LUWU CEMERLANG 2045

INDONESIA EMAS 2045

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN LUWU

2025 - 2029



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :
a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
12. Peraturan Daerah Kabuapaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah Kabuapaten Luwu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5

(lima) tahun

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi dan RTRW.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. pendahuluan;
    b. gambaran umum Daerah;
    c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
    d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
    e. penutup.
(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, serta kondisi lingkungan strategis di Daerah

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.054.25 TAHUN 2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya perencanaan jangka menengah daerah yang berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya telah berakhir masa berlakunya atau daya gunanya, memberikan penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk menjadi dasar pembangunan daerah jangka menengah selanjutnya

Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah pembangunan jangka waktu 2025-2029 wajib didasarkan pada dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR GRAFIK xvii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-7
1.4. Maksud Dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Penulisan I-11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II-8
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-19
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-29
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas II-41
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-54
2.1.7. Demografi II-58
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-62
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-62
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua II-73
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-86
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-105
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju ... II-110
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-113
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-121
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-121
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-123
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-133

2.3.4. Transformasi Digital II-135
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-142
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-145
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro II-155
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-159
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-160
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-169
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-178
2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-180
2.5. Gambaran Keuangan Daerah II-312
2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu II-313
2.5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD II-314
2.5.1.2. Pendapatan Daerah II-314
2.5.1.3. Belanja Daerah II-330
2.5.1.4. Pembiayaan Daerah II-331
2.5.2. Neraca Daerah II-332
2.5.2.1. Aset II-338
2.5.2.2. Kewajiban II-338
2.5.2.3. Ekuitas II-339
2.5.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-340
2.5.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran II-344
2.5.3.2. Analisis Pembiayaan II-348
2.5.4. Analisis Fiskal Daerah II-354
2.5.4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ... II-354
2.5.4.2. Rasio Fiskal Daerah II-355
2.5.4.3. Rasio Tax Daerah II-356
2.5.4.4. Rasio Belanja Pegawai II-357
2.5.4.5. Rasio Belanja Modal II-358
2.5.4.6. Rasio Belanja per Kapita Penduduk II-359
2.5.4.7. Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB II-359
2.5.4.8. Rasio Keuangan II-361
2.5.4.9. Dana Bagi Hasil II-362

2.5.5. Kerangka Pendanaan II-363
2.5.6. Asumsi Ekonomi, Kondisi Sosial Daerah II-366
2.5.7. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah..... II-370
2.5.8. Perhitungan Kerangka Pendanaan..... II-379
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis II-382
2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu II-383
2.6.2. Isu Strategis II-392
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1. Visi..... III-1
3.2. Misi III-2
3.3. Tujuan dan Sasaran..... III-10
3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas III-16
3.4.1. Strategi III-16
3.4.2. Arah Kebijakan III-65
3.4.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah..... III-81
3.5. Arah Kebijakan Kewilayahan..... III-113
BAB VI PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-50
4.2.1. Indikator Kinerja Makro..... IV-50
4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-51
4.2.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-53
4.2.4. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... IV-80
4.2.5. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) IV-85
BAB V PENUTUP..... V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan..... V-1
5.2. Pedoman Transisi..... V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu II-8
Tabel 2.2. Produksi Perkebunan Kabupaten Luwu 2020-2024..... II-9
Tabel 2.3. Produksi Pertanian Pangan dan Palawija Tahun 2020-2024..... II-10
Tabel 2.4. Produksi dan Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-12
Tabel 2.5. Indikator TPB yang Berkaitan dengan Daya Dukung Lingkungan hidup Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 .. II-23
Tabel 2.6. Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-30
Tabel 2.7. Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu II-36
Tabel 2.8. Jumlah Unit SPAM, Alokasi Air baku Serta Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu..... II-36
Tabel 2.9. Jumlah Sambungan Rumah Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Luwu Tahun 2024 ..... II-38
Tabel 2.10. Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani SPALD-T Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-45
Tebel 2.11. Data Timbunan Sampah yang Terkelolah di Fasilitas Pengelolahan Sampah Tahun 2021-2024 di Kab. Luwu.... II-49
Tabel 2.12. Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030 .. II-58
Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel 2.14. PDRB ADHK Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2.15. Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Kab. Luwu Tahun 2020-2024..... II-67
Tabel 2.16. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-72
Tabel 2.17. Perkembangan Capaian Indiator Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel 2.18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-91
Tabel 2.19. Angka Kelulusan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-92
Tabel 2.20. Perkembangan Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-92

Tabel 2.21. Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-93
Tabel 2.22. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel 2.23. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel 2.24. Fasilitas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024. II-97
Tabel 2.25. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.26. Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-98
Tabel 2.27. Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-99
Tabel 2.28. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 . II-100
Tabel 2.29. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.30. Pendidikan Non Formal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-101
Tabel 2.31. Perkembangan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-106
Tabel 2.32. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah..... II-111
Tabel 2.33. Proyeksi Dependency Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030..... II-121
Tabel 2.34. Lokasi Blankspot di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 . II-138
Tabel 2.35. Nilai dan Kategori IMDI Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-139
Tabel 2.36. Capaian Akses Rumah Layak Huni menurut Komponen Kelayakan Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.37. Pemeringkatan BUMdes Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-154
Tabel 2.38. Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-156
Tabel 2.39. Jumlah Kerjasama Daerah Yang Ditindaklanjuti Tahun 2020-2024..... II-179
Tabel 2.40. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Luwu

Tahun 2024 ..... II-181
Tabel 2.41. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-182
Tabel 2.42. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel 2.43. Angka Kelulusan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-185
Tabel 2.44. Angka Melanjutkan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 .. II-185
Tabel 2.45. Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-186
Tabel 2.46. Fasilitas Pendidikan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-187
Tabel 2.47. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten
Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-188
Tabel 2.48. Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-188
Tabel 2.49. Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-189
Tabel 2.50. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.51. Pendidikan Non Formal Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.52. Anak Tidak Sekolah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 . II-191
Tabel 2.53. Cakupan Puskesmas dan Cakupan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel 2.54. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000
Kelahiran Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2.55. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2.56. Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran
Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-194
Tabel 2.57. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2.58. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-196
Tabel 2.59. Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.60. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-197

Tabel 2.61. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-198
Tabel 2.62. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-199
Tabel 2.63. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-199
Tabel 2.64. Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-200
Tabel 2.65. Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-201
Tabel 2.66. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-202
Tabel 2.67. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-202
Tabel 2.68. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029..... II-203
Tabel 2.69. Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Luwu Tahun 2026-2030 ..... II-203
Tabel 2.70. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-204
Tabel 2.71. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-205
Tabel 2.72. Tingkat Prevalensi Tuborkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023 ..... II-205
Tabel 2.73 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 ..... II-206
Tabel 2.74. Kasus Tuberkulosis BTA yang Mendapat Pengobatan melalui Program DOTS Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-207
Tabel 2.75. Kasus Tuborkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-207
Tabel 2.76. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-208
Tabel 2.77. Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-209
Tabel 2.78. Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-209
Tabel 2.79. Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-210
Tabel 2.80. Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-210
Tabel 2.81. Pelayanan Nifas Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-211
Tabel 2.82. Neonatus Dengan Kompliklasi yang Ditangani
Tahun 2020-2024..... II-212
Tabel 2.83. Pelayanan Anak Balita Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-212
Tabel 2.84. Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-213
Tabel 2.85. Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan
Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... .II-213
Tabel 2.86. IKM Terhadap Pelayanan Kesehatan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... .II-214
Tabel 2.87. Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Rasio Jaringan
Irigasi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-215
Tabel 2.88. Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2023..... II-216
Tabel 2.89 Kondisi Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029..... II-218
Tabel 2.90. RTH dan Bangunan Ber-IMB Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-219
Tabel 2.91. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-220
Tabel 2.92. Persentase Rumah dengan SPALD-T Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-220
Tabel 2.93. Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-221
Tabel 2.94. Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-222
Tabel 2.95. Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-222
Tabel 2.96. Rasio Permukiman yang Tertata Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-223
Tabel 2.97. Luas Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-224
Tabel 2.98. Rumah Tangga Kumuh di Perkotaan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-224
Tabel 2.99. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Per Kecamatan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-225
Tabel 2.100. Penanganan Rumah Korban Bencana Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-226
Tabel 2.101. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-226
Tabel 2.102. Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-227
Tabel 2.103. Persentase Gangguan Tantribum yang Dapat Diselesaikan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-227
Tabel 2.104. Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-228
Tabel 2.105. Tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-229
Tabel 2.106. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-230
Tabel 2.107. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-230
Tabel 2.108. PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-231
Tabel 2.109. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-231
Tabel 2.110. Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-232
Tabel 2.111. Besarnya Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-233
Tabel 2.112. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-233
Tabel 2.113. Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-234

Tabel 2.114. Besaran Pekerja atau Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 . II-234
Tabel 2.115. Penanganan Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 . II-235
Tabel 2.116. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2020-2024 ..... II-235
Tabel 2.117. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-236
Tabel 2.118. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-236
Tabel 2.119. Kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-237
Tabel 2.120. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-237
Tabel 2.121. Rasio KDRT Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-238
Tabel 2.122. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 ..... II-239
Tabel 2.123. Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2026-2030 ..... II-239
Tabel 2.124. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-240
Tabel 2.125. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-241
Tabel 2.126. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-241
Tabel 2.127. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2020-2024..... II-242
Tabel 2.128. Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-243
Tabel 2.129. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024..... II-243
Tabel 2.130. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-244
Tabel 2.131. Penduduk Ber-KTP dan Ber KK Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-246
Tabel 2.132. Pasangan Ber-Akte Nikah dan Bay- Ber-Akte Kelahiran
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-247
Tabel 2.133. Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang
Baik Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-248
Tabel 2.134. Kelompok Binaan LPM Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-248
Tabel 2.135. Kelompok Binaan PKK Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-249
Tabel 2.136. LSM Aktif Kabupaten Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-249
Tabel 2.137. PKK Aktif dan Posyandu Aktif Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-250
Tabel 2.138. Desa Berstatus Tertinggal Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-251
Tabel 2.139. Desa Berstatus Mandiri dan Desa Berstatus Swasembada
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-251
Tabel 2.140. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Tahun 2020-2024 ..... II-252
Tabel 2.141. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-257
Tabel 2.142. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 ..... II-260
Tabel 2.143. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024..... II-261
Tabel 2.144. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ... II-263
Tabel 2.145. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020-2024 ..... II-264
Tabel 2.146. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan Tahun 2020-2024 ..... II-265
Tabel 2.147. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Tahun 2020-2024..... II-267
Tabel 2.148. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tahun 2020-2024 ..... II-267
Tabel 2.149. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-268
Tabel 2.150. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024 ..... II-270
Tabel 2.151. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-271
Tabel 2.152. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 ..... II-273
Tabel 2.153. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-274
Tabel 2.154. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-275
Tabel 2.155. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 ..... II-275
Tabel 2.156. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024 ..... II-276
Tabel 2.157. Kinerja Penunjang Administrasi pemerintahan Tahun 2020-2024 ..... II-277
Tabel 2.158. Kinerja Penunjang Manajemen Keuangan Tahun 2020-2024 ..... II-277
Tabel 2.159. Kinerja Penunjang Pengawasan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-278
Tabel 2.160. Kinerja Penunjang Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ..... II-279
Tabel 2.161. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-282
Tabel 2.162. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-316
Tabel 2.163. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-320
Tabel 2.164. Realisasi PAD dari Pajak Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-324
Tabel 2.165. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-326
Tabel 2.166. Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020-2024 ..... II-327
Tabel 2.167. Realisasi PAD dari Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2020-2024 ..... II-327
Tabel 2.168. Realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer
Tahun 2020-2024 ..... II-329
Tabel 2.169. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-330
Tabel 2.170. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-334
Tabel 2.171. Analisi Rasio Solvabilitas Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-339
Tabel 2.172. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-345
Tabel 2.173. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-347
Tabel 2.174. Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2020-2024 ..... II-349
Tabel 2.175. Komposisi Penutup Defesit Riil Anggaran
Tahun 2020-2024 ..... II-350
Tabel 2.176. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun 2020-2024 ..... II-352
Tabel 2.177. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-355
Tabel 2.178. Ruang Fiskal Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-356
Tabel 2.179. Rasio Pajak Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-357
Tabel 2.180. Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-358
Tabel 2.181. Rasio Belanja Modal Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-358
Tabel 2.182. Rasio Belanja Daerah Per Kapita
Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-359
Tabel 2.183. PDRB ADHB Kabupaten Luwu Menurut Pengeluaran
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-360
Tabel 2.184. Kontribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-360
Tabel 2.185. Kontribusi APBD Terhadap PDRB Pada Komponen
Pembentukan PMTB Tahun 2020-2024 ..... II-361
Tabel 2.186. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun 2020-2024 ..... II-361
Tabel 2.187. Rasio Total hutang terhadap Aset Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024 ..... II-362
Tabel 2.188. Realisasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020-2024 ..... II-363
Tabel 2.189. Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-367
Tabel 2.190. Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-369
Tabel 2.191. Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-375
Tabel 2.192. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 ..... II-380
Tabel 2.193. Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026-2030 .... II-381
Tabel 3.1. Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 ..... III-2
Tabel 3.2. Keselarasan antara Pokok Visi dan Misi Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 ..... III-3
Tabel 3.3. Keselarasan antara Misi Kabupaten Luwu, Misi Provinsi Sulawesi Selatan dan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-8
Tabel 3.4. Tujuan Dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030 ..... III-11
Tabel 3.5. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 ..... III-17
Tabel 3.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 ..... III-66
Tabel 3.7. Program Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD III-81
Tabel 3.8. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional III-85
Tabel 3.9. Outcome Dan Program Prioritas RPJMD III-88
Tabel 3.10. Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Luwu III-140
Tabel 4.1. Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... IV-3
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Makro 2025-2030 Kabupaten Luwu IV-50

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama 2025-2030 Kabupaten Luwu IV-52
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030 ..... IV-54
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030 ..... IV-60
Tabel 4.6. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2030 ..... IV-73
Tabel 4.7. Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030 ..... IV-78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya I-10
Gambar 1.2. Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah.....I-11
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Luwu II-3
Gambar 2.2. Peta Jaringan Transportasi Melalui Pusat Kegiatan Kabupaten Luwu II-6
Gambar 2.3. Peta Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan Kabupaten Luwu II-11
Gambar 2.4. Peta Kawasan Perikanan Kabupaten Luwu II-14
Gambar 2.5. Peta Rencana Kawasan Agrowisata Berkelanjutan Kabupaten Luwu II-16
Gambar 2.6. Peta Sebaran Wilayah Industri dan Pertambangan Kabupaten Luwu II-18
Gambar 2.7. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Luwu Tahun 2029.....II-20
Gambar 2.8. Peta Daya Dukung Udara Kabupaten Luwu Tahun 2029..II-20
Gambar 2.9. Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2029 .II-21
Gambar 3.1. Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.....III-56
Gambar 3.2. Peta Potensi Ekonomi Kabupaten Luwu.....III-117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-7
Grafik 2.2. Produksi Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-13
Grafik 2.3. Capaian Sektor Pariwisata Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-15
Grafik 2.4. Kontribusi Pertambangan dan Industri Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-17
Grafik 2.5. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-32
Grafik 2.6. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-33
Grafik 2.7. Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-34
Grafik 2.8. Persentase Penduduk Mengakses sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-37
Grafik 2.9. Target Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Tahun 2025-2030 ..... II-38
Grafik 2.10. Keisiapan Akses Air Minum Perpipaan Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu II-40
Grafik 2.11. Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil Survey SKAMRT II-41
Grafik 2.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-43
Grafik 2.13. Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu II-44
Grafik 2.14. Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-46
Grafik 2.15. Sampah Yang Terkelolah Kabupaten Luwu II-47
Grafik 2.16. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024 ..... II-48
Grafik 2.17. Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-51
Grafik 2.18. Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024 ..... II-52
Grafik 2.19. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-53
Grafik 2.20. Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-53
Grafik 2.21. Intensitas Penurunan Emisi GRK (Ton CO^2eq)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-55
Grafik 2.22. Indeks Resiko BencanaKabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-57
Grafik 2.23. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu,
Tahun 2020-2024 ..... II-59
Grafik 2.24. Komposisi Penduduk di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-60
Grafik 2.25. Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-61
Grafik 2.26. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-62
Grafik 2.27. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024 ..... II-65
Grafik 2.28. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa)
dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Luwu
Tahun 2024 ..... II-66
Grafik 2.29. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-68
Grafik 2.30. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-68
Grafik 2.31. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2020-2024 ..... II-69
Grafik 2.32. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Luwu Tahun 2024 ..... II-70
Grafik 2.33. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024 ..... II-71
Grafik 2.34. Indeks Gini Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara
Tahun 2024 ..... II-71
Grafik 2.35. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan

Tahun 2021-2024 ..... II-73
Grafik 2.36. Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-74
Grafik 2.37. Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun) Per Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-76
Grafik 2.38. Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024 ..... II-76
Grafik 2.39. Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Hamil Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-77
Grafik 2.40. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-78
Grafik 2.41. Perbandingan Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-78
Grafik 2.42. Perkembangan Persentase Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-80
Grafik 2.43. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-81
Grafik 2.44. Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2021-2024 ..... II-81
Grafik 2.45. Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-83
Grafik 2.46. Perkembangan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-84
Grafik 2.47. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Luwu Tahun 2023-3024 ..... II-85
Grafik 2.48. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-87
Grafik 2.49. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-87
Grafik 2.50. Perkembangan Angka Literasi Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-89
Grafik 2.51. Perkembangan Angka Numerasi Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-90

Grafik 2.52. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-95
Grafik 2.53. Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-96
Grafik 2.54. Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang ditamatkan Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-102
Grafik 2.55. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Luwu Tahun 2023-2024 ..... II-103
Grafik 2.56. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten/Kota, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024 ..... II-103
Grafik 2.57. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-105
Grafik 2.58. Perkembangan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2020-2024 ..... II-107
Grafik 2.59. Perkembangan Korban Bencana penerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Luwu, Tahun 2020 – 2024 ..... II-108
Grafik 2.60. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-109
Grafik 2.61. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-110
Grafik 2.62. Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2024 ..... II-112
Grafik 2.63. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024 ..... II-113
Grafik 2.64. Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Luwu, Sulsel dan Nasional Tahun 2021-2023 ..... II-114
Grafik 2.65. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-115
Grafik 2.66. Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-116

Grafik 2.67. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-117
Grafik 2.68. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ..... II-118
Grafik 2.69. IPG Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-119
Grafik 2.70. Angka Ketergantungan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-120
Grafik 2.71. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-122
Grafik 2.72. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-123
Grafik 2.73. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2020-2024 ..... II-123
Grafik 2.74. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-124
Grafik 2.75. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-125
Grafik 2.76. Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-126
Grafik 2.77. Produktivitas Padi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 .... II-126
Grafik 2.78. *Return on Asset* (ROA) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-127
Grafik 2.79. TPAKP di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-128
Grafik 2.80. Perkembangan TPAK Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 ..... II-129
Grafik 2.81. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-130
Grafik 2.82. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-131
Grafik 2.83. Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-132
Grafik 2.84. Produksi Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 .. II-134
Grafik 2.85. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ... II-135
Grafik 2.86. Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet

yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-136
Grafik 2.87. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-137
Grafik 2.88. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-139
Grafik 2.89. Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-140
Grafik 2.90. Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 .... II-142
Grafik 2.91. PMTB Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023 ..... II-143
Grafik 2.92. Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-143
Grafik 2.93. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024 ..... II-145
Grafik 2.94. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Luwu, Tahun 2020-2024 ..... II-148
Grafik 2.95. Data capaian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Tahun 2021-2024 ..... II-150
Grafik 2.96. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-151
Grafik 2.97. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-154
Grafik 2.98. Inflasi Kabupten Luwu Tahun 2020 – 2024 ..... II-155
Grafik 2.99. IPKD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-156
Grafik 2.100. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-157
Grafik 2.101. Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-158
Grafik 2.102. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-160
Grafik 2.103. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 ..... II-161
Grafik 2.104. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-162
Grafik 2.105. Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024 ..... II-163
Grafik 2.106. Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-164
Grafik 2.107. MCP KPK Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-166
Grafik 2.108. Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024 ..... II-168
Grafik 2.109. Persentase Tindak Kriminal Yang Diatasi
Tahun 2020-2024 ..... II-171
Grafik 2.110. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota
DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-172
Grafik 2.111. Jumlah PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-174
Grafik 2.112. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 ..... II-176
Grafik 2.113. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2024 ..... II-178
Grafik 2.114. Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-183
Grafik 2.115. Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024 ..... II-319
Grafik 2.116. Proporsi Komponen PAD terhadap PAD
Tahun 2020-2024 ..... II-322

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang masing-masing diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen RPJMD adalah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, adapun substansi kandungan dokumen RPJMD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3), RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan telah dilantiknya **H. Patahudding, S.Ag** dan **Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu masa bakti Tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD dengan peraturan daerah sebagai pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk menghasilkan kebijakan yang selaras dengan aspek tata ruang, penyusunan RPJMD diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Adapun, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, maka perumusan RPJMD telah terintegrasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Peresiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD ini diharapkan benar-benar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan pada saat yang sama lebih terjaminnya keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025–2045. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, dengan memaksimalkan peran seluruh *stakeholders* melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, dan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) selama periode RPJMD.

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di antara Kabupaten Wajo di sebelah Selatan, dan

Kabupaten Luwu Utara di sebelah Utara serta Kota Palopo sebagai pembagi Kabupaten Luwu menjadi dua wilayah yaitu wilayah bagian Selatan dan wilayah bagian Utara dari Kota Palopo, dengan luas sebesar 3000,25 km persegi dengan ibukota adalah Kota Belopa.

Kabupaten Luwu memiliki 207 desa dan 22 kelurahan, dengan 37 desa berada di wilayah pesisir dan 190 desa merupakan daerah non-pesisir. Pada Tahun 2024 jumlah penduduk adalah sebanyak 385.361 jiwa Dimana sebanyak 50,41% adalah laki-laki dan 49,59% berjenis kelamin Perempuan. Berdasarkan data tahun 2024 di Kabupaten Luwu Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 4,14%, kemiskinan sebesar 11,70% , dan indeks gini sebesar 0,319 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada peringkat 15 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 73,86.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu berlimpah dan merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan jika dikelola dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan maka merupakan aset untuk kesejahteraan generasi mendatang.

Potensi tersebut jika dikelompokkan secara garis besar adalah sebagai berikut antara lain Sektor Pertanian dan Perkebunan berupa padi, jagung, kakao, cengkeh, kopi, dan durian; Sektor Perikanan berupa perikanan budidaya dan perikanan tangkap; Sektor Pariwisata berupa keindahan alam yang melimpah, seperti pegunungan, sungai, dan Pantai; serta Sektor Pertambangan logam dan non logam.

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 struktur perekonomian Kabupaten Luwu didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu (1). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 51,73%; (2). Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,09%; (3). Konstruksi sebesar 9,11%; dan (4).Real Estate sebesar 5,33%. Berdasarkan harga konstan 2010, Nilai PDRB Kabupaten Luwu adalah sebesar 12,18 triliun rupiah meningkat sebesar 4,36% bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 adalah sebesar 4,36%, dan PDRB Perkapita sebesar 59,73 juta rupiah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2029 adalah landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan konstitusional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945, sementara landasan operasionalnya didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor .....);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

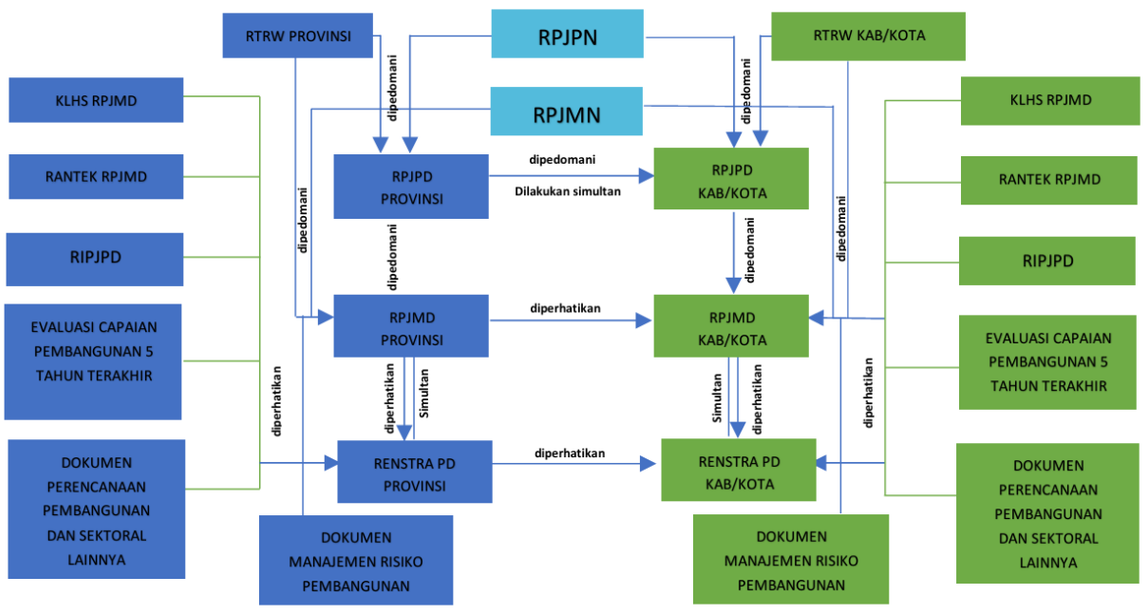
Dokumen RPJMD sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yang ada di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yaitu RPJPN (Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024), RPJMN Tahun 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025), RPJPD Kabupaten Luwu tahun 2025-2045 (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024), dan RTRW Kabupaten Luwu tahun 2011- 2031 (Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011). Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Oleh karena itu, kualitas dokumen RPJMD sangat

ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karenanya, penyusunan RPJMD harus selaras dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu berpedoman pada RPJPN, RPJMN, dan RPJPD serta memperhatikan RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota sekitar. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

Sinergitas dan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya

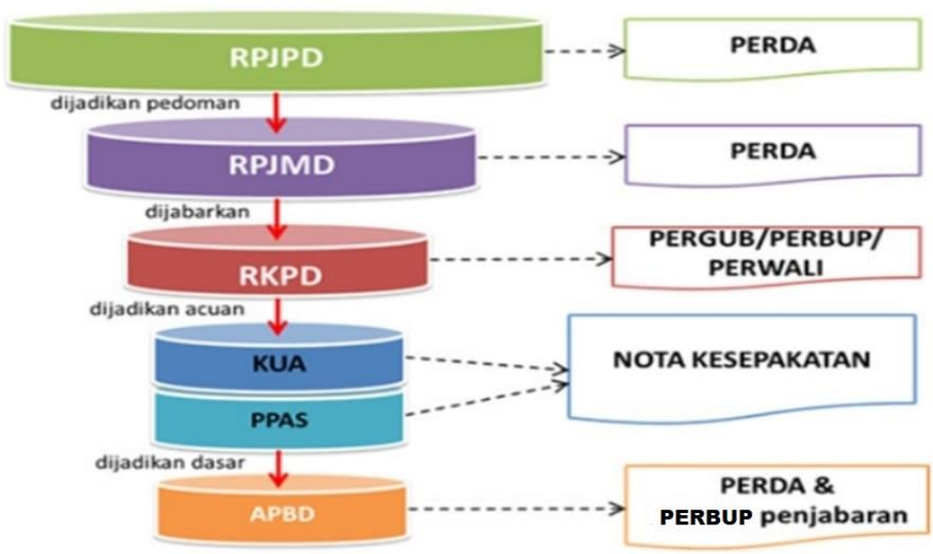


Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sesuai bagan alur pada Gambar 1.1. dapat dijelaskan keterkaitannya sebagai berikut:

- RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomanai RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas Pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.
- RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.
- RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMD yang telah disusun sebagai rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun tidak bermakna apa-apa jika tidak dijabarkan dalam dokumen penganggaran, oleh karena itu idealnya dokumen RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS yang merupakan dasar dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Selanjutnya berikut ini disajikan bagan alur keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2.
Bagan Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Gambar di atas menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang saling terkait hingga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran. RPJPD yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dilaksanakan melalui RPJMD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah, dan selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan melalui RKPD setiap tahun yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk menjembatani penyusunan APBD yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka disepakati terlebih dahulu KUA dan PPAS yang disusun dengan berpedoman pada RKPD. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sejajar dan saling berhubungan dengan APBD yang juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga, evaluasi Rancangan APBD merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menguji kesesuaian Rancangan APBD dengan KUA dan PPAS, RKPD dan RPJMD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan daerah. Disamping itu, penyusunan RPJMD juga dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan program-program pembangunan yang prioritas dan realistis.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
4. Menyelesaikan permasalahan pembangunan, mengelola potensi dan sumber daya Kabupaten Luwu secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan serta meraih setiap peluang yang ada untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan Masyarakat.

5. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra-PD berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian RPJMD serta peningkatan kinerja pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
6. Instrumen penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
7. Instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program pembangunan daerah.
8. Instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
9. Pedoman bagi *stakeholder* dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
10. Dasar bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Luwu berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, dasar hukum yang relevan dalam penyusunan RPJMD, penjelasan singkat hubungan antara RPJMD 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Bab ini juga menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 serta sistematika penulisannya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan data-data dan informasi gambaran umum kondisi Kabupaten Luwu dalam 5 (lima) tahun terakhir, bab ini juga menyajikan gambaran keuangan daerah Tahun 2020 – 2024 dan proyeksi Tahun 2025 – 2029 serta permasalahan dan isu strategis Kabupaten Luwu, data dan informasi disajikan dalam bentuk tabel,

grafik dan gambar yang disertai dengan kesimpulan dari data tersebut.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2025-2029, bab ini terdiri atas subbab visi, misi, tujuan dan sasaran dan subbab strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 yang diuraikan dalam dua subbab yaitu subbab program perangkat daerah dan subbab kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten terluas yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu merupakan kabupaten ke- 4 terluas berdasarkan data BPS tahun 2023. Dengan potensi wilayah yang luas ini, Kabupaten Luwu telah menjadi salah satu penyanggah pangan dan energi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi sekitarnya sekaligus menjadi salah satu kabupaten penghasil mineral bumi untuk suplai kebutuhan nasional dan global.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 6 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah 3.000,25 km². Wilayah Kabupaten Luwu terbagi dalam 22 Kecamatan. Kecamatan Latimojong menjadi kecamatan dengan wilayah terluas yakni 467,75 km² atau 15,59 persen dari total luas wilayah sedangkan Kecamatan Belopa Utara merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni hanya seluas 34,73 km² atau 1,16 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Luwu.

Kabupaten Luwu diapit oleh enam Kabupaten, satu Kota dan Teluk. Letak georafis wilayah Kabupaten Luwu menghampar antara 2°3’45” - 3°37’30” Lintang Selatan dan 119°15” - 121°43’11” Bujur Timur. Posisi Kabupaten Luwu secara georafis dikelilingi oleh struktur morfologi wilayah yang lengkap mulai dari dataran tinggi dan pegunungan seluas 63,99% dari total wilayah, dataran rendah sampai ke pesisir mencakup 36.01 % dari total wilayah dan garis pantai yang cukup panjang di Teluk Bone yakni +/-135 km. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Luwu dideskripsikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Wajo Dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Luwu



Sumber : GTIG Kabupaten Luwu 2025.

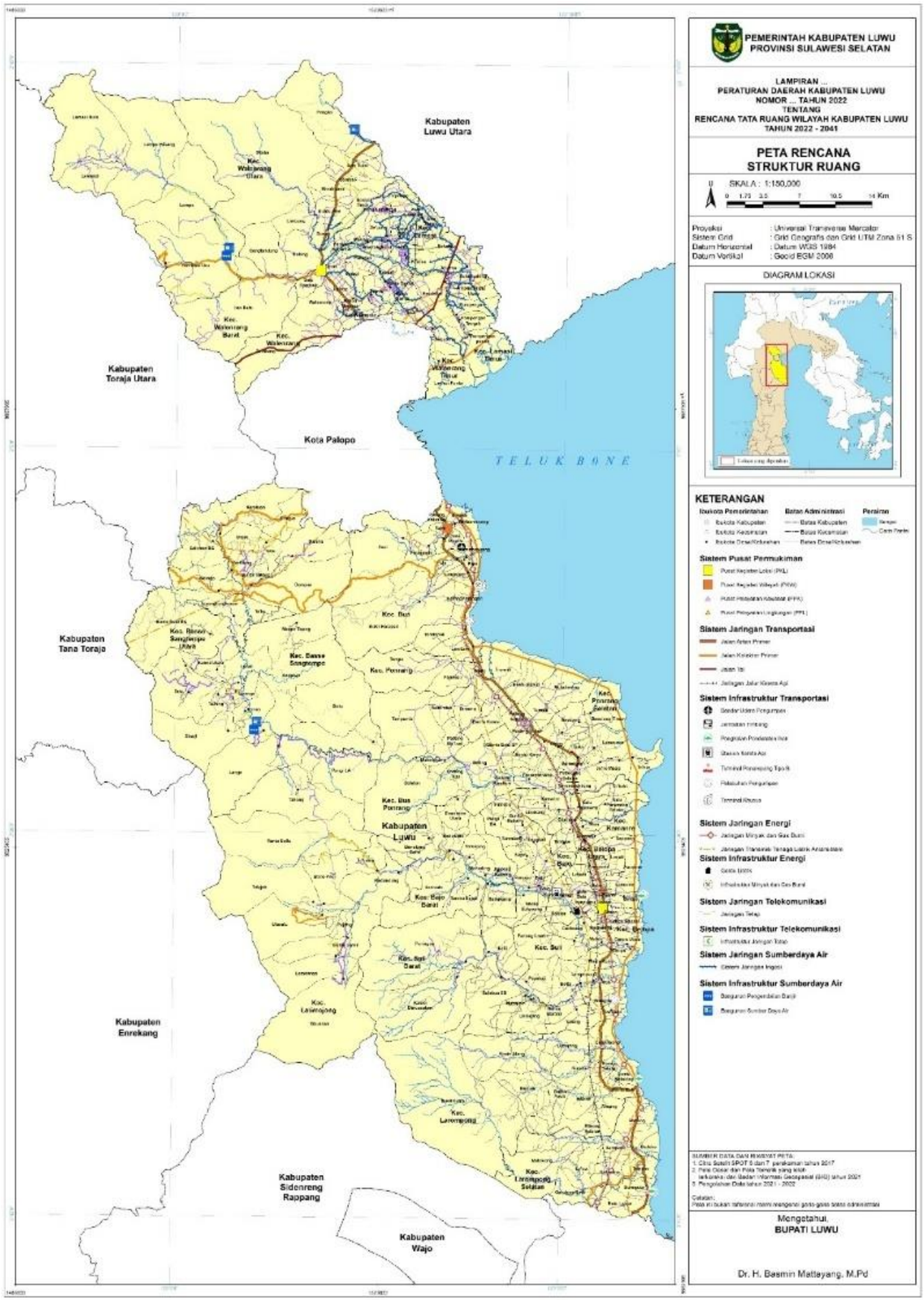
Kondisi topografi Kabupaten Luwu dapat dibagi menjadi beberapa ketinggian di atas permukaan laut (dpl). Persentase masing-masing ketinggian wilayah berupa Wilayah dengan ketinggian 0-25 meter (dpl) 19,42%, Wilayah dengan ketinggian 25-100 meter (dpl) 16,58%, Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter (dpl) 22,03%, Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter (dpl) 18,34%, dan Wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter (dpl) seluas 23,62%. Dengan topografi yang bervariasi mulai dari daerah dengan ketinggian yang sangat rendah hingga daerah yang berada di atas 1000 meter di atas permukaan laut, menyediakan rumah bagi keanekaman hayati. Baik itu berupa tumbuhan endemik maupun hewan-hewan endemik.

Kondisi klimatologi wilayah kabupaten Luwu secara umum memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Mei sampai September dengan curah hujan lebih kecil dari 200 mm/bulan dan musim penghujan berlangsung pada periode Oktober sampai April dengan curah hujan lebih besar dari 200 mm/bulan. Curah hujan rata-rata bulanan yang terjadi di Kabupaten Luwu berkisar antara 35 – 772 mm/bulan dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan tertinggi pada bulan Desember. Jumlah hari hujan berkisar antara 6 – 25 hari dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Agustus.

Dari sisi ketersediaan infrastruktur penunjang, ada nilai tambah ekonomi daerah jika melihat jalur distribusi komoditi pulau Sulawesi yang melewati Kabupaten Luwu. Letak Kabupaten Luwu yang dilintasi oleh jalur Trans-Sulawesi sepanjang 112,82 Km membentang dari selatan ke utara menjadikannya sebagai koridor logistik vital yang menghubungkan Makassar sebagai ibukota provinsi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Gorontalo ke Manado serta Sulawesi Tengah ke Sulawesi Tenggara. Jalur transportasi strategis ini tidak hanya memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga mengintegrasikan pasar-pasar regional yang dilintansi oleh jalur Trans Sulawesi ini. Potensi ini diperkuat oleh dekatannya dengan Selat Makassar yang merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional, membuka peluang bagi pengembangan industri

maritim dan perdagangan antarpulau. Infrastruktur penunjang seperti Pelabuhan Ulo-ulo, Pelabuhan Taddette, Pelabuhan Balambang serta Bandara Bua menjadi modal tambah untuk mendorong distribusi dan konektifitas antar moda transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah-wilayah dalam Provinsi dan Wilayah di sekitarnya.

Gambar 2.2
Peta Jaringan Transportasi Melalui Pusat Kegiatan
Kabupaten Luwu

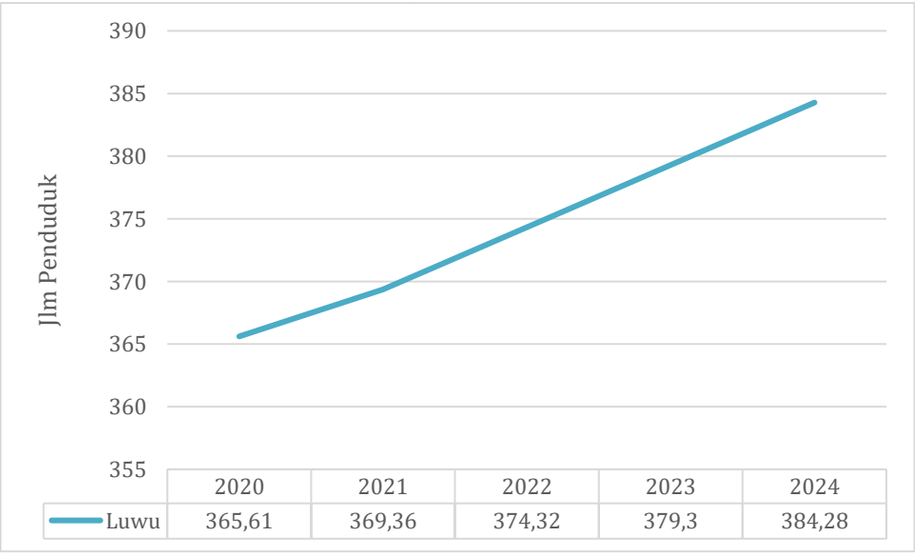


(Sumber : Rancangan Revisi RTRW Kabupaten)

Dengan optimalisasi potensi geografisnya, Kabupaten Luwu dapat berkembang menjadi *growth center* baru yang mampu mendorong pemerataan pembangunan di wilayah utara Sulawesi Selatan sekaligus memperkuat integrasi ekonomi kawasan timur Indonesia.

Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Luwu sebanyak 348.280 Jiwa. Peningkatan jumlah ini memiliki pengaruh terhadap kepadatan penduduk yang dapat mengubah struktur sosial masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhan akan infrastruktur dasar, layanan kesehatan dan aktivitas perekonomi masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Grafik 2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu tahun 2020-2024



(Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025)

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan rekalkulasi terhadap kebutuhan infrastruktur terutama untuk kawasan permukiman untuk mengakomodir dinamika pertambahan jumlah penduduk kedepan.

Tabel 2.1.

Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu

KAWASAN PERMUKIMAN

Kecamatan	Luas (HA)	%
Kec. Bajo	456,6	6,15
Kec. Bajo Barat	250,96	3,38
Kec. Basse Sangtempe	55,42	0,75
Kec. Basse Sangtempe Utara	176,78	2,38
Kec. Belopa	403,16	5,43
Kec. Belopa Utara	269,37	3,63
Kec. Bua	643,36	8,66
Kec. Bua Ponrang	327,12	4,40
Kec. Kamanre	207,12	2,79
Kec. Lamasi	559,48	7,53
Kec. Lamasi Timur	319,04	4,30
Kec. Larompong	474,65	6,39
Kec. Larompong Selatan	318,45	4,29
Kec. Latimojong	77,36	1,04
Kec. Ponrang	526,92	7,10
Kec. Ponrang Selatan	439,15	5,91
Kec. Suli	402,16	5,42
Kec. Suli Barat	244,6	3,29
Kec. Walenrang	421,31	5,67
Kec. Walenrang Barat	94,02	1,27
Kec. Walenrang Timur	372,22	5,01
Kec. Walenrang Utara	387,1	5,21
Jumlah	**7.426,35**	**100,00**

(Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Luwu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus dilakukan dengan bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, guna memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ada beberapa sektor sumber daya alam yang potensial dan telah menjadi sumber PDRB di kabupaten Luwu yakni sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Pertambangan.

- **Sektor Pertanian dan perkebunan.** Kabupaten Luwu memiliki lahan subur yang cocok untuk berbagai komoditas pertanian, perkebunan serta tanaman hortikultura, seperti padi, jagung, kakao, cengkeh, kopi, durian dan lainnya. Peningkatan produktivitas pertanian dapat dicapai dengan menerapkan praktik berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik serta teknik

irigasi yang lebih efisien. Pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan akses pasar, juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2.2.

Produksi Perkebunan Kabupaten Luwu 2020-2024

No	Uraian	Produksi Tanaman Perkebunan (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Dalam	3.700,00	700	1.001	1.000,19	999,95
2	Kelapa Hibrida	200	158	188	187,35	187,36
3	Kopi Robusta	455	489	513	510,08	510,08
4	Kopi Arabika	1.965	1.965	894	866,37	852,74
5	Cengkeh	8.000	9.261	9.41	9.547,34	9.525,79
6	Kakao	22.000	22.000	13.69	13.137,47	13.139,17
7	Pala	31	46	49,4	51,06	51,06
8	Lada	290	409	411	413,38	410,78
9	Kapuk	3	1	1	1,29	1,22
10	Kemiri	68	62,94	64	64,21	64,22
11	Jambu Mente	330	205	247	207,92	207,77
12	Kelapa Sawit	300	428	58	298,8	299,8
13	Sagu	920	663	701	675,01	675,01
14	Aren	179	158	178	179,38	179,57
15	Pinang	5	7	7	6,88	6,88
16	Tembakau	5	10	7,15	5,86	87,83

(Sumber : Data Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 2025)

Potensi sektor pertanian kabupaten Luwu ini diarahkan agar dapat menjadi penyanggah utama pangan yang ada di Sulawesi selatan. Tanah yang subur, sumber air sungai yang melimpah serta lahan yang luas membuat sektor pertanian menjadi sumber pendapatan utama dari masyarakat kabupaten Luwu. Luas lahan sawah dikabupaten Luwu adalah 34.238,70 Ha yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 22.117,92 Ha dan Lahan Cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.935,44 Ha. Dengan luas area tersebut, Kabupaten Luwu mampu memproduksi padi dengan hasil yang relatif meningkat setiap tahun.

Tabel 2.3.

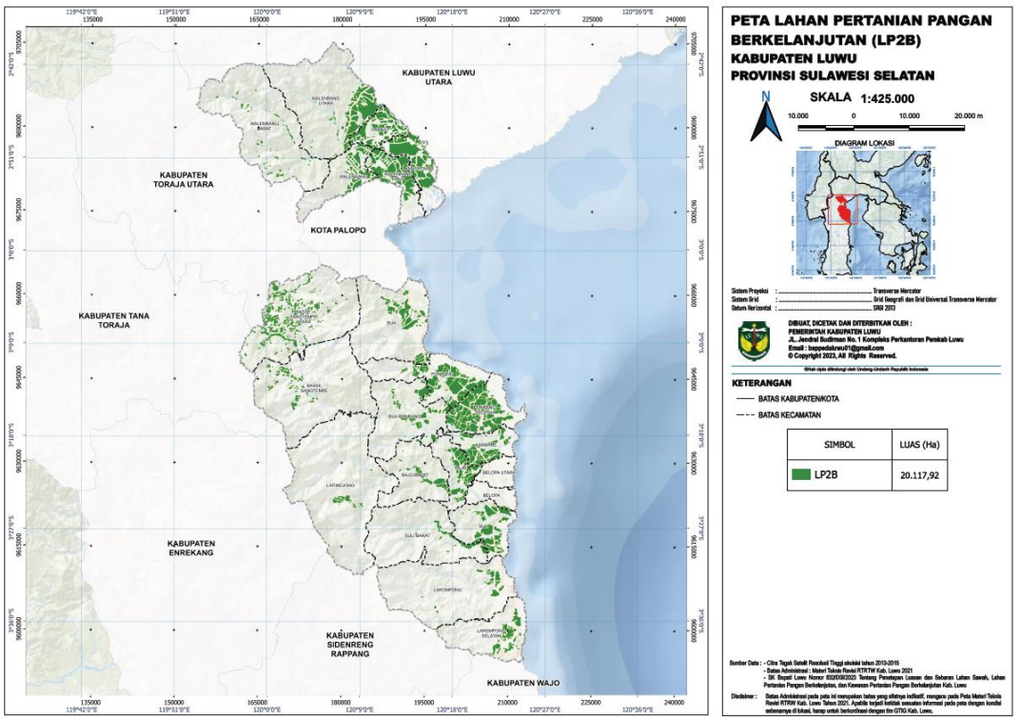
Produksi Pertanian Pangan dan Palawija Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	404.918,08	443.642,36	463.890,52	453.643,82	443.417,52
2	Jagung	31.068,51	50.640,54	33.288,60	26.940,99	28.076,71
3	Ubi Kayu	940,4	514,4	466,2	547,4	446,6
4	Ubi Jalar	1.097,80	651,5	713,07	759,2	412,11
5	Kacang Tanah	43,5	31,6	28,2	35,6	23,7
6	Kacang Kedelai	-	1,5	120,6	16,5	0
7	Kacang Hijau	34,5	14,5	1,5	10,5	7

(Sumber : Data Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Luwu 2025)

Data di atas menujukan adanya fluktuasi jumlah produksi pada komuditas padi, jagung, ubi, dan kacang di Kabupaten Luwu terutama dua tahun pencatatan terakhir. Hal tersebut terkjadi akibat adanya fenomena iklim global seperti *La Nina* dan *El Nino*, adanya serangan hama, bencana alam, ketersediaan dan pemerataan distribusi pupuk yang belum maksimal, ketersediaan bibit unggul, kondisi inftrastruktur pertanian yang belum maksimal serta ketersediaan alat dan mesin pertanian belum merata ke petani. Namun dengan volume produksi yang belum maksimal tersebut, wilayah kabupaten Luwu masih surplus dan masih mampu memenuhi kebutuhan domestik serta kebutuhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat potensi pertanian yang ada sekarang, kabupaten Luwu masih berada pada kondusi produktivitas yang masih belum maksimal. Oleh karena itu, Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang akan menjadi isu strategis yang perlu di ditingkatakan kinerjanya pada periode Rencana Jangka Menengah ini. Sehingga sumber daya alam yang melimpah dalam wilayah kabupaten Luwu dapat dikelolah secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar 2.3
Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Luwu



(Sumber: SK LP2B Dinas Petanian Kabupaten Luwu tahun 2025)

- **Sektor Perikanan.** Potensi perikanan di Kabupaten Luwu sangat menjanjikan, terutama di wilayah pesisir. Pengembangan budidaya perikanan dapat dilakukan dengan menerapkan metode yang berkelanjutan, seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengelolaan stok ikan yang baik. Hal ini akan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

  Posisi kabupaten Luwu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 masuk dalam wilayah Afirmasi Teluk Bone. Sehingga, pada periode ini kabupaten Luwu diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan-dukungan yang bersumber dari pusat. Kinerja pemerintah pusat diarahkan untuk langsung menginterfensi masyarakat kabupaten Luwu yang mau mengelolah sektor perikanan.

  Merespon kebutuhan daerah dan rencana Pembangunan nasional, kabupaten Luwu menyiapkan rancana di bidang perikanan melalui dukungan kebijakan saran dan prasarana

penunjang untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Penyadiaan alat tangkap, bibit, pakan, gudang dan prasarana lainnya menjadi agenda pemerintah. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan untuk mendoron industri sektor ini juga merupakan satu kesatuan rangkaian yang menjadi agenda pengelolahan yang berkelanjutan bagi pemerintah kabupaten Luwu pada periode lima tahun kedepan.

Tabel 2.4.

Produksi dan Komsumsi Ikan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

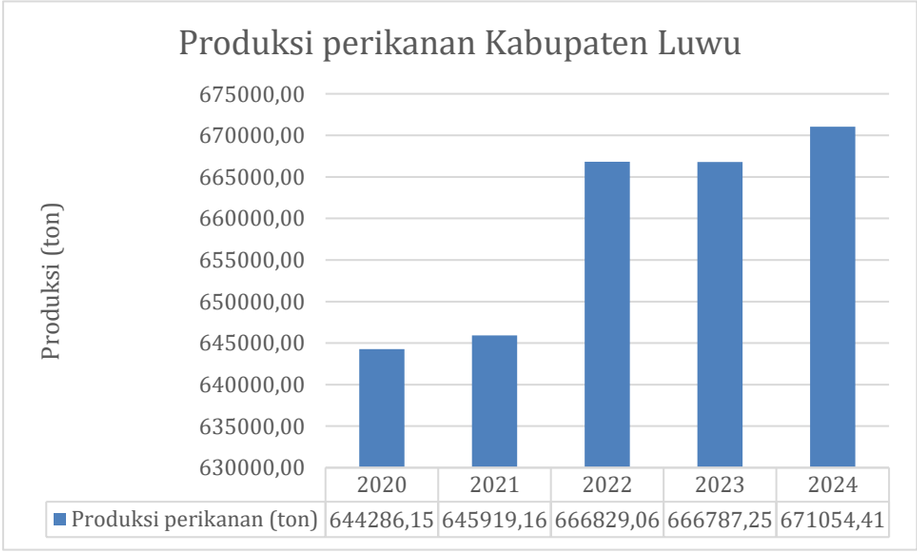
No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Produksi Perikanan**					
	Produksi perikanan (ton)	644,286.15	645,919.16	666,829.06	666,787.25	671,054.41
	Target Daerah (Ton)	641,505.99	659,972.12	679,923.92	703,536.37	729,274.81
	Persentase Produksi Perikanan					
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap (Kg/Trip)	133.30	141.23	119.93	147.87	150.22
3.	Produktivitas Perikanan Budidaya (Kg/m2)	6.66	7.30	7.80	7.86	8.04
4.	**Konsumsi Ikan**					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	54.01	54.21	54.84	55.89	56.26
	Target Daerah (Kg)	50.36	54.65	55.96	56.96	57.26
	Persentase Konsumsi Ikan	107.25	99.01	98	98.12	98.25

(Sumber : Data Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu 2025).

Data Produksi ikan di kabupaten Luwu menjukan adanya peningkatan yang sangat baik. Pada tahun 2024 produksi ikan meningkat 4,16% dari tahun 2020. Disisi lalin, komsumsi ikan kabupaten Luwu juga mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian ini menunjuka bahwa kabupaten Luwu merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang perikanan. Data peningkatan produksi perikanan serta peningkatan konsumsi ikan

menjadi indikator positif adanya potensi besar pada sektor ini sehingga pemerinta kabupaten Luwu menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kedepan sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Luwu secara khusus dan masyarakat provinsi Sulawesi selatan secara umum.

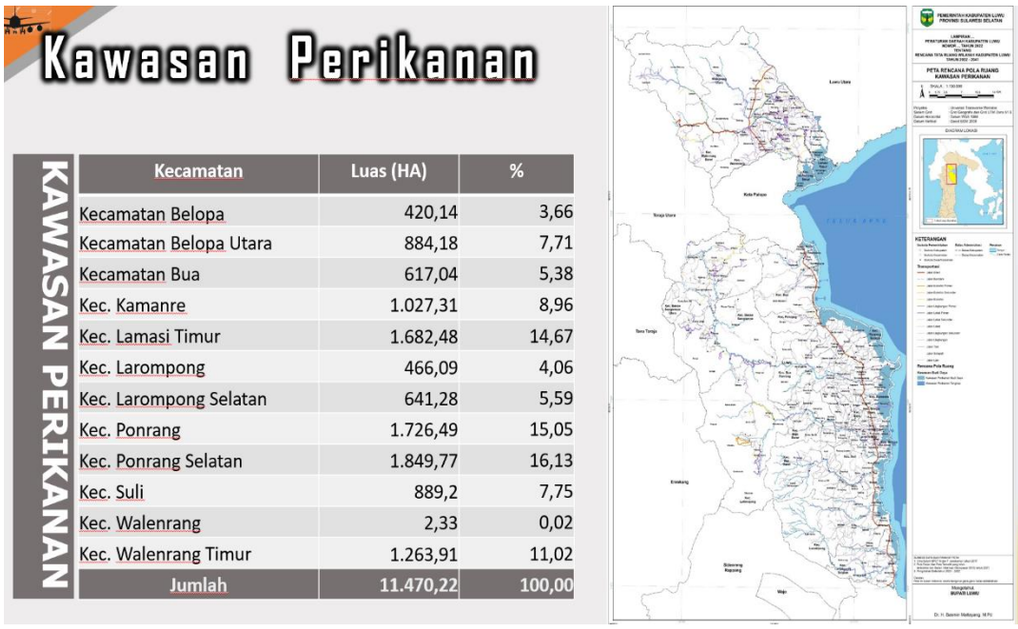
Grafik 2.2.
Produksi Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2020-2024



(Sumber: Data Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu 2025)

Data menunjukan adanya peningkatan produksi perikanan kabupaten Luwu setiap tahun. Dalam rangka peningkatan kinerja sektor perikanan pemerintah kabupaten Luwu terus melaksanakan program pendukung seperti pemberian bantuan alat tangkap, bantuan mesin kapal, pemberian bibit ikan, udang serta perbaikan infrastruktur penujnang kegiatan perikanan seperti pembangunan dan rehabilitasi Jalan, dermaga dan tempat pelelangan ikan.

Gambar 2.4
Peta Kawasan Perikanan Kabupaten Luwu



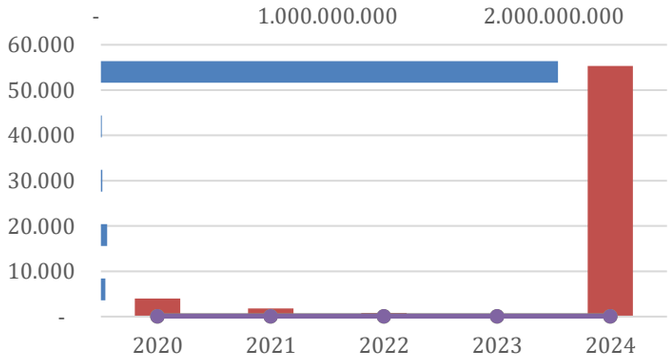
Kecamatan	Luas (HA)	%
Kecamatan Belopa	420,14	3,66
Kecamatan Belopa Utara	884,18	7,71
Kecamatan Bua	617,04	5,38
Kec. Kamanre	1.027,31	8,96
Kec. Lamasi Timur	1.682,48	14,67
Kec. Larompong	466,09	4,06
Kec. Larompong Selatan	641,28	5,59
Kec. Ponrang	1.726,49	15,05
Kec. Ponrang Selatan	1.849,77	16,13
Kec. Suli	889,2	7,75
Kec. Walenrang	2,33	0,02
Kec. Walenrang Timur	1.263,91	11,02
Jumlah	11.470,22	100,00

(Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu)

- **Sektor Pariwisata**. Kabupaten Luwu adalah wilayah yang memiliki keindahan alam yang melimpah. Fitur-fitur alam yang dimiliki oleh kabupaten Luwu seperti pegunungan, sungai, dan pantai dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik. Destinasi wisata yang ada dalam wilayah kabupayten Luwu digolongkan menjadi beberapa objek wisata diantaranya objek wisata Pantai, objek wisata Alam, objek wisata Sejarah, objek wisata Budaya, objek wisata seni, objek wisata Agrowisata, serta objek wisata buatan. Dengan banyaknya opsi objek wisata yang ada di kabupaten Luwu, maka sektor ini memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan daerah lainnya yang perlu dikelolah secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  Pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yang memperhatikan dampak lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata juga akan menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Grafik 2.3.
Capaian Sektor Pariwisata Kabupaten Luwu tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	4.000	1.800	800	308	55.354
PAD sektor pariwisata (Ribu Rupiah)	19.790.000	28.000.000	5.920.000	3.869.000	2.018.963.251
Jumlah Objek Wisata yang dikelola	4	4	4	4	4
Jumlah Objek Wisata	65	66	66	66	66

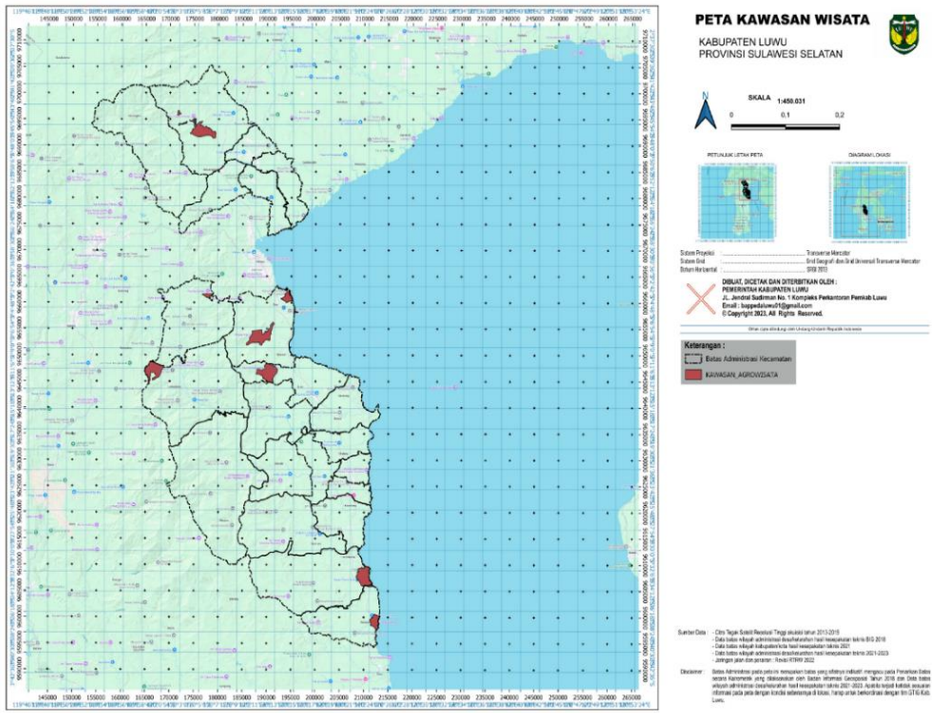
Sumber : Data Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu 2025.

Data capaian sektor pertambangan terkait jumlah kunjungan wisata dengan penerimaan sektor wisata kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 di atas menunjukan adanya fluktuasi yang besar terutama pada tahun 2020 sampai ke 2023 dengan data capaian tahun 2024. Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 ke tahun 2023 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata sebanyak 4000 orang kemudian turun menjadi 308 orang pada tahun 2023. Akibatnya, penerimaan sektor pariwisata juga mengalami penurunan. Penurunan kinerja bidang Pariwisata terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang baru dinayatan berakhir di tahun 2023 melalui Keppres Nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan status pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Sektor pariwisata baru berjalan normal di tahun 2024 sehingga jumlah pariwisata meningkat tajam dari 308 pengunjung pada tahun 2023 menjadi 55.354 pengunjung di tahun 2024.

Pengelolaan pariwisata kabupaten Luwu belum memperoleh perhatian yang maksimal. Berdasarkan data capaian sektor

pariwisata, jumlah objek wisata di kabupaten Luwu tercatat 66 objek pada tahun 2024. Jumlah ini mengalami kenaikan hanya satu objek wisata dalam lima tahun terakhir. Namun jika dilihat jumlah wisata yang dikelolah pemerintah dan swasta hanya empat lokasi. Satu lokasi dikelola oleh pemerintah dan tiga dikelolah oleh swasta. Capaian ini menunjukan bahwa masih banyak objek wisata yang belum mendapat pengelolaan sehingga potensi yang ada belum diberdayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.5
Peta Rencana Kawasan Agrowisata Berkelanjutan
Kabupaten Luwu

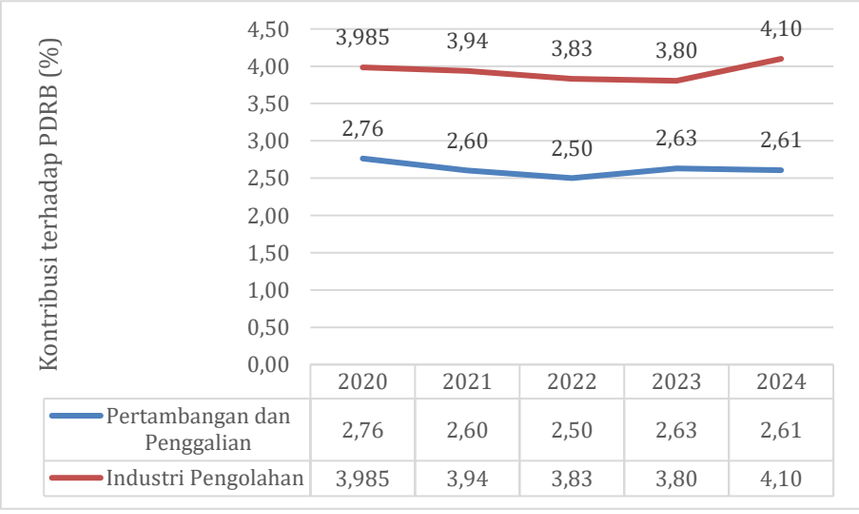


(Sumber: Data olah GTIG Luwu 2025)

- **Sektor Industri dan Pertambangan**. Kabupaten Luwu memiliki potensi pengembangan yang sangat baik pada sektor industri dan pertambangan. Potensi sumber daya alam yang ada di wilayan ini harus digerakan menuju ke arah industrialisasi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Hasil alam dari sektor perkebunan dan pertanian, kelautan dan perikanan serta kandungan mineral-mineral yang bernilai tinggi harus mendapat pengelolaan lebih jauh lagi. Namun, pengelolaan sektor industri dan pertambangan harus dilakukan dengan menerapkan teknologi

ramah lingkungan dan peneratapan konstruksi sistem yang baik, demi meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya.

Grafik 2.4.
Kontribusi Pertambangan dan Industri Kabupaten Luwu tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambangan dan Penggalian	2,76	2,60	2,50	2,63	2,61
Industri Pengolahan	3,985	3,94	3,83	3,80	4,10

(Sumber: BPS Kabupaten Luwu 2025)

Untuk menjawab tantangan kegiatan Industri serta eksplorasi mineral bumi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu telah menyediakan wilayah yang cukup dan memang memiliki potensi. Kecamatan Bua, Latimojong dan beberapa kecamatan lainnya telah diatur pola ruangnya agar kedepan tidak terjadi tumpang tindih zonasi wilayah sebagai wujud dari penataan ruang yang baik.

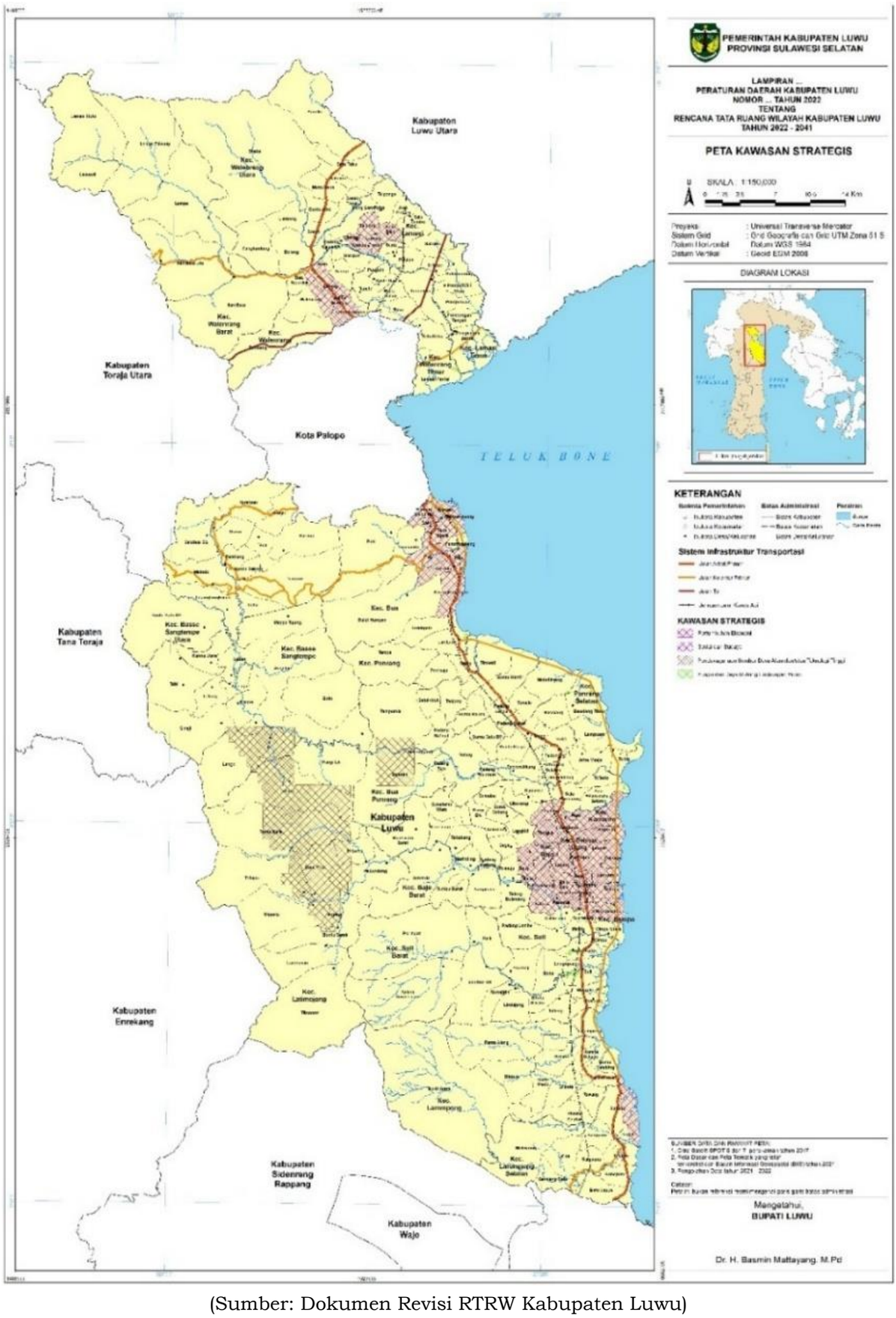
Untuk mengakomodir kegiatan industri di Kabupaten Luwu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu menyediakan kawasan seluas kurang lebih 5000 Ha yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Bua. Untuk kegiatan pertambangan, terdapat kurang lebih 14.000 Ha wilayah pertambangan yang terletak di kecamatan Latimojong, Bastem, Bupon dan Walenrang Utara.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, Kabupaten Luwu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, sehingga tercipta sinergi

yang kuat dalam membangun daerah yang lebih baik. Dengan demikian, Kabupaten Luwu tidak hanya akan menjadi daerah yang maju secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Gambar 2.6

Peta Sebaran Wilayah Industri dan Pertambangan Kabupaten Luwu



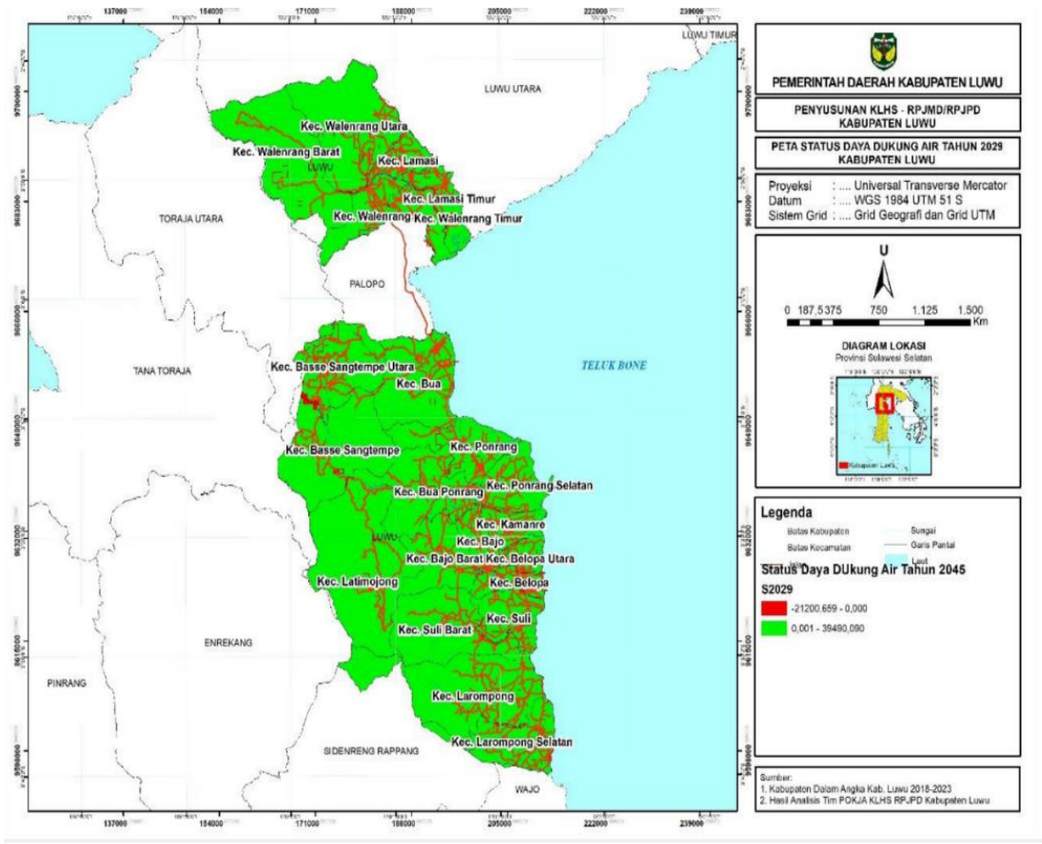
(Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Luwu)

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kondisi kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Gambar 2.7

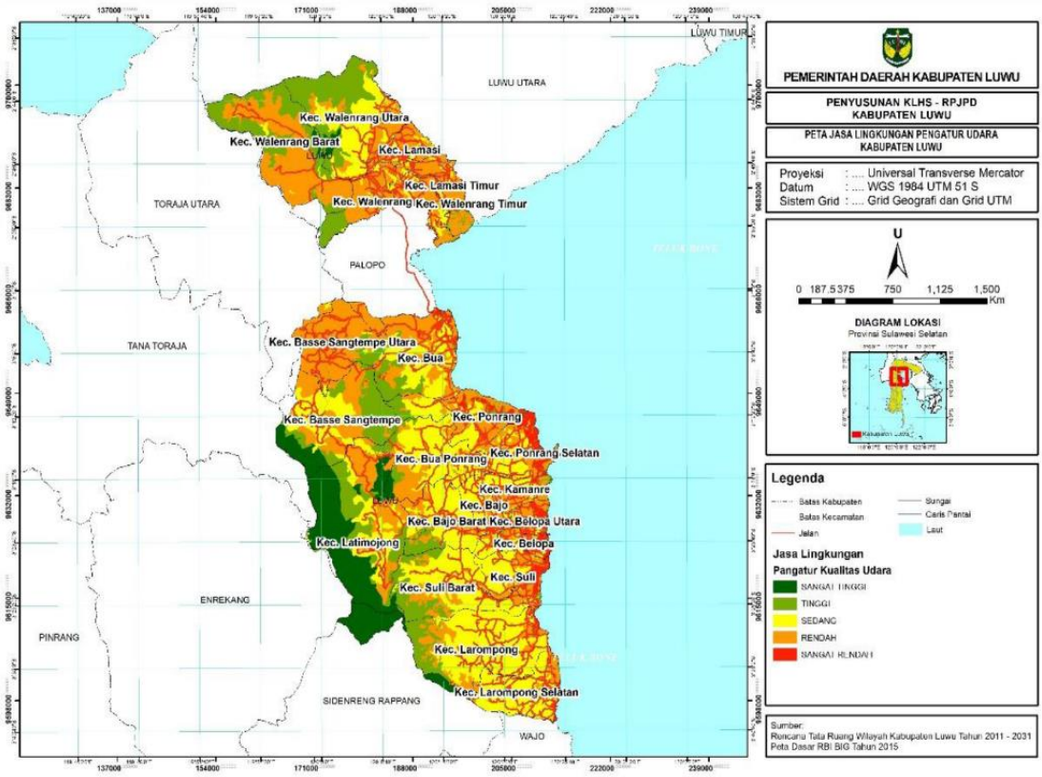
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Luwu Tahun 2029



(Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029)

Gambar 2.8

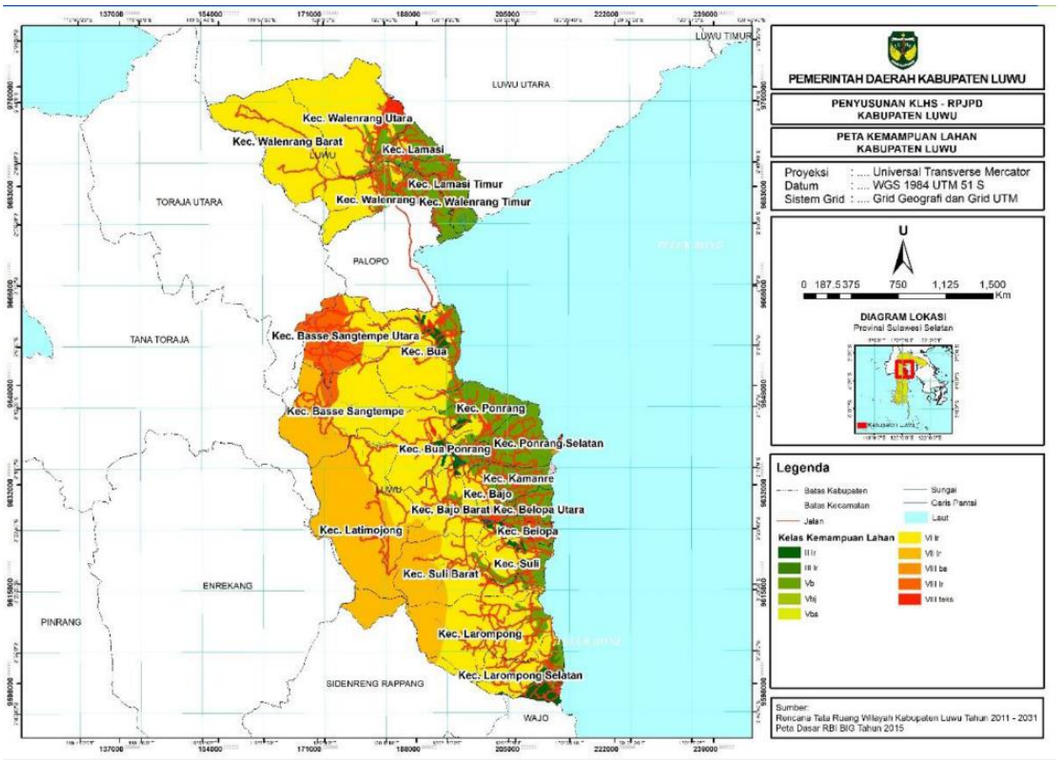
Peta Daya Dukung Udara Kabupaten Luwu Tahun 2029



(Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029)

Gambar 2.9

Peta Daya Dukung Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2029



(Sumber: Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029 bahwa daya dukung air masih cukup berlimpah dimana nilai ambang batasnya 2.566 di tahun 2025. Untuk kualitas udara di Kabupaten Luwu dominan pada level SEDANG dengan luas sebarannya 143.803,91 ha atau 49,01% dari luas wilayah Kabupaten Luwu. Kemudian kategori TINGGI dengan luas 55.084,63 ha atau 18,8% dan kategori RENDAH dengan luas 48.956,26 ha atau 16,68%. Disamping ketiga level tersebut, terdapat juga wilayah dengan kinerja ekosistem jasa pengaturan kualitas udara kategori TINGGI dan SANGAT RENDAH dengan luas wilayah masing-masing 38.946,71 ha (13,27%) dan 6.653,46 ha (2,27%). Wilayah dengan kategori SANGAT TINGGI pada umumnya berada di Kecamatan Walenrang Barat sebesar 8.293,64 ha, Kecamatan Walenrang Utara sebesar 5.910,80 ha, Kecamatan Basse Sangtempe sebesar 5077,53 ha. Wilayah dengan kategori SANGAT RENDAH pada umumnya berada di Kecamatan Ponrang Selatan sebesar 2.153,55 ha, Kecamatan Larompong sebesar 882,97 ha, Kecamatan Suli sebesar 775,18 ha.

Berdasarkan sistem klasifikasi kemampuan lahan, maka kelas kemampuan lahan di Kabupaten Luwu didominasi oleh kelas VI dengan faktor pembatas utama adalah lereng dengan luas persebarannya sebesar 156.277,47 ha atau sekitar 53,4% dari luas wilayah Kabupaten Luwu. Berikutnya kelas V dengan faktor pembatas utama adalah batuan dengan luas sebesar 61.421,64 ha atau sekitar 21,0%. kelas VII dengan faktor pembatas utama adalah lereng dengan luas sebesar 53.731,6 ha atau sekitar 18,3%. Untuk kelas kemampuan lahan II dan III sebesar 7.169,4 ha atau sekitar 2,4% yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dan penggembalaan. Lahan yang tidak sesuai untuk budidaya pertanian secara keseluruhan berada dalam kelas VII dan VIII dengan luas sebesar 67.156,51 ha atau sekitar 22,9%. Berdasarkan uraian di atas, baik daya dukung air, udara dan lahan di kabupaten Luwu masih sangat mendukung untuk keberlangsungan hidup yang berkualitas.

Beberapa metode telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Selain itu penilaian daya dukung lingkungan juga dapat dilakukan berdasarkan jasa ekosistem. Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu:

1. Manfaat penyediaan (provisioning), produksi pangan dan air;
2. Manfaat pengaturan (regulating), pengendalian iklim dan penyakit;
3. Manfaat pendukung (supporting), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan;
4. Manfaat budaya (cultural), spiritual dan rekreasional.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan

pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya.

Tabel 2.5.
Indikator TPB yang Berkaitan dengan Daya Dukung Lingkungan hidup Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No.	TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Kode Indikator	Indikator
6	**Air Bersih dan Sanitasi Layak**	6.1.1.(a)	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
		6.2.1.(b)	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
11	**Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
		11.6.1.(a)	Presentase sampah perkotaan yang tertangani.
12	**Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
13	**Penanganan Perubahan Iklim**	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

(sumber: Dokumen KLHS RPJMD kab. Luwu 2025-2029)

Berdasarkan hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu terkait daya dukung Lingkungan yang ada di wilayah kabupaten Luwu bahwa ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2026-2029 yakni :

1. Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB Kabupaten Luwu hanya melaksanakan 15 tujuan yang terbagi dalam 212 indikator, yaitu:
   a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu: pilar sosial 53,13% (51 dari 96 indikator), pilar ekonomi sebesar 48,21% (27 dari 56

indikator), pilar hukum sebesar 52,38% (11 dari 21), dan pilar lingkungan sebesar 27,03% (10 dari 37).

b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 33 (34,38%), pilar ekonomi 15 (26,79%), pilar lingkungan 9 (24,32%) dan pilar hukum dan tata kelola 5 (23,81%).

c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 11 (11,46%), pilar ekonomi 10 (17,86%), pilar lingkungan 11 (29,73%), dan pilar hukum dan tata kelola adalah 4 (19,05%).

d. Indikator TPB yang yang tidak tersedia datanya di Kabupaten Luwu berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 1 (1,04%), pilar ekonomi 4 (7,14%), pilar lingkungan 7 (18,92%), pilar hukum dan tata kelola adalah 1 (4,76%).

2. Hasil pemeringkatan isu strategis dan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan ditetapkan 11 (sebelas) isu TPB prioritas sebagai berikut:
   - TPB 1 - Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
   - TPB 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
   - TPB 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
   - TPB 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
   - TPB 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
   - TPB 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses

Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
- TPB 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- TPB 17 - Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
- TPB 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- TPB 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara
- TPB 4 - Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

3. OPD yang sudah melaksanakan TPB berdasarkan Kategori pencapaian TPB sebagai berikut :
   a. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 28 OPD dengan total 101 indikator.
   b. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 18 OPD dengan total 62 indikator
   c. OPD yang belum melaksanakan sehingga belum mencapai target sebanyak 14 OPD dengan total 36 indicator.
   d. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 7 OPD dengan total 13 indikator.
4. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
   a. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:
      - Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 9 indikator strategis
      - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 3 indikator strategis
   b. Perlu upaya tambahan, meliputi :
      - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 8 indikator strategis

- Belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 7 indikator strategis
- Belum/tidak ada data sebanyak 3 indikator strategis prioritas

5. Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut :
   a. Tidak perlu upaya tambahan, meliputi:
      - Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 90 isu strategis
      - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target 8 indikator strategis
   b. Perlu upaya tambahan, meliputi
      - Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 43 indikator strategis
      - Belum dilaksanakan dan belum mencapai target 29 indikator strategis
      - Belum/tidak ada data sebanyak 10 indikator strategis
6. Indikator TPB yang telah mencapai target dengan rekomendasi "diperhatikan" sebanyak 9 indikator dan rekomendasi "dipertahankan" sebanyak 101 indikator.
7. Indikator TPB yang belum mencapai target dengan rekomendasi "ditingkatkan" sebanyak 87 indikator dan rekomendasi "ditambahkan" sebanyak 13 indikator.

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029 di atas disimpulkan bahwa kondisi lingkungan hidup masih dapat mendukung aktivitas yang akan berlangsung di kabupaten Luwu. Namun demikian, terdapat beberapa aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan signifikan ke depan, terutama dari sektor pertambangan, pertanian intensif, dan eksplorasi pesisir. Berikut adalah analisis terhadap risiko-risiko tersebut:

1. Risiko dari Aktivitas Pertambangan:
   - Lokasi Strategis. Lokasi pertambangan seluas ±14.000 hektar yang berada di hulu DAS Suso (Kec. Latimojong) dan

DAS Paremang (Kec. Bastem dan Bupon) merupakan ancaman serius. Posisi hulu adalah area kritis yang menentukan kesehatan seluruh daerah aliran sungai di bawahnya.

- Risiko Utama:
  - Pencemaran Air: Limbah tambang (tailing) yang mengandung logam berat dan zat kimia beracun berpotensi mencemari sungai. Pencemaran ini akan mengalir ke hilir, mengancam sumber air irigasi dan kehidupan akuatik.
  - Sedimentasi dan Pendangkalan: Aktivitas penggalian dan pembukaan lahan dapat meningkatkan erosi tanah. Material tanah yang terbawa (sedimentasi) akan mendangkalkan sungai dan waduk/waduk di hilir, mengurangi kapasitas tampung air dan meningkatkan risiko banjir.
  - Kerusakan Ekosistem Hulu: Hilangnya vegetasi penutup tanah di hulu akan mengurangi kemampuan daerah tangkapan air, mengganggu siklus hidrologi, dan berpotensi memicu kekeringan di musim kemarau serta banjir bandang di musim hujan.
- Dampak ke Hilir. Risiko ini secara langsung mengancam sustainability daerah irigasi seperti Bajo (6.540 ha) dan irigasi di DAS Paremang (7.870 ha) yang bergantung pada kualitas dan kuantitas air dari hulu.

2. Risiko dari Pertanian Intensif:
   - Tekanan pada Daerah Irigasi: Luasnya area irigasi menunjukkan skala aktivitas pertanian yang masif.
   - Risiko Utama:
     - Pencemaran Nutrien: Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi (ledakan alga) di perairan akibat masuknya unsur Nitrogen (N) dan Fosfor (P). Hal ini menurunkan kualitas air, mengurangi kadar oksigen terlarut, dan dapat mematikan biota air.

- Penurunan Kualitas Tanah: Praktik monokultur dan penggunaan bahan kimia yang terus-menerus dapat menurunkan kesuburan tanah alami, meningkatkan keasaman tanah, dan merusak struktur tanah dalam jangka panjang.

3. Risiko dari Eksplorasi Kawasan Pesisir (Budidaya Rumput Laut):
   - Aktivitas Massif tanpa Kelola Berkelanjutan: Budidaya rumput laut yang dilakukan secara massif namun tidak diiringi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan menimbulkan ancaman besar.
   - Risiko Utama:
     - Dampak pada Ekosistem Pesisir: Penggunaan rakit dan alat budidaya yang padat dapat mengganggu sirkulasi air, merusak padang lamun, dan terumbu karang di bawahnya.
     - Pencemaran Organik: Sisa-sisa metabolisme dan biomassa rumput laut yang membusuk dapat meningkatkan beban pencemaran organik di perairan pesisir.
     - Kerentanan dan Wabah Penyakit: Sistem budidaya yang terlalu padat dan monoton meningkatkan kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit, yang dapat menyebabkan gagal panen massal dan kerugian ekonomi.
4. Risiko komplek adalah interkoneksi antara ketiga sektor ini. Pencemaran dan sedimentasi dari tambang di hulu akan terbawa hingga ke hilir dan pesisir, mengganggu produktivitas pertanian dan budidaya laut. Sebaliknya, limbah pertanian dan budidaya laut akan memperparah beban pencemaran di seluruh DAS.

Rekomendasi Strategis:

1. Moratorium dan Kajian Mendalam: Diperlukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) strategis untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan seluruh DAS, khususnya terkait aktivitas tambang di hulu.

2. Penerapan Pertanian Berkelanjutan: Mendorong transisi ke pertanian presisi dan organik untuk mengurangi penggunaan input kimia, disertai dengan program konservasi tanah dan air di lahan pertanian.
3. Tata Kelola Budidaya Pesisir: Merancang zonasi budidaya laut yang berkelanjutan, membatasi kapasitas tampung (carrying capacity) area, dan menerapkan praktik terbaik (best practices) untuk budidaya rumput laut.
4. Pemantauan Terpadu: Membangun sistem pemantauan kualitas air dan tanah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mendeteksi dini pencemaran dan mengambil tindakan korektif secara cepat.

Kesimpulannya, Kabupaten Luwu menghadapi risiko degradasi Tanpa pengelolaan yang hati-hati, berkelanjutan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, aktivitas ekonomi tersebut justru dapat menggerakkan ketahanan pangan, ekonomi, dan ekologi wilayah dalam jangka panjang.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kebutuhan terhadap energi, Air, dan Pangan yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang mutlak bagi setiap masyarakat. Pemenuhan atas energi, air dan pangan masyarakat merupakan isu krusial yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap ke tiga hal tersebut harus memenuhi kriteria yang andal dan terjangkau oleh masyarakat. Energi, air dan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat dan industri.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur penunjang, pengaturan harga, dan pengembangan sumber daya terbarukan. Kebijakan yang tepat dan dukungan investasi yang memadai sangat krusial untuk mendorong ketersediaannya dan memastikan akses energi,air dan dapangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sagat berpotensi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan energi, air dan pangan masyarakatnya. Kabupate luwu memiliki delapan sungai besar, lahan sawah dan perkebunan yang luas, serta daerah pesisir dan garis yang pantai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atas energi, air dan pangan. Namun demikian, pemeanfaatan terhadap potensi tersebut harus terus ditingkatkan secara berasama sama oleh seluruh *stake holder* yang ada.

Indikator-indikator capaiaan Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum merupakan barometer kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir dalam menunjang kebutuhan energi, Air dan Pangan Masyarakat. Upaya kabupaten Luwu dalam pemenuhan akses masyarakat terhadap energi, air dan Pangan lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

a. Ketahanan Energi

Ketersediaan energi merupakan isu global yang terus diupayakan oleh pemerintah. Dalam upaya penyediaan kebutuhan energi, pemerintah melalui rancana tata ruang di Sulawesi khususnya di kabupaten Luwu terus melakukan pembangunan guna menyadiakan sumber energi yang baru. Dalam rencana struktur ruang (RTR) sulawesi terdapat rencana sistem jaringan pembangkit tenaga Listrik berupa PLTG dan PLTM di Batusitanduk, PLTM Palangka 1 dan PLTM Rante Balla. Upaya tersebut dalam rangka pemenuhan konsumsi listrik masyarakat yang ada di kabupaten Luwu

Tabel 2.6.

Konsumsi Listrik per Kapita Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Jenis/Item	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pelanggan/*Costumer*	53.331	56.598	59.093	61.761	61.761
Jumlah Penduduk	365.608	367.454	369.820	379.300	379.300
Listrik Terjual/ *Electricity Sold* (Kwh)	83.914.080	n.a	93.291.310	9.489.818.157	9.489.818.157

Jenis/Item	2020	2021	2022	2023	2024
Daya Terpasang / *Installed Electricity Power* (KW)	29.915.150	n.a	67.601	74.482.502	74.482.502
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita)	229,52	n.a	252,26	25.019,29	25.019,29

Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025.

Ketahanan energi mengacu pada kemampuan daerah untuk bertahan dan pulih dari gangguan pasokan energi sambil memastikan penyediaan energi yang handal dan terjangkau secara terus-menerus. Berdasarkan pencatatan data elektrifikasi kabupaten Luwu, jumlah pelanggan Kabupaten Luwu tahun 2023 sebesar 61.761 dengan konsumsi listrik per kapita sebesar 25.019 Kwh. Adanya peningkatan drastis konsumsi listrik per kapita pada tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya listrik terjual akibat pemakaian besar-besaran dari perusahaan besar. Data pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan adanya peningkatan jumlah pelanggan dan konsumsi listrik kabupaten Luwu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sehingga tantangan kedepan adalah bagaimana pemerintah dapat menyediakan energi melihat jumlah kebutuhan energi yang terus bertambah.

Disisi lain, pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut telah melakukan upaya-upaya konkret di lapangan agar pasokan listrik untuk masyarakat dapat terus tersedia. Di tahun 2024 sejumlah proyek penyediaan energi listrik di kabupaten Luwu sedang dilakasankan. Dengan memanfaatkan sumber daya air dari sungai yang ada di Kabupaten Luwu, pasokan energi sangat mungkin untuk di sediakan.

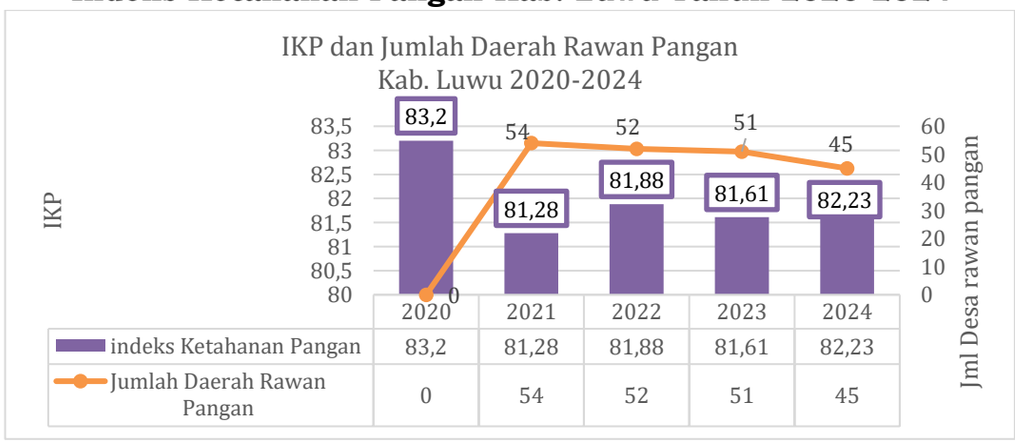
b. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kecukupan atas pangan merupan salah satu isu yang harus terus kita capai agar manusia dapat hidup secara berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Luwu terus melakukan upaya dalam rangka penyediaan pangan. Upaya tersebut berupa penyediaan infrastruktur penunjang ketersediaan pangan, pengembangan pangan berkualitas, dan memastikan tersedianya akses yang luas dan terjangkau terhadap pemenuhan pangan seluruh masyarakat.

Hasil analisis daya dukung ketersediaan pangan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 dan tahun 2045 dalam Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) perlihatkan bahwa nilai status kebutuhan pangan tahun 2025 di semua kecamatan berkisar 0,34 – 11,5, nilai terendah terdapat di Kecamatan Belopa dan tertinggi terdapat di Kecamatan Latimojong. Pada tahun tahun 2045 nilai status kebutuhan pangan berkisar 0,22 – 12,83, nilai terendah terdapat di Kecamatan Belopa dan tertinggi terdapat di Kecamatan Basse Sangtempe. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Luwu memiliki kemampuan penyediaan pangan yang belum terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan pangan yang belum terlampaui.

Meskipun dalam kajian lingkungan hidup strategis aspek daya dukung ketahan pangan masih belum terlampaui, namun ketahanan pangan di Kabupaten Luwu dalam kurun lima tahun menunjukan kinerja yang fluktuatif. Capaian tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2020 dimana nilai capaiannya perada pada angka 83,20. Pada skala nasional pada tahun 2024, indeks Ketahan Pangan kabupaten Luwu berada pada urutan 180 dan berada pada level tujuh terbawah di sulawesi selatan. Capaian tersebut mengindikasikan perlu adanya penguatan program untuk menunjang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Luwu kedepannya.

Grafik 2.5.
Indeks Ketahanan Pangan Kab. Luwu Tahun 2020-2024



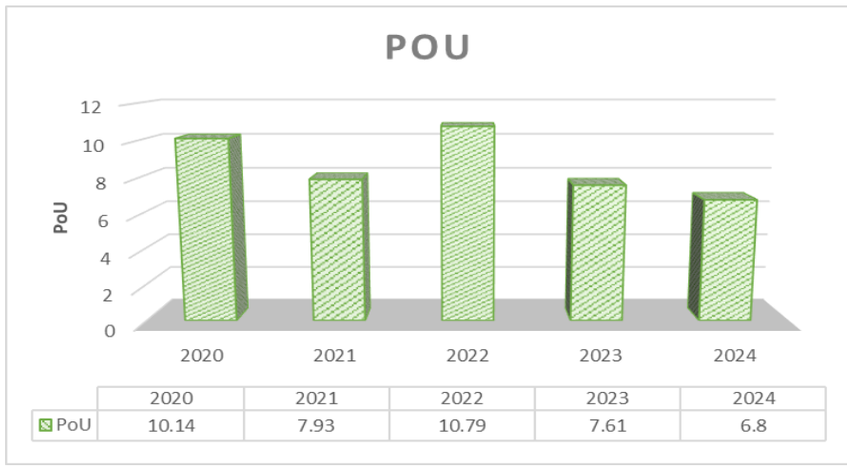
	2020	2021	2022	2023	2024
indeks Ketahanan Pangan	83,2	81,28	81,88	81,61	82,23
Jumlah Daerah Rawan Pangan	0	54	52	51	45

Sumber : Data Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2025

Data jumlah daerah rawan pangan di kabupaten Luwu mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir menunjukan

adanya upaya pemerintah dalam upaya menurunkan jumlah daerah yang mengalami kerawanan pangan. Masalah kerawanan pangan merupakan masalah yang holistik dan multisektor. Perlu adanya kolompok kerja yang bertugas secara terintegrasi agar langkah-langkah yang telah direncanakan dapat berjalan lebih efektif. Komitmen dalam pengurangan wilayah rawan pangan merupakan isu yang terus diupayakan untuk mencapai masyarakat Kabupaten Luwu yang unggul.

Grafik 2.6.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan
Kab. Luwu Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
PoU	10.14	7.93	10.79	7.61	6.8

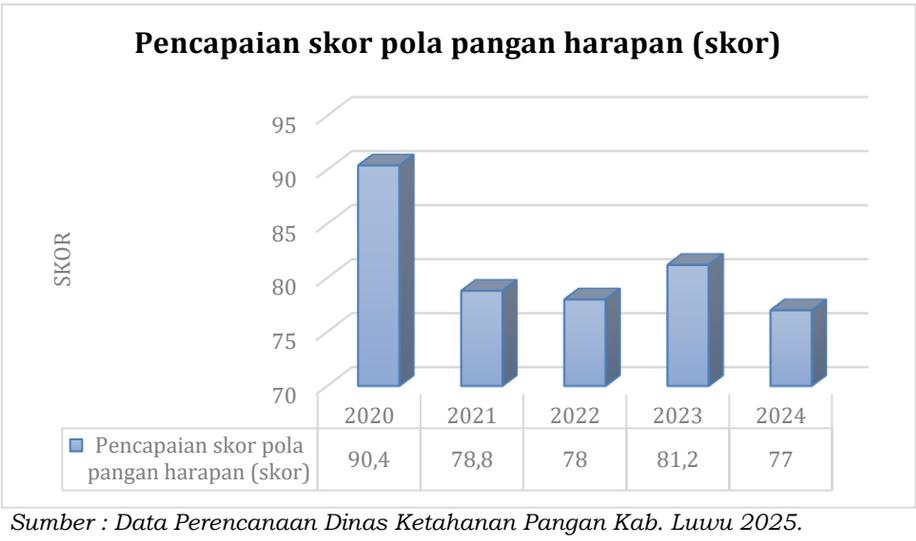
(Sumber : Data Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu 2025)

Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan isu global yang teruang dalam SGDs yang berkaitan dengan targel *Zero Hungry* (Nol Kelaparan) pada tahun 2030. Data dari lima tahun terakhir Terkait Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menunjukan adanya fluktuasi nilai yang cenderung menurun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 di mana capainnya sebesar 10,79 sedangkan angka terendah terjadi di tahun 2024 sebesar 6,8. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian serius secara nasioanal dan kabupaten dalam upaya menurunkan angka stunting di masyarakat. Sehingga, rencana program dalam periode ini juga diarahkan untuk menangani masalah ketidakcukupan konsumsi pangan.

Menurut *Food Agricultural Organisation-Regional Office for Asia and Pacific* (FAO-RAPA), Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi

kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat lainnya. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Berikut Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024.

Grafik 2.7.
Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu 2025.

Data skor pola pangan harapan menunjukan adanya penurunan dalam lima tahun terakhir. Pencapaian skor ini didasarkan atas aspek keberagam pangan, proporsi komsumsi dan kecukupan gizi. Hasil pencapaian skor pola pangan harapan dalam lima tahun terakhir mengindikasikan kondisi yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan terutama dalam hal kecukupan gizi yang sangat erat kaitannya dengan kondisi stunting khususnya bagi balita dan ibu hamil.

c. Ketahanan Air

Analisis daya dukung ketersediaan air dan kebutuhan air dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan yang diperoleh dari data curah hujan. Secara kuantitatif perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1)

perhitungan ketersedian air, (2) perhitungan kebutuhan air, (3) perhitungan ambang batas penduduk, dan (4) penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid.

Hasil perhitungan potensi ketersediaan air di Kabupaten Luwu sebesar 10.697.618.037,1 m3/tahun. Ketersediaan air bersih tinggi terdapat di kecamatan Latimojong, Larompong dan Walenrang Barat. Sedangkan, Kebutuhan air bersih yang tinggi terdapat di kecamatan Walenrang Utara, Bua dan Walenrang Barat.

Berdasarkan hasil analisis daya dukung ketersediaan air bersih di Kabupaten Tana Luwu diperoleh bahwa nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2025 pada semua kecamatan berkisar 163.900,86 - 1.676.185,62 dan nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2045 berkisar 173.874,0 – 1.676.845,33. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Luwu memiliki kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui.

Upaya penyedian air baku di kabupaten Luwu terus dilakukan melalui penguatan infrastruktur penyedia air melalui perluasan jaringan pipa, penyediaan sambungan rumah panambahan jumlah unit layanan serta peningkatan kapasitas pengelolahan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan agar semua masyarakat kabupaten Luwu dapat memperoleh akses terhadap air yang layak. Selain itu, untuk memastikan tercapainya tujuan ini pemerintah terus melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan melakukan kegiatan monitoring serta evalauasi dan pelaporan capaian secara berkala.

- **Kapasitas air baku**

  Upaya Peningkatan dan pemantauan kapasitas air baku merupakan langkah yang harus terus dilakukan guna memastikan ketersediaan air untuk masyarakat kabupaten Luwu dapat terus terpenuhi baik kapasitas maupun kualitasnya. Meskipun, kabupaten Luwu merupakan daerah yang memiliki sumber air yang melimpah namun penurunan kapasitas dan kualitas air merupakan tantangan global yang harus terus

diperhatikan. Penuruan kualitas lingkungan merupakan salah satu tantangan dalam penediaan air baku sehingga perlu untuk memformulasikan langka-langkah yang tepat dan berkelanjutan terkait aspek penyediaan air baku ini. Berikut tabel data kapasitas air baku kabupaten Luwu.

Tabel 2.7.

Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu

NO	NAMA	AIR BAKU INDUK	JENIS	KAPASITAS (L/DET)	KAPASITAS TERPAKAI (L/DET)
1	SUNGAI SALU BUA	-	Sungai	20	20
2	SUNGAI SUSO	-	Sungai	100	40
3	SUNGAI BALLUTAN	-	Sungai	250	50
4	SUNGAI KOMPI	-	Sungai	100	20
5	SUNGAI TAMPA	-	Sungai	250	20
6	SUNGAI LAROMPONG	-	Sungai	100	50
7	SUNGAI PAKALOLO	-	Sungai	1	30
8	SUNGAI LIMBONG	-	Sungai	250	60
9	SUNGAI BINTURU	-	Sungai	40	20

Sumber data: Aplikasi Simspam 2025

Potensi sumber daya air kabupaten Luwu masih dapat ditingkatkan lagi. Berdasarkan tabel di atas, tercatat ada sembilan sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku di kabupaten Luwu. Masih ada sejumlah sungai yang belum dijadikan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air di kabupaten Luwu. Setidaknya tercatat ada sebelas sungai yang cukup besar yang berada di kabupaten Luwu. Sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan air, wilayah ini masih dapat ditingkatkan lebih jauh lagi.

Tabel 2.8.

Jumlah Unit SPAM, Alokasi Air baku Serta Kapasitas Air baku Kabupaten Luwu

Kab.	Jumlah Unit SPAM	Alokasi Air Baku*	Kap. Terpasang*	Kap Produksi*	Kap Distribusi*	Kap Air Terjual*	Idel Cap. Terpasang*	Idel Cap. Terpasang*
Luwu	95	448.51	350.01	311.01	287.27	249.44	90	47

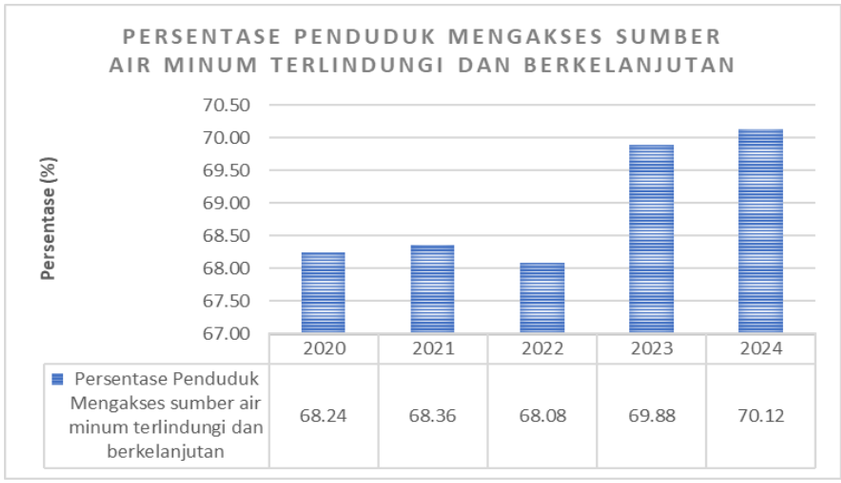
*dalam L/detik

Sumber data: Aplikasi Simspam 2025

- **Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**

Perkotaan merupakan wilayah yang sangat bersinggungan dengan ketersediaan air. Aktifitas di perkotaan yang konsumtif serta intensitas dalam penggunaan air menyebapkan ketersedaiaan air harus terus kontiniu.

Grafik 2.8.
Persentase Penduduk Mengakses sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2025.

Akses masyarakat terhadap sumber air minum yang terlindungi di kabupaten Luwu mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data capaian terakhir di tahun 2024 penduduk yang telah mengakses sumber air minum terlindungi di kabupaten Luwu sebanyak 70.12 persen. Meskipun dalam kurun lima tahun tersebut telah terjadi peningkatan sebanyak 1,88 persen, namun capaian terakhir di tahun 2024, masih ada 29,88 persen penduduk kabupaten Luwu belum memiliki akses terhadap sumber air minum yan terlindungi. Angka teresebut masih sangat tinggi mengingat kebutuhan akan airminum yang berkualias merupakan kebutuhan dasar manusia.

Untuk menyediakan layanan air minum yang aman bagi masyarakat, salah satu langkah yang mudah ditempuh adalah dengan menyediakan air yang terdistribusi melalui perpipaan. Jaringan pipa merupakan upaya untuk melindungi kualitas air untuk sampai ke masyarakat tidak bercampur dengan kontaminan yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan data SIMSPAM Kementerian PUTR

bahwa capaian pesentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Perpipaan yaitu sebesar 19.346 Sambungan Rumah serta persentase akses air minum perpipaan sebesar 25,41 persen.

Tabel 2.9.

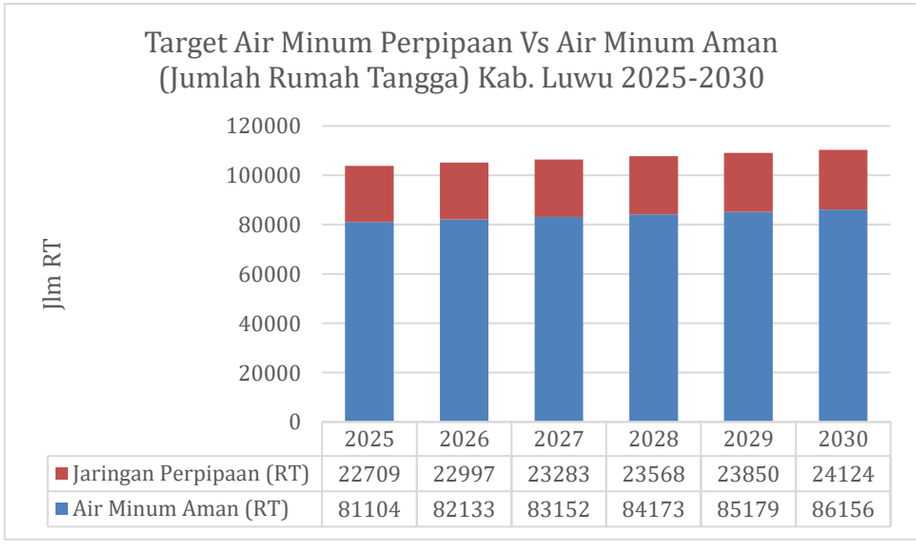
Jumlah Sambungan Rumah Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH UNIT SPAM	ALOKASI AIR BAKU (Liter/Detik)	KAPASITAS TERPASANG (Liter/Detik)	KAPASITAS PRODUKSI (Liter/Detik)	KAPASITAS DISTRIBUSI (Liter/Detik)	KAPASITAS AIR TERJUAL (Liter/Detik)	IDLE CAP TERPASANG (Liter/Detik)	IDLE CAP PRODUKSI (Liter/Detik)	NRW (%)	JUMLAH SAMBUNGAN RUMAH (SR)		
											PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
1	KEP.SELAYAR	83	244,04	203,84	148,14	137,48	119,36	40,20	55,7	13,18	3.967	11.285	15.252
2	BULUKUMBA	129	492,68	350,68	226,73	162,74	126,65	142,00	123,95	22,18	7.281	12.410	19.691
3	BANTAENG	54	473,81	472,13	351,80	277,20	149,62	1,68	120,33	46,02	14.470	11.466	25.936
4	JENEPONTO	82	263,76	263,76	245,76	221,87	204,68	-	18,00	7,75	9.596	15.372	24.968
5	TAKALAR	57	244,47	241,97	193,04	182,64	145,23	2,50	48,93	20,48	11.089	14.378	25.467
6	GOWA	101	807,55	787,05	695,98	530,32	364,34	20,50	91,07	31,30	41394	9.877	51271
7	SINJAI	70	340,82	320,82	278,82	272,68	271,72	20,00	42,00	0,35	14.224	10.837	25.061
8	MAROS	61	498,93	378,03	348,82	341,09	238,02	120,90	29,21	30,22	19.861	7.215	27.076
9	PANGKEP	53	277,57	227,57	161,20	145,94	108,61	50,00	66,37	25,58	4.548	11.171	15.719
10	BARRU	40	312,29	310,71	188,51	147,79	106,03	1,58	122,20	28,26	9.535	5.924	15.459
11	BONE	124	1.015,53	392,53	285,03	235,03	187,16	623,00	107,50	20,37	14.773	8.027	22.800
12	SOPPENG	39	655,61	445,06	393,02	373,05	220,37	210,55	52,04	40,93	8.202	6.980	15.182
13	WAJO	124	448,35	445,23	399,31	347,70	273,68	3,12	45,92	21,29	18.060	12.667	30.727
14	SIDRAP	87	780,65	260,65	217,65	184,46	145,94	520,00	43,00	20,88	6.056	10.471	16.527
15	PINRANG	84	263,40	281,90	149,40	124,68	120,10	- 18,50	132,50	3,67	561	10.173	10.734
16	ENREKANG	87	471,66	607,66	334,66	311,21	288,79	25,00	68,00	7,20	6.603	19.105	25.508
17	LUWU	95	448,01	358,01	311,01	287,27	249,44	90,00	47,00	13,17	8.447	10.899	19.346
18	TANA TORAJA	145	536,00	534,00	489,70	338,45	246,07	2,00	44,30	27,30	5.138	23.164	28.302
19	LUWU UTARA	103	363,59	375,13	337,82	317,12	231,83	- 11,54	37,31	26,90	5.750	13.924	19.674
20	LUWU TIMUR	46	588,77	268,77	222,00	179,64	129,14	320,00	46,77	28,11	11.289	13.635	24.924
21	TORAJA UTARA	93	251,55	251,05	229,52	186,61	133,93	0,50	21,53	28,23	3.752	17.048	20.800
22	MAKASSAR	71	3.482,60	3.466,80	3.397,80	2.967,61	1.633,70	15,80	69,00	44,95	174.585	140	174.725
23	PAREPARE	1	342,00	342,00	232,00	230,00	147,21	-	110,00	36,00	27.202	62	27.264
24	PALOPO	21	1.477,40	579,34	522,34	511,84	332,50	898,06	57,00	35,04	38.481	3.682	42163
	SULAWESI SELATAN	1.850	15.037,04	11.959,69	10.360,06	9.014,42	6.174,12	3.077,35	1.599,63	31,51	464.664	259.912	724.576

Sumber : SIMSPAM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Penyedian layanan air minum perpipaan dalam rencana Pembangunan Kabupaten Luwu harus terus ditingkatkan. Melihat capaian kinerja penyediaan layanan air minum perpipaan di atas, perlu adanya langkah penetapan target rumah tangga lima tahun ke depan. Target ini merupakan upaya untuk mengukur sejauh mana kineja dalam upaya penyediaan air bersih yang aman kepada masyarakat di kabupaten Luwu selama lima tahun mendatang.

Grafik 2.9.
Target Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Tahun 2025-2030



Sumber: Data perencanaan Dinas PUTR Kab. Luwu.

Akses terhadapa sumber air minum terlindungi merupakan salah satu Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Target ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap target capaain nasional dan provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menyediakan layanan air minum yang berkualitas, pemerintah dapat menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Luwu.

Ketersediaan air minum yang berkualitas memerlukan pemantauan yang intensif guna menyediakan hasil data pantau yang lebih akurat. Pemantauan berkala ini bertujuan untuk menvalidasi sekaligus melakukan control terhadap kualitas air yang dikonsumsi oleh Masyarakat di lapangan.

Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) memiliki urgensi kritis sebagai sistem peringatan dini terhadap ancaman kesehatan masyarakat akibat konsumsi air tercemar. Data dari survei ini menjadi fondasi ilmiah untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan krisis air bersih, terutama di wilayah rentan seperti kawasan industri, daerah pesisir, atau lokasi dengan sanitasi buruk. Dengan mendeteksi kontaminan berbahaya seperti bakteri E.coli, logam berat, atau zat kimia beracun, pemerintah dapat segera melakukan intervensi tepat sasaran - mulai dari distribusi filter air darurat hingga pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Tanpa survei berkala ini, ribuan rumah tangga berisiko terpapar penyakit bawaan air seperti diare kronis, gangguan ginjal, bahkan keracunan logam berat yang berdampak jangka panjang pada generasi penerus.

SKAMRT memegang peran strategis dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dan pencapaian target SDGs. Survei ini tidak hanya menyelamatkan nyawa dari ancaman langsung penyakit akibat air, tetapi juga menjadi basis data untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, alokasi anggaran prioritas, dan penguatan sistem surveilans kesehatan lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim yang memperparah krisis air bersih, data SKAMRT menjadi penentu kebijakan adaptasi di tingkat komunitas hingga nasional. Urgensinya semakin kentara mengingat air minum yang terkontaminasi seringkali tidak menunjukkan tanda fisik yang

kasat mata, sehingga hanya melalui survei ilmiah inilah ancaman kesehatan tersembunyi dapat terungkap dan ditangani sebelum berkembang menjadi wabah yang lebih luas.

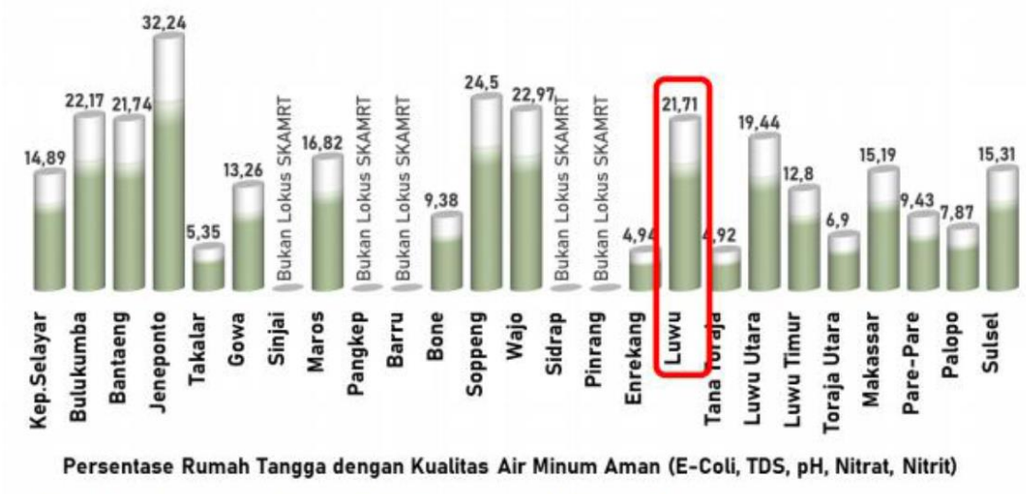
Grafik 2.10.
Keisiapan Akses Air Minum Perpipaan Kabupaten Luwu



Sumber : SIMSPAM Kementerian Pekerjaa Umum, data diolah Bappelitbangda Prov.Sulsel

Pada tahun 2024, Kabupaten Luwu telah mencapai capaian sambungan air minum sebesar 44,76 persen dengan total 19.346 Sambungan Rumah (SR), namun angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari separuh rumah tangga di wilayah tersebut yang belum memiliki akses terhadap air minum perpipaan yang aman. Perlunya percepatan penyediaan sambungan air minum menjadi prioritas utama guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses air bersih yang layak, mengingat air minum yang aman merupakan kebutuhan dasar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan melalui beberapa strategi, seperti peningkatan investasi infrastruktur, optimalisasi program pemerintah, kolaborasi dengan pihak swasta, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air bersih. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Luwu dapat mempercepat perluasan jaringan perpipaan sehingga target universal akses air minum yang aman bagi seluruh rumah tangga dapat tercapai dalam waktu yang lebih efisien.

Grafik 2.11.
Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil Survey SKAMRT



Sumber : Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) 2023

Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) di Kabupaten Luwu menunjukan capaian yang memprihatinkan, dimana hanya 21,71% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang memenuhi standar keamanan. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional dan mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penyediaan air bersih di wilayah tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat, mengingat air minum yang tidak memenuhi standar dapat menjadi media penularan penyakit seperti diare, disentri, bahkan keracunan logam berat jangka panjang.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan pendekatan sistemik dan terintegrasi dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas. Untuk melaksanakan agenda tersebut, pemerintah Kabupaten Luwu sebelumnya telah melakukan beberapa langkah-langkah mulai dari pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), pemantauan dan evaluasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan. Pemerintah secara aktif mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan penguatan program pengolahan limbah yang efisien untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Strategi ini juga meliputi penguatan sistem

informasi dan data lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis ilmiah.

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan kerusakan serta pelestarian lingkungan hidup, pemerintah juga berupaya untuk menarik partisipasi aktif masyarakat menjaga lingkungan hidup melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup merupakan kunci keberhasilan dalam upaya menciptakan lingkungan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

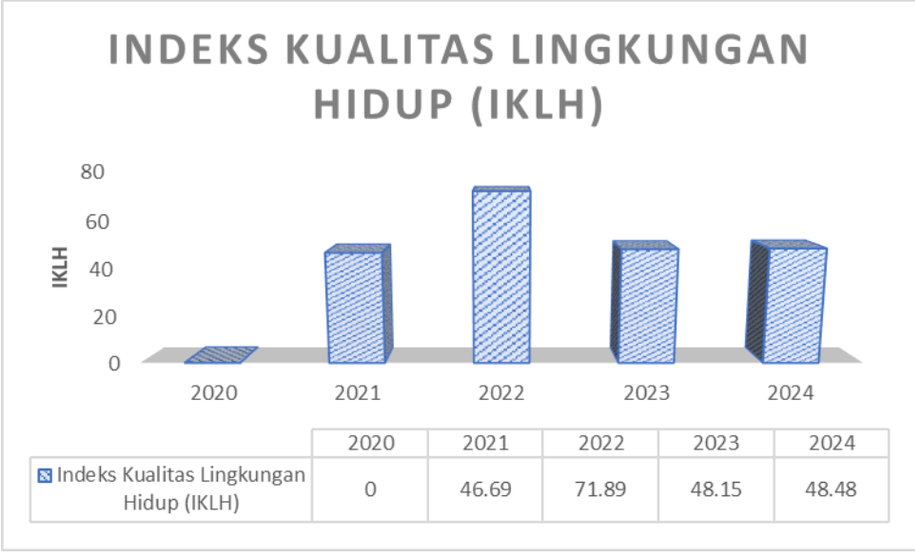
Dalam upaya pelaksanaan program bidang lingkungan hidup, pemerintah perlu menetapkan indikator agar dapat senantiasa melakukan pemantauan, evaluasi serta inovasi. Indikator yang dipilih harus dapat menggambarkan kinerja yang relevan serta besaran yang realistis. Untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang berkualitas, Kabupaten Luwu dalam periode lima tahun ke depan melakukan paralelisasi program untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah seperti capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, dan Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah. Sebagai gambaran awal, berikut sajian capaian indikator yang diperoleh kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu telah menunjukkan dinamis dalam capaian kualitas lingkungan hidup selama lima tahun terakhir, dengan pola perkembangan yang fluktuatif. Terdapat tantangan di tahun 2020 dimana pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat dilaksanakan akibat proses penyesuaian indikator, sehingga baru dapat dimulai secara konsisten pada tahun 2021. Pencapaian

tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan skor 71.89, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan yang signifikan, namun diikuti dengan fluktuasi di tahun-tahun berikutnya.

Grafik 2.12.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0	46.69	71.89	48.15	48.48

(Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2025).

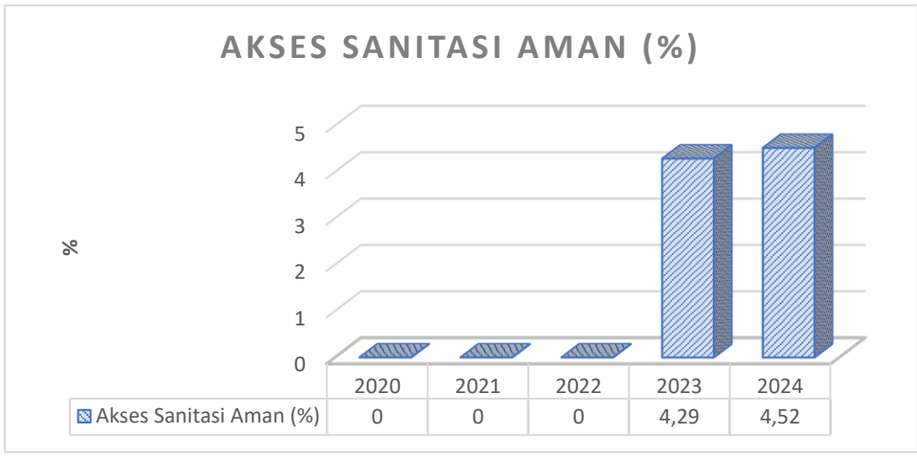
Fluktuasi capaian IKLH ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian khusus meliputi: (1) konsistensi dalam penerapan kebijakan lingkungan, (2) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan, (3) penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, serta (4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terukur, Kabupaten Luwu untuk meningkatkan capaian IKLH jauh lebih baik lagi di masa mendatang, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan secara nasional.

b. Akses Sanitasi Aman

Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukan tren kenaikan. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukan tidak adanya nilai karena pada

periode tersebut belum dilakukan pengukuran. Barulah pada tahun 2023 ke tahun 2024 kabupaten Luwu mulai melakukan pengukuran terkait persentasi akses sanitasi aman yang mana terlihat adanya kenaikan nilai capaian. Meskipun kenaikan capaian indikator ini relatif kecil yaitu 0.23 persen dati tahun 2023 ke 2024, namun penguatan program sanitasi aman di Kabupaten Luwu terus diupayakan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.13.
Akses Sanitasi Aman Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan PUTR Kabupaten Luwu 2025.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman serta tertata dengan baik. Masalah sanitasi pada kawasan perumahan merupakan maslah yang kompleks. Hal ini terjadi karane lingkungan perumahan yang baik harus menyediakan fasiltas untuk pengelolaan lingkungannya. SPAL Domestik Terpusat atau SPAL Domestik-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumbernya secara kolektif ke sub sistem pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Fasilitas ini bertujuan untuk mengelolah hasil limbah rumah tangga yang dialirkan ke suatu wadah pengelolahan terpusat. Infrastruktur ini disediakan agar limbah rumah tangga tidak mencemari lingkungan sekitar perumahan.

Sistem pengelolahan air limbah domestik terpadu (SPALD-T) di kabupaten Luwu telah dilaksanakan. Namun kinerja pelayanan dari kegiatan ini baru dilakukan pencatatan di tahun 2024 sengga data capaiaan SPALD-T belum dapat dimuat untuk tahun 2020 sampai

2023. Berikut hasil capaian layanan SPALD-T pada tahun 2020 ke 2024.

Tabel 2.10.

Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani SPALD-T kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Rumah dengan SPALD-T	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	na	na	na	na	41319
Jumlah Rumah Tangga yang Sudah Dilayani	na	na	na	na	440
Persentase	na	na	na	na	1.06

(sumber: Data perencanaan Dinas PUTR Kab. Luwu 2025).

Berdasarkan data layanan system penglolahan air limbah domestik terpadu di kabupaten Luwu, perlu adanya peningkatan layanan tersebut. Persentase layanan hanya 1.06 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pada program kegiatan ini dengan melakukan penyediaan sarana dan prasara pendukung serta peningkatan tata kelola agar masayarakat kabupaten Luwu dapat terlindung dari pencemaran limbah khususnya limbah domestik. Dengan layanan tersebut, lingkungan perumahan dapat terhindar dari kumuh sehingga masyarakat yang menghuni kawasan perumahn dapat lebih sehat. Disamping itu, pencatatan kinerja pelayannan ini harus dilakukan guna menyediakan data capaian dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan secara khusus pada organisasi pemerintahan yang membidangi sektor tersebut.

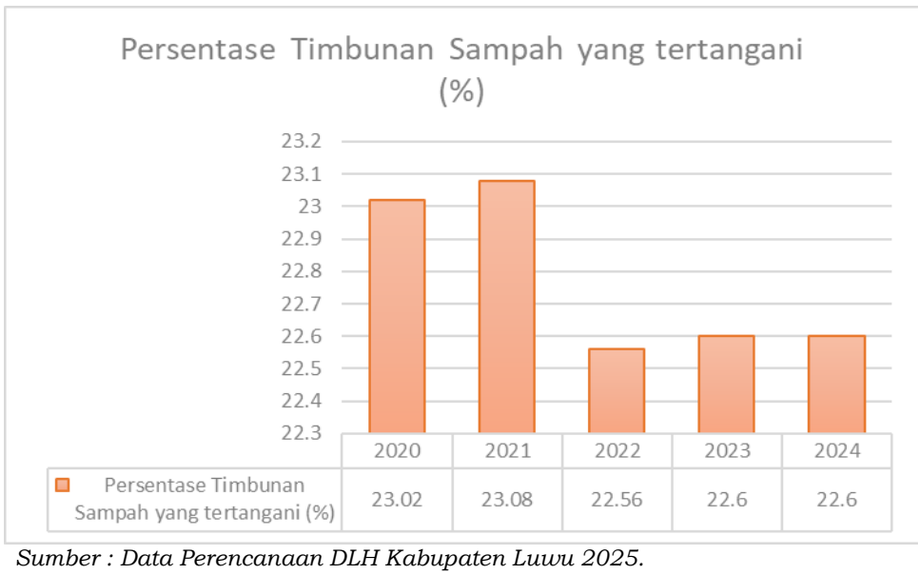
c. Persampahan

Masalah persampahan merupakan tantangan yang besar siring dengan laju pertumbuhan penduduk serta intensitas kegitan manusia serta alam itu sendiri. Permasalahan sampah perkotaan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Solusi tidak dapat lagi hanya bertumpu pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai lokasi pembuangan akhir, melainkan harus dimulai dari pengurangan sampah di sumbernya, yaitu rumah tangga dan industri. Strategi pengelolaan sampah yang efektif melibatkan kombinasi upaya pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle), yang dikenal sebagai konsep 3R.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penting untuk mengoptimalkan peran Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) dan menggalakkan program bank sampah. Ini akan membantu memilah sampah sejak awal, mengubahnya menjadi nilai ekonomi, dan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sarana dan prasarana pengangkutan sampah, meningkatkan kapasitas pengolahan, serta memanfaatkan teknologi inovatif seperti pengomposan, biogasifikasi, atau bahkan konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy) yang berwawasan lingkungan, tentunya dengan memperhatikan dampak lingkungannya.

Partisipasi aktif dan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Sosialisasi masif mengenai pentingnya pemilahan sampah, edukasi tentang dampak negatif sampah, serta pelatihan pengolahan sampah mandiri harus terus digencarkan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, diharapkan masalah persampahan dapat ditangani secara sistematis, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Grafik 2.14.
Persentase Timbunan Sampah yang Tertangani Kab. Luwu
Tahun 2020-2024

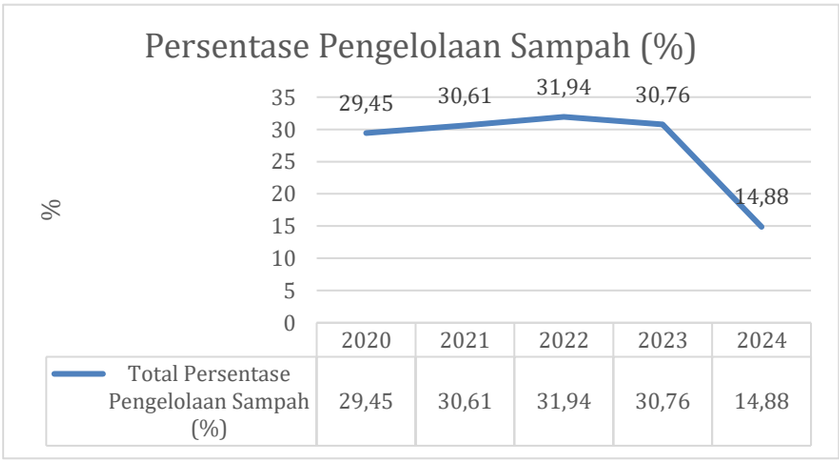


Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Penanganan sampah di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukan adanya tren menurun yang fluktuatif. Penanganan

sampah pada tahun 2021 dan 2022 menunjukan hasil yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan capaian tahun 2022 ke tahun 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penanganan timbunan sampah paling tinggi dilakukan di tahun 2021 dengan nilai persentase 23.08 sedangkan persentas pengangan timbunan sampah palin rendah dilakukan di tahun 2023 dengan nilai 22.56 persen.

Grafik 2.15.
Sampah Yang Terkelolah di Kabupaten Luwu



Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Kinerja capaian Kabupaten Luwu terhadap penanganan timbunan sampah masih belum optimal. Ketersedian sarana untuk pelaksanaan kegiatan *sanitary landfill* menjadi salah satu penyebab timbunan sampah belum mendapatkan penangan yang semestinya. Oleh karena itu, terkait masalah sampah pemerintah kabupaten Luwu berupaya untuk terus meningkatkan penyediaan sarana dapa prasarana persampahan yang lebih andal. Kondisi saarana yang digunakan dalam kegiatan penimbunan sampah saat ini dalam keadaan rusak dan perlu untuk dilakukan penambahan armada dan perbaikan.

Disamping itu penguatan kapasitas oraganisasi melalui penerbitan perda persampahan dan penguatan pendanaan juga merupakan agenda yang krusal untuk segera dilaksanakan.

Grafik 2.16.
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kab. Luwu Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

Berdasarkan data capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah kurun lima tahun terakhir di Kabupaten Luwu. Terlihat kinerja yang stagnan di angka 0,5. Dari data capaian mengindikasingan perlu adanya peningkatan layannan di bidang persampahan khususnya penanganan sampah domestik. Peningkatan Kapasistas kelembagaan, Peningkatan jumlah sarana dan prasarana serta ekskalasi layanan persampahan perumahan di seluruh wilyah Kabupaten Luwu.

Untuk menjamin hal tersebut, perlu adanya langkah-langkah jitu untuk menyusun sebuah pemodelan penganangannan sampah yang lebih konperhensif. Penanganan sampah merupakan program yang melibatkan banyak stake holder, mulai dari skala lingkungan sebagai ujung tangan dari pemerintah daerah dalam rangkah menarik partisipasi aktif oleh masyarakat sampai ke pemerintah daerah sebagai bagian yang menyusun konsep dalam bentuk produk- produk hukum dan mengkoordinir kinerja setiap satuan. Pemerintah daerah juga berperan untuk menarik serta merangkul *resource* non pemerintahan serta lembanga-lembaga lain yang memiliki keinginan untuk berkintribusi terhadap kelestarian lingkungan khususnya masalah persampahan.

Tabel 2.11.

Data Timbunan Sampah yang Terkelolah di Fasilitas Pengelolahan Sampah Tahun 2021-2024 di Kabupaten Luwu

Tahun	Timbunan sampah Tahunan (Ton/Tahun)	Pengurangan sampah Tahunan (Ton/tahun)	%pengurangan sampah tahunan	Penanganan sampah tahunan (ton/tahun)	% Penangan Sampah	Sampah Terkelolah Tahunan (Ton/tahun)	Sampah Masuk Ke TPA (Ton/Tahun)	Timbunan sampah terkelolah di Fasilitas Pengelolah sampah(%)	Daur Ulang Sampah Tahunan (ton/Tahun)	Daur Ulang Sampah Tahunan (%)
2021	55544	4172	7.53	12818.85	23.08	17001.55	12475.65	8.15	845.99	1.52
2022	56932.99	4645.13	8.16	13536.43	23.78	18182.56	12812.85	9.42	1303.8	2.29
2023	57957.77	4731.17	8.16	13094.4	22.59	17805.57	13536.43	7.4	1268	2.19
2024	56104.88	1123.88	2	13924.75	24.82	15048.63	13924.75	2	582.92	1.04

Sumber: SISPN, data diolah Bappelitbangda Provinsi.

Berdasarkan data tabel yang ada, kondisi pengelolaan timbunan sampah di Kabupaten Luwu menunjukkan beberapa tantangan signifikan. Kabupaten Luwu tercatat memiliki timbunan sampah tahunan yang cenderung mengalami peningkatan, dengan volume tertinggi mencapai 57.957,77 Ton/Tahun pada tahun 2023. Meskipun ada upaya pengelolaan, persentase penanganan sampah di wilayah ini masih tergolong rendah, yakni rata-rata hanya sebesar 23,57%. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sampah belum tertangani secara optimal melalui metode daur ulang, pengomposan, atau pemanfaatan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar.

Rendahnya persentase penanganan ini berdampak langsung pada volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan tonase tertinggi sebesar 13.924,75 Ton/Tahun pada tahun 2024. Tekanan terhadap fasilitas TPA menjadi semakin besar, berimplikasi pada kapasitas, umur pakai, dan potensi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini menyoroti urgensi peningkatan kinerja pengelolaan timbunan sampah secara menyeluruh di Kabupaten Luwu. Diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pengangkutan ke TPA, tetapi juga pada penguatan upaya pengurangan sampah di sumbernya, peningkatan kapasitas pemilahan, daur ulang, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tabel yang disajikan, Kabupaten Luwu menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan sampahnya.

Meskipun tercatat volume sampah terkelola sebesar 47.001,55 Ton/Tahun dari total timbunan sampah tahunan 55.544,39 Ton/Tahun, persentase penanganan sampah di wilayah ini masih tergolong rendah, hanya mencapai 23,08%. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat sampah yang dihasilkan belum tertangani secara optimal melalui proses pengurangan, penggunaan kembali, atau daur ulang. Akibatnya, sebagian besar volume sampah, yaitu 17.001,55 Ton/Tahun, masih terus dialirkan dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Kondisi ini menimbulkan beban berat bagi TPA dan mengindikasikan urgensi peningkatan kinerja pengelolaan sampah secara komprehensif. Upaya-upaya yang perlu laksanakan meliputi penguatan fasilitas pemilahan sampah di sumbernya (rumah tangga dan komersial), peningkatan kapasitas daur ulang dan pengomposan, serta pengembangan infrastruktur pengolahan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi kunci vital untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Luwu.

d. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

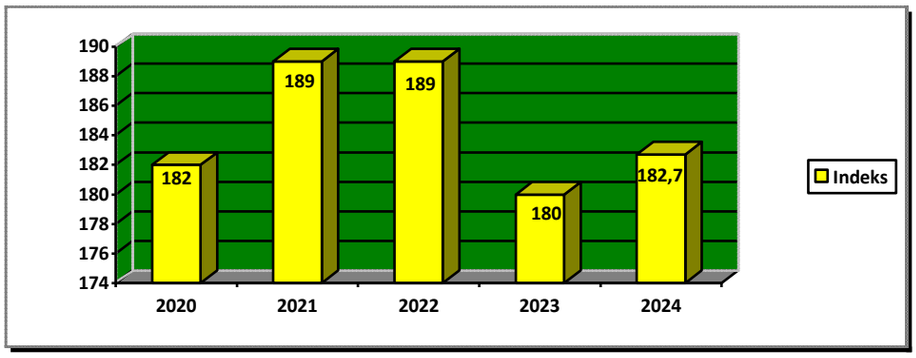
Proporsi ralisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Luwu masih sangat rendah, Meskipun pupuk organik memiliki banyak manfaat bagi pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, perbaikan struktur tanah, dan keberlanjutan Lingkungan namun penggunaannya oleh masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Luwu tahun 2024 proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia hanya sebesar 0,37%.

e. Indeks Pertanaman Padi

Indeks Pertanaman pada padi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur intensitas atau frekuensi penanaman padi dalam

satu tahun pada suatu lahan sawah. Berikut ini data IP pada padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.17.
Indeks Pertanaman Padi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



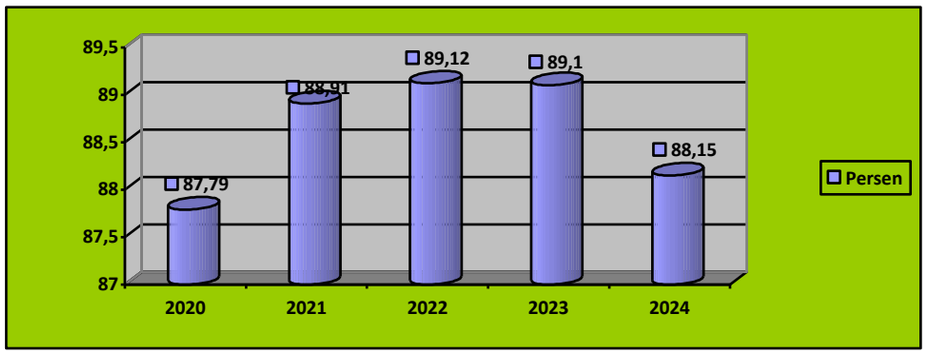
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, IP Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 189 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap hektar lahan sawah di Kabupaten Luwu ditanami padi sebanyak 1,89 kali dalam setahun. Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 1,80 kali tanam dalam setahun, dan pada tahun 2024 adalah 182,7 kali pertahun. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain ketersediaan sarana dan prasaranan, kondisi geografis, dan cuaca.

f. Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi adalah perbandingan luas lahan sawah yang diairi secara teratur dengan sistem irigasi terhadap total luas lahan sawah. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa besar bagian dari lahan sawah yang mendapatkan pasokan air secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan padi. Namun masih ada lahan sawah yang belum beririgasi atau tada hujan. Berikut ini data proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.18.
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



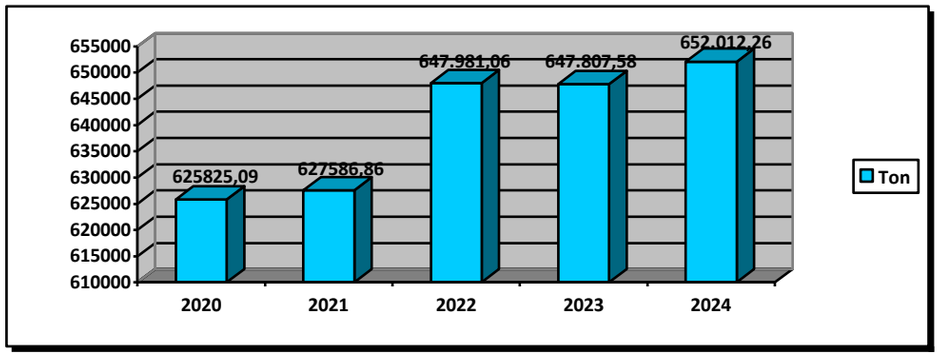
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir (2020-2024) berfluktuasi. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 87,79 persen dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 89,12 persen, Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 82,15 persen. Penyebab utama penurunan proporsi sawah irigasi di tahun 2024 adalah kerusakan infrastruktur irigasi akibat banjir dan adanya catak sawah baru yang tidak dibarengi dengan pembangunan irigasi.

g. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Kabupaten Luwu memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya baik perikanan air Laut maupun air tawar seperti Ikan Bandeng, Udang, Rumput Laut, Ikan Nila, Ikan Mas dan Ikan Lele. Pengembangan Perikanan Budidaya dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.19.
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



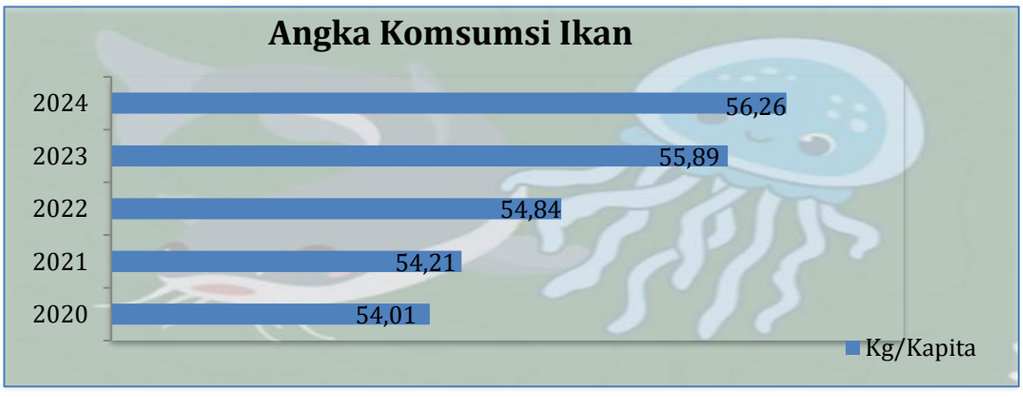
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2025.

Grafik diatas menunjukan jumlah produksi perikanan budidaya Kabupaten Luwu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 mencapai 625.925,09 ton, tahun 2021 sebesar 627.586,86 ton, meningkat di tahun 2022 menjadi 647.981,06 ton dan pada tahun 2024 mencapai 652.012,26 ton.

h. Angka Komsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan (AKI) adalah salah satu parameter penting untuk mengetahui tingkat konsumsi makan ikan masyarakat pada suatu wilayah. Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Berikut ini Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.20.
Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa AKI di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 54,01 Kg/Kapita/Tahun menjadi 56,26 Kg/Kapita/Tahun. konsumsi atau pola konsumsi pangan seperti ikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya ekonomi tetapi juga budaya, ketersediaan, *aksesibilitas*, pendidikan, gaya hidup dan sebagainya.

2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

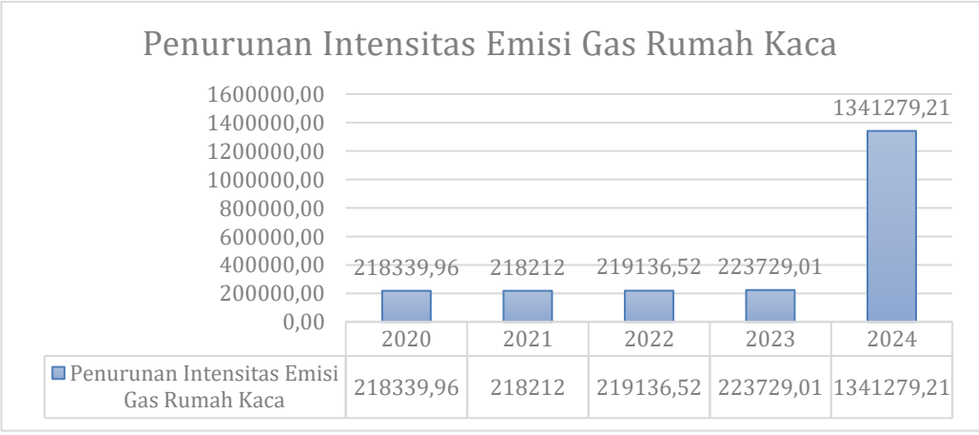
Ketahanan suatu wilayah terhadap dampak perubahan iklim global dan bencana alam merupakan hasil interaksi kompleks antara kemampuan masyarakat, daya tahan infrastruktur, dan kesehatan ekosistem. Masyarakat yang tangguh terhadap bencana ditandai dengan pengetahuan mengenai cara merespon dengan cepat saat sebelum sampai dengan pasca bencana. Jaringan sosial yang kuat, kepemimpinan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan dan meringankan dampak bencana. Daya tahan infrastruktur yang andal ditandai tersedianya fasilitas yang kokoh dan tepat untuk memberikan perlindungan serta peringatan dini sebelum dan setelah terjadi bencana. dengan Selain itu, sistem peringatan dini yang handal dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai merupakan faktor penentu dalam meminimalisir dampak negatif dan mempercepat pemulihan.

Infrastruktur yang tahan bencana merupakan pilar penting dalam menghadapi perubahan iklim. Ini mencakup bangunan tahan gempa dan banjir, sistem drainase yang efisien, jaringan transportasi yang andal, dan sistem energi yang berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur hijau, seperti taman kota, hutan kota, dan sistem pengolahan air hujan, tidak hanya meningkatkan ketahanan ekosistem tetapi juga mengurangi risiko bencana. Penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam proses pembangunan. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang handal juga krusial untuk koordinasi tanggap darurat dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Ekosistem yang sehat dan lestari berperan sebagai penyangga utama dalam menghadapi dampak iklim ekstrem. Keanekaragaman hayati yang tinggi meningkatkan kemampuan ekosistem untuk menyerap guncangan, seperti banjir dan kekeringan. Hutan, bakau, dan lahan basah berfungsi sebagai pelindung alami terhadap bencana dan menyediakan sumber daya penting bagi masyarakat. Upaya konservasi dan restorasi ekosistem sangat penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencegahan deforestasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati merupakan langkah-langkah krusial dalam membangun ekosistem yang tangguh.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk memberikan penekatan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan katangguhan daerah yang berkaitan dengan resiliensi terhadap bencana. Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana merupakan barometer pokok dalam mengukur kinerja pemerintah terkait kebencanaan. Sebagai gambaran awal, berikut capaian perolehan indikator tersebut dalam kurun lima tahun terakhir.

Grafik 2.21.
Intensitas Penurunan Emisi GRK (Ton CO^2eq) Kab. Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan DLH Kabupaten Luwu 2025.

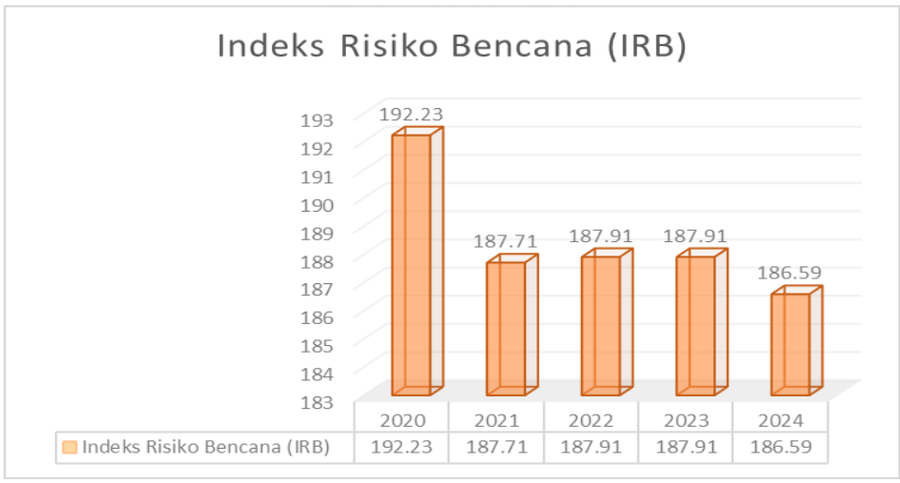
Berdasarkan data capaian di atas, terlihat bahawa adanya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di kabupaten Luwu. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi lingkungan yang

berkaitan jumlah emisi karbon dari aktivitas manusia, peningkatan ekosistem pengurai karbon, serta penurunan penggunaan bahan-bahan pemicu Efek Rumah Kaca. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat bahwa adanya peningkatan terkait penanganan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Empat tahun terakhir yakni tahun 2020 ke 2023 terlihat adanya staknasi dari upaya penangan penuruan emisi. Penurunan dalam kurun waktu tersebut sangat kecil yakni 5389.05 ton CO2 eq. Namun, pada tahun 2024 capaian penurunan GRK meningkat besar. Hal tersebut merupakan implikasi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Ada enam kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penurunan GRK di kabupaten Luwu diantaranya, pengadaan bibit jagung di dua lokasi, pengadaan benih padi di tiga tempat dan pengadaan bibit alpukat. Kegiatan tersebut menyumbang penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 1.341.279,41 ton CO^2eq di tahun 2024. Emisi GRK kumulatif Kabupaten Luwu hingga tahun 2024 tercatat sebesar 1.346.101,27 ton CO^2eq, mencerminkan akumulasi dampak aktivitas pengurangan karbon terutama dari sektor lahan pertanian, perkebunan dan reboisasi hutan untuk percepatan implementasi strategi mitigasi berbasis pertanian dan perkebunan rendah karbon yang inklusif. Terkait Emisi Gas Ruma Kaca (GRK) di kabupaten Luwu, pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk melakukan kegiatan penghijauan terutama di daerah hulu Das dengan melakukan peningkatan program penanaman Pohon buah-buahan unggulan daerah seperti pembagian bibit Pohon alpukat, mangga dan durian.

Pengukuran Intensitas Penurunan Emisi gas Rumah Kaca merupakan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan rencana aksi mandiri dalam rangka mengatasi efek global dari Emisi Gas Rumah Kaca. Pengendalian lingkungan khususnya pelesatarian tanaman untuk pengendalian produksi karbon sebagian besar dilaksanakan di daerah yang memiliki tutupan lahan hutan. Peran pemerintah daerah sangat krusial dimana interfensi program langsung dilaksanakan di daerah masing masing. Program-program pengendalian efek rumah

kaca sangat dekat dengan masyarakat khususnya di pedesaan yang pemukimannnya berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Grafik 2.22.
Indeks Resiko Bencana Kab. Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan BPBD Kabupaten Luwu 2025.

Di sisi lain, indeks resiko bencana kabupaten Luwu mengalami tren penurunan nilai dari tahun 2020 sebesar 192.23 ke 186.59 pada tahun 2024. Meskipun perolehan nilai dalam kurun lima tahun terakhir mengalami fluktuasi namum secara keseluruhan indeks resiko bencan kabupaten Luwu mengalami penurunan yang cukup signifikan.

2.1.7. Demografi

Aspek demografi wilayah mencakup berbagai elemen penting yang menggambarkan karakteristik populasi di suatu daerah. Aspek demografi suatu wilayah mencakup jumlah penduduk, komposisi penduduk serta keberagaman sosial masyarakat. Kabupaten Luwu memiliki karakteristik demografi yang unik dan dinamis. Data kependudukan menunjukkan bahwa wilayah kabupaten Luwu dihuni oleh beragam kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda. Distribusi penduduk tidak merata, dengan konsentrasi penduduk yang lebih tinggi di daerah perkotaan dan pusat-pusat ekonomi seperti Belopa, Padang Sappa, Suli, Larompong, Sakti, Lamasi dan pusat kegiatan di kecamatan lainnya. Proporsi penduduk usia produktif cukup besar, yang menunjukkan potensi ekonomi yang tinggi. Faktor-faktor seperti migrasi, kelahiran,

dan kematian juga memainkan peran penting dalam membentuk dinamika kependudukan di Kabupaten Luwu. Dengan demikian, perencanaan yang baik harus memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk dalam wilayahnya. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebanyak 385.361 jiwa. Proyeksi Penduduk kabupaten Luwu dalam lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12.
Proyeksi Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2025	389300
2026	394240
2027	399130
2028	404030
2029	408860
2030	413550

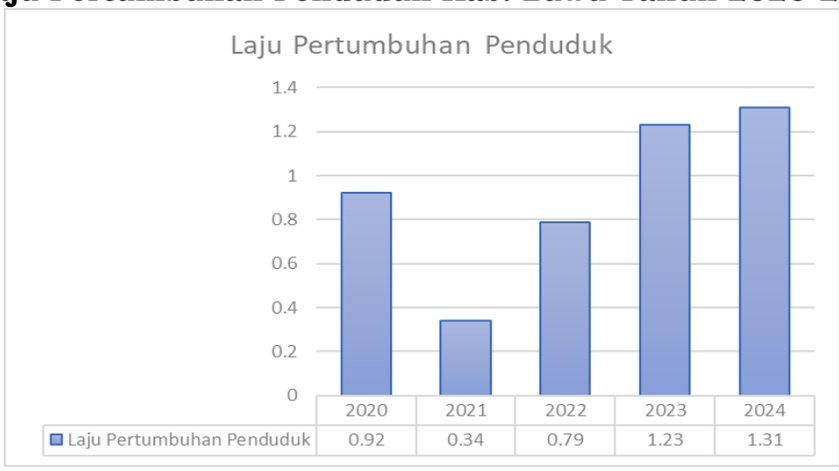
Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Luwu 2025-2045.

Proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sampai tahun 2030 menunjukan ada peningkatan jumlah penduduk sebesar 6,22 persen atau terjadi prediksi pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat sebesar 24.250 jiwa selama lima tahun ke depan. Dinamika pertumbuhan penduduk ini akan mempengaruhi kebutuhan inrfastruktur, peningkatan kebutuhan masyarakat akan sumberdaya alam, Perekonomian masyarakat serta kondisi social budaya. Sehingga, perhatian pemerintah terkait data demografi penduduk diharapkan terus dibenahi. Sinergitas antara organisasi pemerintah daerah menjadi kunci dalam validitas pencatatan domografi penduduk. Jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi diupayakan agar terkelola sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam hal pencatatan kondisi demografi agar diperoleh data yang lebih presisi guna tercapainya perencanaan yang lebih berkualitas.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perubahan persentase dalam jumlah penduduk suatu wilayah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data tabel laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu

Grafik 2.23.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025.

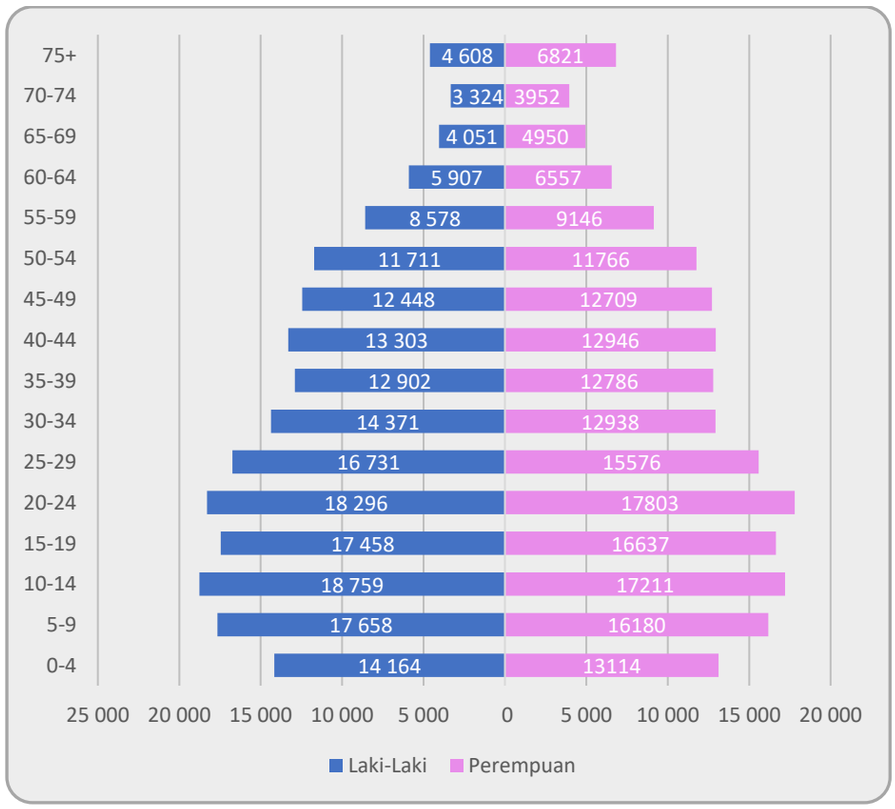
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu mengalami peningkatan berdasarkan data lima tahun terakhir. Grafik di atas menunjukan adanya tren peningkatan laju pertumbuhan Penduduk. Nilai laju pertumbuhan terendah dalam kurun lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yakni 0.34 sedangkan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2024 yakni di angka 1.31.

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan gambaran struktur populasi berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Komposisi usia, misalnya, menunjukkan proporsi penduduk di berbagai kelompok umur, seperti anak-anak, usia produktif, dan lansia. Ini memberikan informasi penting tentang potensi ekonomi, beban sosial, dan kebutuhan layanan publik. Rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, menunjukkan kesetaraan gender dan dinamika sosial. Tingkat pendidikan dan status pekerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan potensi ekonomi suatu wilayah. Memahami komposisi penduduk secara menyeluruh sangat penting

untuk perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.24.
Komposisi Penduduk Kab. Luwu Tahun 2024



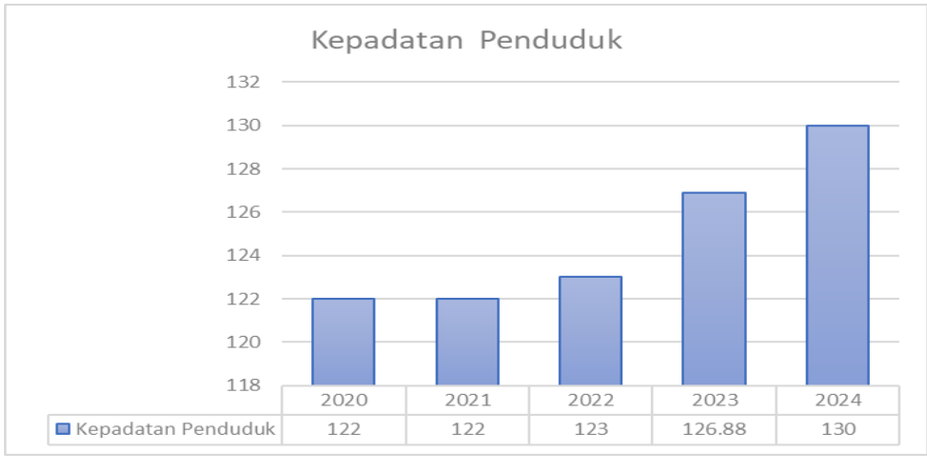
Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025.

Data tahun 2024 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia 20-24 tahun (36.099 jiwa), diikuti kelompok usia 10-14 tahun (35.970 jiwa), dan 15-19 tahun (34.095 jiwa). Konsentrasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) ini mencerminkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk usia non-produktif. Potensi ini dapat menjadi modal utama pembangunan Kabupaten Luwu yakni dengan cara mengelola bonus demografi dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut, biasanya diukur dalam satuan per kilometer persegi. Berikut adalah data grafik kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.25.
Kepadatan Penduduk Kab. Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu 2025.

Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terkahir. Berdasarkan data BPS kabupaten Luwu tahun 2025, kepadatan penduduk meningkat relatif pesat pada tahun 2024 yakni berada pada angka 130. Peningkatan Kepadatan penduduk secara lansung akan menyebapkan peningkatan kebutuhan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan publik mencanangkan beberapa program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima agar tercapai dearajat kesejahteraan yang lebih baik. Penyediaan akses terhadap pangan yang sehat dan terjangkau, akses layanan kesehatan prima, akses terhadap infrastruktur penunjang perekonomian merupakan agendan yang akan dilaksankan dalam kurun lima tahun kedepan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki pendapatan yang berkelanjutan, di Kabupaten Luwu gambaran

kesejahteraan ekonomi dicerminkan antara lain melalui kondisi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menggambarkan persentase perubahan dalam ukuran ekonomi suatu negara atau wilayah dari tahun ke tahun, adapun Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain. Adapun Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengn pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimana Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan dan menurunnya tingkat kemiskinan. Berikut adalah data perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu :

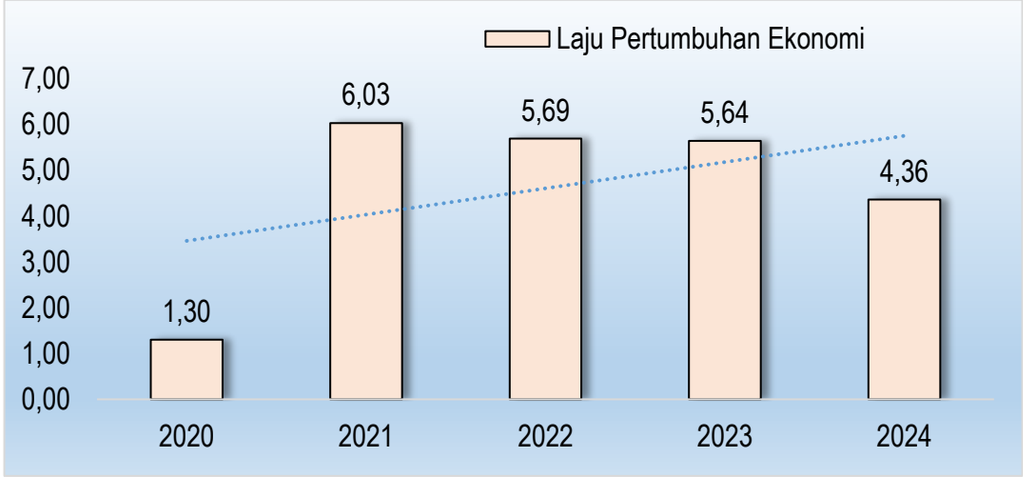
Tabel 2.13.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

NO	WILAYAH	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	NASIONAL	-2.07	3.70	5.31	5.05	5,03
2.	SULSEL	-0.71	4.64	5.10	4.51	5,02
3.	**LUWU**	**1.30**	**6.03**	**5.69**	**5.64**	**4,36**

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Grafik 2.26.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Tabel 2.14.

PDRB ADHK Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.762.221,67	5.014.205,84	5.265.649,50	5.386.399,90	5.480.000,12
B.Pertambangan dan Penggalian	231.823,86	240.566,13	250.950,10	275.432,20	290.000,27
C. Industri Pengolahan	426.677,56	459.377,52	480.108,50	501.005,20	577.000,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12.595,25	13.272,90	13.882,50	15.712,30	17.000,48
E. Pengadaan Air	1.678,06	1.696,04	1.856,40	1.917,20	1.000,92
F. Konstruksi	839.598,28	854.231,98	934.478,80	1.081.242,00	1.115.000,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.166.657,36	1.279.600,92	1.391.380,10	1.531.722,30	1.655.000,38
H. Transportasi dan Pergudangan	73.765,82	79.510,61	92.690,00	100.820,60	107.000,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.698,25	76.846,54	90.356,00	101.229,60	108.000,19
J. Informasi dan Komunikasi	349.736,74	377.130,94	398.979,70	433.679,40	467.000,47
K. Jasa Keuangan	144.483,83	157.130,94	158.321,10	153.556,40	159.000,81
L. Real Estate	605.591,68	642.735,77	673.486,80	711.015,20	753.000,90
M,N. Jasa Perusahaan	2.453,36	2.553,04	2.887,60	3.165,80	3.000,40
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	446.081,77	473.055,33	471.699,00	489.235,80	488.000,54
P. Jasa Pendidikan	380.694,20	399.928,80	416.222,80	450.795,10	479.000,30
Q. Jasa Kesehatan	313.272,29	346.238,87	367.715,20	393.955,20	426.000,46
R,S,T,U. Jasa Lainnya	28.881,34	31.270,49	34.006,70	37.256,30	43.091,09
PDRB ADHK	**9.855.911,31**	**10.449.750,24**	**11.044.670,90**	**11.668.140,40**	**12.176.488,90**

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2025

Dari masing-masing data tersebut di atas, nampak bahwa sektor ekonomi Kabupaten Luwu kurun waktu tahun 2020-2024 secara umum mengalami pertumbuhan, namun pada tahun 2024 telah terjadi perlambatan pada beberapa sektor seperti pengadaan air, dan pengelolaan limbah sehingga nilai capaian *laju pertumbuhan ekonomi* Kabupaten Luwu menurun menjadi sebesar 4,36 persen hal tersebut terlihat dari capaian pada tahun sebelumnya yakni sebesar 5,64 persen.

Kemudian berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kabupten Luwu mengalami kenaikan dari Rp.11,67 Triliun rupiah di tahun 2023

menjadi Rp. 12,17 Triliun pada tahun 2024. Adapun kenaikan nilai PDRB disebabkan oleh meningkatnya produksi di masing-masing lapangan usaha.

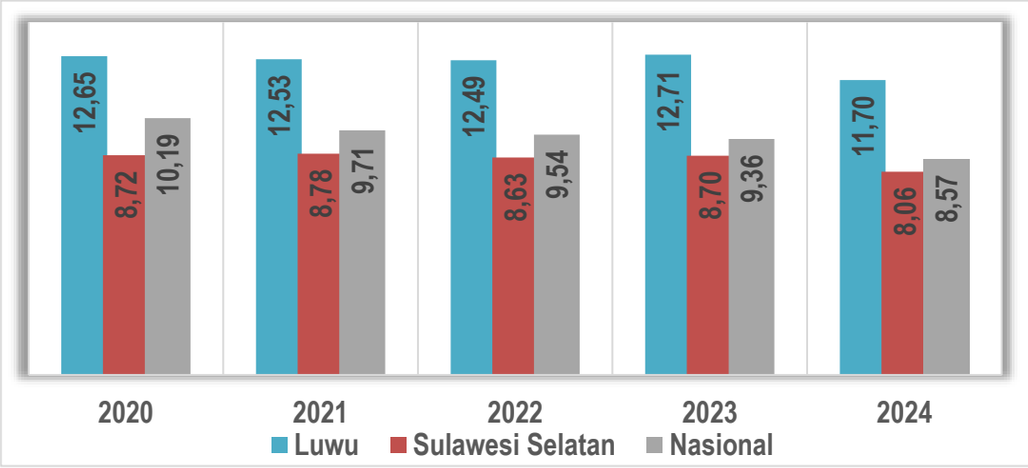
Selanjutnya untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,02 persen pada tahu 2024, adapun peningkatan tersebut masih relevan dengan laju pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Luwu, dimana pada tahun yang sama telah mengalami peningkatan sebesar 4,36 persen.

Kemudian berdasarkan harga konstan 2010, PDRB mengalami kenaikan dari Rp.11,67 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi Rp.12,17 triliun rupiah di tahun 2024. adapun kenaikan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi tersebut disebabkan oleh meningkatnya nilai produksi diseluruh lapangan usaha dan bukn dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga.

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk pada suatu wilayah. Berikut data perkembangan kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.27.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

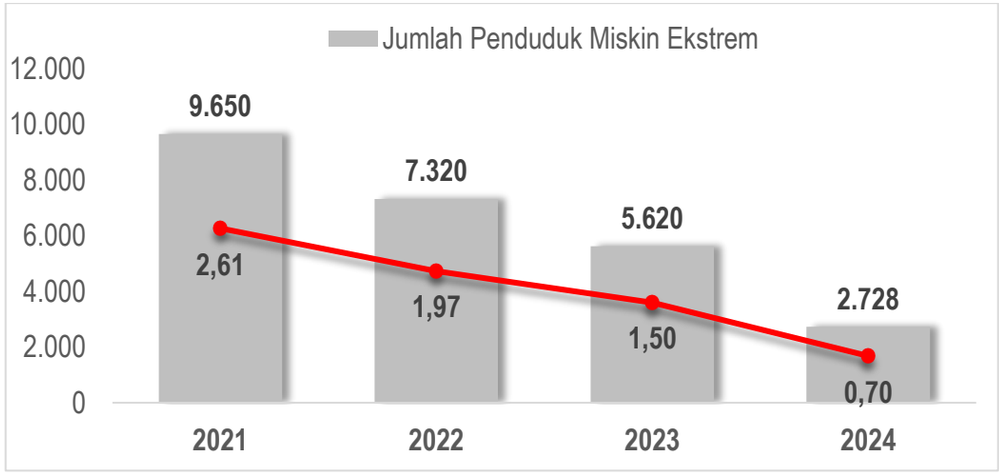
Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,01 persen atau menjadi sebesar 11,70 persen, dimana pada tahun sebelumnya sebesar 12,71 persen. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,24 persen, adapun capaian rata-rata Kabupaten Luwu tersebut berada di atas capaian Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 0,17 persen, dan dibawah capaian rata-rata Nasional yakni sebesar 0,41 persen.

c. Kemiskinan Ekstrem

Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 (satu) keluarga terdiri dari 4 (empat) orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori Miskin Ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan capaian penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Luwu periode 2021-2024 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021

jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Luwu sebanyak 9.650 Jiwa atau sebesar 2,61 persen, mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 2.728 jiwa atau sebesar 0,70 persen, capaian penurunan kemiskinan ekstrem tersebut pada periode yang sama mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,48 persen, untuk lebih jelasnya, berikut digambarkan perkembangan capaian dalam bentuk grafik periode tahun 2021-2024.

Grafik 2.28.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa) dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sul-Sel Tahun 2025.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, dimana nilai PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Luwu atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020-2024 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB perkapita tercatat sebesar 43,96 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 59,73 juta rupiah. Begitupun dengan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan juga terus meningkat. Pada tahun 2020 nilai PDRB perkapita

atas dasar harga konstan sebesar 27,03 juta rupiah dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2024 menjadi sebesar 31,60 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.

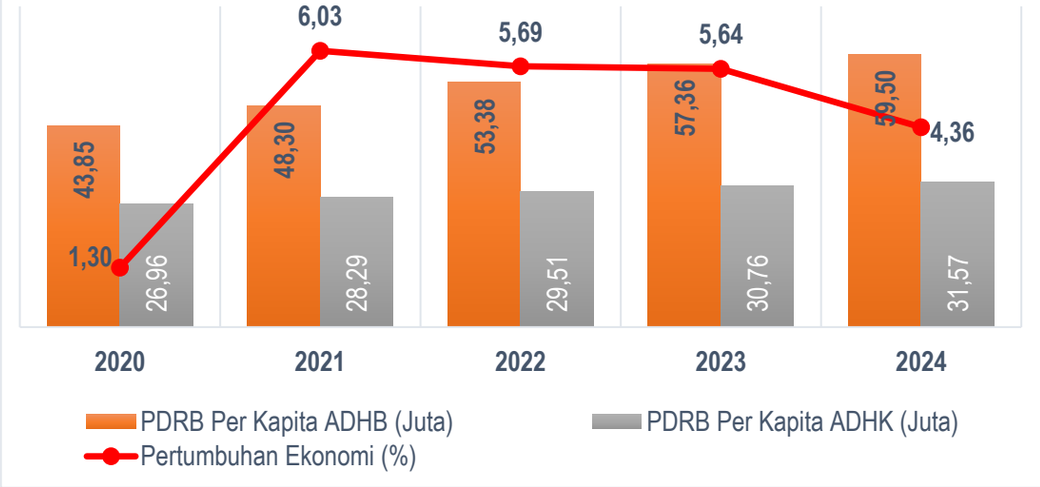
Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	9.855.911,31	10.449.750,24	11.044.670,90	11.668.140,40	12.176.000,49
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	16.031.067,61	17.839.990,46	19.980.972,20	21.755.643,50	22.952.200,00
Jumlah Penduduk (Jiwa)	365.608	367.454	369.820	380.679	385.361
PDRB ADHK Perkapita (juta rupiah)	27,03	28,44	29,86	30,76	31,60
PDRB ADHB Perkapita (juta rupiah)	43,96	48,55	54,03	57,36	59,73

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2025.

Di Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 2020-2024 nilai pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.43,96 juta, mengalami peningkatan sebesar 16,25 juta atau menjadi sebesar Rp.59,73 juta pada tahun 2024. Adapun peningkatan PDRB ADHB tidak terlepas dari kinerja perekonomian yang mampu tumbuh dengan baik sepanjang periode tersebut. Sementara itu, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama juga terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 pendapatan perkapita ADHK mencapai Rp.26,96 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp.4,61 juta atau menjadi sebesar Rp.31,57 juta pada tahun 2024. Dari perkembangan nilai PDRB perkapita ADHK selama periode 2020-2024 telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,37 persen.

Grafik 2.29.
Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Luwu,
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan Kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu, masih menjadi masalah aktual. Berikut Grafik yang menggambarkan perkembngan TPT di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir :

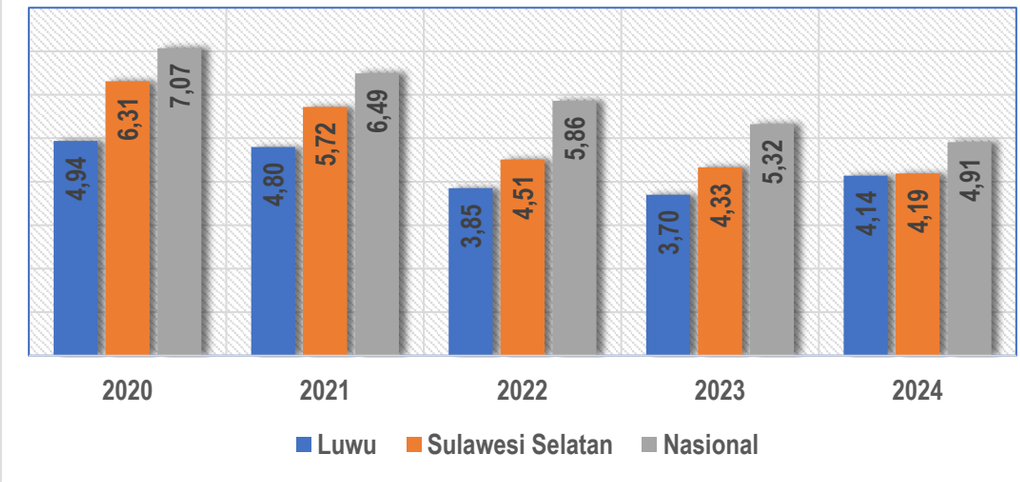
Grafik 2.30.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2025.

Berdasarkan data perkembangan TPT Kabupaten Luwu tersebut di atas, nampak bahwa angka TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 4,14 persen, capian tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,44, dimana pada tahun 2023 capaian TPT Kabupaten Luwu sebesar 3,70 persen. adapun kenaikan TPT di Kabupaten Luwu antara lain disebabkan adanya kejadian bencana alam berupa tanah longsor dan banjir yang melanda beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lahan pertanian, lahan perkebunan, dan perikanan.

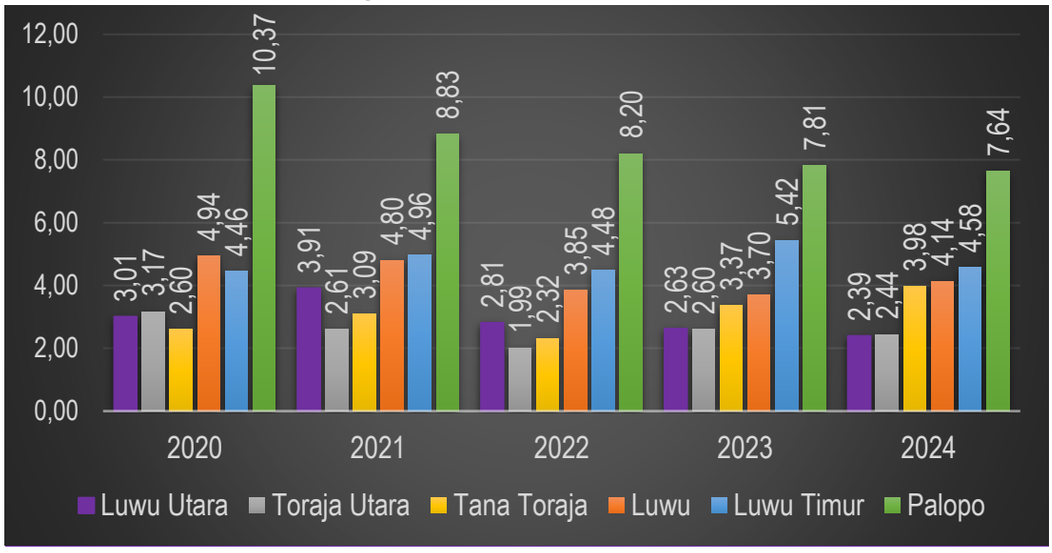
Grafik 2.31.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu 2025.

Dengan memperhatikan data perkembangan capaian persentase TPT masing-masing wilayah tersebut di atas, maka untuk Kabupaten Luwu, pada tahun 2020-2024 persentase penurunan TPT Kabupaten Luwu berada dibawah capaian persentase TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana capaian persentase TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 4,14 persen, sementara pada tingkat Provinsi Sulawesi selatan sebesar 4,19 persen dan Nasional sebesar 4,91 persen. Menurunnya tingkat Penganguran Terbuka tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Grafik 2.32.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2020-2024



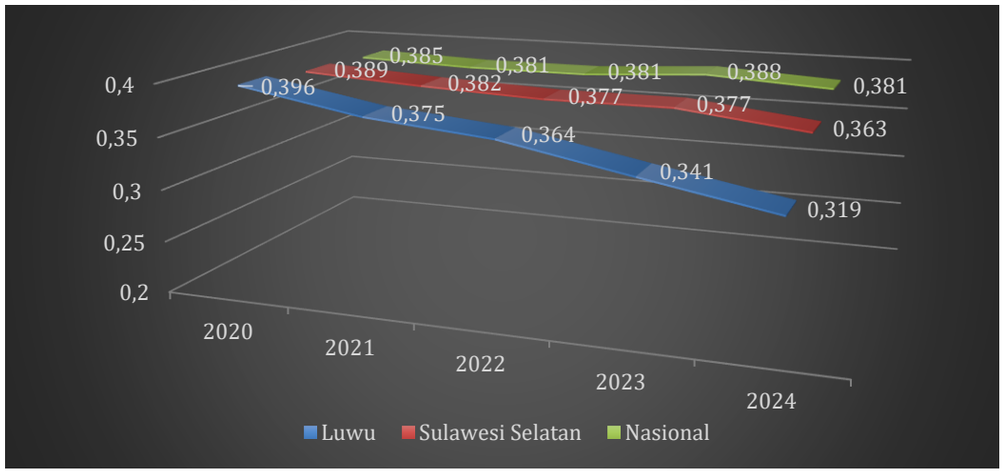
Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Dari grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa capaian persentase TPT Kabupaten Luwu berada pada urutan keempat terkecil dari 6 kabupaten/kota sekitar. Adapun capaian Kabupaten Luwu yakni sebsar 2,39 persen, capaian tersebut lebih tinggi dari Kabupaten Tana Toraja dengan capaian sebesar 3,98 persen, Toraja Utara sebesar 2,44 persen Luwu Utara sebesar 2,39 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masih rendahnya jumlah serapan angkatan kerja, dimana yang berstatus bekerja hanya sebesar 198.230 jiwa dan yang bekerja diantaranya sebanyak 190.018 jiwa.

f. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran suatu masyarakat. Nilai indeks gini berkisar antara **0** (atau nol persen) dan **1** (atau 100 persen). Nilai indeks gini yang semakin mendekati **1** mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Berikut perkembangan indeks gini di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

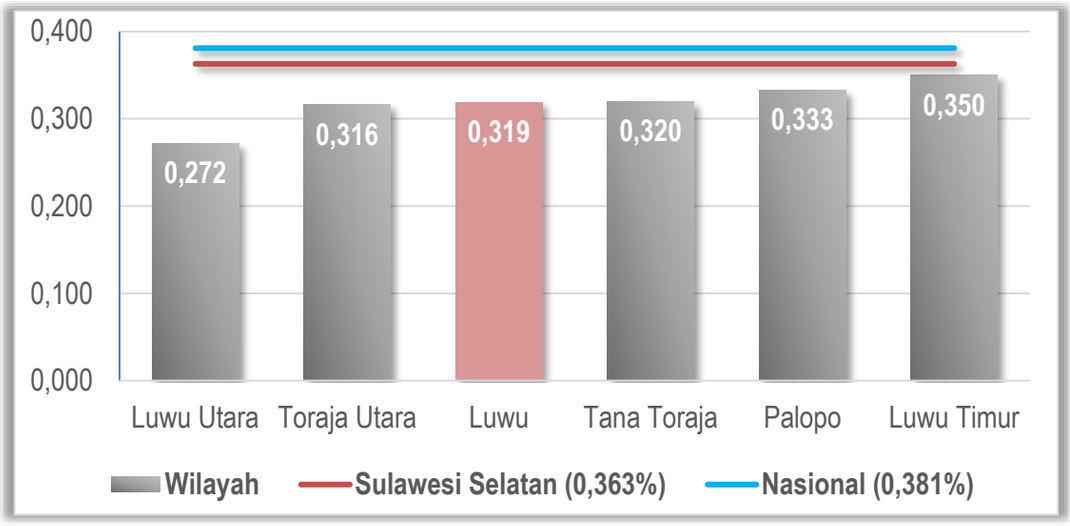
Grafik 2.33.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Berdasarkan grafik diatas, indeks gini di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,396 dan terendah pada tahun 2024 yakni sebesar 0,319. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dengan realisasi pada tahun 2024 masing-masing sebesar 0,363 dan 0,381. Hal ini menandakan bahwa semakin meratanya pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.34.
Indeks Gini Kabupaten Luwu dan Wilayah Setara Tahun 2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan wilayah setara pada kawasan Palopo dan sekitarnya, nampak bahwa indeks gini Kabupaten Luwu pada

tahun 2024 berada di posisi ketiga tertinggi dengan nilai sebesar 0,319. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakat Kabupaten Luwu semakin merata.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahkan pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai poin utama dari pembangunan daerah. IPM didefinisikan sebagai kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Nasional Bruto Perkapita. IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian yang direpresentasikan oleh 3 komponen meliputi : Indeks Kesehatan panjang umur dalam menjalani hidup sehat, diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Indeks (RLS), dan Indeks paritas daya beli/Purchasing Power Party (PPP).

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, adapun peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan capaian pada masing-masing komponen perhitungan seperti AHH, HLS, dan Pengeluaran Perkapita yang merupakan pendorong utama capaian IPM.

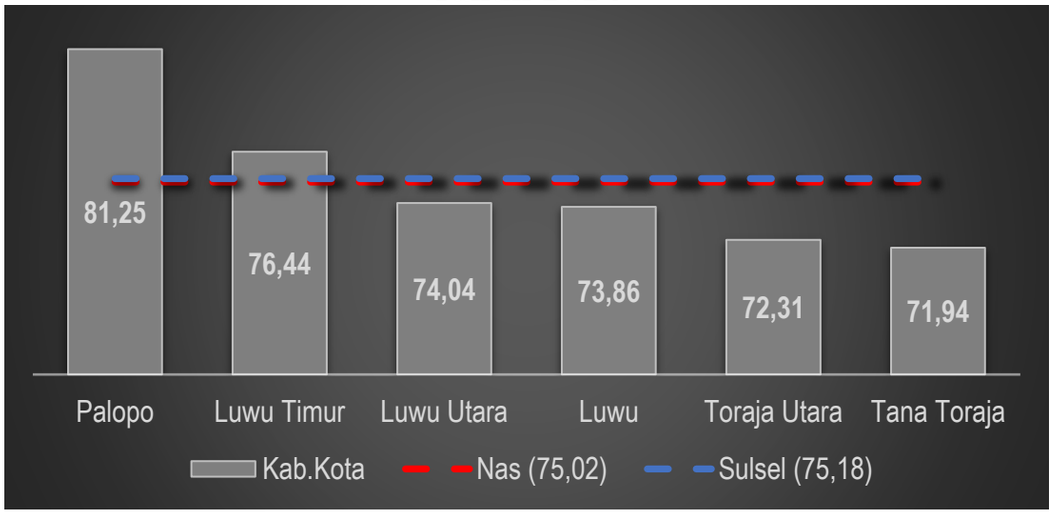
Tabel 2.16.

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

KOMPONEN IPM	SATUAN	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,66	72,76	73,06	73,30	73,52
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,33	13,39	13,40	13,41	13,43
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,24	8,35	8,48	8,73	8,81
Indeks Paritas Daya Beli (PPP)	Rupiah	-	Rp10.116,00	Rp10.308,00	Rp10.691,00	Rp11.121,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	71,58	71,92	72,42	73,23	73,86
Ranking Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan	Angka	11	13	14	14	15

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.35.
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan
Tahun 2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Pada tahun 2024 capaian nilai IPM Kabupaten Luwu telah mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin atau menjadi sebesar 73,86 persen, dimana pada tahun 2023 sebesar 73,23 persen, adapun capaian tersebut menempatkan Kabupaten Luwu berada pada peringkat ke lima belas tertinggi se Sulawesi Selatan dan tergolong sebagai IPM tinggi menurut angka UHH Hasil LF SP2020.

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan pribadi atau keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif, di Kabupaten Luwu gambaran kesehatan untuk semua dicerminkan antaran lain melalui Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting, dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang disajikan di bawah ini :

Tabel 2.17.
Perkembangan Capaian Indiator Bidang Kesehatan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

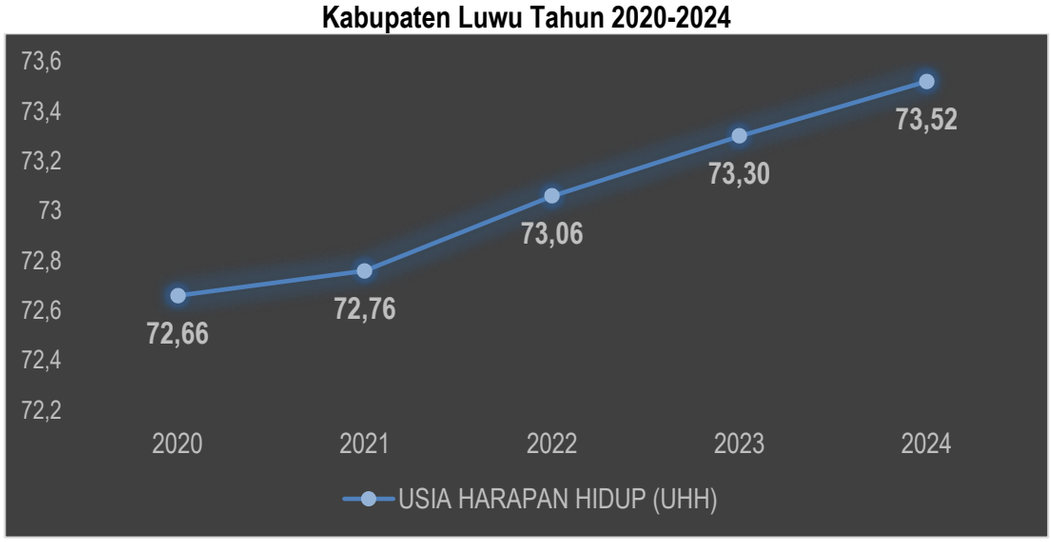
Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,66	72,76	73,06	73,30	73,52
Usia Harapan Hidup Laki-Laki	Tahun	70,70	70,79	71,04	71,20	71,34

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup Perempuan	Tahun	74,23	74,82	75,17	75,50	75,80
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	160,46	233,75	181,70	129,39	166,29
Prevalensi Stunting	Persen	-	22,80	26,70	32,10	23,60
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persen	39,02	43,98	54,91	45,18	54,00
Anga Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate)	Persen	90,91	87,00	87,69	85,28	89,00
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	Persen	89,27	84,26	88,71	85,38	88,42

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai perkiraan jumlah tahun atau seberapa lama seseorang diharapkan dapat hidup. Semakin tinggi rata-rata usia harapan hidup, maka perkiraan lama hidup seseorang akan semakin panjang. Berikut perkembangan usia haraoan hidup Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 dan data perbandingan wilayah kabupaten/kota sekitar.

Grafik 2.36.
Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

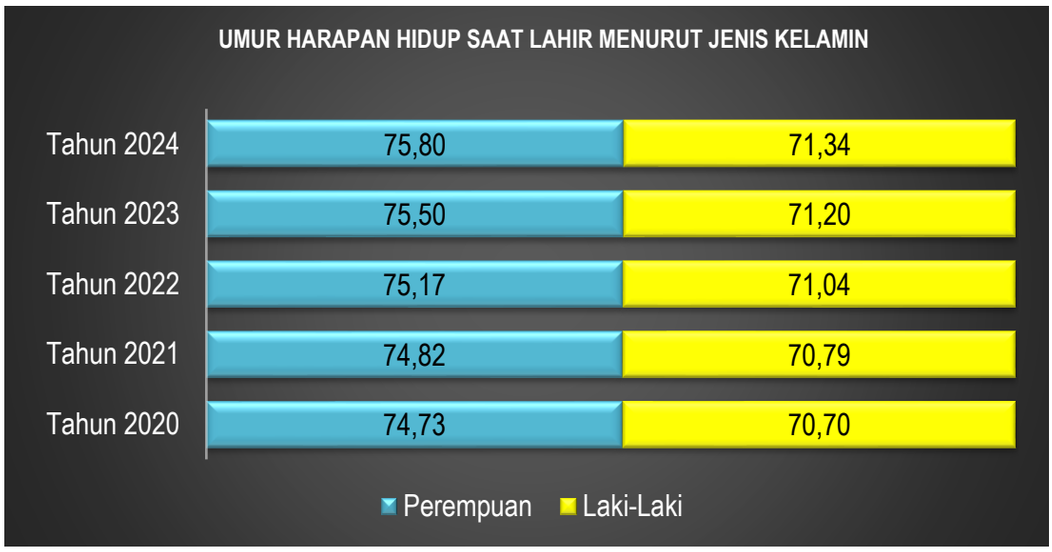


Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Pada tahun 2024, nilai UHH Kabupaten Luwu berdasarkan hasil LF2020 telah mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin atau mengalami peningkatan menjadi sebesar 73,52 Tahun, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 73,30 Tahun. Meningkatnya capaian UHH Kabupaten Luwu antara lain dipengaruhi oleh persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan selama sebulan terakhir, dimana capaiannya cukup membaik, sebagaimana dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan sebesar 26,35 persen, angka tersebut kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 24,04 persen pada tahun 2024 dan adapun faktor lain dalam meningkatkan dan menjaga kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Luwu yakni antara lain melalui peningkatan jumlah keluarga yang memiliki akses sarana air bersih dan sanitasi layak, untuk tahun 2024, persentase penduduk yang berakses air minum layak sebesar 80,41 persen atau sebanyak 308.112 dari total jumlah penduduk sebanyak 383.198 jiwa, sedangkan yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 75,98 persen atau sebanyak 60.402 Rumah Tangga.

Kemudian untuk Usia Harapan Hidup perjenis kelamin di Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tahun 2020-2024 masih di dominasi oleh jenis kelamin perempuan, dimana pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 74,73 tahun dan jenis kelamin laki-laki sebesar 70,70 tahun, kemudian pada tahun 2024 usia harapan hidup perempuan kembali menempati angka capaian yang lebih tinggi dari jens kelamin Laki-laki yang menandakan bahwa usia harapan hidup jenis kelamin perempuan hidup lebih lama dibanding Laki-laki, dimana pada tahun 2024 UHH perempuan mencapai 75,80 tahun, sedangkan usia harapan hidup Laki-laki sebesar 71,34 tahun. Oleh karena itu kesenjangan harapan hidup antara perempuan dan laki-laki perlu menjadi perhatian agar kedepan arah kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sehingga dapat berdampak pada peningkatan Usia Harapan Hidup dan menekan kesenjangan usia harapan hidup antara Laki-Laki dan perempuan.

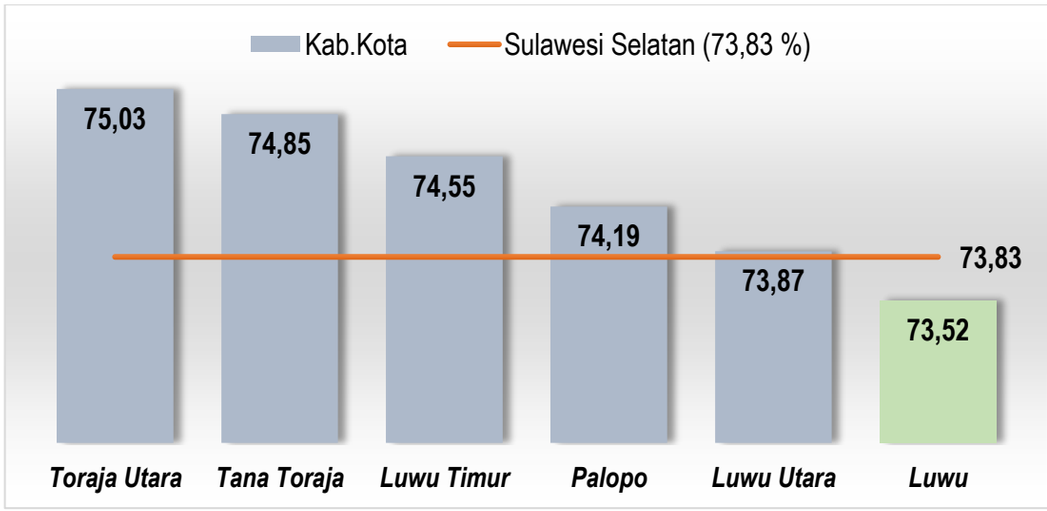
Grafik 2.37.
Perkembangan Usia Harapan Hidup (Tahun) Per Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Selanjutnya untuk perbandingan antar Kabupaten Kota sekitar, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 capaian Kabupaten Luwu masih berada dibawah Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan kota palopo dengan nilai selisih kurang lebih sebesar 1 (Satu) tahun untuk provinsi dan sekitar kurang lebih 2 (Dua) tahun untuk Kota Palopo.

Grafik 2.38.
Perbandingan Usia Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2024

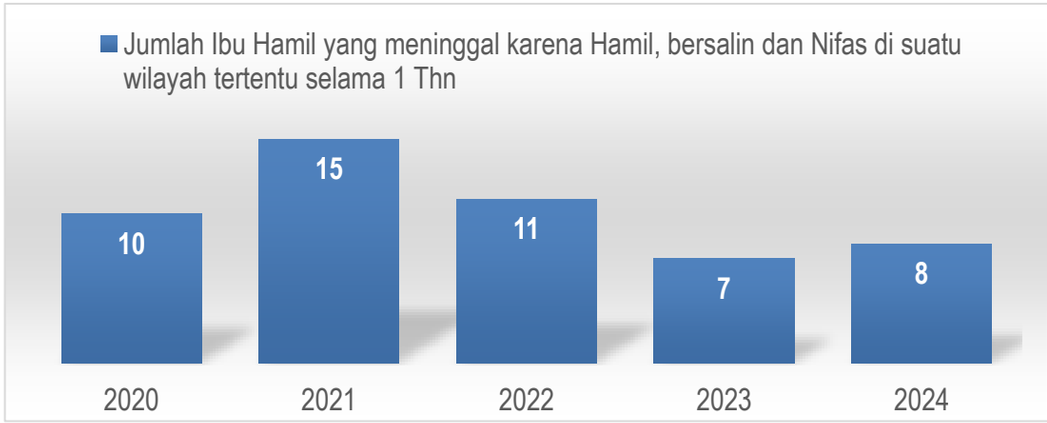


Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

b. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu atau (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, angka kematian ibu melahirkan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah kasus mencapai 15 kasus kematian dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.417 jiwa, melihat masih tingginya jumlah kasus kematian pada ibu yang menandakan bahwa telah terjadi masalah dalam sistem kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini Dinas Kesehatan perlu berupaya lebih maksimal dalam pencegahan angka kematian ibu. Di bawah ini disajikan perkembangan jumlah kasus Kematian Ibu yang terjadi saat kehmilan, bersalin dan nifas serta capaian Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dalam bentuk grafik.

Grafik 2.39.
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Hamil
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



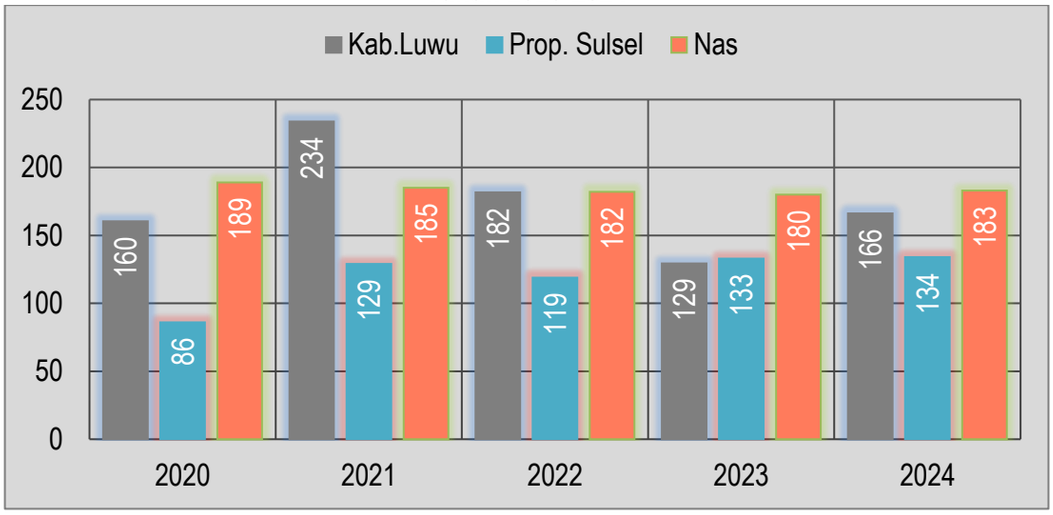
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.40.
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.41.
Perbandingan Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan grafik perkembangan dan perbandingan capaian tersebut di atas, nampak bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 234 per 100.000 kelahiran hidup, namun jika dilihat dari jumlah kunjungan ibu hamil K4 pada tahun yang sama, nampak bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 tergolong tinggi yakni dengan nilai sebesar 84,11 persen dengan jumlah ibu hamil yang memperoleh

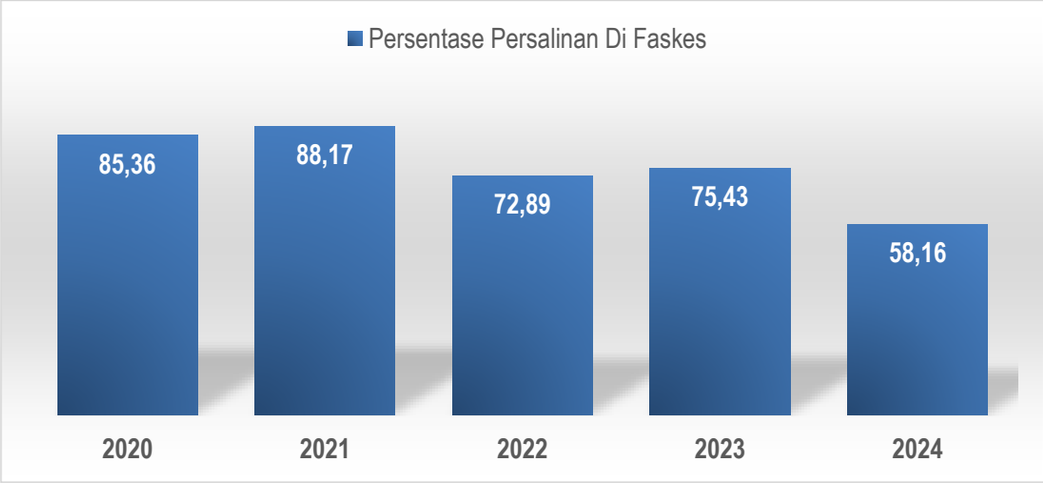
layanan antenatal K4 sebanyak 6.315 ibu hamil, kemudian Angka Kematian Ibu tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 166 per 100.000 kelahiran hidup atau dengan jumlah kasus kematian sebanyak 8 kasus pada tahun 2024 dengan cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 sebesar 53,56 persen dari total sasaran ibu hamil sebanyak 8.645 orang. Penurunan angka kematian ibu dalam kurun waktu tahun 2020-2024 tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kualitas layanan kesehatan pada ibu hamil dan melahirkan. Kemudian Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Propinsi dan Nasional pada tahun 2024, nampak bahwa capaian Kabupaten Luwu masih berada di bawah capain tingkat Nasional, dan di atas capaian Propinsi Sulawesi Selatan, dimana capaian Nasional sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dan propinsi Sulawesi Selatan sebesar 134 per 100.000 kelahiran hidup, masih tingginya AKI Kabupaten Luwu dengan nilai sebesar 166 per 100.000 kelahiran hidup disebabkan antara lain karena faktor geografis, dimana masih terdapat beberapa wilayah tergolong daerah terpencil yang menyebabkan kurangnya akses layanan seperti kegawatdaruratan di tingkat dasar (pustu maupun poskesdes) serta terbatasnya sumberdaya tenaga kesehatan terkait kegawat daruratan.

c. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan adalah merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup umur kehamilannya dan dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan ibu sendiri, adapun tempat yang paling ideal untuk persalinan adalah fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga yang siap menolong sewaktu-waktu terjadi komplikasi persalinan, sebagaimana diketahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan segala sarana dan prasarana alat atau tempat yang dapat menunjang kesehatan atau dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Di Kabupaten Luwu berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu

pelayanan serta pemerataan pelayanan kesehatan kehamilan dan persalinan yang ada di masyarakat dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu. Berdasarkan data dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, pada tahun 2020 jumlah ibu melahirkan di fasilitas kesehatan sebanyak 6.117 orang dengan jumlah sasaran ibu bersalin sebanyak 7.166 orang, mengalami peningkatan pada thun 2021 menjadi sebanyak 6.318 orang dengan sasaran sebanyak 7.166 orang, kemudian pada tahun 2022 jumlah ibu melahirkan mengalami penurunan menjasi sebanyak 6.015 orang dengan sasaran sebanyak 8.252 orang, menurun lagi menjadi sebesar 5.376 orang dengan sasaran sebanyak 7.127 orang, selanjutnya pada tahun 2024, jumlah ibu melahirkan kembali mengalami penurunan sebesar 577 orang atau menjadi sebanyak 4.799 dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 8.252 orang. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data persentse persalinan yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 :

Grafik 2.42.
Perkembangan Persentase Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



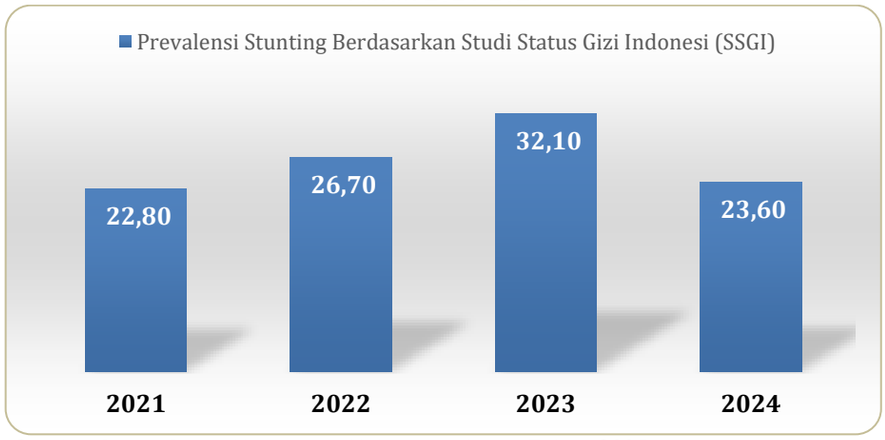
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

d. Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Upaya dalam menangani masalah *stunting* pada balita secara nasional telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 2, yaitu

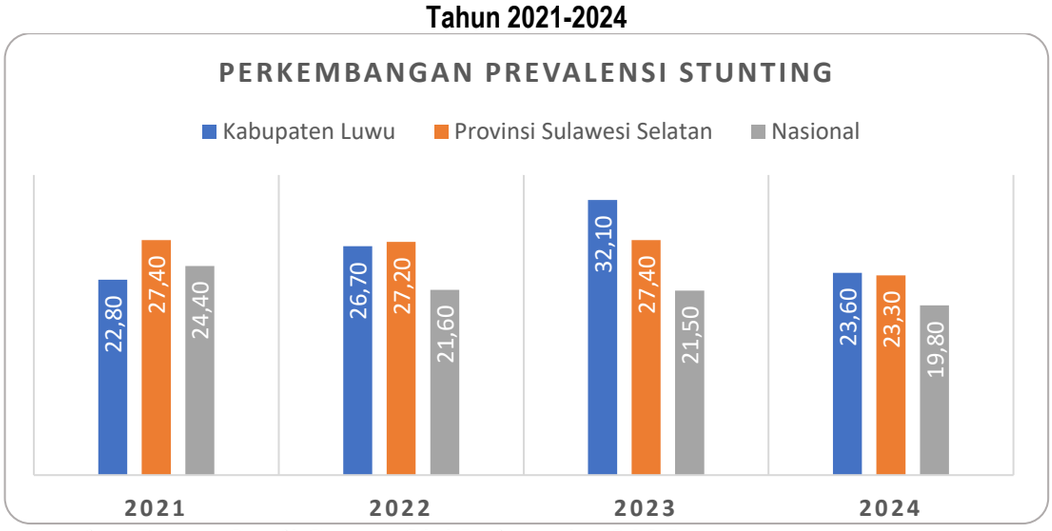
menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Keseriusan Pemerintah dalam percepatan penanganan masalah stunting dituangkan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Salah satu tujuan dalam Stranas tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah lima tahun, Berikut ini disajikan data perbandingan capaian prevalensi stunting Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Grafik 2.43.
Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Grafik 2.44.
Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Studi Status Gizi Indonesia, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2024 berdasarkan

Studi Status Gizi Indonesia telah mengalami peningkatan yaitu dari 22,80 persen pada tahun 2021 menjadi 23,60 persen di tahun 2024. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, nampak bahwa Capaian prevalensi stunting Kabupaten Luwu masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tingkat Nasional dimana realisasi pada tahun 2024 sebesar 23,30 persen dan untuk tingkat Nasional sebesar 19,80 persen, adapun beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting di Kabupaten Luwu diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yakni cakupan Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang belum maksimal, cakupan layanan penduduk berakses air minum bersih serta adanya perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2024 cakupan Pemberian makanan tambahan gizi masih dengan nilai sebesar 59,60 persen, kemudian cakupan layanan penduduk yang berakses air minum bersih dengan niai sebesar 80,41 persen, selanjutnya untuk wasting (gizi buruk dan gizi kurang) yang berpotensi melahirkan stunting baru juga masih tergolong cukup tinggi dengan nilai sebesar 2,3 persen. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Luwu kedepan akan lebih meningkatkan koordinasi dalam hal perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sehingga diharapkan dapat berdampak pada sasaran intervensi bisa tepat sasaran, serta meningkatkan penyebaran tenaga gizi agar sebarannya merata pada masing-masing wilayah.

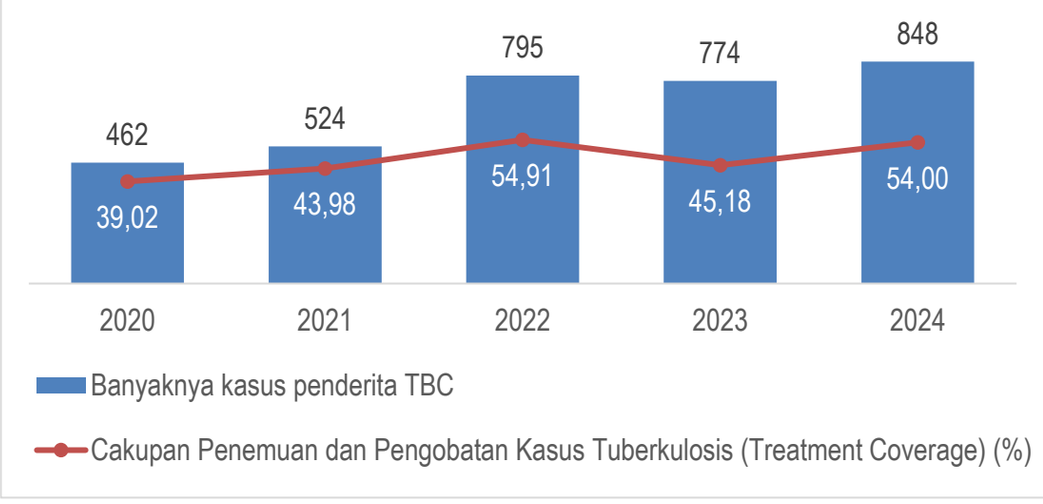
e. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang memengaruhi sistem pernapasan, terutama paru-paru dan disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* atau bakteri TBC. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang penyebarannya melalui udara. Penyakit TBC masih merupakan masalah Kesehatan di Indonesia yang hingga sekarang belum terselesaikan. Oleh karena itu, berbagai terobosan telah dilakukan baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dalam upaya percepatan menuju eliminasi Tuberkulosis, salah satunya adalah penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis secara aktif, masif dan intensif.

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di antara perkiraan kasus tuberkulosis. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Berikut data perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.45.
Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu tahun 2025.

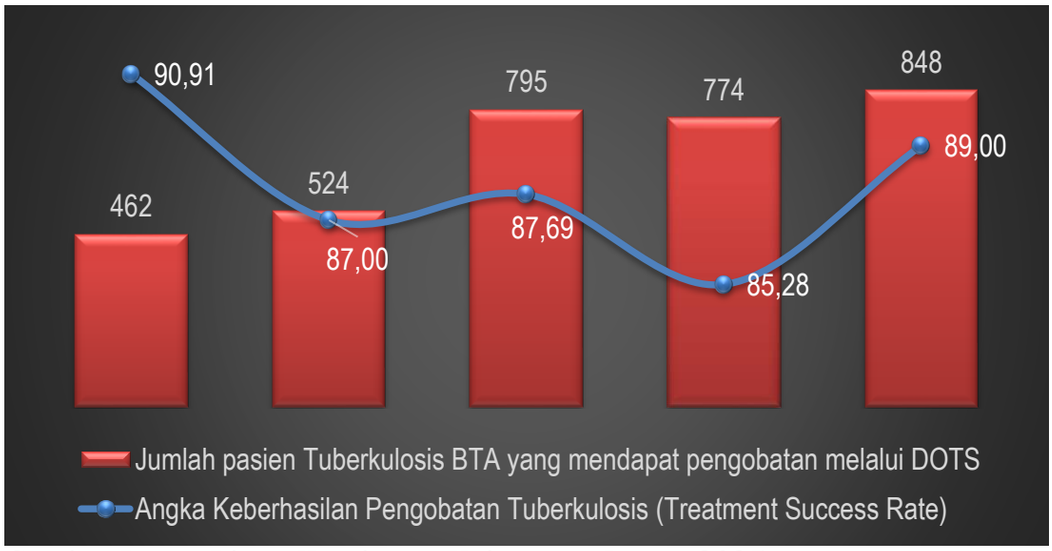
Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) mengalami fluktuasi. cakupan penemuan kasus tuberkulosis tertinggi berada pada tahun 2022 yakni sebesar 54,91 persen, capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 10,93 persen dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 43,98 persen atau meningkat dengan jumlah kasus sebanyak 795 kasus dari jumlah penduduk sebanyak 369.820 jiwa, kemudian pada tahun 2024 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB sebesar 54 persen

dengan jumlah kasus pasien penderita TB sebanyak 848 kasus dengan jumlah penduduk sebanyak 380.679 jiwa.

f. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%. Berikut data perkembangan *treatment success rate* tuberculosis di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 - 2024.

Grafik 2.46.
Perkembangan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, 2025.

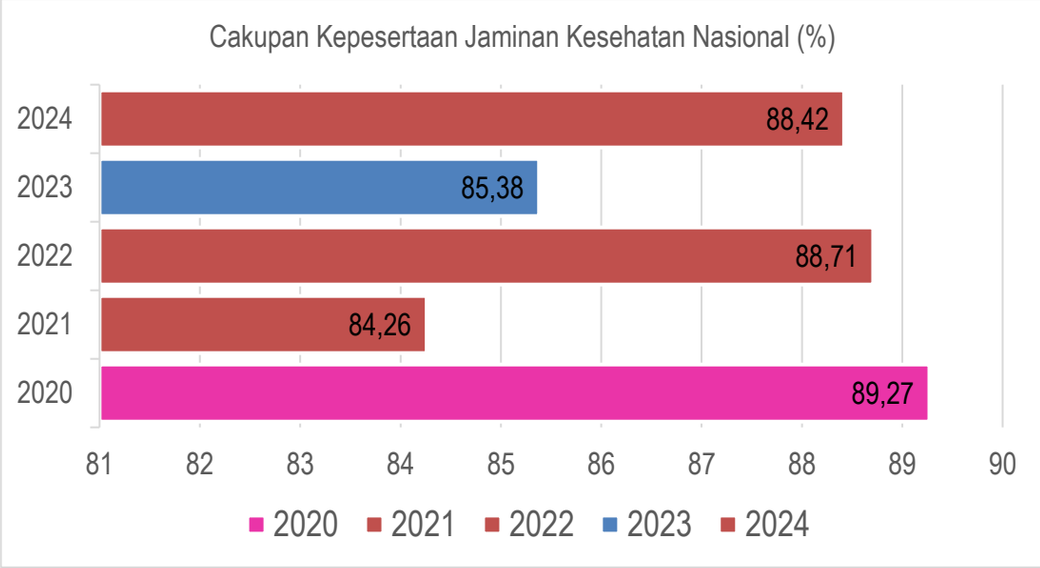
Berdasarkan grafik diatas, angka keberhasilan pengobatan tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 capaian Kabupaten Luwu sebesar 90,91 persen mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 yakni sebesar 85,28 persen, kemudian pada tahun 2024 angka keberhasilan pengobatan mengalami peningkatan sebesar 3,72 persen atau menjadi sebesar 89,00 persen, dari capaian tersebut nampak bahwa capaian keberhasiln Kabupten Luwu masih jauh dari target

minimal keberhasilan pengobatan untuk semua kasus tuberkulosis, dimana angka keberhasilan capaian yakni sebesar 90 persen.

g. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis maupun non medis, yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative dan seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran peserta. Berikut data perkembangan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.47.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan grafik diatas, cakupan kepesertaan JKN selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi sebesar 89,72 persen pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 84,26 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya

kepesertaan JKN adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami dan tidak menyadari pentingnya JKN.

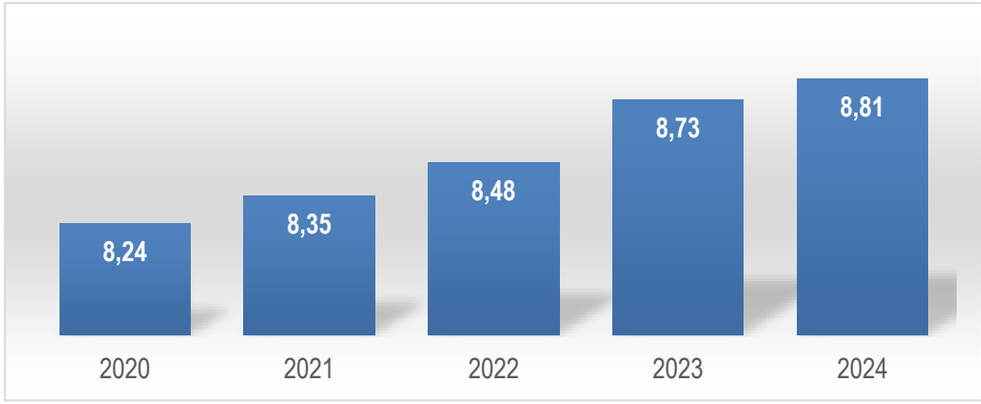
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata didefinisikan sebagai setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis untuk mewujudkan kehidupan masyaralat dan bangsa yang bermartabat., di Kabupaten Luwu gambaran pendidikan berkualitas yang merata dicerminkan antara lain melalui Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembngunan Literasi Masyrakat, Indeks Literasi Digital sebagai berikut :

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun ke atas

Angka RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, meningkatkan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di Kabupaten Luwu capaian angka RLS penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 8,73 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,8 poin atau menjadi sebesar 8,81 tahun pada tahun 2024, hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaen Luwu adalah setara kelas satu SMP/Sederajat. Dari capaian RLS ini masih menunjukkan bahwa secara umum, sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu belum sepenuhnya tuntas pendidikan dasar sembilan tahun, oleh karena itu kedepan Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus berupaya meningkatkan capaian RLS karena semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya. Di bawah ini disajikan perkembangan RLS Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 :

Grafik 2.48.
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk lebih jelanya, di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik terkait capaian angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu selama periode tahun 2020-2024.

Grafik 2.49.
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



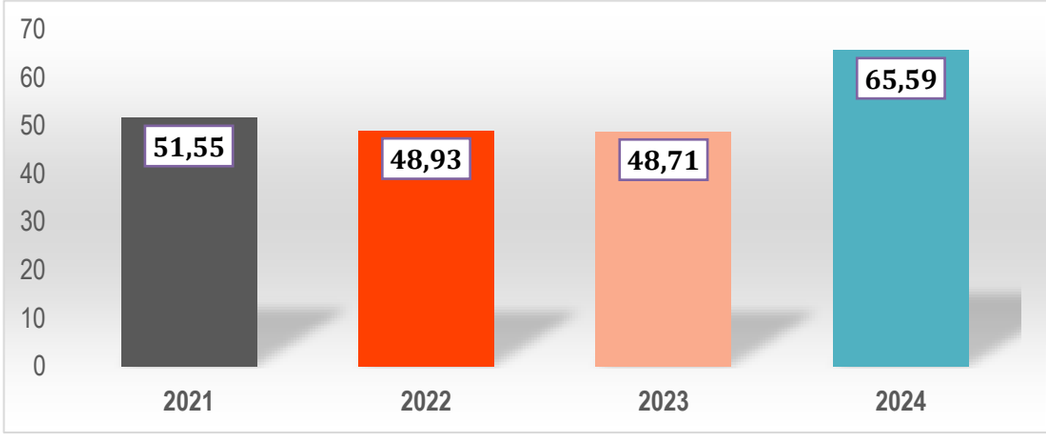
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Dari perkembngan grafik tersebut di atas, diketahui bhwa capaian Kbupaten Luwu terus mengalami peningkatan, Dimana. Pada tahun 2020 sebesar 13,33 tahun, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 13,43 tahun. Hal ini menandakan bahwa saat ini infrastruktur pendidikan di Kabupaten Luwu semakin memadai sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat setiap tahunnya.

c. Angka Literasi

Literasi menurut *International Literacy Association* (ILA) adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan symbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Definisi ini menegaskan bahwa konsep literasi perlu mengakomodasi dua komponen penting, yaitu *teks dan kecakapan berpikir*. Adapun Angka Literasi yakni ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat melek huruf dalam suatu wilayah atau negara. Angka ini mengindikasikan persentase penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan baik dalam bahasa tertentu. Pada tahun 2021, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu capaian nilai Angka Literasi Kabupaten Luwu sebesar 51,55 persen, hal tersebut mengindikasikan bahwa ada tingkat melek huruf di Kabupaten Luwu, dimana Nilai Angka Literasi dipengaruhi oleh faktor banyaknya jumlah penduduk dalam wilayah atau negara tersebut memiliki kemampuan membaca dan menulis. Peningkatan melek huruf dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan individu, akses terhadap informasi, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Penting diketahui bahwa Angka Literasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pendidikan, akses terhadap pendidikan, dan kualitas pendidikan. Di bawah ini disajikan data perkembangan angka literasi Kabupaten Luwu tahun 2021-2024.

Grafik 2.50.
Perkembangan Angka Literasi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, 2025.

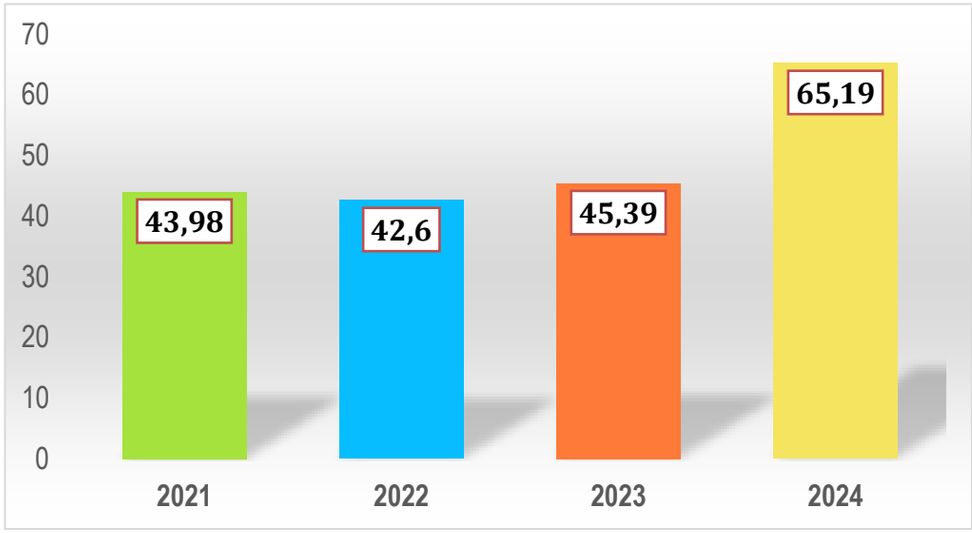
Berdasarkan grafik di atas nampak bahwa kemampuan literasi Kabupaten Luwu dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari capaian pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 65,59 persen, peningkatan tersebut disebabkan antara lain makin meningkatnya kualitas tenaga pendidik, dan banyaknya anak-anak yang mahir dalam memahami teks bacaan.

d. Angka Numerasi

Numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mengasah dan menguatkan pengetahuan serta keterampilan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan serta dapat memprediksi dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis. Perlu diketahui bahwa numerasi tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Namun, perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki numerasi. Numerasi mencakup mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi riil sehari-hari, yang seringkali permasalahannya tidak terstruktur, memiliki banyak cara

penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor non matematis. Adapun angka numerasi yakni ukuran yang mengindikasikan persentase penduduk yang memiliki kemampuan matematika atau numerasi yang baik, seperti pemahaman terhadap konsep-konsep matematika dasar. Pada tahun 2021, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, nilai Angka Numerasi Kabupaten Luwu sebesar 43,98 persen, capaian terssbut mengindikasikan penduduk Kabupaten Luwu memiliki kemampuan matematika yang baik, sebgimana diketahui bahwa kemampuan matematika yang baik dapat memiliki dampak positif pada banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Penting untuk diketahui bahwa Angka Numerasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem pendidikan, akses terhadap pendidikan matematika, dan kualitas pendidikan. Berikut perkembangan capaian angka numerasi Kabupaten Luwu periode tahun 2021-2024.

Grafik 2.51.
Perkembangan Angka Numerasi Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan data grafik tersebut di atas, nampak bahwa kemampuan numerasi pada Kabupaten Luwu periode tahun 2021-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 65,19 persen, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, capain Kabupaten Luwu yakni sebesar 45,39 persen atau telah mengalami peningkatan sebanyak 19,8 persen.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang Pendidikan.

e. Angka Partisipsi Sekolah

Angka Partisipsi Sekolah atau biasa disebut APS adalah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD), 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 2.18.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	%	92,17	93,66	90,12	40,98	54,09
SD/MI	%	93,94	94,14	94,35	98,48	79,48
SMP/MTs	%	94,28	96,08	95,06	79,76	75,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 capaian APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 92,17 persen menurun menjadi 54,09 persen pada tahun 2024. Kemudian untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 93,94 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 79,48 persen. selanjutnya untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 94,28 persen pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 75,70 persen pada tahun 2024. Perkembangan persentase APS di Kabupaten Luwu pada kurun waktu tahun 2020-2024 menandakan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 54 persen anak usia 4-6 tahun sedang mengikuti proses pembelajaran, adapun capaian angka tersebut merupakan angka capaian terendah jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya pada tahun yang sama.

Selanjutnya jika dilihat dari angka kelulusan, nampak bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami

fluktuasi. Tahun 2020 angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,84 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 99,33 persen pada tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 96,78 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 97,81 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.19.

Angka Kelulusan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	%	93,84	95,58	96,58	93,73	99,33
SMP/MTs	%	96,78	97,46	97,04	80,98	97,81

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Kemudian untuk Angka Melanjutkan (AM), sebagaimana diketahui bahwa angka ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dan capaian tertinggi angka melanjutkan terjadi pada tahun 2020 yaitu dengan nilai capaian sebesar dari 102,40 persen dan terendah terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 69,85 persen. Berikut data perkembangan capaian Angka Melanjutkan Kabupaten Luwu periode tahun 2020-2024.

Tabel 2.20.

Perkembangan Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI ke SMP/MTs	%	102,40	101,15	100,96	69,85	99,33

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Selanjutnya mengenai pencapaian masing-masing jenjang pendidikan dalam rangka percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Luwu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu, Anak Tidak Sekolah atau disebut ATS adalah merupakan Anak usia sekolah yang tidak pernah/belum sekolah,

putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, dan lulus tidak melanjutkan atau berpartisipasi dalam pendidikan melalui lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Pada tahun 2024 jumlah anak usia 7 sampai 12 tahun yang mengenyam pendidikan sesuai usia jenjang pendidikan sebanyak 36.050 orang dengan jumlah anak tidak tamat SD/Sederajat sebesar 0,13 persen atau sebanyak 46 0rang. Sementara jumlah anak usia 13 sampai 15 tahun yang tidak tamat SMP/Sederajat sebesar 0,30 persen dari jumlah total anak usia 13-15 tahun sebanyak 13.829 orang pada tahun yang sama. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data perkembangan jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024:

Tabel 2.21.

Perkembangan Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS)

Kabupaten Luwu Tahun 2021-2024

Tahun	Satuan	Usia 7-12 Tahun		Usia 13-15 Tahun	
		Jumlah Anak	Tidak Tamat SD/Sederajat	Jumlah Anak	Tidak Tamat SMP/Sederajat
2021	Orang	36.936	48	15.222	111
2022	Orang	37.305	55	13.832	35
2023	Orang	36.756	59	13.371	76
2024	Orang	36.050	46	13.829	42

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

f. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar atau APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk yang mengenyam pendidikan. APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A mengalami penurunan dari 93,94 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 79,47 persen pada tahun 2024. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B terjadi penurunan dari 98,68 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 75,70 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.22.

Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2021	2023	2024
SD/MI/ Paket A	%	93,94	94,14	94,14	98,48	79,47
SMP/MTs/ Paket B	%	98,68	96,08	96,08	79,76	75,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

.

g. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 capaian nilai APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,94 persen tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 79,57 persen di tahun 2024. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 98,68 persen pada tahun 2020 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 76,53 persen.

Tabel 2.23.

Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/ Paket A	%	93,94	94,14	93,63	98,48	79,57
SMP/MTs/ Paket B	%	98,68	96,56	94,49	79,76	76,53

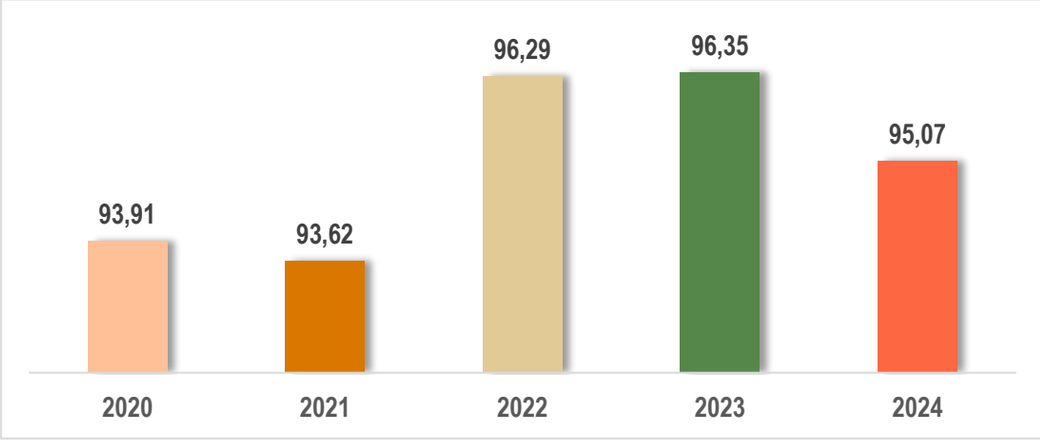
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

h. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Semakin tinggi angka

melek huruf menunjukkan tingkat keberhasilan program pendidikan begitu pula sebaliknya. Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Berikut perkembangan AMH Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024.

Grafik 2.52.
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

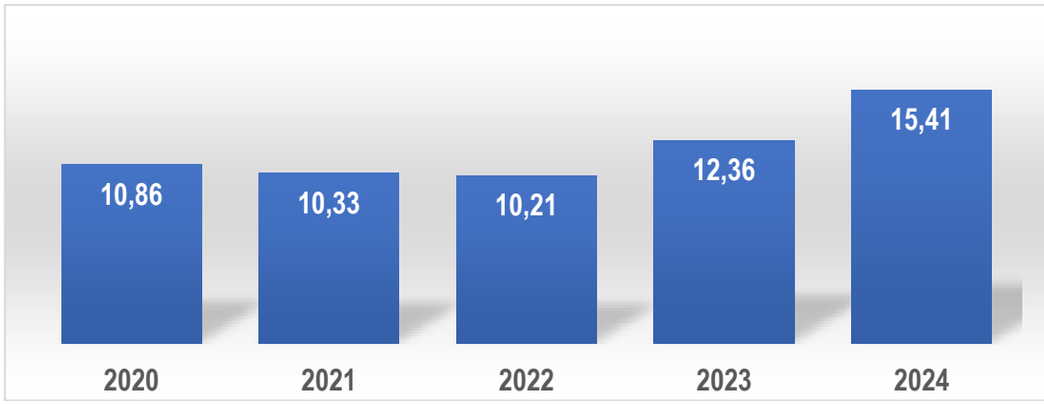


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tahun 2025.

i. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV; S1; S2; S2 Terapan; dan S3. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% yang artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Berikut perkembangan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu.

Grafik 2.53.
Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Luwu dalam Angka, 2020-2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi selama tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi namun, memiliki tren yang meningkat. Dimana pada tahun 2020 dengan nilai mencapai 10,86 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 15,41 persen persen pada tahun 2024, hal tersebut menandakan bahwa hanya terdapat 15,41 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi dari total jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 290.190 jiwa. Rendahnya penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ini menggambarkan kualitas penduduk di Kabupaten Luwu dari segi pendidikan masih belum maksimal.

j. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah dapat diketahui kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 16,33 persen menjadi sebesar 92,18 persen. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 35,27 persen meningkat menjadi sebesar 96,61 persen pada tahun 2024 atau

mengalami peningkatan rata-rata dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebanyak 50,04 persen.

Tabel 2.24.

Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	438	441	453	2.356	2.240
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	2.683	2.683	2.743	4.043	2.430
Persentase	**%**	**16,33**	**16,44**	**16,51**	**58,27**	**92,18**
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	401	413	407	472	1.001
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	1.137	1.137	1.132	1.003	1.047
Persentase	**%**	**35,27**	**36,32**	**35,95**	**47,05**	**95,61**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

k. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia tersebut. Sebagaimana tabel di bawah dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah di tingkat pendidikan dasar selama lima tahun terakhir mengalami tren penurunan, dimana Pada tahun 2020 capaian nilainya sebesar 65,50 poin. Angka ini menurun menjadi sebesar 61,71 poin pada tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah sekolah pada periode yang sama, nampak bahwa pada tahun 2020 jumlah sekolah yang tersedia sebanyak 250 unit, meningkat menjadi sebanyak 252 unit sekolah pada tahun 2024, adapun jumlah sekolah tertinggi berada pada tahun 2023 dengan jumlah sekolah sebanyak 267 unit sekolah.

Tabel 2.25.

Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar (Per 10.000 penduduk)	Rasio	65,50	67,25	67,36	64,27	61,71

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

l. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid.

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pedidikan dasar di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 1:12. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 12 murid.

Tabel 2.26.

Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI + SMP/MTs	Guru : Murid	1:14	1:15	1:14	1:17	1:12
SMA/SMK/MA	Guru : Murid	1:12	1:12	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

m. Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat

Persentase ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2023 meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 38,30% dari 1,86% di

tahun 2022 Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat pada jenjang SD/MI juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yaitu dari 16,94% pada tahun 2019 menjadi 14,06% pada tahun 2023.

Sementara itu, ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan drastis yaitu dari 54,10% pada tahun 2019 menurun menjadi 35,07% pada tahun 2023. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat juga mengalami trend yang menurun yaitu dari 8,51% di tahun 2019 menjadi 2,40% di tahun 2022 namun untuk tahun 2023 kembali meningkat menjadi 9,00 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.

Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	1.053	996	46	784	202
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2356
Persentase	**%**	**45,68**	**42,71**	**1,86**	**38,30**	**8,57**
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	324	295	28	288	8
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2.356
Persentase	**%**	**15,85**	**14,06**	**12,65**	**14,06**	**0,34**
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	489	461	28	296	107
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**50,36**	**46,90**	**2,69**	**35,07**	**5,58**
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	77	61	25	76	8
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**7,92**	**6,20**	**2,40**	**9,00**	**0,42**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

n. Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Persentase penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) menunjukan kondisi yang fluktuatif namun memiliki tren yang cenderung menurun. Jika melihat data tabel di bawah menunjukkan angka melek huruf belum mencapai angka 100 persen, dimana pada tahun 2020 persentase penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang melek huruf adalah sebesar 93,91 persen dari jumlah total penduduk usia yang sama sebanyak 329.791 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 95,07 persen atau dengan total keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 349.391 jiwa.

Tabel 2.28.

Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	93,91	93,62	96,29	96,35	95,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

o. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Secara umum, jika melihat perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu antara tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, yaitu 70,36 persen pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 84,28 persen pada tahun 2024, jika dilihat perkembangan pada tahun 2023-2024, capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 12,71 persen, dimana pada tahun 2023, capainnya sebeasar 72,11 persen. Adapun hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terkait capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi pada masa mendatang adalah tetap memperhatikan tingkat keberdayaan para guru yang telah memenuhi kualifasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.29.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	70,36	62,85	76,52	72,11	84,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2024.

p. Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta didik non formal mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024, dari 1.731 orang pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.754 orang di tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan menjadi 513 orang di tahun 2024. Penurunan terbanyak terjadi pada pendidikan Paket C yaitu dari 1.185 orang pada tahun 2020 menurun menjadi 286 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

Tabel 2.30.

Pendidikan Non Formal
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Paket A	Orang	92	307	101	126	44
Paket B	Orang	454	604	420	200	183
Paket C	Orang	1.185	1.843	1.145	711	286
Jumlah	Orang	**1.731**	**2.754**	**1.666**	**1.037**	**513**

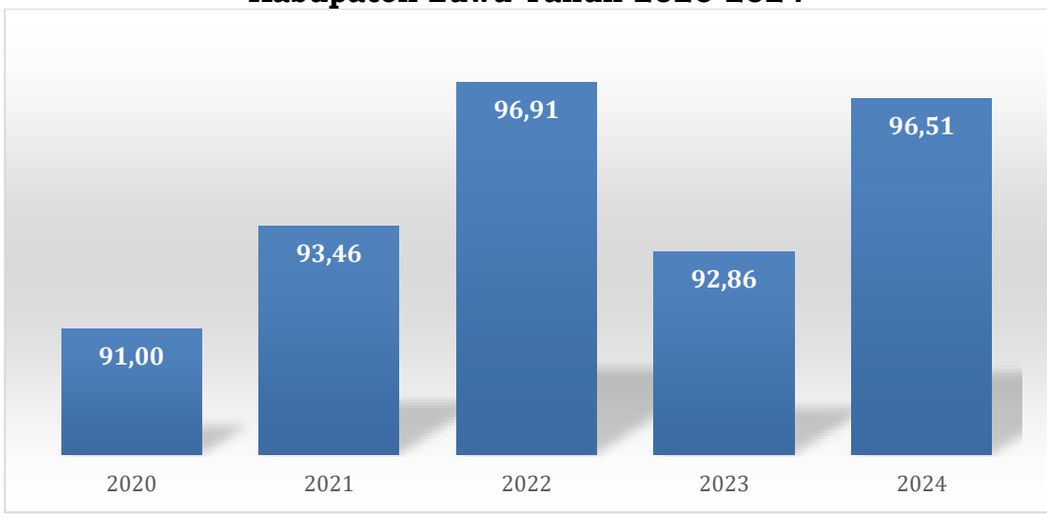
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

q. Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah merupakan jenjang pendidikan tertinggi seseorang atau anggota masyarakat yang telah diselesaikan dengan memperoleh surat tanda tamat dari jenjang

pendidikan yang ditempuhnya, sebagaimana diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, tertuama pada sektor formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu pada tahun 2020-2024, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tinggi *(program diploma, program sarjana, dst)* yang ditamatkan setiap tahunnya mengalami perubahan yang cenderung memiliki tren meningkat, dimana pada tahun 2020 capaian tersebut sebesar 19.628 jiwa atau sebesar 91 persen. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan perkembangan capaian Kabupaten Luwu dalam bentuk grafik.

Grafik 2.54.
Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi Yang ditamatkan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



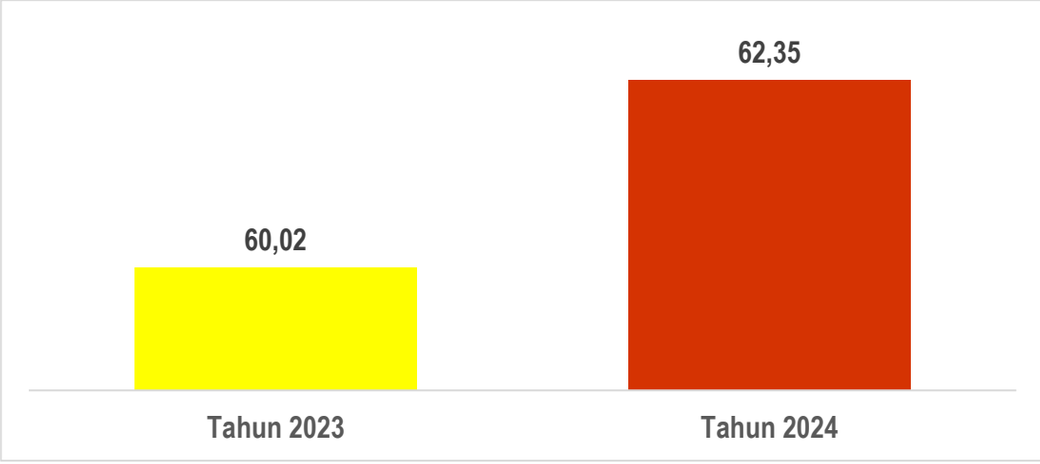
Sumber Data : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2025

r. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau disebut IPLM digunakan sebagai alat ukur terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan Pengukuran IPLM agar dapat diketahui kondisi mengenai jenis perpustakaan, baik pada aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, gedung, hingga pelayanan pemustaka itu sendiri. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan dalam

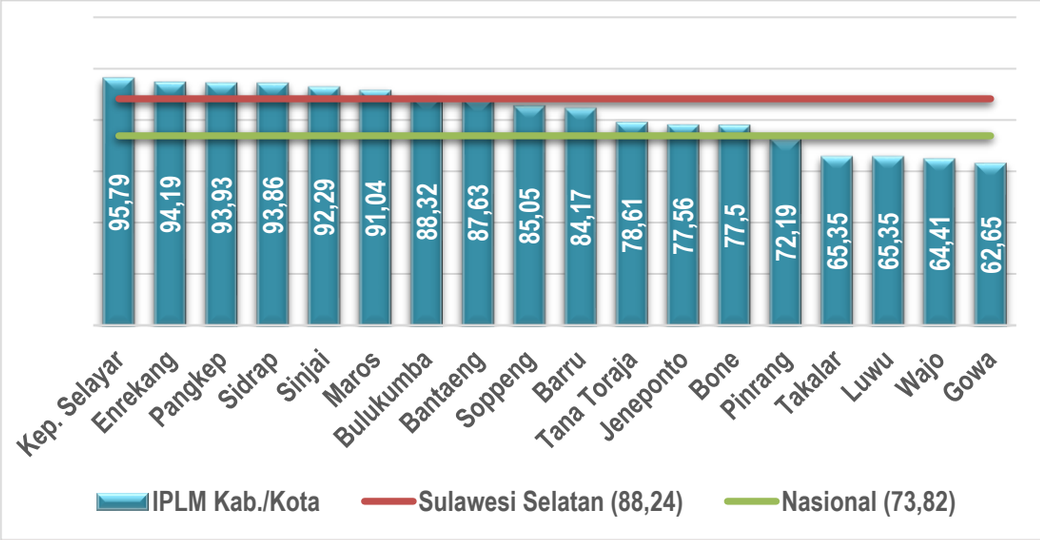
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun pengukuran IPLM dihitung melalui skor indeks (skala level 100), untuk tingkat 0-30 kategori skor rendah, 30-50 kategori rendah, 50-80 kategori sedang, 80-90 kategori tinggi, dan 90-100 kategori sangat tinggi. Di bawah ini disajikan pencapaian IPLM Kabupaten Luwu periode Tahun 2023-2024.

Grafik 2.55.
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Luwu Tahun 2023-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Grafik 2.56.
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten/Kota,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik tersebut di atas, nampak bahwa capaian IPLM Kabupaten Luwu mengalami peningkatan, dimana pada tahun

2024 mengalami peningkatan sebesar 2,33 poin atau meningkat menjadi sebesar 65,35 poin, jika dibandingkan dengan pencapaian Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Nampak bahwa capaian Kabupaten Luwu masih dikategorikan pencapaian sedang karena berada pada rentang angka 50-80, capaian tersebut juga menempatkan Kabupaten Luwu berada dibawah capaian Provisni Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 88,24 poin dan Nasional dengan nilai sebesar 73,82 poin serta berada di atas capaian Kabupaten Wajo dan Gowa pada tahun 2024.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

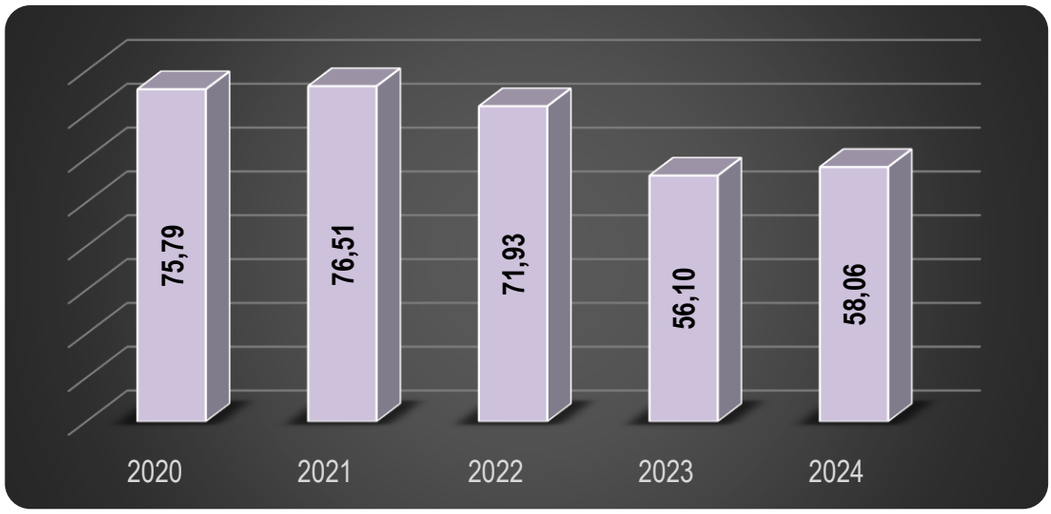
Perlindungan Sosial Yang Adaptif didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat diharapkan memiliki ketahanan dan kemampuan menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai resiko dan krisis serta memiliki kesempatan untuk hidup yang lebih baik dalam rangka mempertahankan kehiduan yang layak., di Kabupaten Luwu gambaran perlindungan soaial yang adaptif dicerminkan antara lain melalui indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Angka Ketergantungan, PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial, dan Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial sebagai berikut :

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pemerintah terus mengupayakan pembangunan pada sektor ketenagakerjaan sebagai dari bagian pembangunan sumberdaya manusia serta perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan hari tua, pensiun, dan pemutusan hubungan kerja yaitu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan adanya jaminan sosial, keluarga dari pekerja juga memiliki jaminan penghidupan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, para pekerja harus dipastikan tercakup dalam kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berikut data cakupan kepesertaan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.57.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Disnakertrans Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 75,79 persen kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi sebesar 56,10 persen. Selanjutnya untuk tahun 2024 telah mengalami peningkatan sebanyak 1,96 persen atau menjadi sebesar 58,06 persen. Hal tersebut terjadi disebabkan meningkatnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja serta adanya kesadaran pekerja akan pentingnya kepesertaan jaminan sosial sebagai perlindungan dasar terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul dikemudian hari.

b. Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal

Istilah "disabilitas" digunakan secara umum untuk menggambarkan kondisi yang mengalami keterbatasan fungsi tubuh maupun keterbatasan struktur tubuh, keterbatasan dan juga hambatan dalam melakukan aktivitas (WHO, 2007). Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. di Kabupaten Luwu pemberdayaan penyandang disabilitas telah dilakukan melalui pelibatan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah seperti penciptaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, informasi dan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, hal tersebut dilakukan guna memberikan peluang untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan potensi yang mereka miliki.

Di Kabupaten Luwu perkembangan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal pada tahun 2023 sebesar 0,9 persen, kemudian pada tahun 2024 capaian tersebut tidak mengalami perubahan, dimana jumlah total penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal hanya sebanyak 1 (satu) orang dari total jumlah penyandang disabilitas sebanyak 103 orang.

Tabel 2.31.

Perkembangan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal	Orang	N.a	N.a	N.a	1	1
2	Jumlah Penyandang Disabilitas	Orang	N.a	N.a	N.a	103	103
	Persentase Penyandang Disabilitas Yang bekerja di Sektor Formal	Persen	N.a	N.a	N.a	0,90	0,90

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025

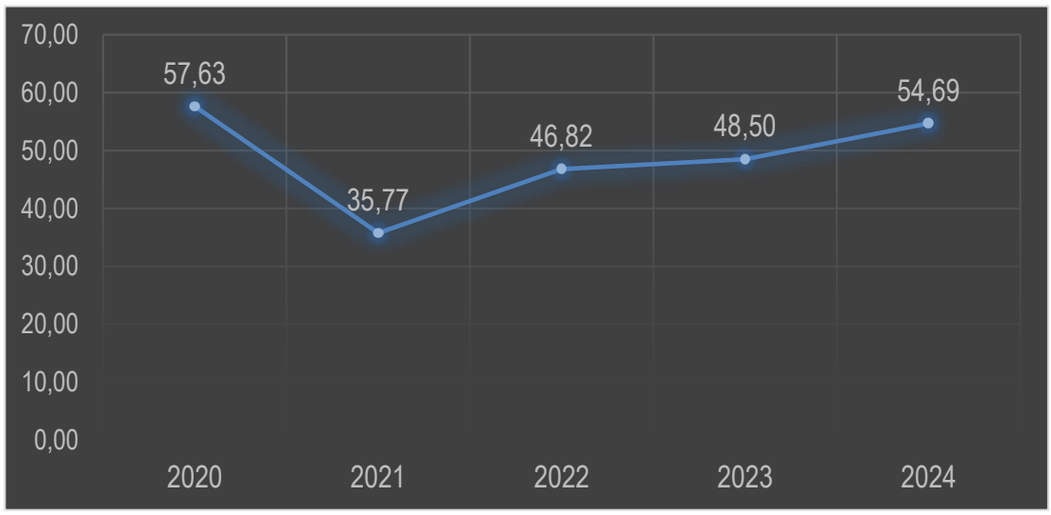
Dari Grafik tersebut di atas, nampak bahwa Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal belum maksimal. Hal itu disebabkan karena setiap individu penyandang disabilitas awalnya memang memiliki keterbatasan masing-masing untuk masuk ke pasar kerja. Selain itu dari permintaan tenaga kerja tidak banyak yang bisa menerima tenaga kerja yang memiliki keterbatasan seperti Penyandang Disabilitas. Mengingat adanya keterbatasan dari

Penyandang Disabilitas untuk bekerja sesuai kompetensinya, baik itu pekerjaan secara umum atau yang formal, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu atau pun pihak terkait lainnya kedepan akan berupaya memberi perhatian khusus untuk membantu para penyandang disabilitas mempersiapkan diri dalam penguatan kemampuan agar memiliki kesiapan dan kemampuan untuk berkontribusi pada sektor formal sesuai kompetensi yang diersyaratkan.

c. PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan Perseorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sosialnya secara wajar. Di Kabupaten Luwu perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan mengalami peningkatan selama periode tahun 2020-2024, untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik.

Grafik 2.58.
Perkembangan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Sosil Kabupaten Luwu Tahun 2025.

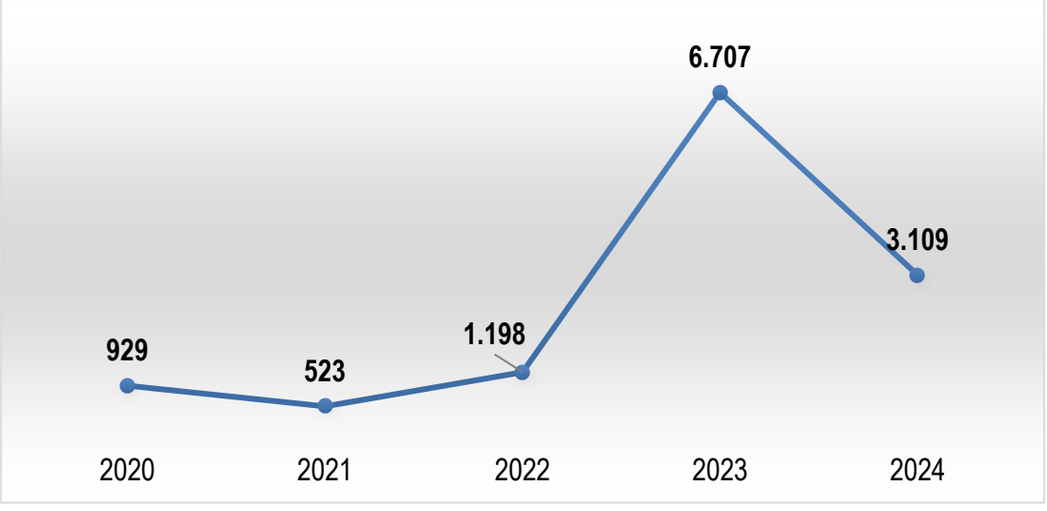
Dari grafik perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 (satu) tahun tersebut di atas, dapat diketahui bahwa persentase PMKS penerima bantuan tertinggi berada pada

tahun 2020 dengan nilai capaian sebesar 57,63 persen, kemudian mengalami penurunan sebanyak 21 poin atau menjadi sebesar 35,77 persen pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 54,69 persen atau dengan jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 44.470 orng dengan jumlah total PMKS sebanyak 81.313 orang.

d. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tnggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yng dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana yng bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Di Kabupaten Luwu perkembangan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat telah mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana jumlah korban penerima bantuan sosial kejadian bencana tertinggi berada pada tahun 2022, Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data perkembangan jumlah korban bencan yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2020-2024

Grafik 2.59.
Perkembangan Korban Bencana penerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Sosil Kabupaten Luwu Tahun 2025

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Luwu, jumlah korban bencana penerima bantuan sosial sebagaimana telah digambarkan pada grafik tersebut di atas, nampak bahwa pada tahun 2020 jumlah korban penerima bantuan soaial sebanyak 929 orang dengan jumlah kejadian bencana sebanyak 19 kasus kejadian, kemudian jumlah

penerima tersebut mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2022 dengan jumlah korban penerima sebanyak 6.707 orang dengan jumlah kejadian sebanyak 32 kasus bencana, selanjutnya mengalami penurunan jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2024 sebanyak 3.109 orang dengan jumlah kasus kejadian sebnyak 31 kejadian.

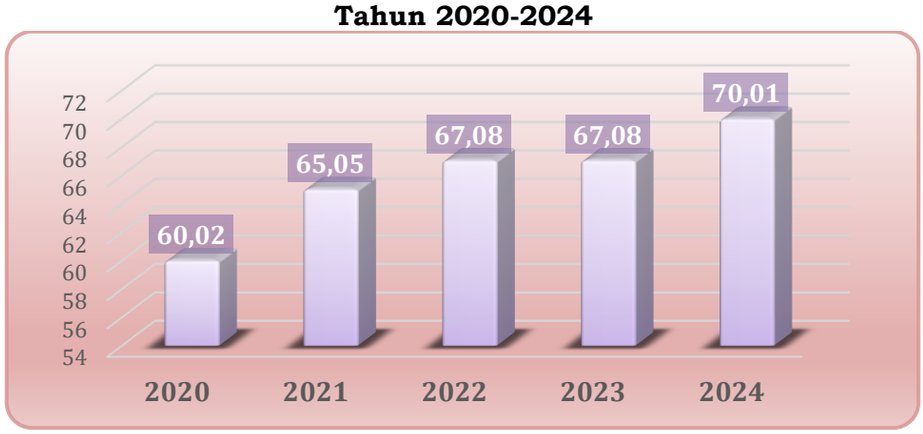
2.2.5. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju

Gambaran beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju di Kabupaten Luwu dicerminkan dari persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dan indeks kerukunan umat beragama, sebagai berikut:

a. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi merupakan perbandingan jumlah cagar budaya yang telah dilindungi atau dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya. Berikut data persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Kabupaten Luwu tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.60.
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025.

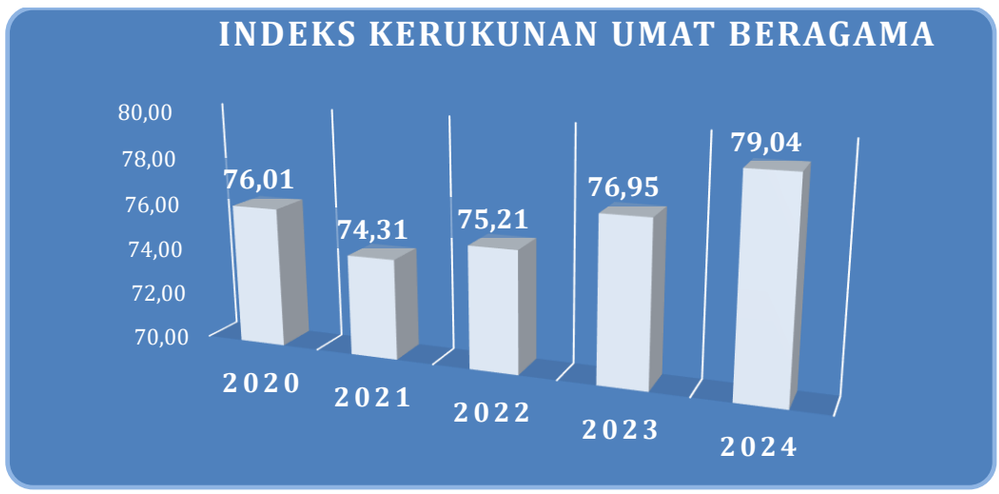
Berdasarkan grafik diatas, persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total

registrasi di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar 60,02% kemudian meningkat menjadi 70,01% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya dukungan anggaran pemeliharaan dari pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat untuk menjaga situs cagar budaya.

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Survei ini dilakukan secara berkala oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program kerukunan. IKUB mengukur kerukunan berdasarkan tiga dimensi utama: toleransi antar umat beragama, kesetaraan antar umat beragama, dan kerja sama antar umat beragama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain. Berikut data Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga 2024.

Grafik 2.61.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Kemenag Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan data diatas, nilai IKUB Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi cenderung meningkat dengan realisasi tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 79,04 dan terendah pada tahun 2021 yakni sebesar 74,31. Tren ini menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama di kabupaten Luwu cenderung membaik, Salah satu faktor meningkatnya nilai IKUB yaitu adanya sikap toleransi yang tinggi dan saling menghormati antar sesama umat beragama.

c. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) memfasilitasi berbagai Kegiatan keagamaan untuk mendukung kehidupan beragama masyarakat. Berikut data persentase Kegiatan keagamaan tahun 2020-2024 yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah daerah:

Tabel 2.32.

Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan / Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah

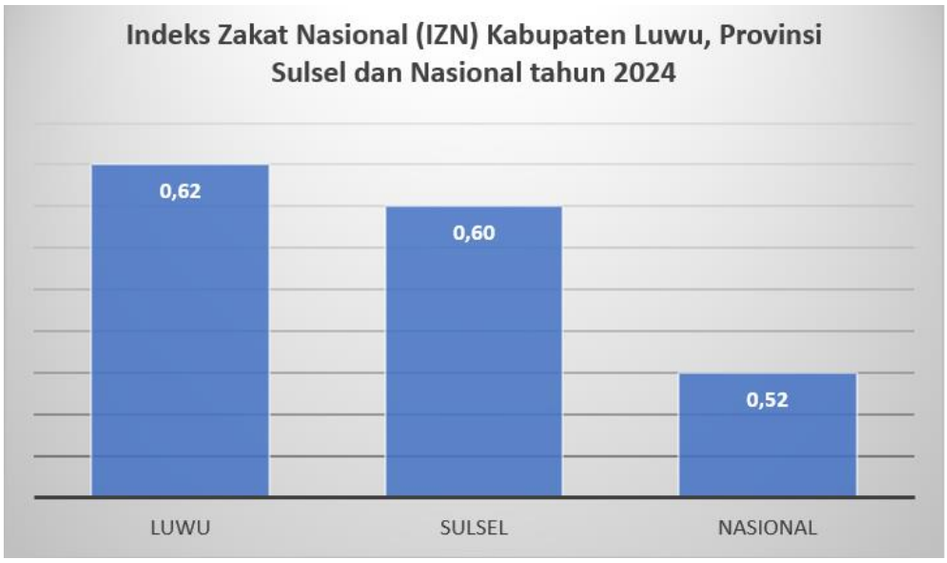
No.	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi pemda	12	10	11	10	11
2	Jumlah kegiatan keagamaan dalam 1 tahun	12	10	11	10	11
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

d. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah wujud dari keseriusan untuk mentransformasikan pengelolaan zakat agar selalu menuju kearah yang lebih baik. Indeks zakat nasional merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat secara nasional berbasis data dan informasi yang dikembangkan sejak tahun 2016 dan secara berkala diimplementasikan kepada seluruh pengelolaan zakat di Indonesia. Berikut data Indeks Zakat Nasional Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2024.

Grafik 2.62.
Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2024



Sumber : Baznas, 2025.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat nilai indeks zakat nasional untuk Kabupaten Luwu yaitu 0,62 kategori bertumbuh, berada diatas nilai IZN Provinsi (0,60) kategori stabil dan Nasional (0,52) Kategori stabil. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berperan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Gambaran pembangunan kualitas keluarga dan kesetaraan gender di Kabupaten Luwu dicerminkan dari kondisi indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks perlindungan anak, indeks pembangunan pemuda, dan indeks ketimpangan gender sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga, sehingga dapat dijadikan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan menjadi dasar bagi para pemangku

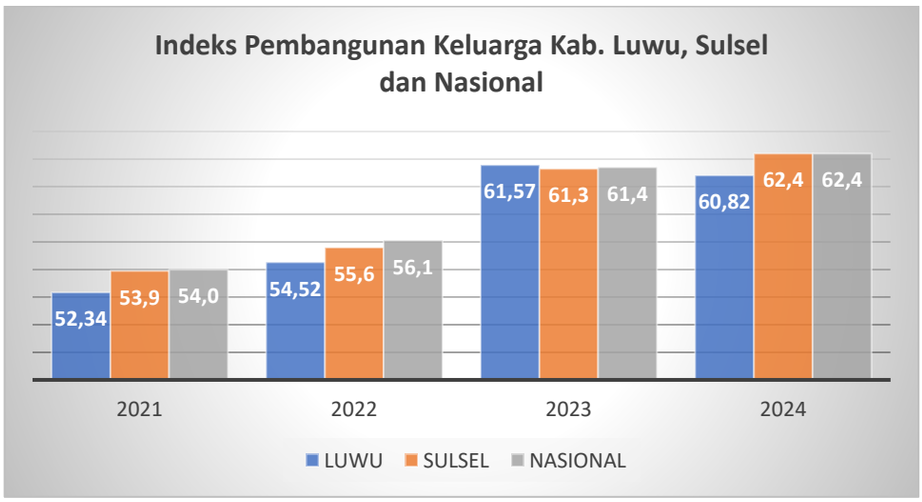
kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/ program/kegiatan.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai IPKK berkisar antara 0 – 100 dengan kategori sebagai berikut:

- IPKK yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40.
- IPKK yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70.
- IPKK yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Berikut data IPK di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan Nasional dari tahun 2021 sampai 2024.

Grafik 2.63.
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



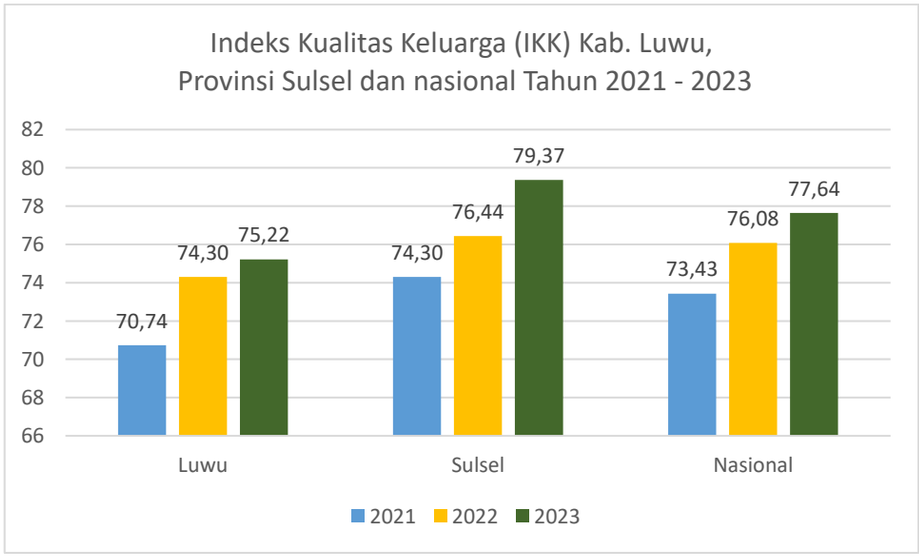
Sumber : BKKBN, 2025.

Pada tahun 2021 nilai IPK Kabupaten Luwu berada dibawah nilai provinsi dan nasional yaitu 52,34, namun begitu pada tahun 2023 meningkat mencapai 61,57 di atas nilai provinsi (61,3) dan nasional (61,4), dan pada tahun 2024 nilai IPK Kabupaten Luwu turun 1 poin menjadi 60,82. Faktor pendukung naiknya nilai Indeks Pembangunan Keluarga meliputi peningkatan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Hal ini dapat dicapai melalui beragam upaya, seperti peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas hidup dan dukungan pemerintah serta stakeholder terkait.

b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) terdiri dari 5 dimensi utama yaitu : 1) Kualitas legalitas dan struktur; 2) Kualitas ketahanan fisik; 3) Kualitas ketahanan ekonomi; 4) Kualitas Ketahanan sosial psikologi; 5) Kualitas ketahanan sosial budaya. Berikut data Indeks Kualitas keluarga di Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan dan nasional tahun 2020 sampai 2023.

Grafik 2.64.
Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Luwu,
Sulsel dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Luwu, 2025

Di kabupaten Luwu, Indeks Kualitas Keluarga mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 dan berada dibawah IKK Sulsel dan Nasional, dimana tahun 2023 nilai IKK Kabupaten Luwu sebesar 75,22 namun masih berada dibawah IKK Sulsel (79,37) dan Nasional (77,64).

c. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang digunakan untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA merupakan salah satu indikator dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. Berikut data Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Grafik 2.65.
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Luwu, 2025.

Nilai IPA kabupaten Luwu kurun waktu 2020 – 2024 mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 57,03 dan capaian terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 56,26. Salah satu penyebab menurunnya Indeks Perlindungan Anak (IPA) di kabupaten Luwu yaitu masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk meninkatkan indeks perlindungan anak, salahsatunya memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP merupakan komposit yang menggambarkan tiga domain pembangunan pemuda, yaitu: Pembangunan individu, Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam rangka mengejawantahkan konsep pembangunan manusia seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya serta keluasan untuk meningkatkan kemampuannya. IPP disusun berdasarkan 15 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 domain: Pendidikan, Kesehatan dan

kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan kerja, Partisipasi dan kepemimpinan, Gender dan diskriminasi.

Di kabupaten Luwu jumlah organisasi pemuda pada tahun 2020 sebanyak 30 dan meningkat pada tahun 2022 yaitu 51 organisasi yang masih aktif sampai saat ini. Faktor yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah organisasi pemuda antara lain adalah kebutuhan pemuda untuk wadah kegiatan dan pengembangan diri, meningkatnya kesadaran akan peran pemuda dalam pembangunan, serta dorongan dari pemerintah dan pihak terkait untuk melibatkan pemuda dalam berbagai Kegiatan pembangunan.

Grafik 2.66.
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



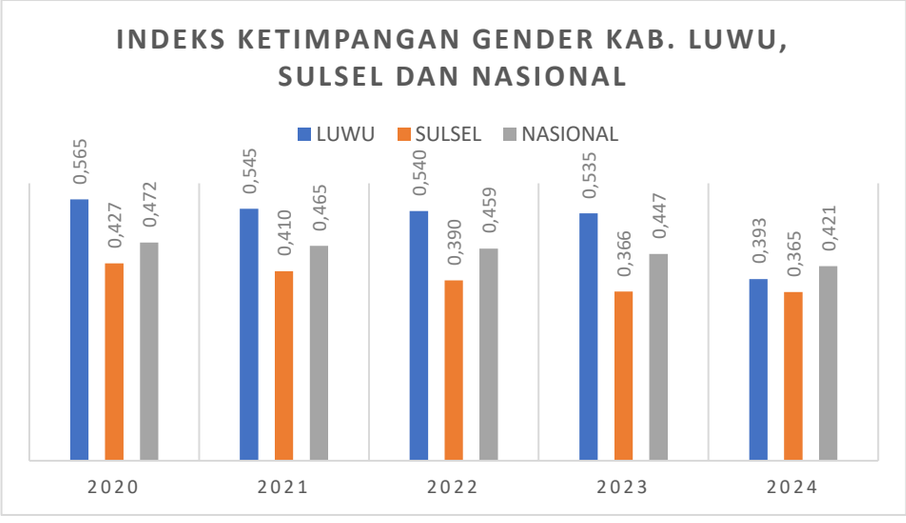
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025.

e. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu (1) dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi Perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), (2) dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta (3) dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Berikut data IKG di Kabupaten Luwu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Berikut data IKG di Kabupaten Luwu, Sulsel dan nasional dari tahun 2020 hingga tahun 2024

Grafik 2.67.
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



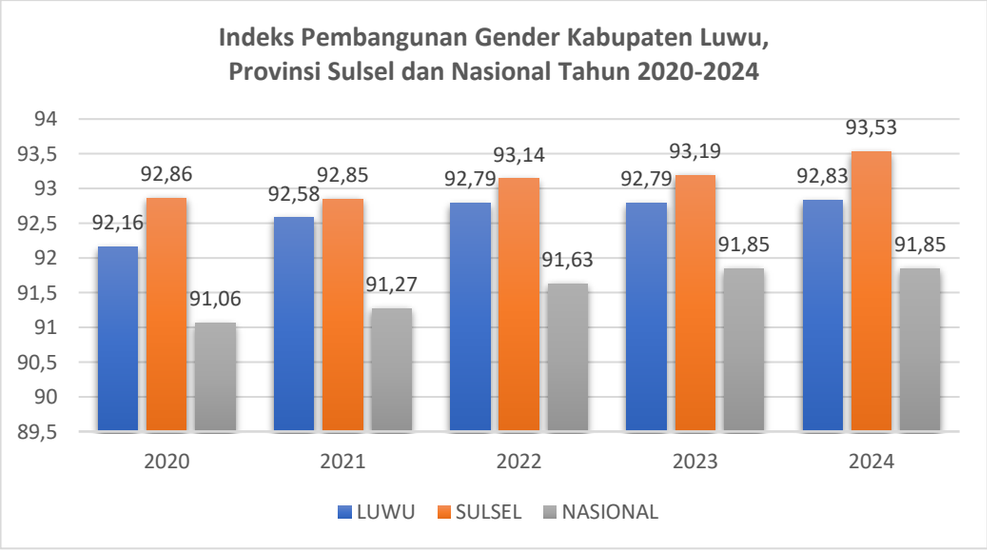
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024.

Berdasrkan grafik diatas, nilai IKG di Kabupaten Luwu terus mengalami penurunan. Dimana nilai IKG tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 0,565 dan IKG terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,393. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin rendah atau meningkatnya kesetaraan gender di Kabupaten Luwu. Namun jika dibandingkan nilai IKG Sulawesi Selatan dan nasional, Kabupaten Luwu Masih cukup tinggi, dimana tahun 2023 IKG Kabupaten Luwu mencapai 0,535 sedangkan Sulawesi selatan 0,366 dan 0,447 untuk nasional. Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) disebabkan oleh perbaikan di berbagai dimensi yang menjadi indikator IKG, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan pasar tenaga kerja.

f. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.68.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu, Provinsi Sulsel dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025.

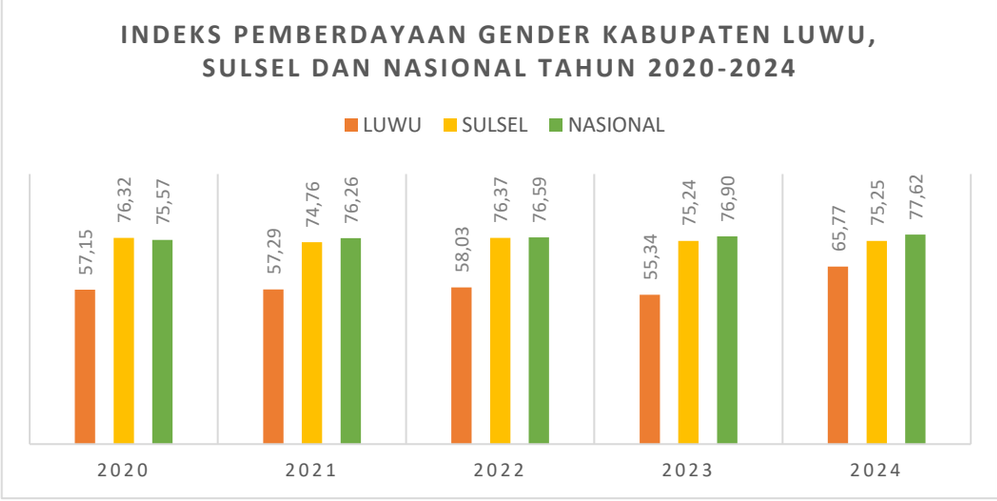
Berdasarkan grafik di atas terlihat data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 tercatat 92,16 dan tahun 2024 mencapai nilai 92.83. Jika dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional Indeks Pembangunan Gender kabupaten Luwu berada di bawah dari capaian provinsi dan lebih tinggi dari nilai IPG nasional. Salah satu faktor meningkatnya nilai IPG di Kabupaten Luwu yaitu peningkatan partisipasi Angkatan kerja perempuan.

g. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi dan politik, dengan fokus pada kesetaraan gender dalam peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mengukur kesetaraan gender dalam hal partisipasi di berbagai bidang, seperti partisipasi di parlemen, kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga, dan peran perempuan sebagai tenaga profesional.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di kabupaten Luwu pada tahun 2020 sampai 2024 fluktuatif cenderung meningkat walaupun di tahun 2023 mengalami penurunan namun kembali naik di tahun 2024, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, parlemen dan swasta menjadi faktor meningkatnya nilai IDG di kabupaten Luwu. Adapun nilai ini juga masih rendah dibandingkan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tingkat Provinsi Sulsel dan nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.69.
IPG Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Gambaran daya saing daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain Daya Saing Sumber Daya Manusia; Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru; Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; dan Stabilitas Ekonomi Makro yang akan dijelaskan sebagai berikut:

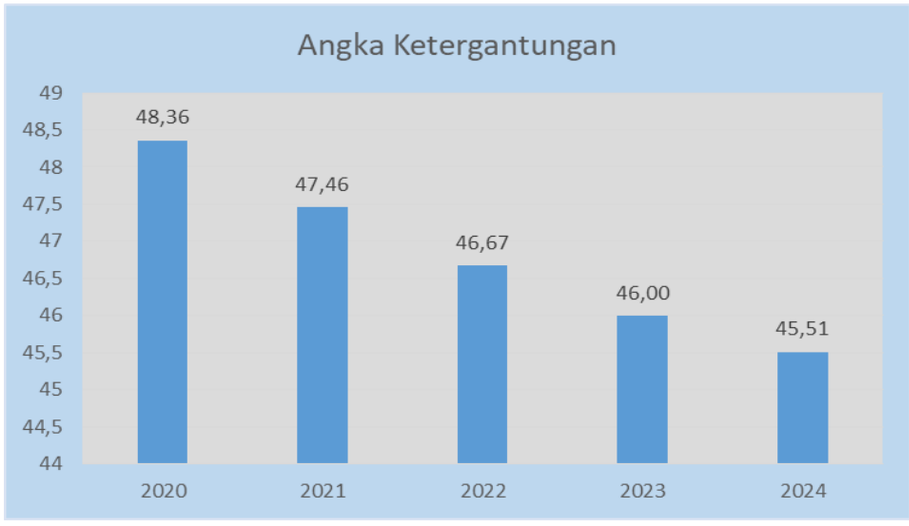
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah karena Sumber Daya Manusia berperan dalam mengolah dan mengelola faktor produksi lainnya. Daya Saing Sumber Daya Manusia daerah di Kabupaten Luwu sendiri dicerminkan dari berbagai kondisi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan mengacu pada perbandingan antara jumlah individu yang tidak aktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan pensiunan) dengan jumlah individu yang aktif secara ekonomi (anggota angkatan kerja). Ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat beban yang diberikan oleh populasi yang tidak aktif secara ekonomi terhadap populasi yang aktif dalam menghasilkan pendapatan. Berikut adalah grafik angka ketergantungan di Kabupaten Luwu :

Grafik 2.70.
Angka Ketergantungan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020-2024.

Berdasarkan data penduduk di Kabupaten Luwu menunjukkan Angka Ketergantungan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami penurunan secara terus menerus. Menurunnya Angka Ketergantungan dapat diartikan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Kondisi ini termasuk dalam bonus demografi yang harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memprecepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta perkembangan teknologi. Berdasarkan data Hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, bonus demografi di Kabupaten Luwu di proyeksi masih berlangsung hingga tahun 2030. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.33.

Proyeksi *Dependency Ratio* Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2030

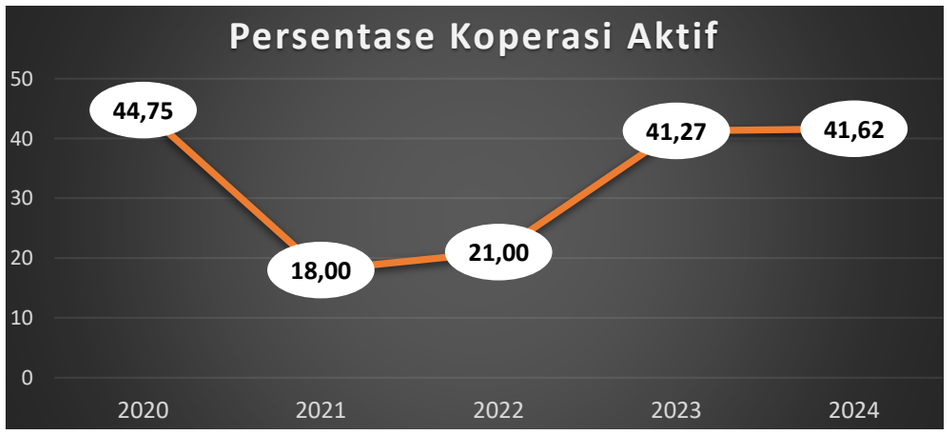
Uraian	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (ribu)	Orang	121,31	122,82	124,72	126,92	129,28	131,69
Jumlah Penduduk Usia Produktif (ribu)	Orang	267,98	271,38	274,41	277,10	279,55	281,89
Dependency Ratio	**Persen**	**45,27**	**45,26**	**45,45**	**45,80**	**46,25**	**46,72**

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

b. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan menjalankan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 44,75% pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 18,00% yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid 19 yang membuat perekonomian melambat. Kemudian pada tahun 2023 hingga tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 41,62% atau sebanyak 179 koperasi aktif dari 430 jumlah koperasi di Kabupaten Luwu. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.71.
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Tahun 2020-2024.

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

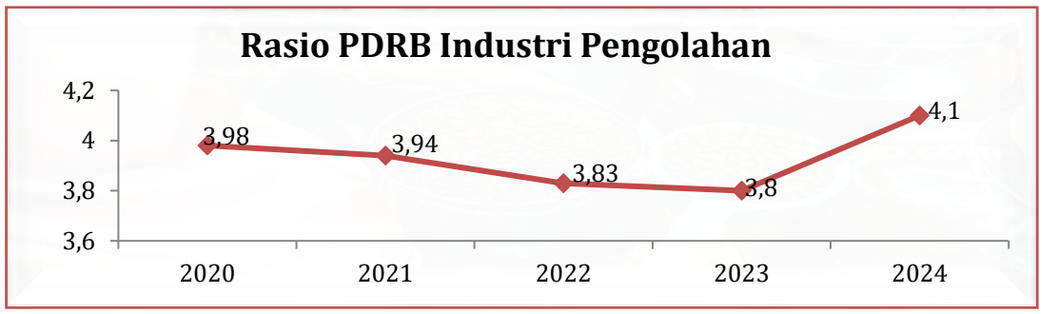
Iptek dan Inovasi memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan, peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, dan meningkatkan kualitas produk dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah akan turut membentuk kompleksitas daya saing suatu daerah. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Perkembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Luwu dicerminkan dari berbagai kondisi yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 cenderung mengalami

penurunan akiba dari adanya bencana covid 19 dan masih kurangnya penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi. Pada tahun 2020 Rasio PDRB sektor industri pengolahan sebesar 3,98 turun menjadi 3,8 pada tahun 2023, pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,1 persen. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.72.
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

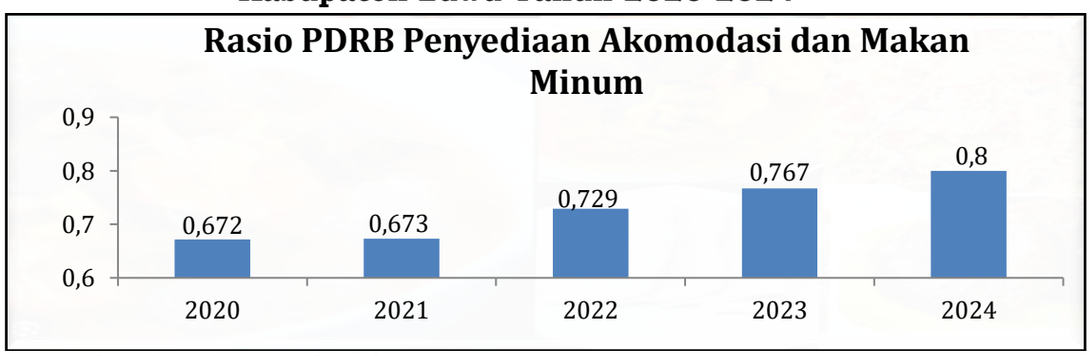


Sumber data BPS Kabupaten Luwu.

b. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kontribusi PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga 2024 masih sangat rendah dibanding sektor lainnya, Walaupun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 sebesar 0,672, naik menjadi 0,767 pada 2023 dan 0,8 pada tahun 2024. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.73.
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber data BPS Kabupaten Luwu.

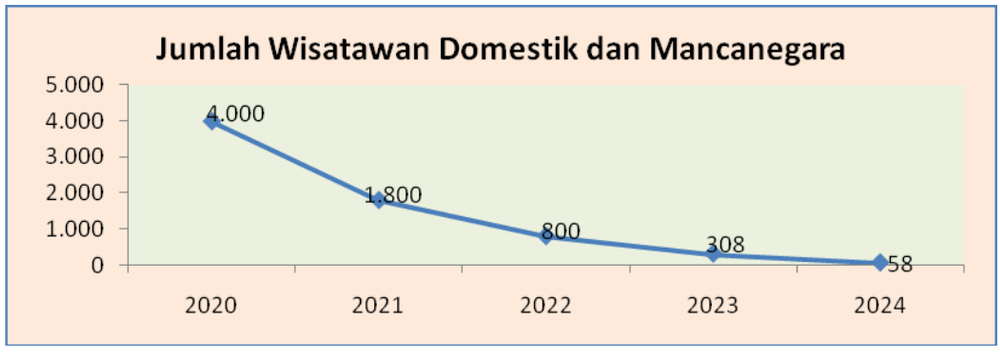
Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat rendah akibat dari beberapa faktor diantaranya

kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Luwu.

c. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Pada sektor pariwisata Kabupaten Luwu mempunyai cukup banyak potensi untuk dikembangkan seperti wisata alam, wisata pantai dan wisata budaya. Berdasarkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Kabupaten Luwu selama kurung waktu 2020-2024 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar 4.000, turun menjadi 58 pada tahun 2024. Menurunnya jumlah kunjungan wisata yang sangat signifikan tidak hanya berdampak pada konrtibusi sektor pariwisata terhadap PDRB tapi juga pada PAD Kabupaten Luwu.

Grafik 2.74.
Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu,2025.

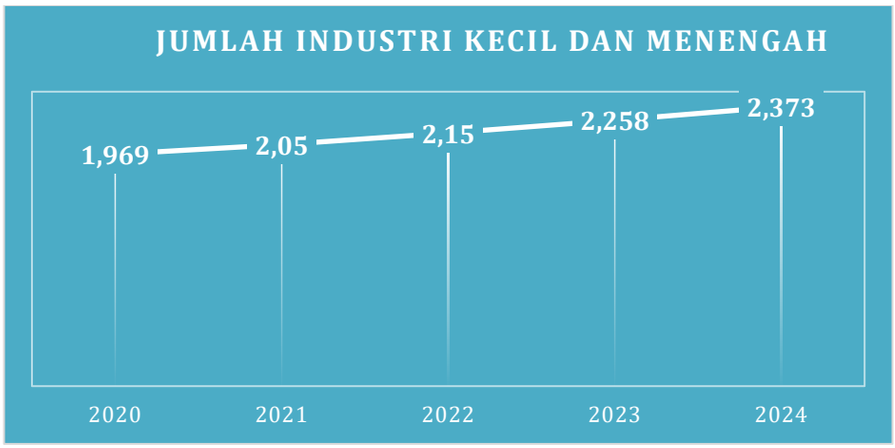
d. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Perpres No 8 Tahun 2008, terdapat 14 subsektor industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video/film/animasi/fotografi, game, musik, seni pertunjukan, penerbitan/percetakan, software, televisi/radio, dan riset & pengembangan. Jumlah industri ekonomi kreatif di Kabupaten Luwu pada tahun 2023 sebanyak 45 industri meningkat pada tahun 2024 menjadi 67 industri yang terdiri dari subsektor desain produk, kuliner, fashion, fotografi, desain komunikasi visual, seni pertunjukkan, dan televisi.

e. Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu dari tahun 2020 sebesar 1.964 terus menerus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 2.373. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.75.
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

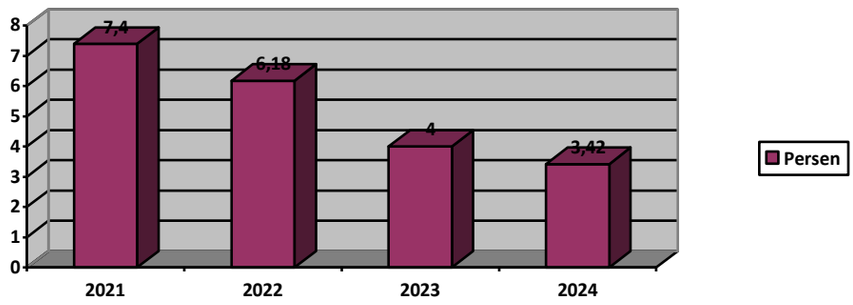


Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian.

f. Persentase Koperasi Sehat

Kopersai yang sehat merupakan koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip koperasi, menerapkan manajemen yang baik, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Peran koperasi dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip koperasi, menerapkan manajemen yang baik, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu pada tahun 2021 hingga tahun 2024 terus meneruas mengalami dimana pada tahun 2021 sebesar 7,4 persen, pada tahun 2022 sebesar 6,18, pada tahun 2023 sebesar 4 persen dan tahun 2024 sebesar 3,42%.

Grafik 2.76.
Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

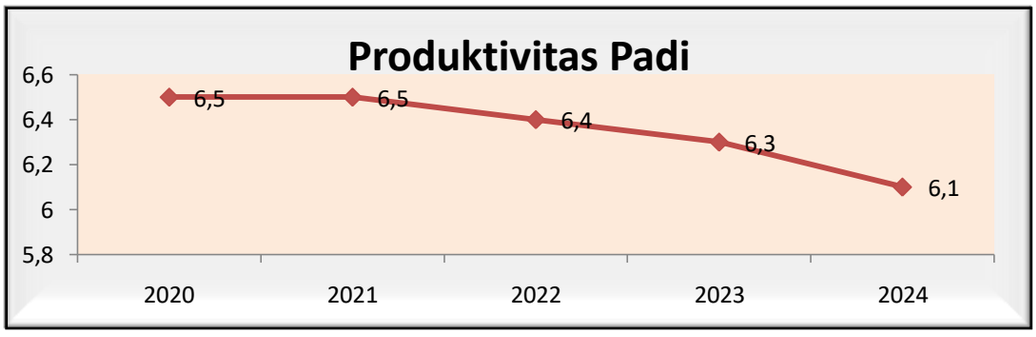


Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, Tahun 2020-2024.

g. Produktivitas Padi

Produktivitas padi adalah ukuran seberapa banyak gabah kering giling (GKG) yang dapat dihasilkan dari satu hektar sawah dalam satu musim tanam. Ini merupakan indikator penting bagi ketahanan pangan suatu daerah. Dengan produktivitas yang tinggi, dapat menjamin ketersediaan beras sebagai makanan pokok bagi seluruh masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas juga dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini data produktivitas Padi di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Grafik 2.77.
Produktivitas Padi Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, 2025.

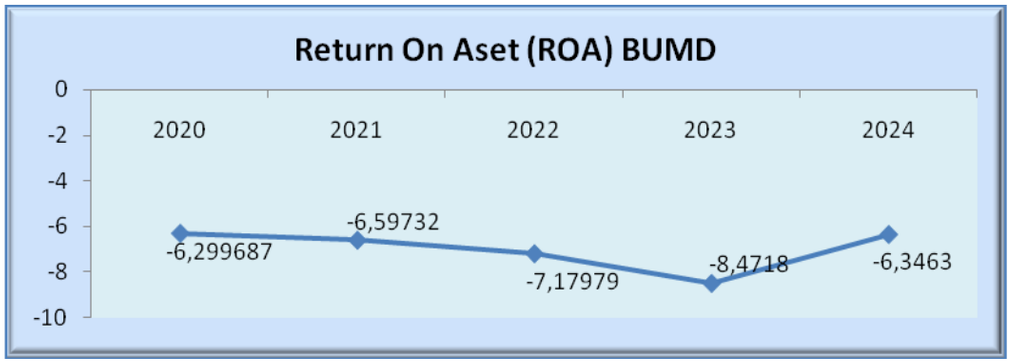
Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2020 sampai tahun 2021 produktivitas padi di Kabupaten Luwu terus mencapai 6,50 Ton/Ha. Selanjutnya dari tahun 2022 hingga tahun 2024 produktivitas padi mengalami

penurunan menjadi 6,1 Ton/Ha. Penurunan produktivitas padi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain varietas padi, kualitas tanah, ketersediaan air, pupuk dan pestisida, teknologi pertanian dan iklim.

h. Return on Aset (ROA) BUMD

Return on aset (ROA) merupakan ukuran nilai keuntungan suatu perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Dalam kurung waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 return on aset PDAM Kabupaten Luwu minus karena laba merugi akibat dari biaya tidak langsung atau biaya penyusutan aset. Pada tahun 2020 sebesar -9,299 menjadi -8,471 pada tahun 2023, kemudian di tahun 2024 sebesar -6,346. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.78.
***Return on Asset* (ROA) Kabupaten Luwu**
Tahun 2020-2024



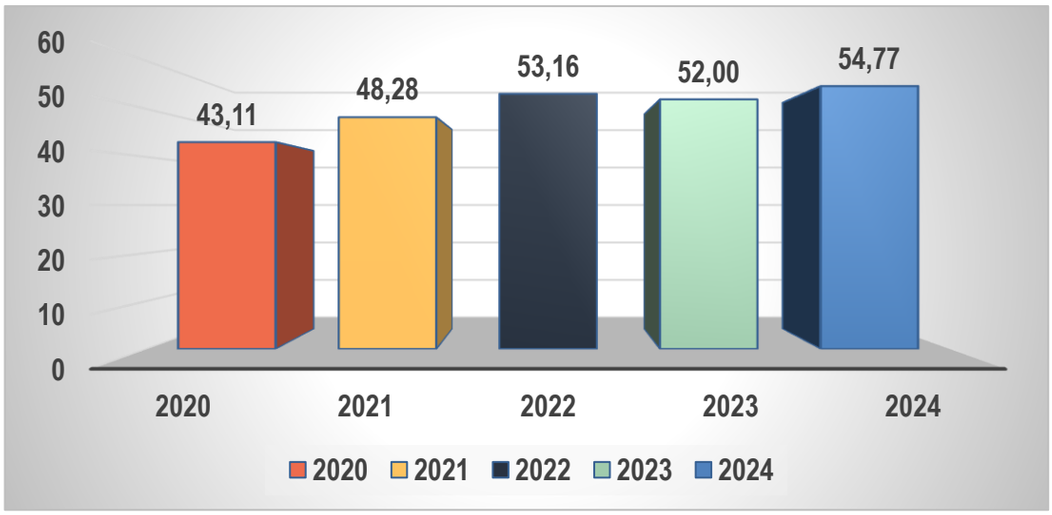
Sumber : PDAM Kabupaten Luwu.

i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Angkatan Kerja Perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan

kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja. Berikut Grafik yang menggambarkan TPAKP selama 5 (Lima) Tahun terakhir.

Grafik 2.79.
TPAKP di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

Grafik diatas menunjukkan capaian TPAKP Kabupaten Luwu. pada tahun 2020 TPAKP sebesar 43,11 persen. Kemudian pada tahun 2021-2022 terus mengalami peningkatan sebesar 10,05 poin atau menjadi sebesar 53,16 persen dan kembali mengalami peningkatan sebesar 1,61 poin atau menjadi sebesar 54,77 persen pada tahun 2024.

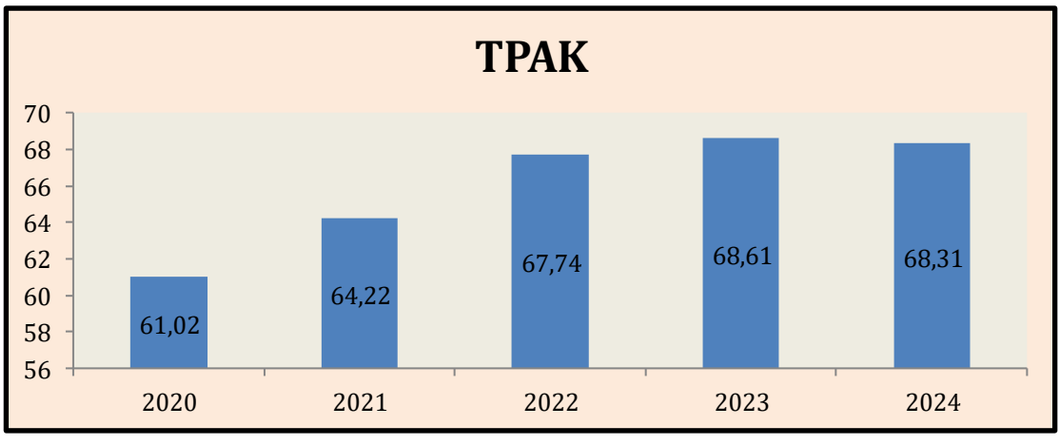
Dengan memperhatikan masing-masing grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Dari total 290.190 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu, 68,31% (198.230 jiwa) masuk dalam angkatan kerja, sedangkan 31,69% (91.960 jiwa) bukan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja, 95,86% (190.018 jiwa) telah bekerja, sementara 4,14% (8.212 jiwa) masih menganggur. Partisipasi tenaga kerja laki-laki lebih tinggi (119.075 jiwa) dibanding perempuan (79.155 jiwa), sedangkan dalam kategori bukan angkatan kerja, perempuan mendominasi terutama dalam pekerjaan domestik (46.330 jiwa). Hal ini menunjukkan masih kuatnya peran gender dalam pembagian kerja, di mana laki-laki lebih aktif dalam sektor ekonomi dibanding perempuan yang lebih banyak berperan dalam pekerjaan rumah tangga. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan

dalam dunia kerja, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu kedepan akan lebih berupaya dalam mengarhkan kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor formal serta memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja informal.

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Berikut Grafik Tingkat Partispasi angkatan Kerja di Kabupten Luwu Tahun 2020-2024.

Grafik 2.80.
Perkembangan TPAK Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



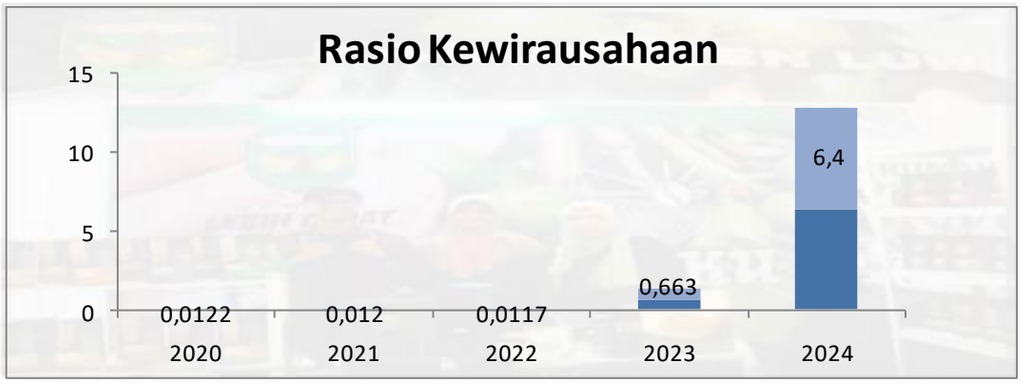
Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Grafik di atas menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu untuk lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan tetapi masih berfluktuasi dimana TPAK pada tahun 2020 sebesar 61,02 persen terjadi peningkatan hinga tahun 2023 sebesar 68,61 persen kemudian menurun lagi pada tahun 2024 sebesar 68,31 persen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja tidak disertai dengan penambahan lapangan pekerjaan di Kabupaten Luwu.

j. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan mengacu pada perbandingan jumlah usaha atau bisnis baru yang didirikan dalam suatu wilayah atau negara dalam satu tahun tertentu terhadap jumlah total penduduk atau angkatan kerja pada tahun yang sama. Ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat aktivitas kewirausahaan dalam suatu wilayah atau negara. Berikut adalah data tabel rasio kewirausahaan di Kabupaten Luwu:

Grafik 2.81.
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



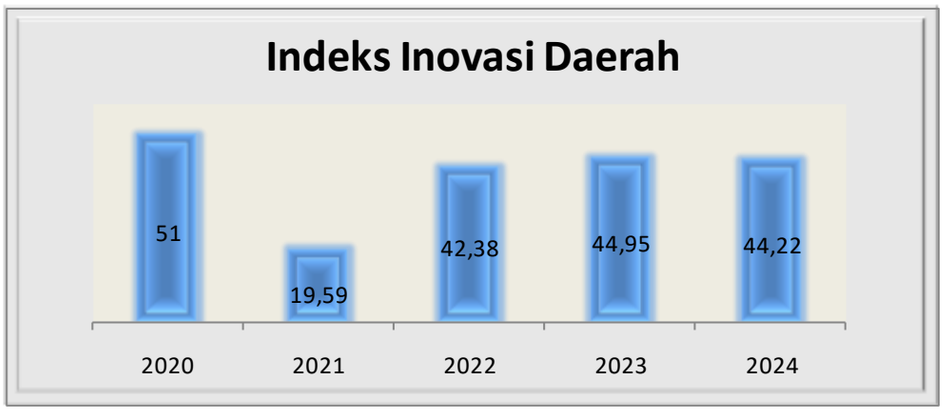
Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, 2025.

Data tabel diatas menunjukkan terkait data "Rasio Kewirausahaan" dari tahun 2020 hingga tahun 2024 di Kabupaten Luwu. Pada tahun 2020, terlihat nilai Rasio Kewirausahaan sebesar 0,012, hingga tahun 2022 stagnan kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,663, dan pada tahun 2024 sebesar 6,4 persen. Nilai Rasio Kewirausahaan yang meningkat mengindikasikan tingkat aktivitas kewirausahaan yang dapat dianggap sebagai tanda Positif untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Aktivitas kewirausahaan yang sehat dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi daerah. Penting untuk dicatat bahwa Rasio Kewirausahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, lingkungan bisnis, akses terhadap sumber daya dan pendanaan, serta kondisi ekonomi secara keseluruhan.

k. Indeks Inovasi daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kemampuan daerah atau wilayah dalam mengembangkan solusi kreatif dan baru untuk berbagai tantangan dan masalah yang mereka hadapi. Hal ini mencakup berbagai aspek inovasi, seperti penelitian dan pengembangan, investasi dalam teknologi, dan kemitraan inovatif. Penilaian tingkat inovasi daerah dapat bervariasi berdasarkan metodologi yang digunakan dalam pengukuran, dan faktor-faktor seperti investasi dalam inovasi dan kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat memengaruhi perubahan dalam nilai Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun. Berikut adalah data indeks inovasi daerah di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Grafik 2.82.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri.

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa indeks inovasi daerah berfluktuatif dimana pada tahun 2020 mencapai 51, kemudian pada tahun 2021 menurun drastis menjadi 19,59 akibat adanya perubahan cara perhitungan, kemudian pada tahun 2022 hingga tahun 2023 meningkat menjadi 44,95, dan pada tahun 2024 turun menjadi 44,22 dengan kategori masih inovatif.

l. Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah

Indeks Kapabilitas Inovasi daerah adalah salah satu pilar Indeks Daya Saing Daerah yang mengukur kemampuan daerah dalam

melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, yang bertujuan untuk menperoleh ukuran daya saing daerah. Dalam mengukur indeks kapabilitas inovasi menekankan pentingnya kualitas inovasi dari pada kuantitas. Perkembangan indeks kapabilitas inovasi daerah Kabupaten Luwu berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2023 dengan nilai 1,05 dan pada tahun 2024 dengan nilai 1,56.

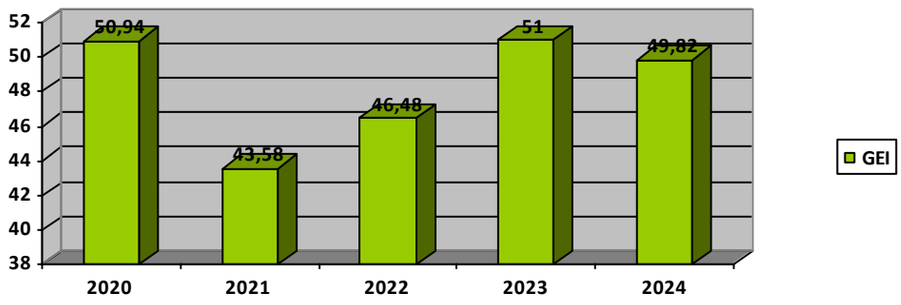
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau atau Green Economy Index (GEI) adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi**.** Indeks Ekonomi Hijau mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin baik.

Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi, namun masih dalam kategori Sedang. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan, tetapi kembali meningkat pada tahun 2022 hingga tahun 2023 dengan capaian 51,00 poin, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 49,82 poin. Selengkapnya dapat dilihaat pada grafik berikut.

Grafik 2.83.
Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber: Litbang Provinsi Sulawesi Selatan, 2025.

b. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian ekosistem laut, serta menciptakan lapangan kerja.

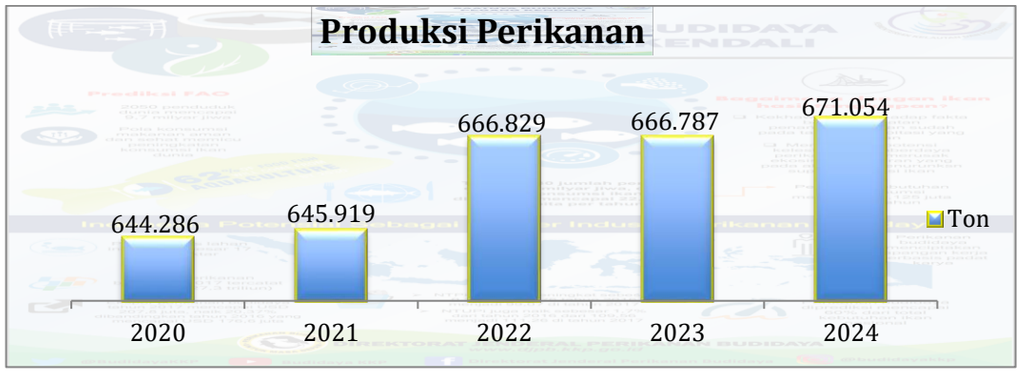
Indeks Ekonomi Biru menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari 0-100 dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. Indeks Ekonomi Biru disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. Skor Indeks Ekonomi Biru yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup.

Skor Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu pada tahun 2023 adalah sebesar 79,47 poin. Jika dibandingkan dengan wilayah setara, Kabupaten Luwu memiliki skor tertinggi disusul oleh Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dengan skor masing-masing sebesar 79,58 dan 77,08. Pada tahun 2024 Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu mencapai 90,31.

c. Jumlah Produksi Perikanan

Pemerintah berupaya meningkatkan produksi perikanan melalui berbagai kebijakan, seperti pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Total produksi perikanan Kabupaten Luwu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan produksi sektor perikanan belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga pendapatan masyarakat sektor perikanan masih rendah. Produksi perikanan Kabupaten luwu lima tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.84.
Produksi Perikanan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, 2025.

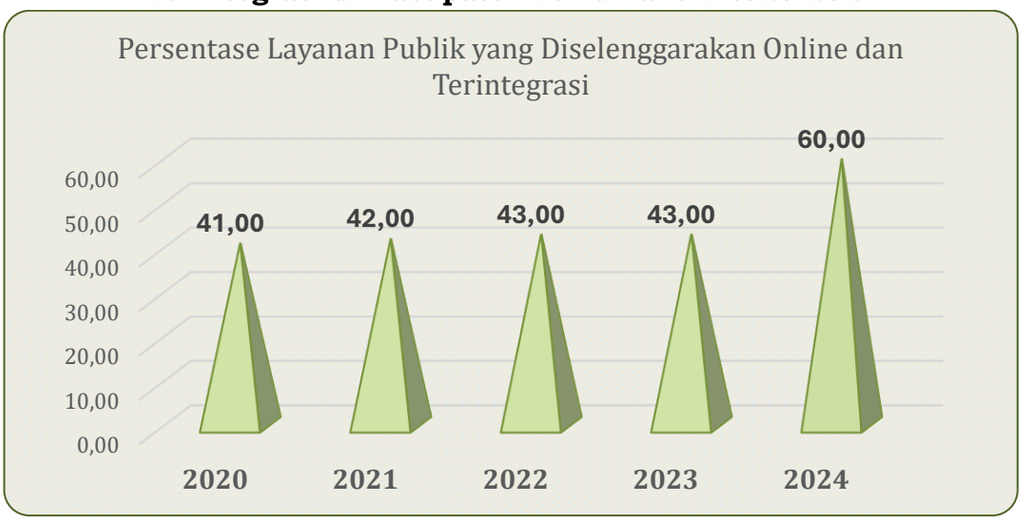
Berdasarkan grafik diatas Total Produksi Perikanan Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebesar 644.286,15 ton meningkat pada tahun 2021 sebesar 645.919,16 ton, kemudian pada tahun 2022 sebesar 666.829,06 ton dan pada tahun 2024 mencapai 671.054,41 ton.

2.3.4. Transformasi Digital

a. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi

Layanan publik *online* dan terintegrasi adalah suatu sistem dimana berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat diakses secara digital dan terhubung satu sama lain. Sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan administratif, seperti perizinan, kependudukan, pembayaran pajak, atau pelaporan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif. Berikut ini data persentase Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024.

Grafik 2.85.
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2025.

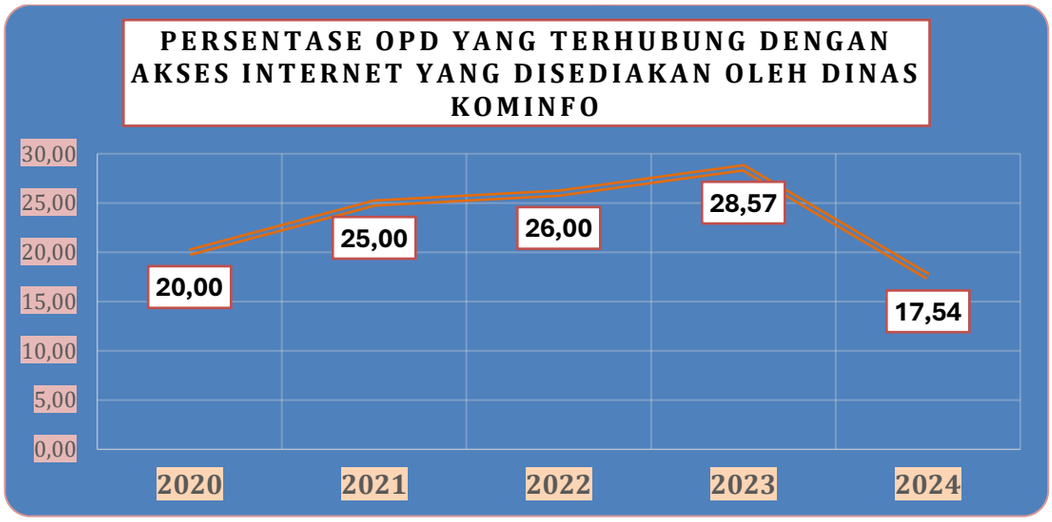
Berdasarkan grafik diatas, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Luwu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 capaiannya sebesar 41,00% meningkat menjadi 60,00% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya layanan publik yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi di Kabupaten Luwu.

b. Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo adalah Indikator yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disambungkan sistem jaringan informasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Indikator ini untuk menilai kinerja Diskominfo dalam menyediakan akses sistem jaringan informasi kepada OPD. Indikator ini juga digunakan untuk mengukur kemajuan dalam penggunaan teknologi informasi.

Berikut grafik data capaian Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024:

Grafik 2.86.
Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2025.

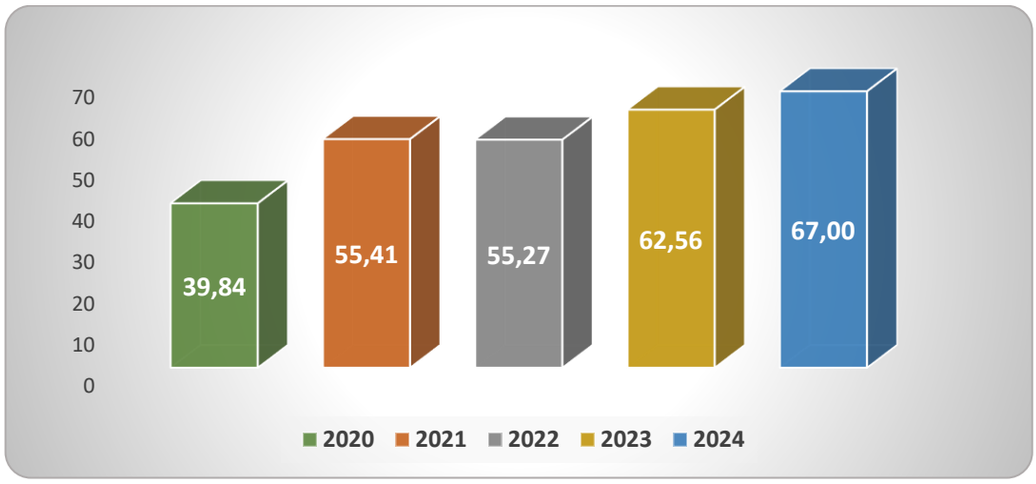
Berdasarkan grafik data persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo di kabupaten luwu tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yaitu dari 20,00% menjadi 28,57%. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi perubahan perhitungan indikator sehingga capaiannya menjadi sebesar 17,54%. Namun demikian, perolehan tersebut masih tergolong rendah dimana masih ada gap sebesar 82,46 persen OPD yang belum mengakses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan seluruh Organisasi Perangkat daerah dapat terhubung dengan internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Luwu untuk mewujudkan tersedianya sebuah jaringan informasi yang lebih mudah diakses dan lebih Akuntabel dalam satu server.

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet adalah ukuran penting yang menggambarkan sejauh mana masyarakat telah terhubung dengan dunia digital. Indikator ini juga dapat mencerminkan kemajuan beberapa aspek seperti kemajuan digital, inklusi sosial, dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga semakin tinggi proporsi indikator ini, maka semakin besar potensi suatu wilayah untuk memanfaatkan

peluang di era digital. Berikut perkembangan nilai proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Grafik 2.87.
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yaitu dari 39,84% pada tahun 2020 menjadi 67,00% pada tahun 2024. Dari data tersebut masih terdapat 33,00% rumah tangga yang belum mendapatkan akses internet sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat mengentaskan area *blankspot* sehingga semua wilayah di Kabupaten Luwu bisa mendapatkan akses internet.

d. Jumlah dan Lokasi *Blankspot*

Blankspot adalah wilayah yang belum memiliki akses komunikasi dan informasi, baik analog maupun digital. Di era serba digital seperti sekarang, keberadaan *blankspot* menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan akses komunikasi dan informasi di seluruh wilayah. Ketidaktersediaan akses komunikasi dapat menghambat berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, hingga akses ke layanan darurat. Berikut data lokasi *blankspot* di Kabupaten Luwu tahun 2024.

Tabel 2.34.

Lokasi *Blankspot* di Kabupaten Luwu
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Bajo Barat	Desa Bonelemo
2	Bajo Barat	Desa Bonelemo Barat
3	Basse Sangtempe	Desa Sinaji
4	Basse Sangtempe	Desa Lange
5	Basse Sangtempe	Desa Ledan
6	Basse Sangtempe	Desa Tabi
7	Basse Sangtempe Utara	Desa Dampan
8	Bua	Desa Bukit Harapan
9	Larompong	Desa Bukit Sutra
10	Walenrang Barat	Desa Ilan Batu
11	Bua Ponrang	Desa Tampumia
12	Bua Ponrang	Desa Padang Ma'Bud
13	Ponrang	Desa Tampa
14	Latimojong	Desa Boneposi
15	Latimojong	Desa Kadundung
16	Latimojong	Desa Rante Balla
17	Walenrang Utara	Desa Siteba
18	Walenrang Utara	Desa Limbong
19	Suli Barat	Desa Kaladi Darussalam
20	Suli Barat	Desa Kaili
21	Suli Barat	Desa Muhajirin

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Luwu, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 21 Desa dari 11 Kecamatan yang masuk dalam lokasi *blankspot*. Basse Sangtempe merupakan kecamatan dengan Lokasi blankspot terbanyak yaitu terdapat 4 desa, kemudian disusul Kecamatan Latimojong dan Kecamatan Suli Barat dengan masing-masing 3 desa.

e. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

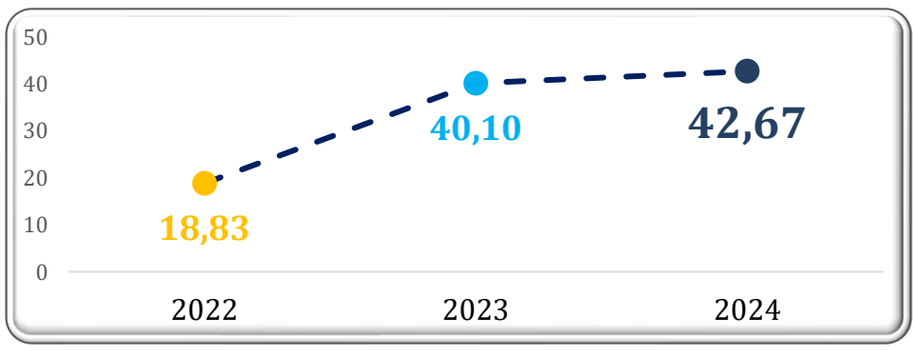
Masyarakat digital adalah masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Proses digitalisasi membentuk karakter esensial mereka, dengan aktivitas yang dilakukan secara elektronik dan bebas kertas. Seluruh kegiatan, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, kini sepenuhnya berbasis teknologi. Pengukuran IMDI secara rutin dilakukan mulai dari tahun 2022, untuk memantau perkembangan kompetensi digital

masyarakat Indonesia secara menyeluruh dari skala nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Kerangka kerja IMDI terdiri dari tiga komponen, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Adapun komponen pilar terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

1) Infrastruktur dan ekosistem;
2) Keterampilan Digital;
3) Pemberdayaan; dan
4) Pekerjaan.

Pilar-pilar tersebut bersama-sama mewujudkan pengukuran keterampilan digital yang komprehensif, objektif, dan terstandarisasi. Masing-masing pilar dijabarkan menjadi sepuluh subpilar spesifik, yang kemudian diukur melalui indikator-indikator yang berasal dari data primer dan sekunder. Berikut nilai IMDI Kabupaten Luwu tahun 2022-2024.

Grafik 2.88.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024



Tabel 2.35.
Nilai dan Kategori IMDI Kabupaten Luwu Tahun 2024
Berdasarkan Pilar

Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Pilar				Kategori
	Infrastruktur dan Ekosistem	Keterampilan Digital	Pemberdayaan	Pekerjaan	
42,67	48,76	63,29	23,22	35,85	Cukup

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025.

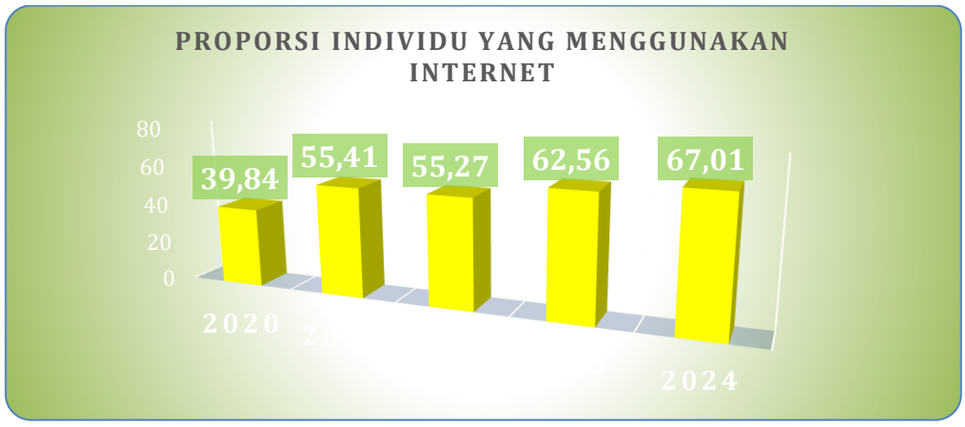
Berdasarkan data di atas, nilai IMDI Kabupaten Luwu mengalami peningkatan yaitu dari 18,83 pada tahun 2022 menjadi 42,67 pada tahun 2024 dengan kategori “Cukup”. Pilar Pemberdayaan dan Pekerjaan menjadi pilar yang memiliki nilai paling rendah. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya kemampuan masyarakat

dalam menggunakan teknologi digital untuk aktivitas digital yang produktif baik sebagai pengguna ataupun penyedia serta masih kurangnya adopsi teknologi digital pada industri dan kebutuhan keterampilan digital sebagian besar industri masih di level dasar (*basic*).

f. Proporsi Individu yang Menggunakan Internet

Proporsi Individu yang menggunakan internet merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui jumlah persentase penduduk yang mengakses dan menggunakan internet. Indikator ini memungkinkan untuk memahami perkembangan digitalisasi suatu daerah. Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang dilakukan pengukuran terkait jumlah penggunaan internet oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu. Berikut grafik Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024:

Grafik 2.89.
Proporsi Individu yang Menggunakan Internet di Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa proporsi individu yang menggunakan internet memiliki tren yang meningkat. Data tahun 2020 tercatat sebanyak 39,84 persen penduduk Kabupaten Luwu mengakses internet kemudian meningkat menjadi 67,01 persen pada tahun 2024. Terjadi peningkatan sebesar 27,7 persen selama lima tahun terakhir. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup baik, namun data diatas menunjukan masih ada 32,99 persen masyarakat

yang belum mengakses internet sehingga kedepan rencana pembangunan diarahkan untuk melakukan perluasan jangkauan internet secara merata sampai ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Luwu.

Pemerataan akses internet di wilayah kabupaten Luwu merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akses internet yang merata memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, akses internet juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah terpencil, seperti melalui e-commerce dan pariwisata digital. Dengan demikian, pemerataan akses internet dapat membantu mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh cakupan wilayah Kabupaten Luwu.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

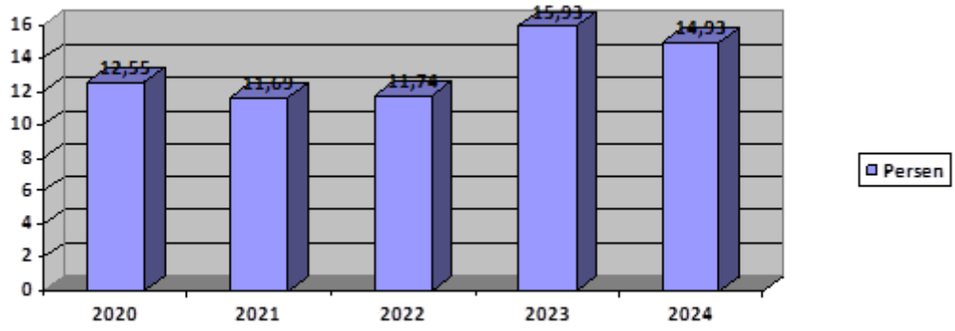
Integrasi ekonomi domestik dan global adalah pengaturan antar negara yang mencakup pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan dan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Integrasi ekonomi domestik dan global yaitu proses penggabungan ekonomi suatu Negara dengan ekonomi global sehingga terjadi peningkatan perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi antar Negara. integrasi ekonomi di Kabupaten Luwu dapat digambarkan dalam beberapa indikator sebagai berikut.

a. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Koefisien variasi harga antar waktu kebutuhan pokok adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data

semakin heterogen atau bervariasi. Secara umum, koefisien variasi harga sebesar ≤5% dianggap baik, sedangkan koefisien variasi harga sebesar ≥10% dianggap buruk. Berikut ini data persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Grafik 2.90.
Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



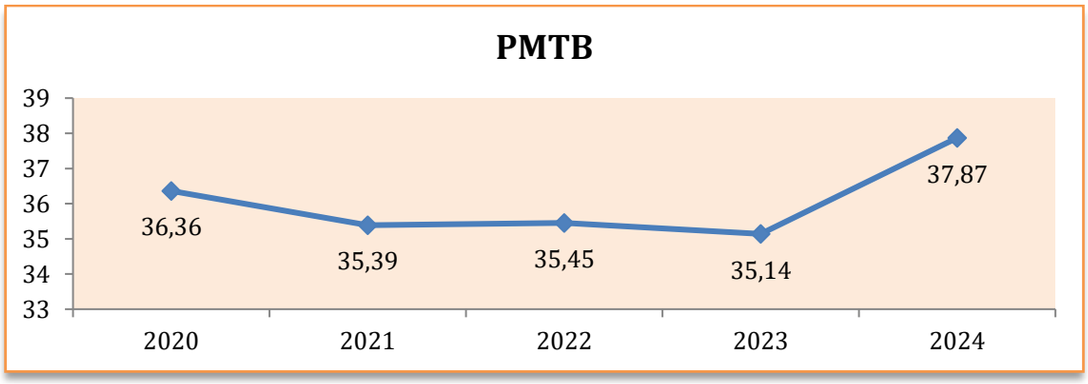
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat selama tahun 2020 hingga tahun 2024 koefisien variasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Luwu berada di atas 10% dan memiliki tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan dalam keadaan yang tidak stabil yang berarti dalam satu tahun terjadi perubahan harga kebutuhan pokok yang cukup drastis.

b. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. PMTB memiliki kontribusi yang relatif besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar 36,36 turun pada tahun 2023 menjadi 35,14, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 37,87 persen. Persentase Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.91.
PMTB Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

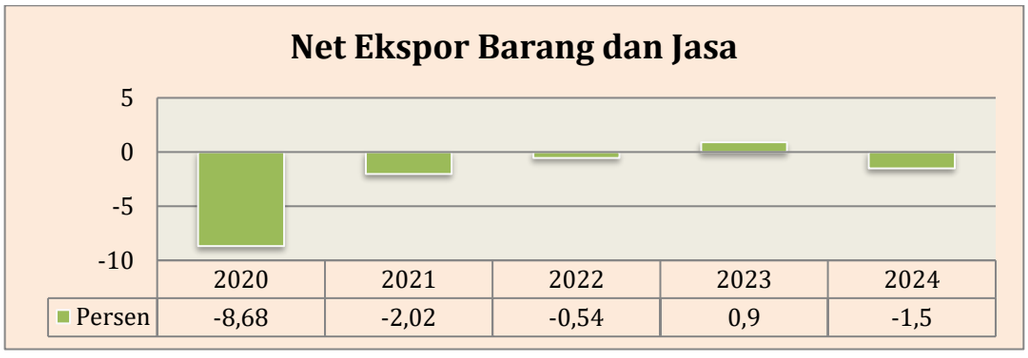


Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

c. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Net ekspor bernilai positif manakala ekspor lebih besar daripada impor dan net ekspor bernilai negatif manakala impor lebih besar daripada ekspor. Berikut ini data net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Grafik 2.92.
Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 net ekspor barang dan jasa Kabupaten Luwu selalu bernilai negatif yang berarti impor lebih besar daripada ekspor. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan net ekspor menjadi 0,91%. Peningkatan tersebut memberikan indikasi yang baik, dimana ekspor lebih besar dibandingkan impor. Hal ini juga menggambarkan bahwa perekonomian daerah mengalami surplus. Namun di tahun 2024 kembli mengalami penurunan sebesar -1,5.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan yang maju harus beriringan dengan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan. Konsep kota sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju harus dipadukan dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Hal ini berarti kota harus menyediakan akses yang adil terhadap layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi bagi seluruh warganya, tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penerapan teknologi hijau menjadi kunci keberhasilannya. Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus diarahkan pada kemandirian ekonomi dan sosial. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Integrasi antara perkotaan dan perdesaan sangat penting, di mana kota dapat berfungsi sebagai pusat layanan dan pasar bagi produk-produk dari desa, sementara desa dapat menyediakan ruang terbuka hijau dan sumber daya alam yang mendukung keberlanjutan kota. Dengan demikian, pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan akan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

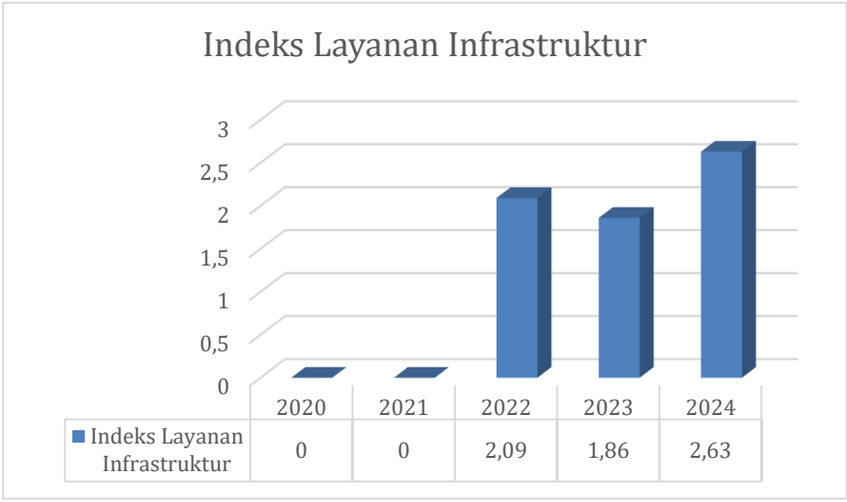
Untuk merencanakan konsep perkotaan dan pedesaan di wilayah kabupaten Luwu dalam lima tahun kedepan, perlu melakukan peninjauan terhadap gambaran capaian indikator kinerja kabupaten luwu selama lima tahun terakhir. Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam perencanaan penataan kota dan pedesaan yakni Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri.

a. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif

dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni: ketersediaan infrastruktur, fungsi infrastruktur, kondisi infrastruktur, manfaat infrastruktur, mutu dan kualitas infrastruktur. Indikator ini merupakan ukuran yang penting untuk melihat sajauh mana pemerintah dapat menyediakan infrastruktur yang memiliki nilai kualitas yang tinggi serta memiliki kriteria andal yang baik.

Grafik 2.93.
Indeks Layanan Infrastruktur Kab. Luwu Tahun 2020-2024



(Sumber : BRIN 2025).

Pengukuran Indeks ini baru dilaksanakan pada tahun 2022 ke tahun 2024 sehingga capaian tahun 2020 ke 2021 menjadi tidak terukur atau nol. Perolehan nilai pengukuran Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu dalam Lima tahun terakhir secara umum menunjukan adanya performa yang fluktuatif. Pada tahun 2022 layanan infrastruktur kabupaten Luwu berada pada skor 2,09 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dimana skornya meningkat menjadi 2,63. Capaian nilai tersebut diukur bedasarkan beberapa indikator, idantaranya Pemenuhan SPM Jalan, Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Kereta api, Layanan Infrastruktur Bandara, Layanan Infrastruktur Pelabuhan, Rasio Elektrifikasi, susut energi listrik, penyediaan Akses Air Minum Layak dan Tingkat kehilangan Air.

Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Luwu merupakan kabupaten yang Agraris dimana sebagian besar pendapatan masyarakat bertumpuh pada kegiatan pertanian perkebunan dan

perikanan. Oleh karena itu, pembagunan infrastruktur kedepan akan memberikan porsi yang optimal untuk mengangkat daya pada sektor-sektor unggulan daerah tersebut. Konektifitas antar pusat kegiatan masyarakakat khususnya jalan antar koneksi kecamatan, jalan Tani dan jalan Perikanan, Infrastruktur Pertanian, Pengadaan Fasilitas Pengolahan hasil bumi, pusat niaga, akses air bersih, Infrastruktur kesehatan, Infrastruktur Pendidikan, jaringan internet menjadi beberapa agenda utama Pemerintah Kabupaten Luwu dalam kurun lima tahun kedepan.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang berkualitas, pencapaan target Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan. Indikator ini mengambarkan hunian yang memenuhi standar minimal kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Di dalam indikator tersebut terkandung empat komponen kriteria yang menjadi barometer pembentuk. Pertama, ketahanan bangunan memastikan struktur rumah mampu melindungi penghuninya dari ancaman bencana alam dan kondisi cuaca ekstrem, serta menjamin keamanan jangka panjang tanpa risiko keruntuhan. Kedua, kecukupan luas menekankan pentingnya ruang yang memadai bagi setiap anggota keluarga, mencegah kepadatan berlebihan yang dapat memicu masalah kesehatan, privasi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketiga akses air minum yang layak Akses air minum layak berarti setiap rumah tangga memiliki ketersediaan air bersih yang aman untuk dikonsumsi, mudah diakses, dan terjangkau, sehingga meminimalkan risiko penyakit bawaan air dan mendukung praktik kebersihan pribadi dan yang keempat yaitu akses sanitasi layak menjamin ketersediaan fasilitas jamban yang higienis dan sistem pembuangan limbah yang memadai. Komponen ini krusial untuk mencegah penyebaran penyakit menular, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara kolektif, membentuk fondasi hunian yang sehat. Kurangnya akses terhadap toilet yang bersih dan aman, serta sistem pengelolaan limbah yang

tidak efektif, dapat memicu penyebaran penyakit menular seperti diare dan kolera, terutama di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur sanitasi, edukasi publik tentang praktik higiene, dan kebijakan yang inklusif merupakan langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua.

Tabel 2.36.
Capaian Akses Rumah Layak Huni menurut Komponen Kelayakan Tahun 2024

Kab/kota	Rumah Layak Huni	Ketahanan Bangunan	Kecukupan Luas	Air Minum Layak	Sanitasi Layak
Luwu	71.53	93.48	96.01	82.05	92.91
Palopo	85.73	95.11	92.18	99.26	96.57
Wajo	80.31	93.37	93.35	91.39	95.93
Luwu Utara	81.64	96.65	97.59	88.12	97.14
Enrekang	74.6	96.18	93.73	83.34	96.63

(sumber:Bps 2024).

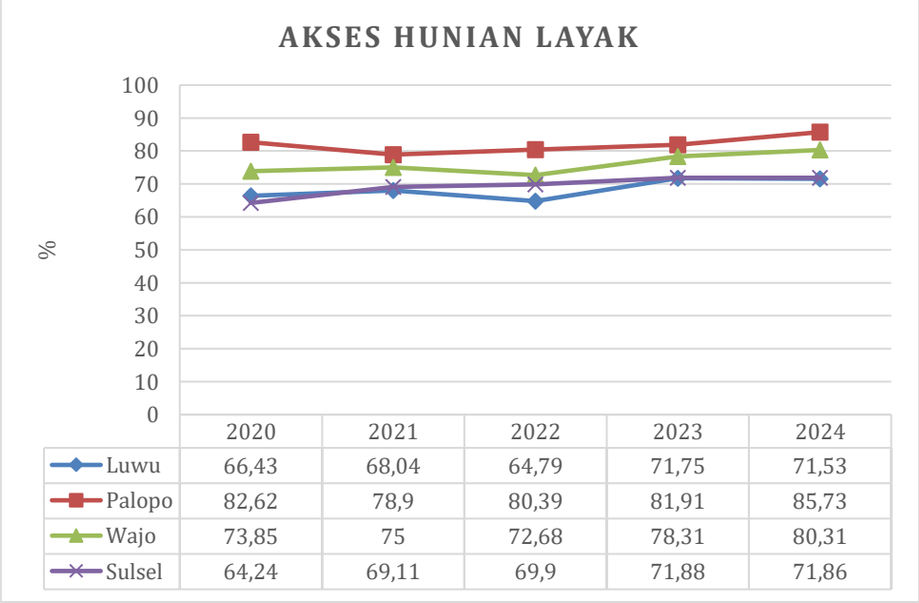
Data pencatatan capaian rumah layak huni menunjukan bahwa nilai yang diperoleh kabupaten Luwu paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang berbatasan di sekitarnya. Dari empat aspek kelayakan huni, Luwu hanya unggul dari Wajo dari aspek Ketahan Bangunan. Dari Aspek Kecukupan Luas menunjukan Luwu unggun dari Palopo, Wajo dan Enrekang. Dilihat dari aspek Air Minum, Kabupaten Luwu berpredikat paling rendah dan dari aspek Sanitasi Layak Luwu Juga memiliki nilai yang paling rendah dari Kabupaten di sekitarnya. Melihat hasil penilaian kelayakan huni di atas, kabupaten Luwu perlu untuk melakukan peningkatan kinerja untuk program rumah layak huni.

Pemerintah daerah harus memulai dengan melakukan pendataan komprehensif untuk mengidentifikasi rumah tangga yang belum memenuhi kriteria kelayakan pada keempat komponen tersebut. Berdasarkan data ini, program rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat diintensifkan, didukung dengan penyediaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) atau milik (Rusunami) di perkotaan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan

dan memenuhi kebutuhan kecukupan luas. Penegakan regulasi dan standar bangunan untuk memastikan setiap pembangunan hunian baru memenuhi kriteria kelayakan sejak awal.

Di sisi lain, peningkatan akses air minum layak dan sanitasi layak menuntut investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur. Perluasan jaringan perpipaan air bersih, pembangunan instalasi pengolahan air minum, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat atau komunal yang efektif harus menjadi prioritas. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air bersih dan praktik sanitasi yang benar juga tak kalah penting. Kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mencapai target indikator ini, demi terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.94.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Luwu, Wilayah Sekitar dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu	66,43	68,04	64,79	71,75	71,53
Palopo	82,62	78,9	80,39	81,91	85,73
Wajo	73,85	75	72,68	78,31	80,31
Sulsel	64,24	69,11	69,9	71,88	71,86

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan peningkatan persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak di seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Selatan. Secara umum rumah tangga yang dapat mengakses hunian yang layak di kabupaten Luwu cenderung mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan Kota, kabupaten sekitarnya seperti

Kabupaten Wajo, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terlihat capaian Kabupaten Luwu Masih berada dibawah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan capaan ini agar masyarakat kabupaten Luwu dapat secara menyelru memperoleh akses hunian yang layak.

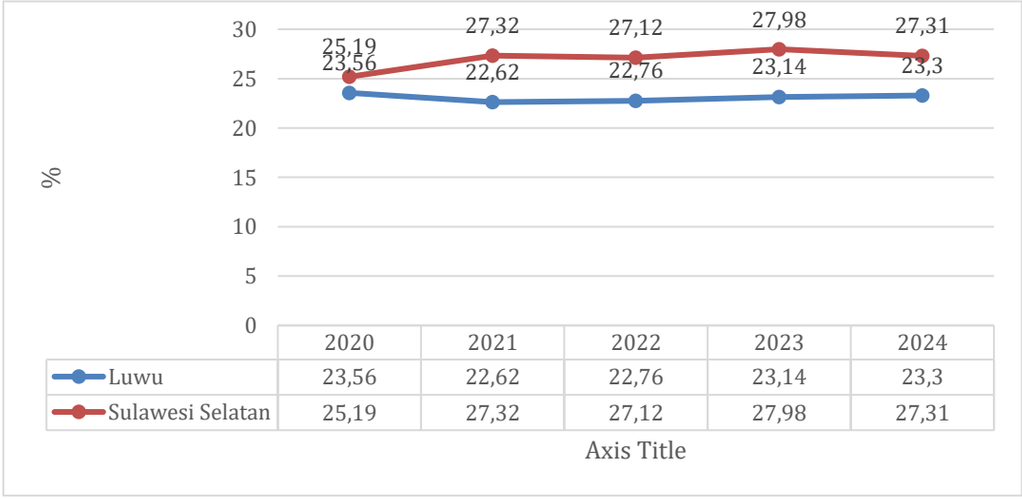
Akses terhadap hunian yang layak sangat erat kaitannya dengan faktor keterjangkauan secara ekonomi oleh masyarakat. Untuk memperoleh hunia yang layak saat ini perlu mengeluarkan dana yang cukup besar yang kemungkinan agak sulit untuk dijangkau. Perlu adanya upaya pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat untuk meringankan pengeluaran untuk memperoleh hunian yang layak

Akses terhadap hunian yang layak tidak dapat dipisahkan dari faktor keterjangkauan secara ekonomi bagi masyarakat. Biaya untuk memperoleh hunian yang memenuhi standar kelayakan seringkali memerlukan pengeluaran dana yang lebih besar. Hal tersebut menjadi batasan yang menimbulkan tantangan besar bagi mayoritas lapisan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kesenjangan antara harga properti yang terus meningkat dengan daya beli masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan impian memiliki rumah yang aman dan nyaman. Tanpa intervensi yang optimal dari pemerintah, kondisi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peran pemerintah menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan keterjangkauan ini. Diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah untuk memberikan bantuan yang meringankan beban finansial masyarakat dalam mengakses hunian layak. Bantuan ini dapat berbentuk beragam, mulai dari skema subsidi bunga kredit perumahan, penyediaan lahan yang terjangkau untuk pembangunan perumahan bersubsidi, program bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah swadaya, hingga fasilitasi kepemilikan melalui skema sewa-beli atau rumah susun sederhana. Dengan dukungan kebijakan dan program yang tepat sasaran, pemerintah dapat secara signifikan membantu masyarakat mewujudkan hak dasar mereka atas hunian yang layak, sehingga

berdampak positif pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik 2.95.
Data capaian Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2024.

Meskipun pada data persentase pengeluaran perkapita sebulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga di kabupaten Luwu masih di bawah dari capaian provinsi Sulawesi Selatan, namun proporsi tersebut masih relatif tinggi. Pemerintah perlu hadir untuk memberikan stimulan yang lebih proporsional seperti bantuan listrik, air, dan kebersihan hunian sebagai upaya yang konkret. Dengan menurunkan pengeluaran perkapita intuk kebutuhan perumahan untuk memberikan porsi pengeluaran yang sifatnya produktif seperti untuk membiayai permodalan untuk usaha dan investasi lainnya maka diharapkan derajat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.

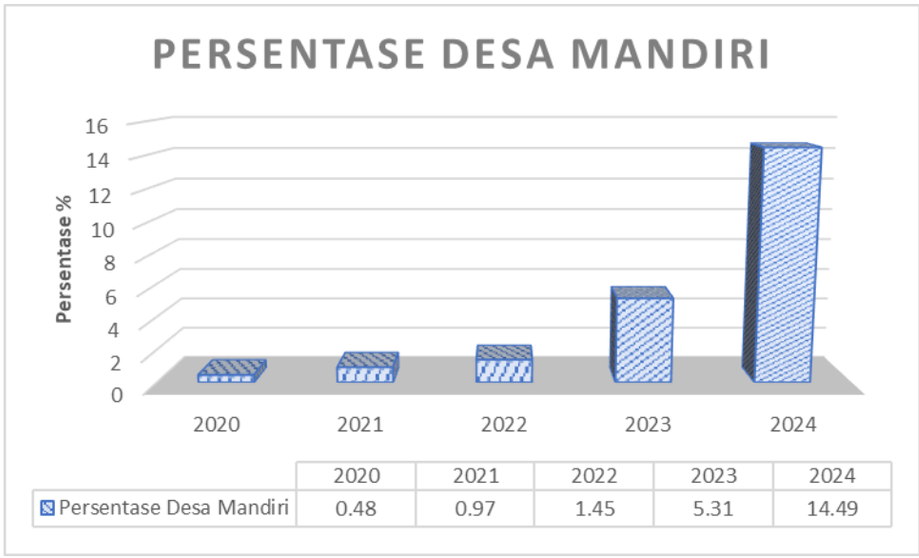
c. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan salah satu predikat/Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam Peraturan Kementerian Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan bahwa Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana

pemerintah melakukan kinerja dalam upaya mengentaskan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Persentase status desa mandiri kabupaten Luwu pada tahun 2023 tercatat 5,31 persen dari 207 desa. Berdasarkan data pencatatan dari dinas DPMD kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah desa yang memperoleh status Desa Mandiri sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.96.
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Data Perencanaan Dinas DPMD Kab Luwu tahun 2025.

Desa mandiri di kabupaten Luwu terus meningkat jumlahnya. Keberhasilan tersebut mengindikasi kan adanya pengelolaan administrasi yang baik oleh pemerintah desa dan adanya dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan terus ditingkatkan demi mencapai kesejahteraan masyarakat luwu. Kerja sama yang serius akan terus ditingkatkan dengan adanya program-program yang tujuannya memberikan penguatan kepada pemerintah desa untuk menuntaskan permasalahan yang ada di desa terutama perogram yang menjadi prioritas nasional dan kabupaten seperti penurunan stunting, anak tidak sekolah dan lainnya.

Pencapaian derajat desa mandiri ditinjau berdasarkan beberpa aspek. Aspek ketahanan sosial, aspek ketahanan ekonomi dan aspek ketahanan ekologi/lingkungan menjadi rangkaian komposit yang harus dikembangkan untuk memaksimalkan potensi desa itu sendiri.

Kemandirian suatu desa dapat dilihat dari cara desa memanfaatkan potensi yang ada melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan derajat perekonomiannya. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mengaktifkan badan usaha milik desa. Badan usaha yang dimiliki oleh desa, baik seluruhnya maupun sebagian besar modalnya, dan didirikan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui badan usaha ini, bantuan pemodalan dapat diberikan untuk usaha yang akan dijalankan oleh masayakat. Namun demikian, BUMDes harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi yang baik harus dilakukan agar badan ini dapat bejalan dengan baik.

Pemeringkatan BUMDes dan BUMDes Bersama yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui evaluasi kinerja dan potensi badan usaha milik desa. Penilaian mencakup beberapa aspek yakni aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek usaha dan unit usaha, aspek kemitraan, aspek aset dan permodalan, aspek administrasi laporan Keuangan dan akuntabilitas, aspek keuntungan dan mafaat bagi desan dan masyarakat. Bagi BUMDes yang berkinerja baik, pemeringkatan ini membuka peluang untuk mendapatkan penghargaan, pendampingan, dan akses pendanaan, sehingga mendorong percepatan pengembangan usaha desa. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong persaingan sehat antardesa dalam mengelola BUMDes secara profesional dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kriteria penilaian yang komprehensif, pemeringkatan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga sebagai panduan pengembangan bagi BUMDes untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing. Bagi desa-desa berprestasi, program ini memberikan insentif berupa penghargaan, pendampingan teknis, dan

akses pendanaan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui mekanisme ini, Kemendesa PDTT berupaya menciptakan ekosistem BUMDes yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pemeringkatan BUMDes bukan sekadar kompetisi, melainkan langkah nyata menuju kemandirian ekonomi desa. Berikut Pemeringkatan BUMDes di Kabupaten Luwu pada tahun 2024.

Tabel 2.37.
Pemeringkatan BUMDes Kabupaten Luwu Tahun 2025

Kecamatan	Pemeringkatan			
	Berkembang	Pemula	Perintis	Maju
Bajo	4	2	4	1
Bajo Barat	0	3	3	0
Basse Sangtempe	1	1	6	0
Basse Sangtempe Utara	0	2	10	0
Belopa	1	3	1	0
Belopa Utara	2	4	0	0
Bua	4	5	5	0
Bua Ponrang	0	4	4	0
Kamanre	2	0	3	0
Lamasi	2	7	0	0
Lamasi Timur	3	1	5	0
Larompong	0	2	10	0
Larompong Selatan	0	3	6	0
Latimojong	1	2	9	0
Ponrang	0	1	6	0
Ponrang Selatan	0	2	9	0
Suli	0	8	4	0
Suli Barat	1	3	3	0
Walenrang	0	0	7	0
Walenrang Barat	0	2	3	0
Walenrang Timur	0	2	4	0
Walenrang Utara	0	4	6	0

Sumber : DPMD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

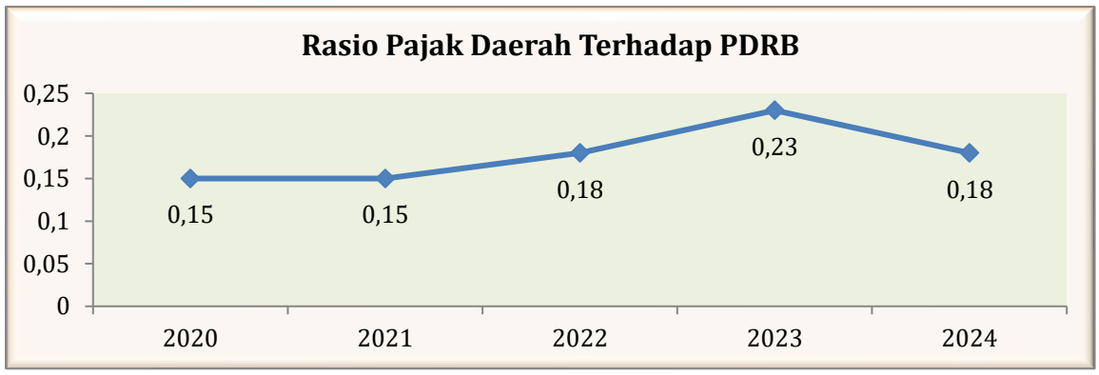
Berdasarkan data pemeringkatan BUMDes dikabupaten Luwu tahun 2025, terlihat bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas pengelolaan organisasi. Pemerintah Kabupaten Luwu perlu meningkatkan fasilitasi dalam rangka pembinaan BUMDes sehingga organisasi tingkat desa ini dapat bemberikan manfaat yang nyata untuk meningkatkan kemandirian desa.

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat. Pemerintah daerah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengatur dan mengumpulkan penerimaan sendiri, khususnya dalam hal perpajakan yang dapat memperkuat kapasitas fiskalnya. Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 berada pada level 0,15 naik pada tahun 2023 menjadi 0,23 persen. Namun pada tahun 2024 turun menjadi 0,18 persen. Dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.97.
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

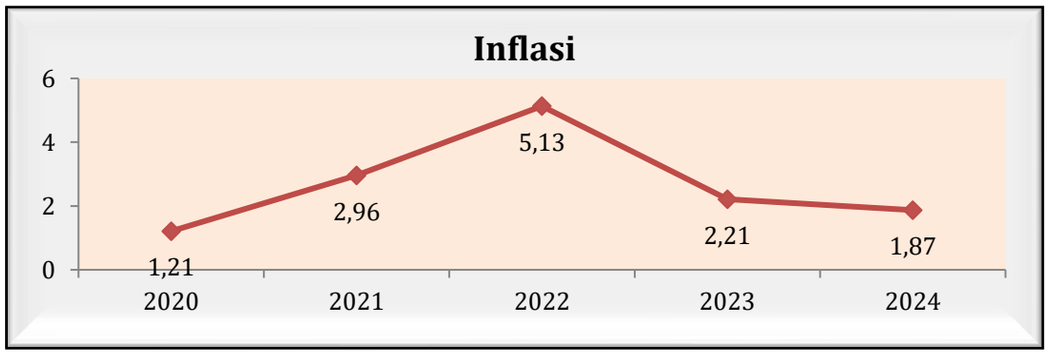


Sumber : Bapenda Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

b. Tingkat Inflasi Gabungan

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi Kabupaten Luwu berdasarkan IHK Kota Palopo. Nilai inflasi zona Kota Palopo lima tahun terakhir (2020-2024) berfluktuasi, terendah pada tahun 2020 sebesar 1,21, naik pada tahun 2021 sebesar 2,96, tertinggi di tahun 2022 sebesar 5,13 kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 2,21, dan pada tahun 2024 sebesar 1,87. Perkembangan laju inflasi IHK Palopo dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.98.
Inflasi Kabupten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

c. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan investasi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dinamika perekonomian suatu daerah. Investasi yang masuk ke suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini data pertumbuhan investasi daerah di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.38.
Pertumbuhan Investasi Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Realisasi Investasi (Rp)	357.000.000.000	336.613.519.167	1.876.267.703.941	2.570.604.531.514	1.290.283.000.000
Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	-	-5,88	457,40	37,01	-50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2025.

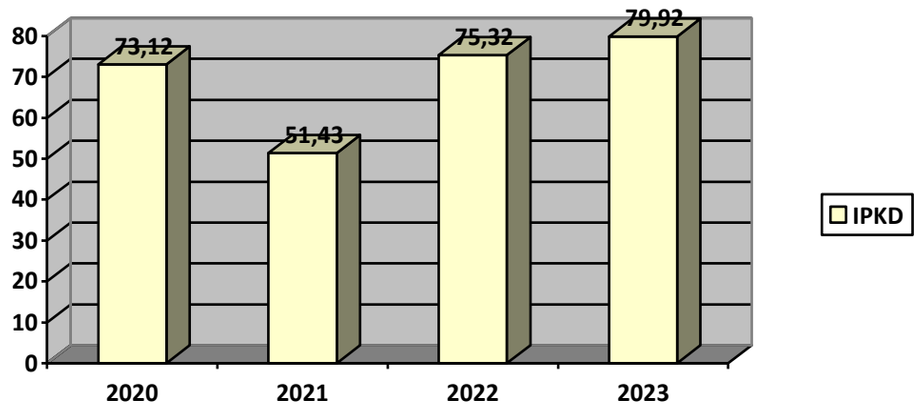
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu bahwa pertumbuhan investasi Kabupaten Luwu selama tahun 2021 hingga tahun 2023 sangat fluktuatif. Dimana pada tahun 2021 pertumbuhan investasi bernilai negatif yaitu -5,88 atau menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian

meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 457,40% dengan nilai realisasi investasi sebesar 1,87 triliun rupiah. Pada tahun 2023 pertumbuhan investasi di Kabupaten Luwu meningkat sebesar 37,01% dengan nilai realisasi investasi sebesar 2,57 triliun rupiah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -50% dengan nilai investasi sebesar 1,29 triliun.

d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks pengelolaan keuangan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola kuangan daerah. Dengan mengukur berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sebagai gambaran seberapa baik pengelolaan anggaran daerah. Nilai indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.99.
IPKD Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2023



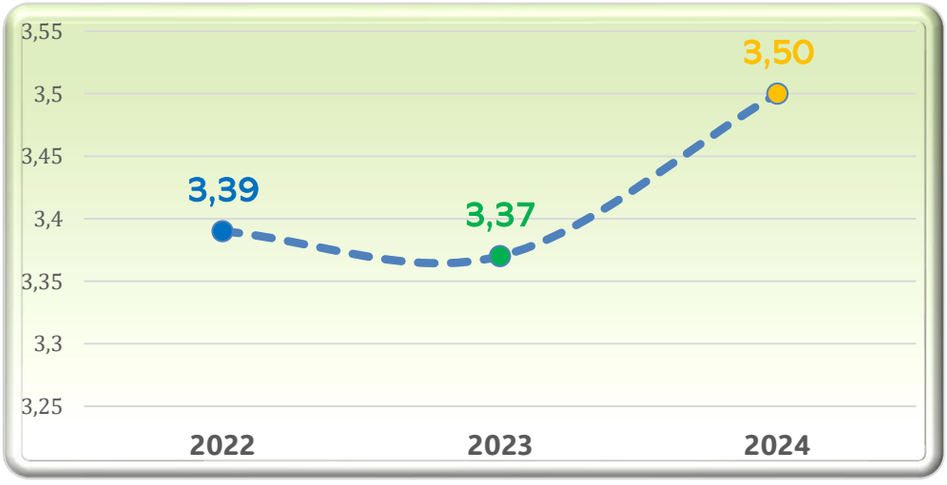
Sumber : SK Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2025.

Pada grafik diatas menunjukan nilai indek pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu yaitu pada tahun 2020 sebesar 73,12, mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 51,43, kemudian meningkat di tahun 2022 hingga 2023 sebesar 75,32 dan 79,92 (perlu perbaikan) atau nilai B.

e. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks ini terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10. Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Berikut data IKAD Kabupaten Luwu tahun 2022-2024.

Grafik 2.100.
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2024



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), 2025.

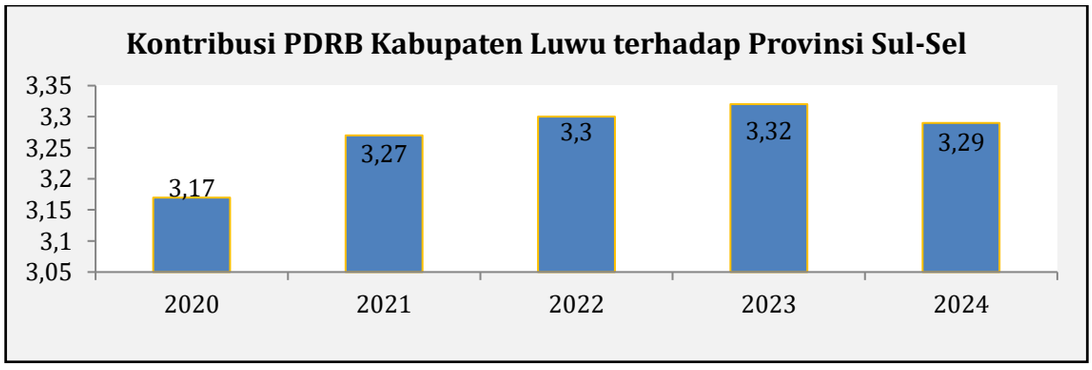
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian IKAD Kabupaten Luwu selama tiga tahun terakhir masih tergolong rendah yaitu berkisar di angka 3 poin. Dimana pada tahun 2022 nilai IKAD sebesar 3,39 poin kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 3,37 poin. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3,50 poin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat akses keuangan masyarakat masih rendah yang disebabkan beberapa hal seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau

terutama pada daerah terpencil, dan kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan yang masih rendah.

f. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Terhadap Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap Provinsi masih rendah walaupun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 Kabupaten Luwu hanya menopan perekonomian Sulawesi Selatan sebesar 3,17 persen meningkat menjadi 3,32 pada tahun 2023, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 3,29 persen. Kontribusi PDRB kabupaten luwu terhadap provinsi lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.101.
Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu terhadap Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan bentuk kebijakan atau program layanan publik yang diberikan oleh satu pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan dasar, mendorong pembangunan yang insklusif dan berkelanjutan dan

meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Aspek pelayanan umum digambarkan dalam: (1) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaftif; (2) hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi subtansial; (3) ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan; dan (4) kinerja setiap urusan pemerintah daerah, yang tercerminkan dalam pencapaian indikator – indikatornya sebagai berikut:

2.4.1.Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Perbaikan Penyelenggaraan pemerintahan harus di topang dengan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif dan inklusif. Hal ini dilakukan untuk dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan juga mampu menyesuaikan dengan tuntunan zaman saat ini dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kehandalan dalam pelayanan pemerintahan.

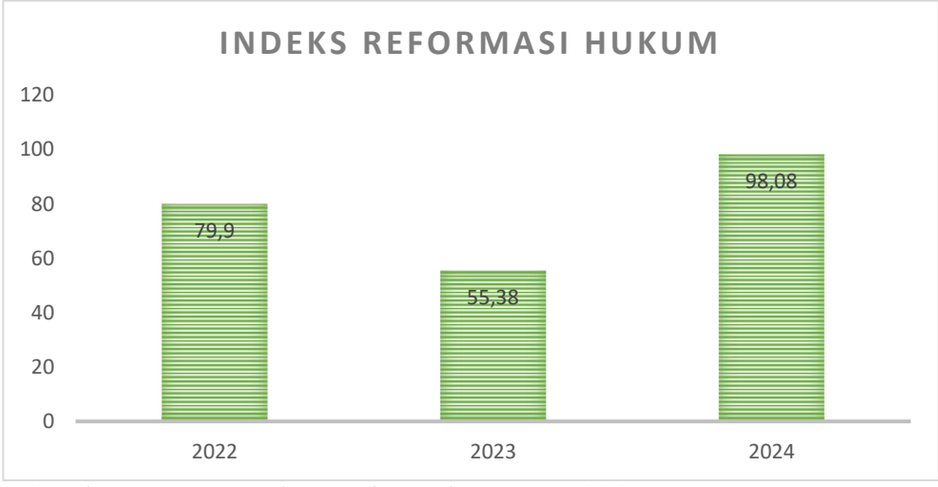
a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum (IRH) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya reformasi di bidang hukum dan tata kelola pemerintahan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pengukuran indeks reformasi hukum ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin tinggi nilai indeks reformasi hukum maka semakin berhasil pelaksanaan komponen reformasi hukum.

Data indeks reformasi hukum yang dirlis oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik indonesia memperlihatkan jika nilai indeks reformasi hukum di Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah 98,08 (kategori AA) dengan predikat sangat baik. Nilai ini meningkatkan

signifikan dari tahun sebelumnya, dimana nilai indeks reformasi hukum tahun 2023 adalah 55,3 (kategori CC) dengan predikat cukup. Hal ini mengindikasikan jia upaya upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel sudah sangat baik. Hasil ini menjadi tantangan kedepanya untuk dapat dipertahankan bahkan di tingkatkan sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih baik. Adapun data capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu dapat di lihat pada garik di bawah ini :

Grafik 2.102.
Indeks Reformasi Hukum Kab. Luwu Tahun 2022 - 2024



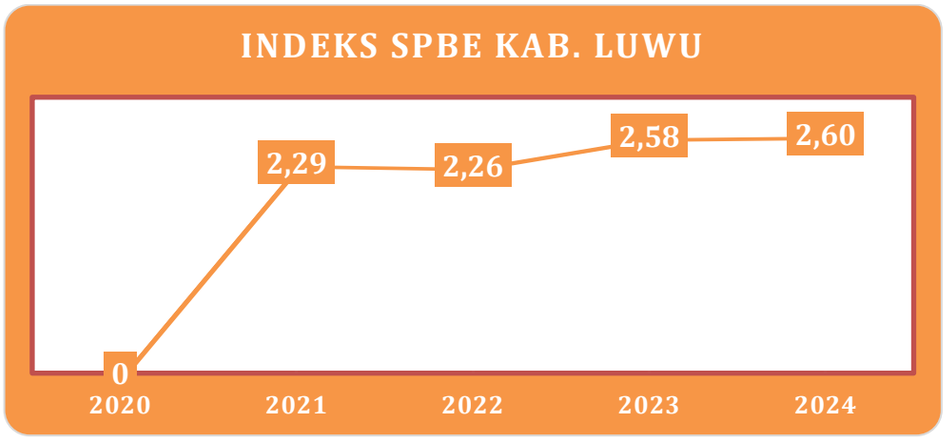
Sumber : Kementerian Hukum dan HAM, 2025.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemanfataan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, yang penerapanya bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah layanan pemerintahan. Indeks pemerintahan berbasis elektronik digunakan untuk mengukur sejauh mana negara atau daerah telah mengadopsi dan memanfaatkan tekonologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemerintahan. Indeks ini merepresentasikan tingkat kematangan dan efektivitas implementasi E-Goverment yang mencakup penyediaan layanan publik secara digital, transparansi, partisipasi masyarakat, serta integrasi sistem pemerintahan.

Data nilai indeks SPBE Kabupaten Luwu dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.103.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian PAN RB, 2024.

Grafik diatas memperlihatkan jika indeks SPBE tahun 2024 sebesar 2,60 poin meningkat dari tahun 2023 sebesar 2,58 poin, hal ini menunjukkan jika sudah ada upaya peningkatan dalam pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Luwu meskipun belum maksimal sehingga peningkatannya belum cukup signifikan. Kedepannya Pelayanan berbbasis digital ini harus terus di tingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efesien.

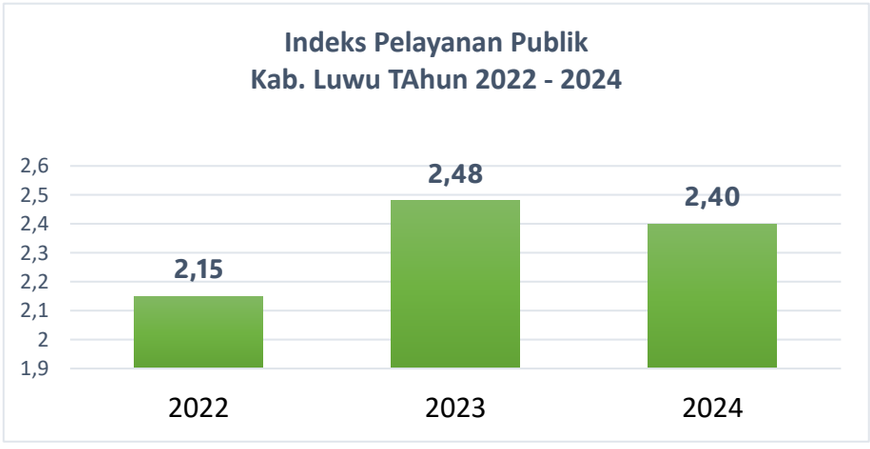
c. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan hal yang kerap mendapat perhatian dari pimpinan daerah karena ini menjadi gambaran awal dari penyelenggaran pemerintah di suatu daerah. pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks pelayanan publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana dan prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Hasil penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam rentang waktu tahun 2022 - 2024 menempatkan Kabupaten Luwu dalam kategori C (Cukup), dengan nilai skor indeks 2,15 di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 2,48 di tahun 2023, namum kemudian menurun menjadi 2,40 di tahun 2024. Nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu yang masih berada dalam kategori C ini mengindikasikan masih rendahya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Luwu, karenanya upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua aspek harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten di tahun-tahun mendatang agar nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu meingkat menjadi kategori Baik. Adapun data indeks pelayanan publik Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.104.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2024



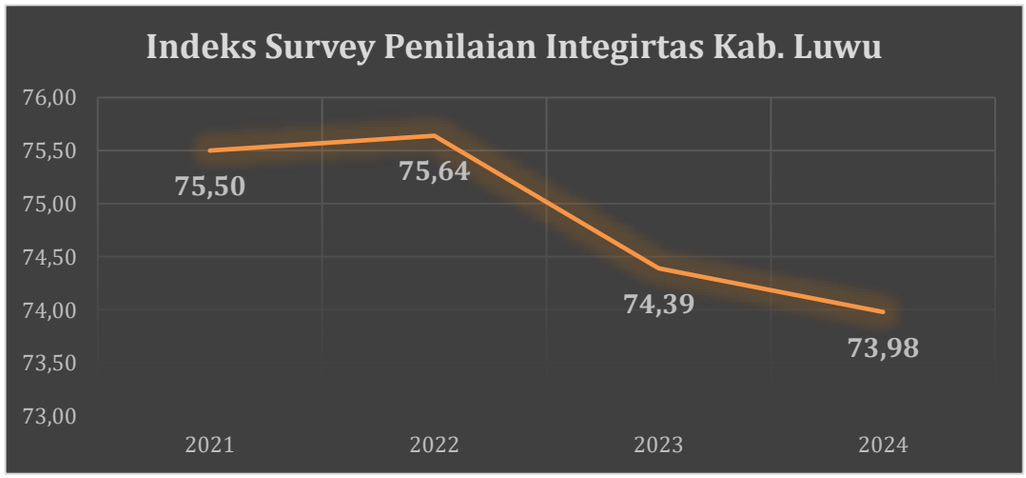
Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

d. Survei Penilaiain Integritas

Pelayanan pemerintahan yang berintegritas adalah pelayanan yang dilakukan dengan jujur, adil dan bertanggung jawab tampa adanya niat untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan yang berintegritas menjadi syarat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Indeks integritas nasional merupakan alat untuk mengukur atau menilai tingkat kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rilis hasil survey penilaian integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperlihatkan jika pada tahun 2024 Kabupaten luwu berada dalam kategori waspada dengan nilai indeks 73,98 poin. Nilai indeks ini mengalami penurunan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana di tahun 2023 nilai indeks SPI sebesar 74,39 poin, meskipun masih di kategori yang sama yakni waspada. Nilai Indeks SPI tahun 2024 yang menempatkan Kabupaten Luwu dalam kategori waspada ini menunjukkan jika upaya pencegahan korupsi yang di lakukan di Kabupaten Luwu masih sangat rendah. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari segenap stakeholder yang ada untuk menciptakan pememerintahan yang lebih bersih dan transparan. Adapun indeks penilaian integritas Kabupaten Luwu selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Adapun indeks penilaian integritas Kabupaten Luwu selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.105.
Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Luwu
Tahun 2021-2024



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025.

Trend penurunan nilai Indeks SPI terjadi di dua tahun terakhir seperti yang terlihat di grafik diatas dimana di tahun 2023 dan 2024 menurun setelah sebelumnya di Tahun 2022 nilai indeks SPI Kabupaten Luwu mencapai nilai 75,64 yang merupakan nilai tertinggi selama survey SPI dilakukan di Kabupaten Luwu meskipun juga masih dalam kategori Waspada. Hal ini menunjukkan jika upaya pencegahan korupsi yang di lakukan di Kabupaten Luwu masih

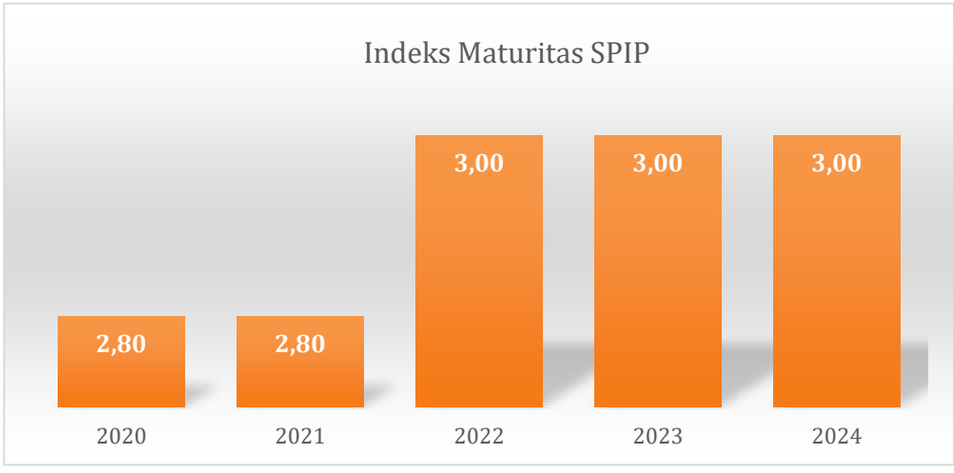
sangat rendah, untuk itu perlu upaya serius dari segenap stakeholder yang ada untuk menciptakan pengelolaan dan pelayanan pememerintahan yang lebih bersih dan transparan dengan melakukan pengawasan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan integritas ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

e. Indeks Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang dirancang untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Penilaian SPIP ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan model maturitas SPIP yang mengacu pada lima komponen utama yakni : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring pengendalian.

Indeks Maturitas SPIP ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan (maturty level) penerapan SPIP yang di klasifikasikan dengan level 0 – 5, semakin tinggi nilai indeks maturitas semakin menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP di suatu Pemerintah Daerah. Adapun data Indeks Maturitas SPIP Kabuaten Luwu tahun 2020 – 2024 tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.106.
Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangungan, 2025.

Rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seperti yang tersaji di grafik diatas memperlihatkan jika indeks maturitas SPIP Kabupaten Luwu dalam tiga tahun terkahir mencapai level 3 (terdefenisi). Hal ini mengindikasikan jika kualitas penyelenggaran SPIP di Kabupaten Luwu sudah baik, pencapaian ini tentunya di dukung oleh sistem pengendalian yang terstruktur dengan dokumentasi dan mekanisme pengukuran yang jelas. Kedepanya sistem yang sudah baik ini harus lebih dioptimalkan lagi agar level indeks maturitas SPIP Kabupaten Luwu dapat ditingkatkan menjadi level 4 (terkelola).

Indeks maturitas bukan hanya menjadi sekedar alat ukur tetapi menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih efektif dan bertingteritas. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan prinsip good governance, transparan dan bebas korupsi. Penetapan target peningkatan level maturitas SPIP diharapkan dapat meminimalkan resiko, meningkatkan akuntabilitas, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif.

f. *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK

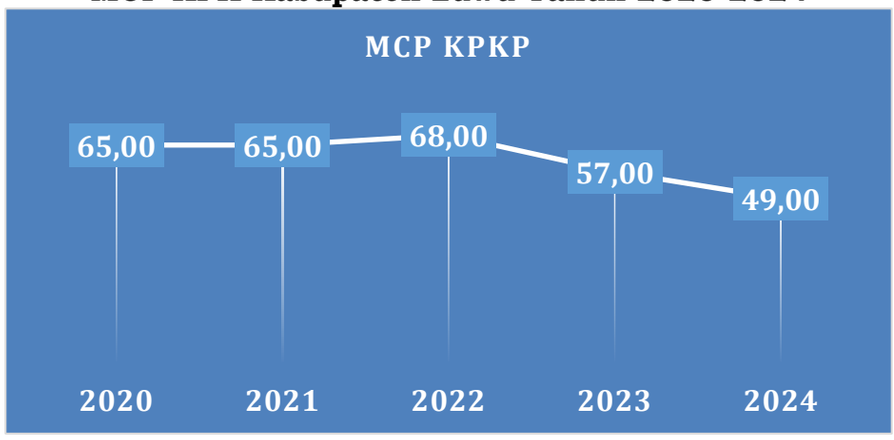
Pencegahan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk memastikan adanya regulasi dan sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan sistem *Monitoring Center For Prevention* (MCP) untuk memantau dan mengidentifikasi resiko korupsi di suatu pemerintah daerah.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK merupakan program monitoring capaian kinerja program, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK yang bertujuan untuk memantau titik–titik rawan korupsi, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Ada delapan area intervensi MCP yang menjadi fokus yakni manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi

pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Skor MCP KPK merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pencegahan korupsi. Peningkatan skor MCP ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan. Skor MCP KPK Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.107.
MCP KPK Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025

Grafik diatas memperlihatkan jika terjadi penurunan skor MCP KPK dalam dua tahun terakhir yakni 57 di tahun 2023 dan menurun lagi menjadi 49 di tahun 2024 setelah sebelumnya di tahun 2022 mencapai 68 yang merupakan skor tertinggi yang pernah dicapai Kabupaten Luwu dalam rentang waktu tahun 2020 - 2024.

Penurunan skor MCP KPK di tahun 2024 menjadi 49 (kategori rentan) ini menjadi warning bagi Pemerintahan Kabupaten Luwu karena hal ini mengindikasikan jika pemerintah daerah belum baik dalam upaya pencegahan korupsi dan perbaikan sistem pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu harus fokus dalam peningkatan efektivitas di delapan area intervensi utama dan meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan di tingkat opd serta membuat sistem pengawasan internal yang lebih baik.

Upaya intervnesi delapan fokus utama ini dapat berupa : perencanaan dan penganggaran yang transpran, pengadaan barang dan jasa yang efesien, pelayanan publik prima, pengawasan apip yang efektif, manajemen ASN yang profesional, pengelolaan BMD yang tepat, optimalisasi pajak daerah, pembentukan tim asistensi dan verifikasi, kolaborasi dengan Kejaksanan dan KPK untuk pendampingan, pengawasan dan evaluasi berkala. Dengan upaya perbaikan pada delapan intervensi ini diharapkan dapat meningkatan skor MCP KPK kedepannya sehingga Kabupaten Luwu dapat keluar dari kategori rentan dalam upaya pencegahan Korupsi.

g. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur, melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja secara transparan, akuntabel dan terukur sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penilaian sakip bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas, mendorong kinerja yang efektif dan efesien, transparasi dan partisipasi publik, serta sebagai dasar dalam evaluasi kebijakan.

Peningkatan nilai SAKIP menjadi indikasi adanya komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, dan menjadi gambaran utuh perbaikan tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan akuntabilitas kinerja.Capaian nilai sakip Kabupaten Luwu sudah cukup baik, dimana dalam kurun waktu empat tahun terakhir Kabupaten meraih kategori baik (B) dalam penilaian sakip. Adapun nilai Sakip Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.108.
Nilai SAKIP Kabupaten Luwu
Tahun 2020 - 2024



Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

Capaian nilai sakip Kabupaten Luwu seperti yang di sajikan pada grafik diatas memperlihatkan konsistensi Kabupaten Luwu yang selalu berada dalam kategori baik (B) dalam penilaian Sakip. hal ini menunjukkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Luwu sudah cukup baik, namum kedepanya masih diperlukan lagi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan komitmen dalam manajemen kinerja agar nilai sakip dapat ditingkatkan untuk menjadi kategori sangat baik (BB).

2.4.2. Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi subtansial merupakah elemen penting yang saling terkait dan harus dikuatkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dengan stabilitas politik dan keamanan yang selalu kondusif. Ketika ketiga elemen ini terjaga maka pembangunan nasional dapat lebih cepat dilakukan karena dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga harmonisasi sosial antar warga negara sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Negara maju dan berdaulat hanya dapat di wujudkan jika ketiga elemen penting ini menjadi kuat. Hukum yang berkadilan dapat memastikan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam

hukum untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Keamanan nasional yang tangguh mengggambarkan kemampuan negara melindungi kedaulatan, keutuhan wilayahnya dan keamanan masyarakatnya dari segala bentuk ancaman, dan Demokrasi subtansial memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk berekpresi dan mengemukakan pendapat dan turut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

a. Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan mengacu pada tingkat atau persentase keberhasilan penegakan Perda dan Perkada yang ditetapkan. Berdasarkan laporan pelaksanaan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten sudah terlaksana secara maksimal, dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, nilai persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Luwu adalah 100 persen. Hal ini mengindikasikan konsistensi dari OPD terkait dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, dan juga menggambarkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam mematuhi Perda dan Perkada yang ditetapkan.

Kemampuan suatu daerah dalam penegakan Perda dan Perkada disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah : sosialisasi Perda dan Perkada yang efektif, penegakan aturan hukum, keberadaan intitusi yang kuat dan terpercaya, Perda dan Perkada yang jelas dan dapat di terapkan, kerjasama antar stakholder terkait, serta kesadaran dari masyarakat dalam mematuhi perda dan perkada yang ditetapkan.

b. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Selesaikan

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu kondisi kehidupan bermasyarakat yang teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, dan tertib. Untuk mewujudkan kondusifitas lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu maka diperlukan usaha bersama dari seluruh stakeholder terkait dan juga seluruh elemen masyarakat. Kondisi Trantinbum di

Kab. Luwu sudah sangat baik, dimana Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mencapai skor sempurna yakni 100 persen dalam mencegah dan meredam gangguan Tratinbum di Kabupaten Luwu. Kedepanya kondisi ini tentu harus tetap dipertahankan dengan upaya deteksi dini segenap potensi gangguan tratinbum sehingga upaya pencegahan ganguan trantinbum dapat lebih cepat dilakukan.

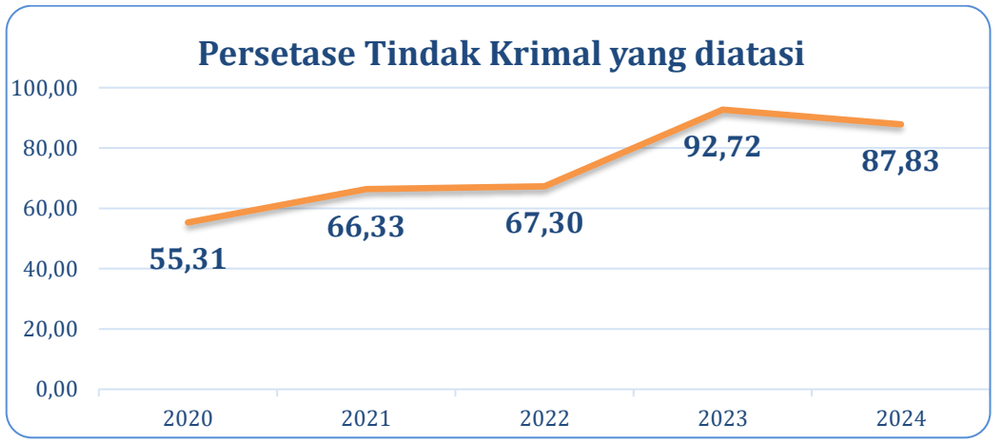
c. Persentase Tindak Kriminal Yang Diatasi

Persentase tindak kriminal yang diatasi menunjukkan jumlah kejadian kriminal yang dilaporkan pada intansi yang berwenang, dan mendapat penagangan dan dapat teratasi. Rilis data tindak kriminal yang diatasi, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Luwu memeperlihatkan adanya peningkatan siginifikan dari persentase tindak kriminal yang diatasi, yang sebelumnya sebesar 67, 3 % pada tahun 2022 menjadi 92, 72 % di tahun 2023 namum kembali menurun menjadi 87,83 % di tahun 2024. Hal ini memperlihatkan jika pada dasarnya kinerja dari intansi terkait sudah cukup baik. Namun perlu konsistensi dalam upaya penanganan tindak kriminal agar tidak terjadi penurunan seperti yang terjadi di tahun 2024.

Keberhasilan penanganan kasus tindak kriminal sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan sumber daya, sarana prasarana baik itu dalam hal jumlah personil kepolisian maupun ketersedian peralatan investigasi dan peralatan pendukung lainnya, serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait kasus yang ditagani.

Secara umum, dalam lima tahun terkahir, persentase tindak kriminal yang diatasi cenderung meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2024 dengan nilai persentase sebesar 87,83 % setelah di tahun sebelumnya di tahun 2023 memperoleh nilai persentase sebesar 92,72 % yang merupakan nilai persentase tertinggi dalam kurun lima tahun terkahir. adapun data persentase tindak kriminal yang diatasi tahun 2020 -2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.109.
Persentase Tindak Kriminal Yang Diatasi
Tahun 2020-2024



Sumber : Kepolisian Resor Luwu Tahun 2025.

Penurunan nilai persentase di tahun 2024 sebesar 87, 83 % seperti yang terlihat pada grafik diatas diharapkan tidak berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, namum sebalinya kembali dapat ditingkatkan, untuk itu diperlukan upaya berupa peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat, sosialisasi terkait jenis dan pencegahan tindak kriminal, serta pelibatan masyarakat dalam memberikan informasi tindak kriminal yang terjadi wilayah masing-masing. Dengan komptensi SDM yang cukup dan di tunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta didukung peran aktif masyarakat, maka diharpakan kondisi keamanan dapat lebih terjaga sehingga masyarakat dapat beraktiftitas dengan tenang dan nyaman.

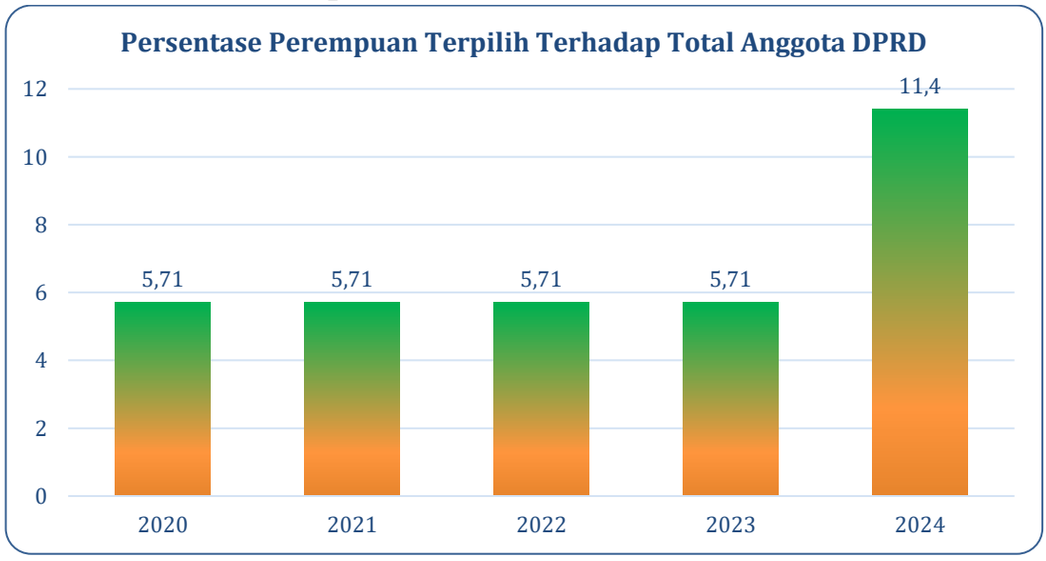
d. Pesentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Isu kesetaraan gender menjadi konsen dalam penyelengaraan pemerintahan, hal ini dimaksudkan agar kaum perempuan mengambil peran dalam jalannya pemerintahan dengan memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Dalam hal partisipasi politik, isu kesetaraan gender ini di akomodir dengan mensyaratkan tiap partai politik mengusung minimal 30 % kaum perempuan sebagai caleg dalam pemilihan legislatif.

Besarnya partisipasi perempuan dalam politik dan besarnya keterwakilan suara Perempuan dalam pengambilan keputusan tercerminkan dalam besarnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keterwakilan perempuan di Dewan DPRD merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat inklusivitas demokrasi di tingkat lokal.

Pemilihan legislatif Tahun 2024, menepatkan 4 orang perempuan dari 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu, atau 11, 4 % dari total anggota DPRD Kabupaten Luwu. Persentase perempuan terpilih tahun 2024 ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya 5,71 %. Meskipun persentase perempuan terpilih tahun 2024 ini meningkat, namun pada dasarnya nilai ini masih tergolong rendah karena capaiannya yang masih kurang dari kuota 30 % untuk anggota DPRD perempuan. adapun data persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 dapat lihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 2.110.
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2025.

Grafik di atas memperlihatkan jika dalam rentang waktu lima tahun terakhir, persentase perempuan terpilih dari total anggota DPRD Kabupaten Luwu masih dibawah 30 %, hal mengindikasikan bahwa tingkat partispasi perempuan dalam politk masih cukup

rendah sehingga akan berpengaruh pada keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan terkhusus lagi terhadap isu-isu keseteraan gender, perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan.

Kurangnya perempuan yang terpilih bisa disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya adalah faktor budaya patriarki di masyarakat yang masih memandang persoalan politik merupakan dunia laki-laki sehingga pemilih cenderung lebih memilih calon laki – laki untuk menjadi aggota DPRD, rekrutmen dan kaderisasi partai pada kader perempuan yang belum berjalan dengan baik sehingga kader perempuan dengan kapasitas yang baik masih kurang sehingga kecenderungan calon legislatif perempuang yang didorong untuk maju dalam pemilihan legislatif terkadang bukan hadir dari kaderisasi partai dan seleksi yang ketat tapi hanya semata untuk memenuhi syarat pengajuan 30 % caleg perempuan.

Untuk itu kedepanya, pemerintah bersama dengan partai politik perlu berupaya upaya mendorong pendidikan politik bagi kaum perempuan dengan mengakitfkan organisasi-organisasi perempuan, melakukan pelatihan kepemimpinan khusus perempuan, sosialisasi terkait pentingnya keterwakilan perempuan di DPRD, pengembangan kapasistas dan pendampingan calon perempuan sehingga dengan itu diharapkan persentase perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD dapat meningkat.

e. PERDA yang merupakan Inisiatif DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki 3 fungsi utama, yang salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi ini mencakup penyusunan dan pengajuan rancangan Peraturan Daerah baik itu inisaitif DPRD maupun usulan dari pihak eksekutif, dan melakukan pengesahaan Ranperda menjadi Perda. Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD merupakan peraturan yang digagas dan diajukan oleh anggota DPRD sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan di tingkat daerah. Berbeda dengan perda yang diusulkan

oleh eksekutif (Pemerintah Daerah), Perda inisiatif ini mencerminkan aspirasi masyarakat yang di angkat melalui fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.

Jumlah perda inisiatif DPRD menjadi gambaran seberapa besar DPRD Kabupaten Luwu menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan Daerah. Adapun jumlah perda inisiatif DPRD Kabupaten Luwu yang di buat dalam rentang waktu tahun 2020 – 2024 tersaji pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.111.
Jumlah PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas terlihat jika perda inisatif DPRD yang dibuat dalam kurun 5 waktu terakhir masih cendreung fluktuatif, tahun 2022 merupakan tahun dengan jumlah Perda tertinggi dengan jumlah 4 perda, yang kemudian menurun di dua tahun terkahir yakni 3 perda di tahun 2023 dan terkahir 2 Perda di tahun 2024. hal ini dapat mengindentifikasian jika anggota DPRD belum memaksimalkan hak inisiatifnya dalam pembentukan perda, ataukah perda usulan dari pihak eksekutif sudah mengakomodir aspirasi masyarakat, yang menjadi indikasi positif jika pihak pemerintah sudah cukup baik dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

DPRD memiliki hak inisiatif dalam pembentukan Perda yang diperoleh dari aspirasi masyarakat. Kedepannya, DPRD Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengajukan lebih banyak Perda yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena dianggap lebih

mengerti kondisi dan keinginan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah Perda inisiatif DPRD maka bertambah pula aspirasi masyarakat yang diakomodir menjadi peraturan daerah yang nantinya akan menjadi payung hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan fungsinya dalam hal pembangunan, pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

f. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Partai Politik merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi, keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik memiliki nilai yang strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintahan yang inklusif dan kebijakan yang responsif. Keterlibatan perempuan diharapkan dapat lebih mampu mengadvokasi isu-isu yang lebih lekat dengan kaum perempuan seperti perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan reproduksi, dll.

Peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan langkah penting menuju kesetaraan gender dalam politik. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui berbagai regulasi, pendidikan politik, maupun dukungan partai politik, namun tantangannya masih tetap ada, yang salah satunya masih kuatnya budaya patriarki yang masih menganggap politik sebagai urusan laki-laki, sehingga perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, partai politik, masyarakat, dan perempuan sendiri untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan dalam politik. Adapun data persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.112.
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu, 2025.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase Perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 stagnan di angka 25,27%, namum meningkat menjadi 30 % di tahun 2024. Peningkatan ini menjadi tanda positif bagi keterlibatan perempuan dalam partai politk dan mengindikasikan jika ruang ekpresi politik bagi kaum perempuan sudah cukup terbuka, dan mengindentifikasikan jika masyarakat sudah mulai memberikan dukungan bagi perempuan yang hendak masuk dalam dunia politik.Dengan memiliki pengurus perempuan, maka partai politik sebagai lembaga penopang demokrasi akan lebih mudah dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan perempuan baik berupa pelatihan kepemimpinan perempuan, pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Keterlibatan perempuan sebagai pengurus partai politik bukan hanya tentang keadilan gender tetapi juga tentang kualitas demokrasi. Partai politik yang inklusif akan melahirkan kebijakan yang lebih adil dan kepemimpinan yang representatif. Untuk itu dibutuhkan komitmen yanag kuat dari partai politik, pemeritah dan masyarakat dalam membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat berperan aktif dalam politik sehingga perempuan dapat lebih berdaya dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terutama pada hal-hal yang terkait langsung dengan kaum perempuan.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi adalah kemampuan suatu negara untuk secara adaptif merespon tantangan dalam hubungan internasionalnya sedang pertahanan berdaya gentar kawasan adalah kemampuan suatu negara untuk mencegah ancaman dan serangan dari pihak lain dengan menunjukkan kekuatan dan kesiapan yang memadai.

Diplomasi dan pertahanan harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional diberbagai bidang, dan tetap memelihara hubungan internasional yang konstruktif. Diplomasi yang kuat dan didukung oleh pertahanan yang tangguh akan meningkatkan posisi tawar yang tinggi dalam geopolitik dunia sehingga kita tidak hanya menjaga kedaulatan negara Indonesia, tetapi juga mampu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

a. Indeks daya saing daerah

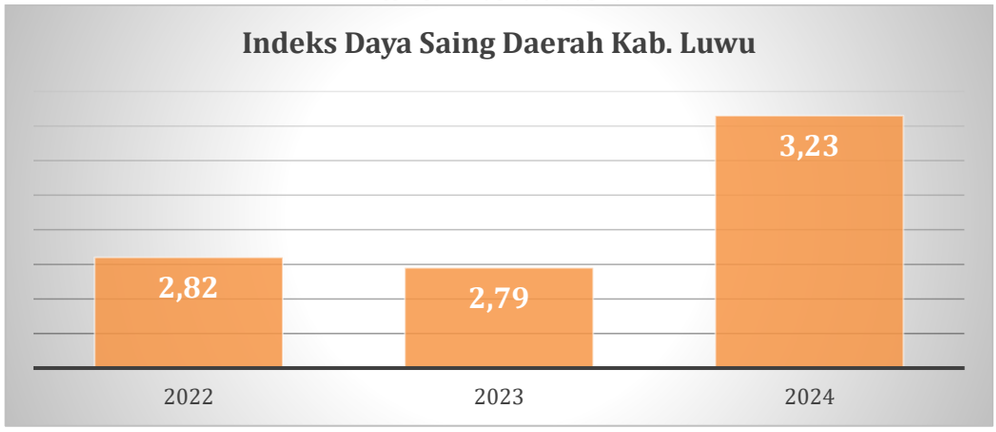
Indeks daya saing daerah digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya, potensi dan peluang yang dimilikinya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks ini menjadi informasi yang digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu daerah, dan menjadi acuan dalam menyusun program prioritas suatu daerah sehingga dapat dirumuskan konsep dan strategi pengembangan suatu daerah.

Daya saing suatu daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktifitas di tiga lini yakni : produktifitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong efesiensi, dan produktifitas yang di dorong oleh inovasi yang dituangkan dalam 4 komponen utama yang terdiri dari : lingkungan pendukung, SDM, Pasar, Ekosistem Inovasi dan dijabarkan dalam 12 pilar daya saing.

Pengukuran Indeks daya saing daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dimaksudkan untuk menyediakan data dasar yang akurat dengan mengkur produktifitas dan kemajuan daerah menggunakan kerangka global competitivesnes

indeks (GCI) dari word economic forum (WEF). Adapun data indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.113.
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2022-2024



Sumber: BRIN, 2025.

Grafik di atas memperlihatkan jika Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu masih fluktuatif. Indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu mengalami penurunanan yang sebelumnya sebesar 2,82 di tahun 2022 menjadi 2,79 di tahun 2023, namum kembali meningkat menjadi 3,23 di tahun 2024. Peningkatan indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu di tahun 2024 ini mengindikasikan jika Kabupaten Luu sudah cukup mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saingnya meskipun belum cukup maksimal. Peningkatan ini tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan indeks daya daerah ini tentunya harus dapat dipertahankan bahkan di tingkatkan dengan melakukan intervensi pada aspek-aspek pendukung daya saing daerah sehingga Kabupaten Luwu dapat berkembang menjadi daerah yang lebih kompetitif dengan daerah lain.

b. Jumlah Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti

Dalam upaya memajukan pembangunan daerah di berbagai sektor, Pemerintah Kabupaten luwu telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pihak swasta dan Universitas. Kerjasama daerah dengan berbagai pihak ini merupakan salah satu kunci penting dalam mempercepat

pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potesi sumber daya, mengatasi permasalahan dan keterbatasan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten telah menjalin kerjasama di berbagai bidang diantaranya : kesehatan, hukum, infrasturuktur, pengembangan desa/Pemerintahan, ekonomi, penanggulangan bencana, pengembangan SDM, pendidikan dan penelitian, pertanahan, ketahanan pangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan program kegiatan yang nyata.

Adapun jumlah kerjasama daerah yang ditindaklanjuti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.39.
Jumlah Kerjasama Daerah Yang Ditindaklanjuti
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kerjasama
1.	2020	4
2.	2021	3
3.	2022	3
4.	2023	37
5.	2024	6

Sumber : Sekertariat Daerah Kab. Luwu, 2025.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintah daerah adalah hasil dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, diukur berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Kinerja juga diukur berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terbagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang urusan Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak; Pangan;

Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan dan Kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan yang terdiri dari bidang urusan Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi. Serta penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari bidang urusan Perencanaan Pembangunan; Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; Pengawasan; Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.

2.4.4.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

2.4.4.1.1. Urusan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dengan memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. APS adalah perbandingan penduduk usia 4-6 Tahun (PAUD), 7-12 tahun (SD), 13-15 tahun (SLTP), dan 16-18 tahun (SLTA) yang sedang bersekolah terhadap total penduduk usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesadaran penduduk (dalam hal ini orang tua) dalam menyekolahkan anak-anaknya.

Tabel 2.40.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	%	92,17	93,66	90,12	40,98	54,10
SD/MI	%	93,94	94,14	94,35	98,48	79,48
SMP/MTs	%	94,28	96,08	95,06	79,76	55,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 APS PAUD di Kabupaten Luwu sebesar 92,17%, menurun menjadi 54,10%

pada tahun 2024. Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2020 mencapai 93,94%, sedangkan pada tahun 2024 APS SD/MI menurun menjadi sebesar 79,48%. Jenjang pendidikan SMP/MTs, pada tahun 2020 sebesar 94,28%, menurun menjadi 55,35% pada tahun 2024.

Capaian tahun 2024 untuk angka partisipasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dari target 66,26 % terealisasi hanya 54,10%, pada jenjang pendidikan SD/MI target 102,5% terealisasi 79,48%, berikut jenjang pendidikan SMP/MTs target 79,34% terealisasi 55,35%. Kinerja untuk Angka Partisipasi Sekolah pada semua jenjang pendidikan belum mencapai sesuai target yang diharapkan.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk yang mengenyam pendidikan. APK di Kabupaten Luwu untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A terjadi penurunan dari 93,94% pada tahun 2020 menjadi 79,47% pada tahun 2024. Jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B juga terjadi penurunan dari 98,68% pada tahun 2020 menjadi 75,70% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2021	2023	2024
SD/MI/Paket A	%	93,94	94,14	94,14	98,48	79,47
SMP/MTs/Paket B	%	98,68	96,08	96,08	79,76	75,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Capaian tahun 2024 untuk Angka Partisipasi Kasar (APK), pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A target 102,5% terealisasi 79,47%, berikut jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B target 102,5% terealisasi 75,70%. Kinerja untuk Angka Partisipasi Kasar pada

semua jenjang pendidikan belum mencapai sesuai target yang diharapkan.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,94% tetapi kemudian menurun menjadi 79,57% di tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 98,68% di tahun 2020, kemudian menurun menjadi 76,53% di tahun 2024.

Tabel 2.42.
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Paket A	%	93,94	94,14	93,63	98,48	79,57
SMP/MTs/Paket B	%	98,68	96,56	94,49	79,76	76,53

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Capaian tahun 2024 untuk Angka Partisipasi Murni (APM), pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A target 102,5% terealisasi 79,57%, berikut jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B target 92,32% terealisasi 76,53%. Kinerja untuk Angka Partisipasi Murni pada semua jenjang pendidikan belum mencapai sesuai target yang diharapkan.

4) Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan adalah angka melek huruf. Semakin tinggi angka melek huruf menunjukkan tingkat keberhasilan program

pendidikan begitu pula sebaliknya. Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Berikut perkembangan AMH Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024.

Grafik 2.114.
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Luwu, 2025.

AMH Kabupaten Luwu pada tahun 2024 tercatat sebesar 95,07 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan AMH pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,35 persen. Angka AMH pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 95,07 persen penduduk mampu membaca dan menulis dan masih terdapat 4,93 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Capaian tahun 2024 untuk Angka Melek Huruf pada kategori sangat tinggi yakni dari target 100% terealisasi 95,07%.

5) Angka Kelulusan

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami fluktuasi. Tahun 2020 angka kelulusan jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Luwu adalah sebesar 93,84% kemudian meningkat menjadi 99,33% di tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami fluktuasi. Angka kelulusan paling tinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 98,11%.

Tabel 2.43.
Angka Kelulusan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	%	93,84	95,58	96,58	93,73	99,33
SMP/MTs	%	97,46	97,04	96,22	81,59	98,11

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Capaian tahun 2024 untuk Angka Kelulusan (AL), pada jenjang pendidikan SD/MI target 100% terealisasi 99,33%, berikut jenjang pendidikan SMP/MTs target 100% terealisasi 98,11%. Kinerja untuk Angka Kelulusan pada kedua jenjang pendidikan tersebut tingkat capaian kinerjanya pada kategori Sangat Tinggi.

6) Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh lulusan dari satu jenjang pendidikan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi yaitu dari 98,86% pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,33% pada tahun 2024. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA cenderung meningkat, yaitu dari 98,93% pada tahun 2020 menjadi 99,46% pada tahun 2023.

Tabel 2.44.
Angka Melanjutkan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI ke SMP/MTs	%	98,86	98,80	97,04	81,90	98,00
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,93	98,03	99,01	99,46	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Capaian tahun 2024 untuk Angka Melanjutkan (AM), pada jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs target 100% terealisasi 98,00%, berikut jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA target 100% terealisasi 99,46% (tahun 2023). Kinerja untuk Angka

Melanjutkan pada kedua jenjang pendidikan tersebut tingkat capaian kinerjanya pada kategori Sangat Tinggi.

7) Angka Putus Sekolah (APtS)

Capaian angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,77 persen di tahun 2020 menurun menjadi 0,09 persen di tahun 2023. Namun di tahun 20204 mengalami peningkatan menjadi 2,56 persen. Sementara itu, Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTs padaberfluktuasi dengan capaian terendah di tahun 2021 sebesar 1,04 persen dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3,42 persen.

Tabel 2.45.
Angka Putus Sekolah (APtS)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	%	0,77	0,83	0,78	0,09	2,56
SMP/MTs	%	2,74	1,04	3,42	2,79	2,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Capaian tahun 2024 untuk Angka Putus Sekolah (APTs), pada jenjang pendidikan SD/MI target 0% terealisasi 2,56%, berikut jenjang pendidikan SMP/MTs target 0% terealisasi 2,80%. Kinerja untuk Angka Putus Sekolah pada kedua jenjang pendidikan tersebut belum tercapai sesuai yang diharapkan.

Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena alasan anak putus sekolah sangat variatif dan spesifik kasus perkasus, tidak hanya ketidakmampuan secara ekonomi yang menjadi penyebab putus sekolah, juga antara lain karena anak berkebutuhan khusus, anak tidak ingin bersekolah, anak telah bekerja dan menikah, anak berhadapan dengan bantuan hokum, mengalai kekerasan, terkena dampak bencana, ada kendala akses transportasi, anak berada pada kondisi sosial dan pergaulan kurang mendukung, serta anak tidak memiliki akta kelahiran.

8) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di wilayah Kabupaten Luwu sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah dapat diketahui kondisi ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 58,27% menjadi 92,18%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami fluktuasi namun, cenderung meningkat dari 35,27% pada tahun 2020 menjadi 87,08% pada tahun 2024.

Tabel 2.46.
Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	438	441	453	2.356	2.240
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	2.683	2.683	2.743	4.043	2.430
Persentase	**%**	**16,33**	**16,44**	**16,51**	**58,27**	**92,18**
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan baik	Unit	401	413	407	472	1.671
Jumlah seluruh ruang kelas	Unit	1.137	1.137	1.132	1.003	1.919
Persentase	**%**	**35,27**	**36,32**	**35,95**	**47,05**	**87,08**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

9) Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar per 10.000 Penduduk

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia pendidikan dasar. Sebagaimana tabel di bawah dapat diketahui rasio ketersediaan sekolah di tingkat dasar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 adalah sebesar 65,50 poin, yang berarti bahwa tersedia 65 sekolah untuk setiap 10.000 penduduk pada usia sekolah pendidikan dasar. Angka ini menurun menjadi

42,18 poin pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar (Per 10.000 penduduk)	Rasio	65,50	67,25	67,36	31,72	42,18

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

10) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid.

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pedidikan dasar di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 1:21. Hal ini menunjukkan bahwa 1 orang guru mempunyai beban kerja dalam mengajar dan mengawasi 21 murid.

Tabel 2.48.
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI + SMP/MTs	Guru : Murid	1:14	1:15	1:14	1:17	1:21
SMA/SMK/MA	Guru : Murid	1:12	1:12	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

11) Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat

Persentase ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 38,30% dari 8,57%. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat pada jenjang SD/MI juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yaitu dari 15,85% pada tahun 2020 menjadi 0,34% pada tahun 2024.

Sementara itu, ruang kelas dalam kondisi rusak sedang untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan drastis yaitu dari 50,36% pada tahun 2020 menurun menjadi 5,58% pada tahun 2024. Sedangkan persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat juga mengalami trend yang menurun yaitu dari 7,92% di tahun 2020 menjadi 0,42% di tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49.
Ruang Kelas Kondisi Rusak Sedang dan Rusak Berat
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	1.053	996	46	784	202
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2.356
Persentase	**%**	**45,68**	**42,71**	**1,86**	**38,30**	**8,57**
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	324	295	28	288	8
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	2.305	2.332	2.476	2.047	2.356
Persentase	**%**	**15,85**	**14,06**	**12,65**	**14,06**	**0,34**
SMP/MTs						
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak sedang	Ruang	489	461	28	296	107
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**50,36**	**46,90**	**2,69**	**35,07**	**5,58**

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ruang kelas kondisi bangunan rusak berat	Ruang	77	61	25	76	8
Jumlah seluruh ruang kelas	Ruang	971	983	1040	844	1.919
Persentase	**%**	**7,92**	**6,20**	**2,40**	**9,00**	**0,42**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

12) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Secara umum, jika melihat perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Luwu antara tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, yaitu 84,00% pada tahun 2020 menurun menjadi 67,35% pada tahun 2024. Hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah pada masa mendatang adalah meningkatkan keberdayaan para guru untuk memenuhi kualifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 2.50.
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	84,02	84,24	68,77	65,10	67,35

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

13) Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta didik non formal mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024, dari 2.754 orang pada tahun 2020 menurun menjadi 1.666 orang di tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1.037 orang. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 513 orang. Penurunan terbanyak terjadi pada pendidikan Paket C yaitu dari 1.843 orang pada tahun 2020 menurun menjadi 286 orang pada tahun 2024. Hal ini

menunjukkan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia anak didik.

Tabel 2.51.
Pendidikan Non Formal
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Paket A	Orang	307	101	59	123	44
Paket B	Orang	604	420	256	200	183
Paket C	Orang	1.843	1.145	540	711	286
Jumlah	Orang	**2.754**	**1.666**	**855**	**1.037**	**513**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

14) Anak Tidak Sekolah (ATS)

Pada tahun 2024 jumlah anak tindak sekolah usia 7 tahun sampai 12 tahun sebanyak 736 orang. Sementara jumlah anak tidak sekolah usia 13 tahun sampai 15 tahun sebanyak 800 orang. Sedangkan anak tidak sekolah usia 16 tahun sampai 18 tahun sebanyak 1.861 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52.
Anak Tidak Sekolah
Kabupaten Luwu Tahun 2024

Tahun	Satuan	Usia 7-12 Tahun	Usia 13-15 Tahun	Usia 16-18 Tahun
2024	Orang	736	800	1861

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan gambaran kinerja pada urusan pendidikan diatas, maka ada beberapa permasalahan sekaligus isu strategis pada urusan pendidikan sebagai berikut :

a. Masih rendahnya partisipasi pendidikan PAUD dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah, mencakup angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni.
b. Masih adanya angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah.
c. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kondisinya kurang layak dan belum sesuai standar dalam pelayanan pendidikan.
d. Rasio guru terhadap murid cukup rendah dari standar nasional, dan distribusi tenaga pendidikan yang kurang merata.

e. Masih rendahnya rata-rata kualifikasi pendidikan tenaga pendidik.
f. Masih terbatasnya layanan pendidikan yang inklusif dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal dan belum merata.

2.4.4.1.2. Urusan Kesehatan

1) Cakupan Puskesmas dan Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas yang terdapat di Kabupaten Luwu sudah cukup memadai sebab jumlah puskesmas telah sama dengan jumlah kecamatan yaitu sebanyak 22 puskemas sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Luwu ke depan akan fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas di setiap kecamatan agar dapat dicapai peningkatan kualitas layanan. Sedangkan untuk cakupan Puskesmas Pembantu pada tahun 2024 baru mencapai 56,39 persen dari seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Luwu.

Tabel 2.53.
Cakupan Puskesmas dan Cakupan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	Unit	22	22	22	22	22
Jumlah seluruh kecamatan	Kecamatan	22	22	22	22	22
Cakupan Puskesmas	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	112	120	122	122	128
Jumlah desa / kelurahan	desa / kelurahan	227	227	227	227	227
Cakupan Puskesmas Pembantu	**%**	**49,34**	**52,86**	**53,74**	**54,63**	**56,39**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi Per 1000 Kelahiran

Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Luwu sejak tahun 2020-2024 cenderung menurun yaitu dari 0,9923 menjadi 0,9886 yang artinya dalam 1000 kelahiran terdapat 984 bayi yang bertahan hidup. Capaian tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi sehingga diharapkan setiap bayi yang lahir dapat hidup dengan sehat.

Tabel 2.54.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) per 1000 Kelahiran
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kematian bayi pada 1 tahun tertentu	Orang	48	53	80	83	55
Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu	Orang	6232	6417	6054	5410	4811
Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka (per 1000 KH)	7,70	8,26	13,21	15,34	11,40
AKHB (1-AKB)	Angka	**0,9923**	**0,9917**	**0,9868**	**0,9844**	**0,9886**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup dari sajian data pada tabel di bawah menggambarkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 mencapai 70,34 tahun dan meningkat menjadi 71,23 tahun pada tahun 2024.

Tabel 2.55.
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,34	70,44	70,75	71,00	71,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

4) Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup

Berdasarkan data pada tabel di bawah, kasus kematian balita di Kabupaten Luwu selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2020 angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup sebesar 9,33 dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,29. Hal ini berarti dalam 1000 kelahiran terdapat 2 balita yang meninggal.

Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare dan pneumonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tata laksana dalam penanganan balita sakit.

Tabel 2.56.
Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kematian balita pada 1 tahun tertentu	Orang	58	62	85	88	11
Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu	Orang	6232	6417	6054	5410	4811
AKBa	**Angka (per 1000 KH)**	**9,33**	**9,66**	**14,04**	**16,27**	**2,29**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

5) Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Kematian neonatal rata-rata disebabkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR) dan Asfiksa (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O2) ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh). Kondisi ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi dan kemampuan petugas dalam penanganan awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir

bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, sementara kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

Kematian neonatal di Kabupaten Luwu periode tahun 2020 s/d 2024 masih fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian neonatal sebesar 4 bayi per 1000 kelahiran hidup dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 10 bayi per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.57.
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kematian neonatal pada 1 tahun tertentu	Orang	31	42	64	85	50
Jumlah kelahiran hidup pada 1 Tahun tertentu	Orang	6232	6417	6054	5410	4811
AKN	**Angka (per 1000 KH)**	**4,97**	**6,55**	**10,57**	**15,71**	**10,39**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

AKI menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global dan merupakan indikator yang digunakan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ resiko jumlah kematian ibu.

Angka kematian ibu di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah 160,46 yang berarti dari setiap bayi yang lahir hidup terdapat 166 kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Angka ini meningkat menjadi 166,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Tabel 2.58.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin dan Nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Orang	10	15	11	7	8
Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	Orang	6232	6417	6054	5410	4811
AKI	**Angka (per 100.000 KH)**	**160,46**	**233,75**	**181,70**	**129,39**	**166,29**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun, 2025.

7) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Luwu relatif meningkat. Pada tahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 427 unit, meningkat menjadi 436 unit pada tahun 2024. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2020 sebanyak 29.814 jiwa. Kemudian menurun menjadi 28.851 jiwa pada tahun 2024. Rasio Posyandu per satuan balita pada tahun 2020 adalah 14,32 dan meningkat menjadi 15,11 pada tahun 2024. Dengan demikian, pelayanan kesehatan terhadap balita telah masuk kategori yang ideal.

Tabel 2.59.
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu	Unit	427	430	430	432	436
Jumlah Balita	Orang	29814	29831	30340	33029	28851
Rasio per satuan balita	Rasio	**14,32**	**14,41**	**14,17**	**13,08**	**15,11**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

8) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Meski demikian, rasio puskemas, poliklinik dan pustu per satuan penduduk justru menurun. Pada tahun 2020 jumlah sarana pelayanan kesehatan adalah 230 unit dan meningkat menjadi 238 unit pada tahun 2024. Jika dibandingkan per satuan penduduk, dapat diukur rasio ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu yaitu sebesar 1:1.619 pada tahun 2024. Hal ini berarti bahwa setiap sarana pelayanan kesehatan melayani penduduk sebanyak 1.620 jiwa.

Tabel 2.60.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Unit	234	237	237	238	238
Jumlah Penduduk	Orang	365.608	367.454	369.820	372.161	385.721
Rasio per satuan penduduk	**Rasio**	**1:1.562**	**1:1.550**	**1:1.560**	**1 :1.564**	**1:1.620**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

9) Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk

Sejak tahun 2020-2024, jumlah rumah sakit di Kabupaten Luwu sebanyak 2 unit. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah 0,00001. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI/Swasta	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Daerah	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah seluruh Rumah Sakit	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah Penduduk	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Rasio	Angka	**0,000055**	**0,000054**	**0,000054**	**0,000054**	**0,00001**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

10) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter di Kabupaten Luwu terus meningkat pada periode tahun 2020-2024, dari 48 orang pada tahun 2020 menjadi 115 orang pada tahun 2024. Jumlah ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00030 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62.
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dokter	Orang	48	44	57	74	115
Jumlah Penduduk	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Rasio per satuan penduduk	Angka	**0,00013**	**0,00012**	**0,00015**	**0,00020**	**0,00030**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

11) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dianggap belum mencukupi dan belum sesuai kebutuhan di unit pelayanan kesehatan termasuk di Puskesmas dan Rumah Sakit. Secara umum tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) masih kurang jumlahnya, serta tenaga untuk upaya promotive dan preventif (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga Farmasi, dan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis). Pendistribusian tenaga kesehatan tidak merata utamanya di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.

Tabel 2.63.
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Medis	Orang	417	441	501	594	1810
Jumlah penduduk	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Per 10.000 penduduk	**0,00114**	**0,00120**	**0,00135**	**0,00160**	**0,00469**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Luwu selama kurun waktu 2020-2024 terus bertambah yaitu dari 417 orang menjadi 1810 orang. Jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk meningkat. Jika dibandingan dengan

jumlah penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2024 sebesar 0,00469.

12) Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sama halnya dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama akan diperoleh gambaran tentang komplikasi kebidanan yang ditangani. Pada tahun 2020-2023, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 100%. Namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 73,34%.

Tabel 2.64.
Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Kasus	1224	1398	917	1369	1268
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1224	1398	917	1369	1729
Cakupan	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**73,34**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

13) Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2024 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan sangat fluktuatif tetapi memiliki tren yang menurun. Cakupan upaya pertolongan oleh tenaga kesehatan dengan komptensi kebidanan paling rendah terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 58,52%, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai 89,45% pada tahun 2021.

Tabel 2.65.
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6229	6410	6064	5404	4829
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7166	7166	8252	7127	8252
Cakupan	**%**	**86,92**	**89,45**	**73,49**	**75,82**	**58,52**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

14) Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Upaya penyebarluasan program *Universal Child Immunization* (UCI) di Desa/ Kelurahan secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari cakupan UCI di desa dan kelurahan yang meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 226 desa/kelurahan yang telah dilakukan UCI. mengalami penurunan menjadi 221 desa/kelurahan pada tahun 2021-2023. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar 222 desa/kelurahan atau sudah mencapai 97,80%.

Tabel 2.66.
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	226	221	221	221	222
Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kel	227	227	227	227	227
Cakupan	**%**	**99,56**	**97,36**	**97,36**	**97,36**	**97,80**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

15) Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Penanganan perawatan terhadap balita gizi buruk dapat dikatakan sangat baik. Dengan melihat data jumlah bayi penderita gizi buruk setiap tahunnya mendapatkan perawatan secara menyeluruh. Adapun penanganan yang paling banyak dilakukan terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 187 balita dan pada tahun 2024 sebanyak 55 balita yang tertangani. Penyebabnya tentunya karena beberapa faktor salah satunya yaitu kurangnya asupan makanan bergizi yang diakibatkan rendahnya perekonomian keluarga.

Tabel 2.67.
Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja	Orang	187	72	50	31	55
Jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	187	72	50	31	55
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

16) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,1%, tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga mencapai 0,19% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 0,10%.

Tabel 2.68.
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase balita gizi buruk	%	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,19**	**0,10**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

17) Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Pada periode tahun 2020-2024, jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Jumlah anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2020 mencapai 96,59%, kemudian meningkat menjadi 100,00% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69.
Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak usia 1 Tahun yang mendapat Imunisasi Campak di suatu wilayah selama 1 Tahun	Orang	6155	6533	7206	6717	6463
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama.	Orang	6372	6693	6449	6798	6463
Persentase	**%**	**96,59**	**97,61**	**111,74**	**98,81**	**100,00**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

18) Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Penanganan terhadap balita penderita pneumonia setiap tahunnya telah dapat dilakukan 100%, meskipun kasusnya terus ditekan. Pada tahun 2024 tercatat 553 kasus, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 548 kasus. Meskipun telah ditangani 100%, namun perkiraan jumlah balita penderita pneumonia sangat tinggi dibanding yang ditangani pada tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap balita penderita pneumonia masih belum menyeluruh dan oleh karena itu dibutuhkan pengecekan rutin terhadap balita secara berkala dan menyeluruh di setiap wilayah.

Tabel 2.70.
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita Pneumonia balita	Orang	28	20	343	548	553
Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani	Orang	28	20	343	548	553
Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di suatu wailayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1376	1376	1361	1412	1364
Persentase	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

19) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2024 sebesar 68,65%. Lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60,82% pada tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diberikan perhatian khusus karena mengingat penularannya yang sangat mudah. Seperti halnya penanganan penyakit lainnya maka perlu diadakan tes kesehatan khusus penanganan penyakit TBC BTA secara rutin dan berkala tiap tahunnya.

Tabel 2.71.
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	Orang	258	594	258	416	403
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama	Orang	624	624	670	684	587
Cakupan	**%**	**41,35**	**95,19**	**38,51**	**60,82**	**68,65**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

20) Tingkat Prevalensi Tuborkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat prevalensi TBC per 100.000 penduduk periode tahun 2020-2024 di Kabupaten Luwu cenderung fluktuatif, yaitu dari 126,36 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 meningkat menjadi 219.85 per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa tingkat prevalensi tuborkulosis memiliki tren meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka harus dilakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan dalam penanganan TBC, juga dengan mengingat ancaman dan penularan penyakit ini.

Tabel 2.72.
Tingkat Prevalensi Tuborkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Kasus	462	526	797	762	848
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Prevalensi	**Per 100.000 Penduduk**	**126,36**	**143,15**	**215,51**	**204,75**	**219,85**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

21) Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Angka kematian yang merupakan salah satu ancaman besar terhadap penderita penyakit tuborkulosis menjadi salah satu tolok ukur penilaian terhadap kebehasilan penanganan penyakit. Tingkat kematian karena penyakit ini, dapat dilihat pada tabel yang disajikan masih fluktuatif dan cenerung meningkat jumlahnya. Pada tahun 2020 persentase tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000 penduduk sebesar 7,11%. Kemudian meningkat menjadi 16,59% pada tahun 2024. Oleh karenanya pemerintah harus terus melakukan penanganan khusus untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit ini.

Tabel 2.73.
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	26	47	54	38	64
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Persentase	**Per 100.000 Penduduk**	**7,11**	**12,79**	**14,60**	**10,21**	**16,59**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

22) Kasus Tuberkulosis BTA yang Mendapat Pengobatan melalui Program DOTS

Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami fluktuasi beriringan dengan meningkatnya perkiraan jumlah penderita tuberkulosis paru BTA. Persentasi penanganan terendah terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 50,58% meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,06%.

Tabel 2.74.
Kasus Tuberkulosis BTA yang Mendapat Pengobatan melalui Program DOTS Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	526	797	762	774	848
Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	Orang	1040	1118	1140	1140	1145
Persentase	**%**	**50,58**	**71,29**	**66,84**	**67,89**	**74,06**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

23) Kasus Tuborkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Penanganan kasus tuborkulosis sembuh dalam program DOTS terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya, walaupun terjadi sedikit peningkatan pada jumlah penderita penyakit tuborkulosis yang sedang diobati dalam program DOTS pada kurun waktu yang sama. Kasus yang sembuh mencapai 16,13% pada tahun 2024, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,23%.

Tabel 2.75.
Kasus Tuborkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	Orang	119	146	209	290	65
Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	247	321	437	366	403
Persentase	**%**	**48,18**	**45,48**	**47,83**	**79,23**	**16,13**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

24) Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah sangat baik karena tanggap dalam melakukan perawatan terhadap orang yang ditemukan menderita penyakit DBD, sekalipun dalam jumlahnya yang tidak sedikit terkhusus pada tahun 2023 yang mencapai 43 kasus. Namun, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 12 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76.
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 Tahun	Orang	6	31	72	43	12
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	6	31	72	43	12
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

25) Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi

Selama kurun waktu 2020-2024 terjadi fluktuasi persentase prevalensi HIV/AIDS dari tahun ke tahun, dimana tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 0,0118% dengan jumlah penderita 44 jiwa dari 372.161 jumlah penduduk yang ada dalam kurun waktu yang sama. Menurun pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 0,0093% atau sebanyak 36 pasien dari 385.721 orang penduduk.

Tabel 2.77.
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pasien HIV dan AIDS disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu	Orang	32	22	56	44	36
Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama	Orang	365608	367454	369820	372161	385721
Persentase	**%**	**0,0088**	**0,0060**	**0,0151**	**0,0118**	**0,0093**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

26) Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 72,71% pada tahun 2020 menjadi 94,22 % dan pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Tabel 2.78.
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1	Orang	33.476	34,881	38,596	40753	41483
Jumlah seluruh penduduk miskin di Kabupaten	Orang	46.040	46,260	46,500	47670	44240
Cakupan	**%**	**72,71**	**75,40**	**83,00**	**85,49**	**94,22**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

27) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi tiap tahunnya dalam kurun tahun 2020-2023 sudah cukup optimal dengan melihat persentase cakupan

yang disajikan pada tabel dengan capaian di atas 90%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,36%.

Tabel 2.79.
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6150	6271	6007	5424	4822
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja padakurun waktu yang sama	Orang	6232	6417	6054	5410	7859
Cakupan	**%**	**98,68**	**97,72**	**99,22**	**100,26**	**61,36**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

28) Kunjungan Ibu Hamil K4

Kunjungan Ibu hamil yang memperoleh pelayanan K4 mengalami penurunan pada 2020-2024, dimana pada tahun 2020 mencapai 5869 kunjungan atau 78,17% dari total ibu hamil, menjadi 4630 kunjungan atau 53,56% pada tahun 2024.

Tabel 2.80.
Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	5.869	6.315	6.106	5.258	4630
Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama	Orang	7.508	7.508	8.645	7.467	8645
Cakupan	**%**	**78,17**	**84,11**	**70,63**	**70,42**	**53,56**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

29) Pelayanan Nifas

Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar mengalami penurunan dari tahun 2020-2024 yaitu sebesar 86,46% atau sebanyak 6196 orang pada tahun 2024 menjadi 58,68% atau sebanyak 4842 orang pada tahun 2024.

Tabel 2.81.
Pelayanan Nifas
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6196	6294	5959	5361	4842
Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7166	7166	8252	7127	8252
Cakupan	**%**	**86,46**	**87,83**	**72,21**	**75,22**	**58,68**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

30) Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Penanganan neonatus dengan komplikasi pada tahun 2020-2023 sudah sangat baik. Dapat dilihat dalam perkembangan jumlah penanganan dari tahun ke tahun yang mencapai 100%. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat drastis dimana capaian neonatus dengan komplikasi yang ditangani hanya 32,91%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah kedepannya untuk dapat meningkatkan pelayanan pada neonatus yang mengalami komplikasi karena dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, bahkan kematian.

Tabel 2.82.
Neonatus Dengan Kompliklasi yang Ditangani
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	Orang	495	517	373	383	388
Jumlah seluruh neonitas dengan komplikasi yang ada	Orang	495	517	373	383	1179
Cakupan	**%**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**32,91**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

31) Pelayanan Anak Balita

Cakupan anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali pada tiap tahunnya di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi, dimana cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 74,10%.

Tabel 2.83.
Pelayanan Anak Balita
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	18863	20981	21931	21949	22482
Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Orang	29814	29831	30340	33029	30340
Cakupan	**%**	**63,27**	**70,37**	**72,28**	**66,45**	**74,10**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

32) Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Luwu masih berfluktuasi dengan cakupan terbesar terjadi

pada tahun 2024 yaitu sebesar 92,50% dari total murid SD dan setingkat atau sebanyak 7645 orang.

Tabel 2.84.
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6120	5356	5411	5787	7645
Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	7058	6640	6344	6564	8265
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	**%**	**86,71**	**80,66**	**85,29**	**88,16**	**92,50**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

33) Desa/Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam

Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidomologi <24 jam menunjukkan capaian yang cukup baik selama periode tahun 2020-2024, yaitu mencapai 100%.

Tabel 2.85.
Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani >24 jam dalam periode tertentu	Orang	0	4	3	1	4

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Orang	0	4	3	1	4
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

34) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerimaan pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Luwu baru dilakukan sejak tahun 2020 dengan capaian IKM terhadap pelayanan kesehatan puskesmas yaitu 76,45% atau termasuk kategori B. Begitu pula IKM terhadap pelayanan kesehatan RSUD juga memperoleh kategori B dengan nilai 78,01%. Sementara itu, capaian tahun 2024 menunjukkan peningkatan nilai namun masih dalam kategori yang sama yaitu kategori B. Data selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
IKM Terhadap Pelayanan Kesehatan Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKM Pelayanan Kesehatan Puskesmas	%	76,45	77,33 (B)	78,01 (B)	84,82 (B)	89,94 (B)
IKM Pelayanan Kesehatan RSUD	%	78,01	77,42 (B)	78,12 (B)	80,15 (B)	n.a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Rasio Jaringan Irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan guna memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

Tabel 2.87.
Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	**Irigasi kabupaten dalam kondisi baik**					
	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	3.700	4.235	4.777	5.377	6161
	Luas irigasi kabupaten (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8.904
	Persentase (%)	**41,55**	**47,56**	**53,65**	**60,39**	**69,19**
1.4.	**Rasio Jaringan Irigasi**					
	Jaringan primer (km)	N.A	2.618	3.488	4.063	3129
	Jaringan Sekunder (km)	5.786	3.375	1.693	340	1741
	Jaringan Tersier (km)	N.A	343	1.740	1.855	1200
	Total Panjang Jaringan Irigasi (1+2+3)	**N.A**	**6.336**	**6.921**	**6.258**	**6070**
	Luas lahan budidaya (Ha)	8.904	8.904	8.904	8.904	8904
1.5	**Rasio Jaringan Irigasi**	**64,98**	**71,16**	**77,73**	**70,28**	**68,17**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

Luas irigasi Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami penambahan yaitu seluas 8.904 Ha. Sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik selama periode yang sama secara terus menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 3.700 Ha atau 41,55%, meningkat menjadi 6.161 Ha atau 69,19% pada tahun 2024.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target "*overstock pangan*" dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi di Kabupaten Luwu dengan luas areal Daerah Irigasi jaringan sekunder pada tahun 2024 spanjang 1741 km. Sedangkan panjang jaringan tersier pada tahun

2024 mengalami penurunan menjadi 1200 km. Sementara itu, rasio jaringan irigasi selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, yaitu dari 64,98% pada tahun 2020 menjadi 68,17% di tahun 2024.

2) Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada tahun 2020, persentase penduduk terhadap akses air bersih/air minum di Kabupaten Luwu adalah sebesar 80,78%. Kondisi tersebut semakin membaik di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 81,83 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadu 79,88%.

Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah 247.035 jiwa, dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 268.711 jiwa. Sedangkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan, menurun pada tahun 2024 yaitu 69,66%. dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 69,88%.

Tabel 2.88.
Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.	**Penduduk berakses Air Minum**					
	Penduduk berakses air minum (orang)	292.457	299.802	302.302	304.539	308.112
	Jumlah penduduk (orang)	362.027	368.314	369.820	372.157	385.721
	Persentase (%)	**80,78**	**81,40**	**81,74**	**81,83**	**79,88**
1.2.	**Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Perkotaan dan Perdesaan**					
	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan (RT)	247.035	251.785	252.592	260.070	268.711
	Jumlah penduduk (orang)	362.027	368.314	369.820	372.157	385.721

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase	**68,24**	**68,36**	**68,30**	**69,88**	**69,66**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

3) Jalan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kriterianya adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai *International Roughness Index*-IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai *Road Condition Index*-RCI).

Jalan raya yang melintas di wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah 3.950,51 Km, yang terdiri dari jalan nasional 112,82 Km, jalan provinsi sepanjang 2014,23 Km dan jalan kabupaten 1823,46 Km. Berdasarkan kondisi jalan pada tahun 2024, jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Luwu adalah 439,65 Km atau 24,11% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak sedang adalah 119,58 Km atau 6,56%, rusak ringan sepanjang 23,56 Km atau 1,29%, dan kondisi rusak berat sepanjang 1.240,61 km atau 68,04%. Namun proporsi jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan dari 31,01% pada tahun 2020 menjadi 30,67% pada tahun 2024. Sementara itu, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yaitu dari 0,00561 poin pada tahun 2020 menjadi 0,00476 poin pada tahun 2024.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih besar 40 Km/jam) pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sepanjang 439,65 Km dari sebelumnya 478,29 Km. Namun persentasenya mengalami peningkatan yaitu dari 23,34% menjadi 24,11% yang disebabkan berkurangnya panjang jalan kabupaten. Adapun persentase panjang jalan yang memiliki drainase minimal 1,5 m selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian

tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 0,5721 atau sepanjang 10.432 km.

Tabel 2.89.
Kondisi Jalan Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Panjang Jalan di Kabupaten Luwu**					
	Jalan Kabupaten (Km)	2.049,05	2.049,05	2.049,05	2.049,05	1823,46
	Jalan Provinsi (Km)	83,90	83,90	83,90	77,87	2014,23
	Jalan Nasional (Km)	115,5	111,5	111,5	112,82	112,82
	Total Panjang Jalan (Km)	**2.248,5**	**2.244,45**	**2.244,45**	**2.239,74**	**3.950,51**
2.	**Jalan Kabupaten Menurut Kondisi**					
	Kondisi Baik (Km)	332,65	364,06	443,9	478,29	439,65
	Kondisi Sedang (Km)	302,89	343,97	546,31	140,1	119,585
	Kondisi Rusak Ringan (Km)	1.255,93	1.023,41	884,37	1153,55	23,56
	Kondisi Rusak Berat (Km)	157,98	318,01	174,88	277,51	1240,605
	Rasio panjang jalan kondisi baik	**0,162**	**0,178**	**0,217**	**0,2334**	**0,2411**
	Panjang jalan kondisi mantap (km)	635,54	708,03	593,54	618,36	559,235
	Panjang jalan seluruhnya (km)	2.049,45	2.049,45	2.049,46	2.049,46	1823,40
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	**31,01**	**34,55**	**28,96**	**30,17**	**30,67**
3.	**Panjang jalan dengan jumlah penduduk**					
	Jumlah panjang jalan (km)	2.049,45	2.049,45	2.049,46	2.049,45	1823,40
	Jumlah penduduk (jiwa)	365.608	368.314	371.039	372.157	383198
	Rasio	**0,00561**	**0,00566**	**0,00552**	**0,00551**	**0,00476**
4.	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**					
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	332,65	364,06	452,48	478,29	439,65
	Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	2.049,45	2.049,45	2.049,45	2.049,45	1823,40
	Persentase	**16,23**	**17,76**	**22,08**	**23,34**	**24,11**
5.	**Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)**					
	Panjang jalan yang memiliki drainase (Km)	3.091	5.415	6,028	9,666	10,432
	Persentase	**0,1508**	**0,2642**	**0,2941**	**0,4716**	**0,5721**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

4) Penataan Ruang

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat yaitu dari 27,3 Ha pada tahun 2020 menjadi 41,00 Ha pada tahun 2024. Luas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dari 6,68 Ha menjadi 7,95 Ha dan pada tahun 2024. Jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2024 sebanyak 8.846 unit atau 12,20% dari total bangunan.

Tabel 2.90.
RTH dan Bangunan Ber-IMB Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah**					
	Luas ruang terbuka hijau (ha)	27,93	41,89	46,08	46,50	41,00
	Luas wilayah ber HPL/HGB	6,68	7,12	7,48	7,85	7,95
	Rasio	**34,61**	**5,88**	**6,16**	**5,29**	**5,16**
2.	**Bangunan ber- IMB per satuan bangunan**					
	Jumlah bangunan ber – IMB	98,05	98,10	7.231	8.128	8846
	Jumlah bangunan (unit)	N.A	N.A	87.491	70.183	72512
	Rasio	**N.A**	**N.A**	**0,08**	**0,12**	**0,12**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

5) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 hingga tahun 2023 terus meningkat dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 98,74%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 75,98%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Tabel 2.91.
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga Terlayani	RT	52.969	53.648	60.070	105.382	60402

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Luwu	RT	73.121	73.491	78.365	105.382	79501
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	**%**	**72,44**	**73,00**	**76,65**	**98,74**	**75,98**

Sumber: Dinas PUTR dan Dinas Perkim Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Persentase Rumah dengan SPALD-T

Persentase rumah dengan SPALD-T di Kabupaten Luwu selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Dimana capaian rumah tangga terlayani dengan SPALD-T tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1358 rumah tangga atau 1,70% dari jumlah rumah tangga. Kemudian terus menurun hingga tahun 2024 41319 rumah tangga atau 1,06% dari jumlah rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang bergeser menjadi pengguna SPALD-S. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92.
Persentase Rumah dengan SPALD-T
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tangga	RT	79284	79801	80302	76136	41319
Jumlah Rumah Tangga yang Sudah Dilayani	RT	1258	1358	1200	1148	440
Persentase	**%**	**1,59**	**1,70**	**1,49**	**1,51**	**1,06**

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu Tahun 2025.

7) Akses Sanitasi Aman

Penyediaan layanan air limbah domestik (sanitasi aman) adalah salah satu urusan pemerintah wajib sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang sehat. Akses sanitasi aman di Kabupaten Luwu menunjukkan peningkatan angka dari tahun 2020-2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,52% Berikut

adalah data akses sanitasi aman di Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Tabel 2.93.
Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Sanitasi Aman	%	1,49	1,50	4,60	4,60	4,52

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Luwu, 2025.

Namun capaian data diatas masih termasuk kedalam angka capaian yang cukup rendah karena disebabkan oleh tidak tersedianya sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang merupakan salah satu indikator dalam pemenuhan akses sanitasi aman.

2.4.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2020 jumlah Rumah Tangga (RT) yang menempati rumah layak huni tercatat 75.789 RT dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2024 menjadi sebanyak 75.771 RT. Hal ini terjadi karena pada jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) meningkat dan rumah layak huni menurun jumlahnya.

Sementara itu, rasio rumah layak huni pada tahun 2024 juga menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,196. Terjadinya penurunan rasio rumah layak huni disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah rumah layak huni.

Tabel 2.94.
Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah layak huni	Unit	75.789	74.746	75.386	75.057	75.771
Jumlah penduduk	Orang	365.608	367.454	369.820	380.679	385.721
Rasio	**Angka**	**0,207**	**0,203**	**0,204**	**0,197**	**0,196**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dari tahun 2020 ke tahun 2024 tadak mengalami perubahan yang signifikan yaitu masih berada diantara 0,97. Namun, secara keseluruhan capaian tersebut sudah sangat baik karena luas permukiman layak huni yang ada hampir sama dengan luas wilayah permukiman.

Tabel 2.95.
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas pemukiman layak huni	Ha	7.030,64	7.034,95	7.010,73	7.010,73	7.027
Luas wilayah permukiman	Ha	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
Rasio	**Angka**	**0,971**	**0,972**	**0,968**	**0,968**	**0,971**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Persentase Rumah Tangga Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi empat kriteria, yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*), memliliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan (*durable housing*). Pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang menempati hunian layak di Kabupaten Luwu sebesar 89,13%.

4) Persentase Permukiman yang tertata

Permukiman di Kabupaten Luwu secara umum belum dilakukan penataan secara maksimal dalam rangka meningkatkan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi bahwa sampai dengan tahun 2024, luas area permukiman yang tertata baru mencapai 17,80 Ha atau 0,24% dari 7.237 Ha keseluruhan luas permukiman.

Tabel 2.96.
Rasio Permukiman yang Tertata
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas area permukiman tertata	Ha	15,20	16,20	17,40	17,40	17,80
Luas area permukiman keseluruhan	Ha	7.237	7.237	7.237	7.237	7.237
Persentase	**%**	**0,21003**	**0,22385**	**0,24043**	**0,24043**	**0,24596**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

5) Luas Permukiman Kumuh di Perkotaan

Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu periode 2020-2024 belum terlaksana dengan maksimal. Luas permukiman kumuh di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah 209,09 Ha, menurun dari kondisi pada tahun 2023 yaitu seluas 231,27 Ha.

Tabel 2.97.
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh di Perkotaan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luasan permukiman kumuh kota yang tertangani	Ha	8	8	13	14,31	13
Luas pemukiman kumuh Kota	Ha	206,36	206,36	231,27	231,27	209,09
Persentase	**%**	**3,87**	**3,87**	**5,62**	**5,62**	**6,22**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Rumah Tangga Kumuh di Perkotaan

Jumah tangga kumuh perkotaan selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dari 1.339 unit pada tahun 2020 menjadi 5.098 unit pada tahun 2024. Sehingga proporsinya juga turut mengalami peningkatkan dari 1,60% menjadi 5,99% di tahun 2024.

Tabel 2.98.
Rumah Tangga Kumuh di Perkotaan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	Unit	1.339	5.098	5.098	5.098	5.098
Jumlah seluruh rumah	Unit	83.625	85.251	85.251	85.251	85.004
Proporsi	**%**	**1,601**	**5,980**	**5,980**	**5,980**	**5,997**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

7) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah sebanyak 9.233 unit atau 10,86%. Jumlah rumah tidak layak huni terbanyak berada di Kecamatan Larompong yaitu sebanyak 991 unit rumah atau 16,87%. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni terendah berada di Kecamatan Walenrang Barat yaitu sebanyak 33 unit rumah atau 1,69%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99.
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Per Kecamatan
Kabupaten Luwu Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Persen
1	Larompong	22.927	5873	991	16.874
2	Larompong Selatan	18.051	4784	543	11,35
3	Suli	21.695	5316	488	91.798
4	Suli Barat	10.264	2710	428	15.793
5	Belopa	20.133	3608	373	10.338
6	Kamanre	12.022	2970	310	10.438
7	Belopa Utara	19.155	3724	336	90.226
8	Bajo	16.642	3619	428	11.826
9	Bajo Barat	10.224	2399	258	10.754
10	Basse sangtempe	5.644	1212	233	19.224
11	Latimojong	5.974	982	246	25.051
12	Basse sangtempe Utara	7.407	1714	73	4.259
13	Bupon	15.541	3627	471	12.986
14	Ponrang	27.693	5557	827	14.882

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Persen
15	Ponrang Selatan	25.621	6383	563	88.203
16	Bua	32.930	7905	588	74.383
17	Walenrang	18.363	4366	323	73.981
18	Walenrang Timur	15.738	2508	394	15,71
19	Lamasi	23.086	5410	527	97.412
20	Walenrang Utara	18.780	4652	458	98.452
21	Walenrang Barat	8.192	1953	33	16.897
22	Lamasi Timur	13.738	3732	342	9.164
Kabupaten Luwu		**379.300**	**85.004**	**9.233**	**10,862**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

8) Penanganan Rumah Korban Bencana

Jumlah rumah korban bencana yang tertangani di Kabupaten Luwu pada tahun 2020 sebanyak 7 unit dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 18 unit dimana semua rumah korban terdampak bencana telah tertangani dengan persentase penanganan rumah korban bencana sebesar 100% setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Penanganan Rumah Korban Bencana
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah korban bencana yang telah tertangani	Unit	7	106	76	9	18
Jumlah rumah korban bencana yang belum tertangani	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah rumah korban terdampak bencana	Unit	7	106	76	9	18
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Ketenteraman dalam kehidupan masyarakat terus diupayakan peningkatannya antara lain dengan keberadaan Linmas di setiap desa. Jumlah petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu tahun 2024 sebanyak 2.344 orang dengan rasio terhadap jumlah penduduk sebesar 0,006. Jumlah ini masih tergolong sedikit mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Luwu yang cukup besar.

Tabel 2.101.
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	2.344	2.344	1.143	2.330	2.330
Jumlah Penduduk	Orang	365608	367454	369820	380679	385361
Rasio	**Angka**	**0,0064**	**0,0064**	**0,0031**	**0,0061**	**0,0060**

Sumber: Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada oleh petugas dari tahun 2020-2024 telah mencapai 100% dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak pada tahun 2024 sebanyak 21 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102.
Penegakan Perda dan Perkada
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada	Kasus	33	1	18	13	21

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	33	1	18	13	21
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

3) Persentase Gangguan Tantribum yang Dapat Diselesaikan

Dalam rangka menjaga kondusifitas lingkungan umum dalam wilayah kabupaten Luwu, perlu dilakukan usahan bersama antara seluruh elemen masyarakat beserta stakeholder terkait agar gangguan Trantribum dapat diwujudkan. Pemerintah kabupaten Luwu melalui dinas Satuan Pamong Praja meraih skor yang sempurna yakni 100 persen selama lima tahun terakhir dalam upaya mencegah dan meredam gangguan Tantrantibum yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Tabel 2.103.
Persentase Gangguan Tantribum yang Dapat Diselesaikan
Di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Tantribum yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

4) Pelayanan Bencana Kebakaran

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa pelayanan terhadap bencana kebakaran semakin ditingkatkan. Hal ini terlihat dari keberadaan sarana prasarana yaitu mobil pemadam kebakaran yang semakin meningkat jumlahnya dari 8 unit pada tahun 2020 menjadi 9 unit pada tahun 2024. Sedangkan jumlah personil berfluktuasi namun cenderung menurun dari 177 orang pada tahun 2020 menjadi 169 orang pada tahun 2024.

Tabel 2.104.
Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	8	9	9	9	9
Jumlah Personil Pemadam Kebakaran	Orang	177	174	159	138	169

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

5) Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, tingkat waktu tanggap kebakaran adalah 15 menit. Dari setiap kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Luwu (51 kasus pada tahun 2024), 12 kasus yang telah ditangani dalam waktu tanggap 15 menit. Namun, jika dilihat selama lima tahun terakhir, persentase tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran pada tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 sebesar 70,11% menjadi 23,52% pada tahun 2024.

Tabel 2.105.
Tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Luwu, Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit (kasus)	Kasus	55	47	40	61	12
Jumlah Kejadian Kebakaran	Kasus	63	52	46	87	51
Tingkat waktu tanggap	**%**	**87,30**	**90,38**	**86,95**	**70,11**	**23,52**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

6) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan penilaian seluruh kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Penilaian secara berkelanjutan terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Nilai IRB Kabupaten Luwu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dan masih berada pada kelas risiko Tinggi dengan nilai IRB 186,59 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya perubahan iklim, kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi risiko bencana di suatu wilayah.

Tabel 2.106.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Skor/ Kelas Risiko	192,23 (Tinggi)	187,71 (Tinggi)	187,91 (Tinggi)	187,91 (Tinggi)	186,59 (Tinggi)

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Tahun 2025.

2.4.4.1.6. Urusan Sosial

1) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

PMKS yang menerima bantuan sosial mengalami terus meningkat dari tahun 2020-2024. Dimana pada tahun 2024 mencapai 44.031 orang dengan presentase sebesar 54,44%.

Tabel 2.107.
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS yang menerima bantuan	Orang	27269	32035	39436	42067	44031
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	47447	89572	84400	86990	80874
Persentase	**%**	**57,47**	**35,76**	**46,73**	**48,36**	**54,44**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) PMKS Skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari 27442 jiwa meningkat menjadi 44.470 jiwa. Pada tahun 2022 menurun menjadi sebesar 14.788 orang dengan persentase sebesar 54,69%.

Tabel 2.108.
PMKS Skala Kabupaten yang Memperoleh Bantuan Sosial
Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Orang	27442	32044	39579	42300	44470
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial	Orang	47620	89581	84543	87223	81313
Persentase	**%**	**57,63**	**35,77**	**46,82**	**48,50**	**54,69**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Selama lima tahun terakhir, seluruh korban bencana telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dimana jumlah korban bencana yang menerima bantuan pada tahun 2024 sebanyak 3109 orang menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 6707.

Tabel 2.109.
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana dan Prasana Tanggap Darurat	Unit	18	18	18	18	21
Jumlah kejadian bencana	Kasus	19	23	39	32	31
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang)	Orang	929	523	1198	6707	3109
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun (orang)	Orang	929	523	1198	6707	3109
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

4) Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap selama tahun 2020-2023 telah mencapai 100%. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 93,44%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110.
Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	929	523	1198	6707	2905
Jumlah seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala (orang)	Orang	929	523	1198	6707	3109
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**93,44**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.7. Urusan Tenaga Kerja

1) Besarnya Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Semua kasus yang terkait dengan perjanjian bersama antara pengusaha dan pekerja dalam 5 tahun terakhir dapat diselesaikan.

Tabel 2.111.
Besarnya Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besarnya kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama	**%**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Persentase antara pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan

cenderung meningkat yaitu dari 5,45% pada tahun 2020 menjadi 20,89% pada tahun 2024.

Tabel 2.112.
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran pencarian kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	5,45	11,36	4,71	1,45	20,89

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

3) Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di tempat kerja, serta mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif serta mencegah kerugian akibat kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Penerapan K3 pada Perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir telah mencapai 100% sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.113.
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

4) Besaran Pekerja atau Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan tren yang

terus meningkat. Dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 77,94% meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 56,10%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114.
Besaran Pekerja atau Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	75,79	76,51	71,93	56,10	77,94

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

5) Penanganan Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah seluruhnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.115.
Penanganan Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

6) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja terdaftar yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi Dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 87,27% kemudian menurun menjadi 54,93% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116.
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	49,19	41,11	81,68	87,27	54,93

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

7) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2023 mencapai 32 orang, kemudian meningkat menjadi 48 orang pada tahun 2024. Capaian ini masih snagat rendah jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif yang ada.

Tabel 2.117.
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	32	80	48	32	48

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan, yaitu dari 700 pekerja di tahun 2023 menjadi 4 pekerja di tahun 2024 dengan persentase 15%.

Tabel 2.118.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Orang	4213	4047	3531	700	4
Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	17183	19191	66120	4636	3437
Persentase	**%**	**24,52**	**21,09**	**5,34**	**15,10**	**0,12**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2) Kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan yaitu dari 2 kursi pada tahun 2020 menjadi hanya 1 kursi atau sebesar 2,86% pada tahun 2024. Kondisi ini perlu mendapat perhatian mengingat pembangunan nasional di bidang politik menargetkan keterlibatan perempuan sebesar 30%.

Tabel 2.119.
Kursi yang diduduki perempuan di DPRD
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan	Kursi	2	2	2	1	1
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Kursi	35	35	35	35	35
Proporsi	**%**	**5,71**	**5,71**	**5,71**	**2,86**	**2,86**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pekerja perempuan dilembaga swasta mengalami penurunan dari 12.970 orang pada tahun 2020 menjadi 290 orang pada tahun 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	12970	15144	18031	290	n.a
Jumlah pekerja perempuan	Orang	17183	19191	66120	4636	n.a
Persentase	**%**	**75**	**78**	**27**	**6,30**	**n.a**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

4) Rasio KDRT

Rasio KDRT di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 8 kasus. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100% . Sementara Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 26 kasus. Meski demikian, semua kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat diselesaikan 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121.
Rasio KDRT Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio KDRT	Angka	0	0	2	8	1
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	0	0	0	75	100
Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kasus	53	25	42	53	26

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Kasus	53	25	42	53	26

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

5) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu selama lima tahun terakhir berflukuasi namun, memiliki trend menurun dari 53 kasus pada tahun 2023 menjadi 26 kasus pada tahun 2024. Akan tetapi, semua laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu sudah dapat ditangani secara maksimal.

Tabel 2.122.
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu (kasus)	Kasus	50	25	42	53	26
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu (kasus)	Kasus	50	25	42	53	26
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

6) Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 42 kasus dan menurun di tahun 2024 menjadi 17 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123.
Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	7	5	42	40	17
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Kasus	7	5	42	53	17
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**75**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

7) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebanyak 26 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 40 orang.

Tabel 2.124.
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum (orang)	Orang	7	5	42	40	26
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum (orang)	Orang	7	5	42	53	26
Cakupan	**%**	**100**	**100**	**100**	**75**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2.4.4.1.9. Urusan Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dalam perspektif pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dan multi-dimensi. Bukan hanya sebagai penopang kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi, stabilitas sosial, dan kemandirian wilayah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif namun dengan rata-rata 770 kg menandakan bahwa ketersediaan pangan utama diwilayah Kabupaten Luwu masing cukup stabil.

Tabel 2.125.
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	Kg	270.009.786	310.772.658	304.810.477	292.300.001	287.433.960
Jumlah penduduk (orang)	Orang	364.680	367.454	369.820	372.161	383.198
Kontribusi	**Kg**	740,65	845,75	824,21	785,41	750,09

Sumber : BPS, Dinas Ketahanan Luwu Tahun 2025

2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan energi dan protein per kapita merupakan indikator fundamental dalam pembangunan suatu wilayah. Keduanya tidak hanya mencerminkan kondisi ketahanan pangan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Melalui berbagai upaya optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam beberapa tahun terakhir ketersediaan protein daen energi sudah cukup baik.

Tabel 2.126.
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	Gram/ Kapita/Hari	78	180	181	203	214,7
Ketersediaan energi (ka/kapita/hari)	Ka/ Kapita/Hari	2.498	6.132	6.103	7.590	7.399

Sumber : BPS, Dinas Ketahanan Luwu Tahun 2025.

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di tingkat daerah adalah aspek krusial dalam menjamin kesehatan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting, yang diamanatkan oleh undang-undang, untuk memastikan pangan yang dikonsumsi warganya aman, bermutu, dan bergizi. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sudah cukup dimana daerah rawan pangan menurun hingga 40 daerah saja pada tahun 2024.

Tabel 2.127.
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pencapaian skor pola pangan harapan (skor)	Skor	90,4*	78,8**	78,0**	81,2*	86,27
Ketersedian informasi pasokan, harga dan akses pangan (%)	%	33,3	66,67	66,7	66,7	66,7

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah		11,59	20,84	9,25	0	26,81
Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	Daerah	100	95	52,69	100	NA

Sumber : BPS, Dinas Ketahanan Pangan Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.10. Urusan Pertanahan

1) Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikasi aset tanah milik Pemda merupakan hal yang sangat krusial. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting untuk pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Dalam kurun lima tahun terakhir cenderung fluktuatif yang mana hal ini dipengaruhi oleh pendataan dan yang belum berjalan secara optimal.

Tabel 2.128.
Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (Ha)	Ha	144,4	356.888	148.015	201,500	78.765
Jumlah Luas Wilayah (Ha)	Ha	300025	300025	300025	300025	300025
Persentase	%	0,05	118,95	49,33	0,07	26,25

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2025

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah negara di pemerintah daerah adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pengusaha, hingga instansi pemerintah. Tanah negara, yang dikelola oleh pemerintah, sering kali menjadi sumber sengketa karena ketidakjelasan status, tumpang tindih kepemilikan, atau pemanfaatan yang tidak sesuai. Hal ini dipengaruhi oleh faktor utama diantaranya sertifikasi yang belum tuntas dan sengketa yang belum

terselesaikan. Adapun dalam lima (5) tahun terakhir penyelesaian kasus tanah negara diwilayah Kabupaten Luwu belum dapat diselesaikan seluruhnya dengan capaian 66,6% pada tahun 2024.

Tabel 2.129.
Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus yang diselesaikan	Kasus	3	2	7	7	2
Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	6	10	13	3
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	75	33,33	70	53,85	66,67

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup pemerintah daerah memiliki urgensi yang sangat tinggi karena secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana. Tanpa tata kelola lingkungan yang efektif, daerah akan menghadapi masalah serius seperti pencemaran air dan udara yang berdampak pada kesehatan publik, kerusakan ekosistem yang mengancam keanekaragaman hayati, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor akibat degradasi lahan. Oleh karena itu, kinerja yang solid di bidang ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi vital untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, menjamin kesejahteraan generasi sekarang, dan melindungi warisan alam untuk masa depan. Adapun capaian kinerja urusan lingkungan hidup dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir secara umum perlu ditingkatkan, terutama pada layanan persampahan.

Tabel 2.130.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Peningkatan Indeks Kualitas Air (nilai indeks)	50	50	50	67	70
5.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup					
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	-	-	-
6.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten					
	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Na	Na	5	2	4
	Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Na	Na	5	2	4
	Persentase	Na	Na	**100**	**100**	**100**
7.	Persentase Timbunan Sampah yang tertangani (%)	23,02	23,08	22,56	22,60	22.6
8.	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah	30.77	30.77	30.77	30.77	30,59
9.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani dan Terkurangi	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
10.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
11.	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	6,42	7,53	7,60	7,65	7.6
12.	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27
13.	Persentase Izin Pengolahan Sampah oleh Swasta yang diterbitkan	0	0	0	0	0
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0	46.69	71.89	48.15	48.48

Sumber : Dinas Pertanahan Kab. Luwu Tahun 2025.

1) Ketersediaan dan Pengitegrasian RPPLH

Urgensi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sangatlah tinggi karena dokumen ini menjadi landasan strategis dan operasional bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. RPPLH tidak hanya berfungsi sebagai rencana pembangunan biasa, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang mengikat dan memandu seluruh sektor untuk bertindak secara selaras demi melindungi lingkungan. Nyatanya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir RPPLH Kabupaten Luwu belum dapat disediakan

yang mana hal ini dipengaruhi oleh kebijakan perencanaan dan penganggaran.

2) Layanan dan Pengelolaan Persampahan

Layanan dan pengelolaan persampahan daerah sangatlah krusial dan memiliki dampak yang luas, mencakup aspek kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas ekonomi wilayah. Tanpa sistem yang terkelola dengan baik, sampah akan menjadi masalah kompleks yang menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas hidup. Dalam kurun 5 (lima) tahun sampah perkotaan yang tertangani hanya sebesar 0,20% dengan rata-rata timbulan sampah yang tertangani sebesar 22,6% dengan cakupan area pelayanan hanya sekitar 27,27% wilayah yang harusnya ditangani.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Urgensi kualitas lingkungan hidup sangatlah mendesak karena secara langsung memengaruhi kelangsungan hidup manusia, keberlanjutan ekosistem, dan stabilitas ekonomi global. Lingkungan yang sehat adalah fondasi bagi kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan peradaban. Tanpa kualitas lingkungan yang terjaga, segala bentuk kemajuan akan terancam. Dengan capaian 48,48 mengindikasikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu masih dibawah rentang “baik”.

2.4.4.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Penduduk Ber-KTP

Urgensi penduduk ber-KTP bagi pemerintah daerah sangatlah tinggi karena KTP bukan hanya sekadar identitas diri, melainkan fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang efektif, penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, dan pelayanan publik yang adil. Tanpa data kependudukan yang akurat, pemerintah daerah akan kesulitan menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir penduduk Ber KTP diwilayah Kabupaten Luwu telah mencapai 98,79% yang mana capaian sudah mengindikasikan

capaian yang baik pun demikian halnya dengan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK).

Tabel 2.131.
Penduduk Ber-KTP dan Ber KK Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Penduduk Ber-KTP**						
	Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP	Jiwa	243.233	250.704	248.083	261.376	269.996
	Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah	Jiwa	256.823	258.278	268.779	268.071	273.302
	Rasio		**94,71**	**97,07**	**92,30**	**97,50**	**98,79**
2	**Penduduk Ber-KK**						
	Jumlah penduduk ber-KK	Jiwa	67.702	51.205	115.759	120.542	125.078
	Jumlah penduduk yang telah menikah	Jiwa	151.506	151.368	116.396	120.599	163.539
	Rasio		**44,69**	**33,83**	**99,45**	**99,95**	**76,48**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Tahun 2025

2) Pasangan Ber-Akte Nikah dan Bayi Ber-Akte Kelahiran

Data ini menjadi kunci untuk memahami struktur sosial dan demografi di suatu wilayah. Tanpa akta nikah, status perkawinan masyarakat tidak tercatat secara resmi, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Disamping itu Bayi Ber-Akte Kelahiran menjadi dokumen ini penting guna memastikan setiap anak terdaftar demi melindungi hak-hak mereka.

Tabel 2.132.
Pasangan Ber-Akte Nikah dan Bay- Ber-Akte Kelahiran
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Pasangan Ber-Akte Nikah**						
	Jumlah pasangan nikah ber-akte nikah	Jiwa	25.315	30.661	66.923	68.520	78573

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Jiwa	154.827	155.569	158897	160.800	163539
	Rasio		**16,35**	**19,71**	**42,12**	**42,61**	**48,05**
2	**Bayi Ber-Akte Kelahiran**						
	Jumlah bayi yang ber-akte kelahiran	Jiwa	6.900	7.947	27.298	33.659	33027
	Jumlah bayi	Jiwa	7.845	8.310	27.748	34.354	33913
	Rasio		**87,95**	**95,63**	**98,38**	**97,98**	**97,39**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Tahun 2025.

2.4.4.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 57,97% dari 98,07 pada tahun 2020.

Tabel 2.133.
Sarana Prasaran Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	Unit	203	204	120	120	120
Jumlah seluruh pemerintahan desa	Unit	207	207	207	207	207
Cakupan	**%**	**98,07**	**98,55**	**57,97**	**57,97**	**57,97**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

2) Kelompok Binaan LPM

Kelompok binaan LPM di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sudah maksimal dengan capaian sebesar 100%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134.
Kelompok Binaan LPM
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Binaan LPM	Klp	207	228	207	207	227
Jumlah LPM	Klp	207	228	227	227	227
Rata-rata	**Angka**	**100,00**	**100,00**	**91.16**	**91,16**	**100,00**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

3) Kelompok Binaan PKK

Selama lima tahun terakhir jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi namun capaiannya masih di dengan jumlah kelompok binaan pada tahun 2024 sebanyak 249 dengan cakupan 100% pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135.
Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	229	227	227	227	249
Jumlah PKK	Klp	229	227	249	249	249
Cakupan kelompok binaan PKK	**Klp**	**100**	**100**	**91.16**	**91.16**	**100**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

4) LSM Aktif

Jumlah LSM aktif di perdesaan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2020 yaitu dari 20,34% menjadi 8,06%. Hal ini menjadi perhatian dan sebagai input untuk perumusan kebijakan di masa depan, mengingat potensi perdesaan di Kabupaten Luwu untuk berkembang sangat besar.

Tabel 2.136.
LSM Aktif Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LSM aktif	Lembaga	12	26	26	26	5
Jumlah LSM	Lembaga	59	59	59	59	62
Persentase	**%**	**20.34**	**44.07**	**44.07**	**44.07**	**8.06**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

5) PKK Aktif dan Posyandu Aktif

Pada tahun 2024 semua PKK yang ada di Kabupaten Luwu sudah tergolong aktif, begitu pun posyandu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.137.
PKK Aktif dan Posyandu Aktif
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKK aktif	Organisasi	249	227	249	249	227
Jumlah PKK	Organisasi	249	227	249	249	227
Persentase	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Jumlah posyandu aktif	Unit	418	429	400	411	429
Jumlah posyandu	Unit	418	429	430	432	429
Swasembada Masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarkat	Program	418	418	150	150	80
Persentase Posyandu Aktif	**%**	**100.00**	**100.00**	**93.02**	**95.14**	**100.00**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

6) Desa Berstatus Desa Tertinggal

Jumlah desa bersatus tertinggal di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, yaitu 66 desa dari 207 desa atau sebesar 31,88 di tahun 2020 menjadi 41 desa atau sebesar 19,81% pada tahun 2024. Sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.138.
Desa Berstatus Tertinggal
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	66	52	52	47	41
Jumlah Desa	Desa	207	207	207	207	207
Persentase	**%**	**31.88**	**25.12**	**25.12**	**22.71**	**19.81**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

7) Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan salah satu predikat/Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam Peraturan Kementerian Desa nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan bahwa Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengukur sajauh mana pemerintah melakukan kinerja dalam upaya mengentaskan desa-desa yang masih masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.

Persentase status desa mandiri kabupaten Luwu pada tahun 2024 tercatat 14,49 persen dari 207 desa. Berdasarkan data pencatatan dari dinas DPMD kabupaten Luwu dari tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat adanya peningkatan jumlah desa yang memperoleh status Desa Mandiri seperti yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.139.
Desa Berstatus Mandiri dan Desa Berstatus Swasembada
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	1	2	3	11	30
Jumlah Desa	Desa	207	207	207	207	207
Persentase	**%**	**0.48**	**0.97**	**1.45**	**5.31**	**14.49**

Sumber : Indeks Desa Membangun, Tahun 2025.

Melihat progres perolehan status desa mandiri di kabupaten Luwu di tahun 2024 yakni masih sangat rendah dimana baru terdapat 30 desa mandiri dari 207 desa. Tantangan pemerintah Kabupaten Luwu kedepan adalah perlu meningkatkan upaya pada sektor penunjang untuk meningkatkan jumlah desa dengan status desa mandiri.

2.4.4.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kehadiran perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu adalah dalam rangka melakukan upaya-upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan menggunakan strategi pembinaan keluarga berencana. Layanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**0,92**	**0,34**	**0,79**	**1,23**	**1,31**
2.	**Total Fretility Rate (TFR)**	**2,86**	**2,86**	**3,11**	**2,41**	**2,33**
3.	**Dukungan Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dalam Kebijakan Pengendalian Penduduk**					

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (OPD)	10	10	10	10	10
	Jumlah semua perangkat daerah	35	35	35	35	35
	Jumlah Kampung KB	59	59	59	167	167
	Persentase OPD yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54
4.	**Akseptor KB**					
	Jumlah Akseptor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	Jumlah Pasangan Subur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Rasio	**70.62**	**78.88**	**87.16**	**60.47**	**73.40**
5.	**Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun**					
	Jumlah Peserta KB Aktif	33.951	34.3	20.642	29.073	25.261
	Jumlah Pasangan Usia Subur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Angka (%)	**66.71**	**67.96**	**50.26**	**65.29**	**54.80**
6.	**Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun**					
	Jumlah pasangan usia subur dengan istri dibawah 20 tahun	1043	447	391	391	165
	Jumlah Pasangan Usia Subur	50893	50473	41074	44527	46100
	Cakupan	**2.05**	**0.89**	**0.95**	**0.88**	**0.36**
7.	**Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)**					
	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.486	6.267	13.786	6.616	6.041
	Jumlah Pasangan Usia Subur	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Cakupan (%)	**12.74**	**12.42**	**33.56**	**14.86**	**13.10**
8.	**Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**					
	Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP	9.237	9.448	10.949	7.132	8.441
	Jumlah Akseptor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	Persentase	**25,70**	**23,73**	**30,58**	**26,48**	**24,94**
9.	**Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi**					
	Jumlah Pasangan Usia Subur yang masih menggunakan kontrasepsi	50.893	50.473	41.074	44.527	46.100
	Jumlah Akspetor KB	35.939	39.813	35.801	26.927	33.836
	Persentase	**141,61**	**126,78**	**114,73**	**165,36**	**136,25**
10.	**Anggota Bina Keluarga Balita**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	4.000	3.613	852	627	1.767
	Jmlah Anggota Kelompok BKB	6.32	1.880	1.010	1.655	3.489
	Cakupan (%)	**63,29**	**1,92**	**84,35**	**37,88**	**50,64**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
11.	**Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	1.836	1.692	137	313	1.034
	Jmlah Anggota Kelompok BKR	3.864	3.372	1.281	1.930	3.457
	Cakupan (%)	**47,52**	**50,17**	**10,69**	**16,21**	**29,91**
12.	**Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**					
	Jumlah Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	1.371	1.145	50	83	156
	Jmlah Anggota Kelompok BKL	3.275	2.812	724	978	2.167
	Cakupan (%)	**41,86**	**40,71**	**6,90**	**8,48**	**7,19**
13.	**Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan**					
	Jumlah PPKS	2	2	2	2	3
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Persentase	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**9,09**	**13,63**
14.	**Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**					
	Jumlah PIK R/M	34	37	31	31	30
	Jumlah Kecamatan	22	22	22	22	22
	Cakupan	**154,55**	**165,18**	**140,9**	**140,9**	**136,36**
15.	**PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**					
	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	35	41	51	54	90
	Jumlah PKB/PLKB	35	41	51	54	90
	Cakupan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16.	**PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**					
	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	37	37	37	36	43
	Jumlah anggota kelompok UPPKS	135	135	135	138	161
	Cakupan (%)	**27,40**	**27,40**	**27,40**	**26,08**	**26,70**
17.	**Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan**					
	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	227	227	227	227	227
	Jumlah desa/kelurahan	227	227	227	227	227
	Rasio	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
18.	**Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat**					
	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	70.965	72.877	65.284	57.988	67.895
	Perkiraan Permintaan Masyarakat	52.230	40.025	50.981	45.600	47.334
	Cakupan (%)	**135,87**	**182,07**	**128,05**	**127,16**	**143,44**
19.	**Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**					

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	42	42	44	121	195
	Jumlah Faskes dan jejaring	96	96	96	121	195
	Persentase	**43,75**	**43,75**	**45,83**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, antara lain sebagai berikut.

1) Sepanjang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, pemerintah daerah perlahan berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 sebesar 1,31%. Hal ini menunjukkan cukup luasnya cakupan program keluarga berencana di Kabupaten Luwu.
2) Selama lima tahun terakhir rata-rata jumlah anak yang dilahirkan yang diukur melalui TFR sebesar 2,33 pada tahun 2024 atau rata-rata keluarga memiliki 3 anak. Sementara jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan pemerintah adalah dua anak.
3) Dari data yang disajikan mengenai dukungan perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB pada tahun 2024 yaitu sebanyak 10 OPD atau sebesar 17,54%. Sementara itu, jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di tahun yang sama yaitu sebanyak 8 OPD. Adapun kebijakan daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk sebanyak 3 kebijakan.
4) Jumlah Akseptor KB selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yaitu dari 26.927 pasangan (60,47%) pada tahun 2023 meningkat menjadi 33.836 pasangan pada tahun 2024 (73,40%).
5) Jumlah peserta KB aktif selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 29.073 pasangan (65,29%) menjadi 25.261 pasangan (54,80%).
6) Pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun di tahun 2024 berjumlah 165 pasangan atau mencakup 0,36%.

Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 391 pasangan atau dengan cakupan 0,88%.

7) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (*unmet need*) mengalami fluktuasi dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 33,56%. Sementara capaian pada tahun 2024 sebesar 13,10%.
8) Persentase pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 30,58%. Sementara capaian pada tahun 2024 menurun menjadi 24,04%
9) Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi selama lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 165,36%, sementara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 136,35%.
10) Jumlah anggota kelompok BKB tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 84,35% dan menurun pada tahun 2024 menjadi 50,64%.
11) Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 50,17%. Sementara itum capaian pada tahun 2024 menurun menjadi 29,91%.
12) Perkembangan anggota BKL ber-KB juga terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun dimana 2024 mencakup 7,19% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 8,48%.
13) Persentase cakupan PPKS pada tahun 2024 sebesar 13,63% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 9,09%.
14) Cakupan remaja dalam PIK Remaja/Mahasiswa di tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 140,90% menjadi 136,36%. Artinya, jumlah remaja dalam PIK R/M sudah lebih banyak dari jumlah kecamatan yang ada.
15) Cakupan jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk selama lima tahun terakhir sudah maksimal yang mencapai angka 100%.

16) PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 26,70%.
17) Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa dalam lima tahun terakhir sudah maksimal yaitu mencapai 100%.
18) Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alkon Kabupaten melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Pada Tahun 2024 cakupannya sebesar 143,44%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan alat dan obat kontrasepsi lebih banyak dibandingkan perkiraan permintaan masyarakat.
19) Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 45,83% pada tahun 2022 meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 dan stagnan di tahun 2024.

2.4.4.1.15. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu dengan capaian indikator kinerja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penumpang Angkutan Umum					
	Jumlah penumpang Angkutan Umum	223.325	233.908	244.755	226.623	203.714
	Jumlah penumpang Pesawat udara	20.597	20.705	20.830	30.970	36.725
	Total Jumlah Penumpang	243.922	254.613	265.585	257.593	255.011
2.	Ijin Trayek					
	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	200	0	0	0	0
	Jumlah penduduk	362.027	364.680	369.820	372.161	383.198
	Rasio	0,00055	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	1.853	1924	1400	0	978

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Pelabuhan Laut/Terminal Bis					
	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
	Jumlah terminal bis	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	1	1	1
5.	Layanan Angkutan Darat					
	Jumlah angkutan darat	47.585	51.067	55.843	59.472	64.192
	Jumlah penumpang angkutan darat	223.325	233.908	244.755	226.623	218.286
	Persentase	21,31	21,83	22,82	26,24	29,41
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum					
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	1.328	1.260	1.448	2.316	1.338
	Jumlah angkutan umum	3.252	3.561	2.848	2.316	2.153
	Persentase	40,84	35,38	50,84	100,0	62,15
7.	Pemasangan Rambu-rambu					
	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	450	400	25	125	0
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Persentase	15,00	13,33	0,83	4,17	0,00
8.	Panjang jalan per jumlah kendaraan					
	Panjang Jalan (Km)	2049,45	2049,45	2049,45	2142,45	2142,45
	Jumlah Kendaraan	47.585	51.067	55.843	59.472	64.192
	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
9.	Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum					
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang)	223.325	233.908	244.755	226.623	203.714
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	409	413	527	415	395
10.	Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal					
	Jumlah Orang	243.922	250.341	265.585	257.593	218.286
	Jumlah Barang (kg)	516	531	588	572	467
11.	Layanan Urusan Perhubungan					
	Angkutan Darat	47.585	51.067	55.843	59.472	64.192
	Traffic Light	3	3	3	4	4
	Warning Light	3	3	3	3	3
12.	Kondisi Sarana dan Prasarana LLAJ					
	Jumlah Sarana LLAJ (Unit)	6	6	6	7	7
	Jumlah Prasarana LLAJ (Unit)	450	850	875	1000	1000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perhubungan periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut :

1) Jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan yaitu dari 226.623 orang pada tahun 2023 menjadi 203.714 orang pada tahun 2024. Sementara itu, penumpang pesawat udara pada tahun yang sama mengalami peningkatan yaitu dari 30.970 orang pada tahun 2023 menjadi 36.725 orang pada tahun 2024.
2) Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebanyak 200 namun sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 tidak ada ijin trayek yang di keluarkan oleh Dinas Perhubungan.
3) Jumlah uji KIR angkutan umum selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dimana jumlah tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan jumlah 1.924 kendaraan. Sementara pada tahun 2024 terdapat 978 angkutan umum yang melakukan uji KIR.
4) Jumlah pelabuhan laut dan terminal bus dari tahun 2020-2024 masih tetap yaitu 1 pelabuhan laut dan 1 terminal bis.
5) Persentase layanan angkutan darat dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Dimana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 29,41%.
6) Persentase angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun 2020-2024 berfluktuasi, di mana capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari total angkutan umum. Kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 62,15%. Hal ini berarti masih banyak kendaraan angkutan umum yang belum diuji KIR namun, tetap beroperasi.
7) Persentase pemasangan rambu-rambu masih terbilang minim selama lima tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 15% dari total rambu-rambu yang seharusnya tersedia. Sementara pada tahun 2024 tidak ada pemasangan rambu-rambu.
8) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderun stagna di angka 0,04 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 0,03. Hal ini berarti setiap 1 km jalan dilalui oleh 3 kendaraan.

9) Terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu dari 226.623 orang pada tahun 2023 menjadi 203.714 orang pada tahun 2024. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum juga mengalami penurunan yaitu dari 415 ton pada tahun 20203 menjadi 395 ton di tahun 2024.
10) Jumlah orang yang melalui dermaga/bandara/terminal selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 265.585 orang sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 218.286 orang. Sementara itu, jumlah barang yang melalui dermaga/bandara/terminal juga mengalami fluktuasi dimana capaian tertinggi terjadi di tahun 2022 yaitu sebanyak 588 ton kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 467 ton.
11) Jumlah angkutan darat dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari 47.585 menjadi 64.192 , sedangkan jumlah *Traffic light* pada periode yang sama hanya bertambah 1 unit yaitu menjadi 4 unit di tahun 2024. Sementara itu, jumlah *warning light* yang stagnan selama lima tahun terakhir yakni sebanyak 3 unit.
12) Kondisi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, jumlah sarana yaitu dari 6 unit di tahun 2020 menjadi 7 unit di tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah prasarana juga meningkat yaitu dari 450 unit pada tahun 2020 menjadi 1000 unit di tahun 2024.

2.4.4.1.16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	39,84%	55,41%	55,27%	62,56%	67,01%
2.	Jumlah server yang dikelola	10	10	10	11	11
3.	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	6	7	8	8	8

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Cakupan Layanan Internet pada OPD yang dikelola	20%	25%	26%	28,57%	28,57%
5.	Cakupan Akses Layanan Internet di Desa dengan Baik	50%	60%	65%	67%	69%
6.	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Ads	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Persentase Website OPD	28,00%	30,00%	40,00%	43,00%	51,42%

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang komunikasi dan informatika periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut.

1) Proporsi rumah tangga dengan akses internet dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan dari 39,84% menjadi 67,01%.
2) Jumlah server yang dikelola mengalami peningkatan yaitu dari 10 server pada tahun 2022 menjadi 11 server pada tahun 2024.
3) Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang terus mengalami peningkatan dari 6 aplikasi pada tahun 2020 menjadi 8 aplikasi pada tahun 2024.
4) Cakupan layanan internet pada OPD yang dikelola selama periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 20% menjadi 28,57%.
5) Cakupan akses layanan internet di desa meningkat yaitu 50% pada tahun 2020 menjadi 69% pada Tahun 2024.
6) Website Pemerintah Daerah telah tersedia selama lima tahun terakhir.
7) OPD yang memiliki *website* terus meningkat selama lima tahun terakhir yaitu dari 28,00% pada tahun 2020 menjadi 51,42% pada tahun 2024.

2.4.4.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan aktor utama penggerak perekonomian daerah, sehingga harus dibarengi dengan inovasi berbasis penelitian dan teknologi serta pengembangan pasar. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perindustrian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Koperasi Aktif**					
	Jumlah Koperasi	424	450	461	424	430
	Jumlah Koperasi Aktif	192	81	97	175	179
	Persentase	**44,75%**	**18 %**	**21.00%**	**41,27%**	**41,62%**
2.	**Persentase Koperasi Sehat**	**-**	**7,4%**	**6,18%**	**4.00%**	**n.a**
3.	**Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**					
	Jumlah UMKM	24,136	25,221	26,121	26,174	26,721
	Jumlah UMKM Aktif	16,761	21,647	22,732	23,685	24,232
	Persentase	**89,68%**	**90,13%**	**90,47%**	**90,49%**	**90,68%**
4.	**Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1) Persentase koperasi aktif di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 masih rendah sebesar 41,62% atau sebanyak 179 dari 430 total koperasi.
2) Persentase koperasi sehat di Kabupaten Luwu dari tahun 2020-2023 mengalami penurunan dengan capaian pada tahun 2023 yaitu sebesar 4,00% dari total koperasi aktif.
3) Persentase UMKM aktif terus mengalami perkembangan. Secara umum, UMKM aktif pada Tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 24.232 unit usaha dengan persentase sebesar 90,68%.
4) Jumlah produk asli daerah hasil dari UKM stagnan dalam lima tahun terakhir sebanyak 18 komoditi.

2.4.4.1.18. Urusan Penanaman Modal

Peran swasta melalui investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Investasi harus mampu meningkatkan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.

Efisien dan efektifitas birokrasi, adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta infrastruktur pendukung yang mencukupi merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan investasi daerah. Urusan penanaman modal menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Presentase indeks kepuasan masyarakat	80,15	82,60	83,33	86,20	87,80
2.	Jumlah investor dalam negeri (PMDN/PMA)	40	49	60	112	44
3.	Nilai investasi (Milyar Rupiah)	357.000	336.000	1.870.000	2.570.000	1.290.283
4.	Rasio daya serap tenaga kerja pada proyek penanaman modal	35,12	36,88	13,41	48,79	48,05

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang penanaman modal periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut:

1) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perizinan mencapai 87,80 pada tahun 2024 dengan kriteria Baik.
2) Jumlah investor dalam negeri (PMDN) dan investor asing (PMA) di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebanyak 44 investor menurun dari tahun sebelumnya dengan 112 investor.
3) Nilai investasi di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 1,29 Triliun menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,57 Triliun.
4) Rasio daya serap tenaga kerja pada proyek penanaman modal berfluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 48,79% dan capaian tahun 2024 sebesar 48,05%.

2.4.4.1.19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu unsur yang penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Oleh karena itu perlu disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. Urusan kepemudaan dan olah raga menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	30	30	51	51	51
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Kegiatan Olahraga	0	0	0	0	2
4.	Jumlah Organisasi Olahraga	1	1	1	3	3
5.	Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif (%)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Pembinaan Olahraga (cabang olahraga unggulan yang dibina)	2	2	2	2	2
7.	Jumlah cabang olahraga yang memiliki pelatih yang telah sertifikasi	6	6	6	7	8
8.	Jumlah Wasit yang Bersertifikasi	0	0	0	16	16
9.	Jumlah Atlet yang Berprestasi	0	0	0	7	9
10.	Jumlah Klub Olahraga	0	0	0	0	0
11.	Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga	1	1	1	1	30
12.	Cakupan Pembinaan atlet muda	0	0	0	0	0
13.	Jumlah prestasi olahraga	0	0	0	3	3

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga periode tahun 2020-2024, antara lain sebagai berikut :

1) Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Luwu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu dari 30 organisasi pada tahun 2020 menjadi 51 organisasi pada tahun 2024.
2) Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi Pemda sebanyak 3 kegiatan pada tahun 2024.

3) Jumlah kegiatan olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebanyak 2 kegiatan.
4) Jumlah organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Luwu meningkat yaitu dari 1 organisasi pada tahun 2020 menjadi 3 organisasi pada tahun 2024.
5) Persentase organisasi olahraga yang aktif di Kabupaten Luwu selama lima tahun terakhir mencapai 100%.
6) Pada tahun 2024, terdapat 2 cabang olahraga unggulan yang dibina.
7) Jumlah cabang olahraga yang memiliki pelatih yang telah tersertifikasi pada tahun 2024 sebanyak 8 cabang olahraga.
8) Jumlah wasit yang bersertifikasi pada tahun 2024 sebanyak 16 wasit.
9) Jumlah atlet yang berprestasi pada tahun 2024 sebanyak 9 atlet, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7 atlet.
10) Selama lima tahun terakhir tidak ada klub olahraga yang terbentuk di Kabupaten Luwu.
11) Jumlah gedung/lapangan olahraga pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan yaitu sebanyak 30 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 1 unit.
12) Tidak terdapat pembinaan atlet muda selama lima tahun terakhir.
13) Jumlah prestasi olahraga yang diraih pada tahun 2024 yaitu sebanyak 3 prestasi olahraga.

2.4.4.1.20. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat serta setiap kecakapan, dan kebiasaan. Urusan kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.146.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	2	2	2	2	2
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	8	8	8	8	8
Total benda, situs dan kawasan cagara budaya yang dimiliki daerah	Unit	13	13	13	13	17
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	0	0	0	0
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	13	13	13	13	17
Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	60,02	65,05	67,08	67,08	70,01

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kebudayaan periode 2020-2024, antara lain sebagai berikut :

1) Selama lima tahun terakhir penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun dilaksanakan 2 kali.
2) Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 8 unit.
3) Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah pada tahun 2024 sebanyak 13 unit.
4) Tidak ada karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi pada tahun 2024.
5) Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu meningkat dari 13 cagar budaya pada tahun 2023 menjadi 17 cagar budaya pada tahun 2024.
6) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi pada tahun 2024 realisasinya sebesar 70,01% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 67,08% pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya dukungan anggaran pemeliharaan dari pemerintah

daerah serta kesadaran masyarakat untuk menjaga situs cagar budaya.

2.4.4.1.21. Urusan Statistik

Statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram dan/atau tabel yang isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, ketersediaan data dan informasi yang memadai dapat memberikan dasar dan arahan supaya kebijakan dan program yang dicanangkan dapat tepat sasaran. Urusan statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku ”PDRB”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku “kabupaten dalam angka” dan buku PDRB telah tersedia secara berkelanjutan selama periode tahun 2020-2024.

2.4.4.1.22. Urusan Persandian

Urusan persandian diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	PD	57	57	57	57	57
Jumlah Total Perangkat Daerah	PD	57	57	57	57	57
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah selama lima tahun terakhir di Kabupaten Luwu telah mencapai 100%

2.4.4.1.23. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar disekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Urusan perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Pengunjung Perpustakaan**					
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (pemda)	10.246	10.934	13.112	14.290	15.399
	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	10.246	10.934	13.112	14.290	15.399
	Total	**20.492**	**21.868**	**26.224**	**28.580**	**30.798**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Rata-Rata Pengunjung per Bulan (orang)	**854**	**911**	**1.093**	**1.191**	**1.283**
2.	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (exp)	47.674	48.912	49.746	52.067	52.067
3.	**Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk**					
	Jumlah Perpustakaan	282	282	282	282	282
	Jumlah Penduduk	365.508	365.508	365.508	365.508	365.508
	Rasio	**0,00077**	**0,00077**	**0,00077**	**0,00077**	**0,00077**
4.	**Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai memiliki sertifikat (orang)**					
	Jumlah putakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	3	3	3	7	8
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3	3	3	12	13
	Persentase	**100**	**100**	**100**	**58,33**	**61,54**
5.	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikelola	113	113	113	113	113
6.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Berprestasi	-	-	-	-	-
7.	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	2	2	2	2	2
8.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,32	65,33	65,34	65,35	78,69

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang perpustakaan pada periode tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut.

1) Jumlah pengunjung perpustakaan pemda dan non pemda pada tahun 2024 sebanyak 30.798 orang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 28.580 orang.
2) Jumlah koleksi buku yang tersedia juga meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 52.067 pada tahun 2024.
3) Rasio perpustakaan per satuan penduduk selama lima tahun terakhir tergolong stagnan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 0,00077.

4) Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat pada tahun 2024 sebanyak 8 orang atau sebesar 61,54% dari jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang ada di Kabupaten Luwu.
5) Jumlah perpustakaan di Desa/Kelurahan yang dikekola pada tahun 2024 sebanyak 113 perpustakaan.
6) Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak terdapat perpustakaan desa/kelurahan yang berprestasi.
7) Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola stagnan dalam lima tahun terakhir yaitu berjumlah 2 unit.
8) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 78,69 meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 65,35.

2.1.3.2.1 Urusan Kearsipan

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/ nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam pelakasanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu kantor. Urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jumlah Arsip daerah yang dikelola	OPD	4	5	5	7	7
Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang	4	5	6	7	8

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Unit	9	10	11	12	13

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan berbagai capaian pembangunan di bidang kearsipan pada periode tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :

1) Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku selama lima tahun terakhir mengalami stagnan dengan capaian yaitu sebesar 80,00%.
2) Jumlah OPD yang mengelola arsip daerah dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 7 OPD pada tahun 2024.
3) Jumlah SDM pengelola kearsipan pada tahun 2024 sebanyak 8 orang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 7 orang.
4) Jumlah sarana kearsipan daerah selama lima tahun terakhir (2020-2024) meningkat yaitu sebanyak 13 sarana.

2.1.3.2.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk indikator kinerja kunci terdapat 8 indikator yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas perikanan dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.151.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Produksi Perikanan**					
	Produksi perikanan (ton)	644.286,15	645.919,16	666.829,06	666.787,25	671.054,41
	Target Daerah (Ton)	641.505,99	659.972,12	679.923,92	703.536,37	729.274,81
	Persentase Produksi Perikanan	100,43	97,87	98,07	94,78	92,02

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	Produktivitas Perikanan Tangkap (Kg/Trip)	133,3	141,23	119,93	147,87	150,22
3	Produktivitas Perikanan Budidaya (Kg/m2)	6,66	7,3	7,8	7,86	8,04
4	**Konsumsi Ikan**					
	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	54,01	54,21	54,84	55,89	56,26
	Target Daerah (Kg)	50,36	54,65	55,96	56,96	57,26
	Persentase Konsumsi Ikan	**107,25**	**99,01**	**98**	**98,12**	**98,25**
5	**Cakupan bina kelompok nelayan**					
	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n (kelompok)	25	12	53	10	22
	Jumlah kelompok nelayan	287	299	309	319	319
	Cakupan bina kelompok nelayan	**66,2**	**4,01**	**17,15**	**3,13**	**6,26**
6	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	39,98	41,18	42,25	42,85	45,69
7	Bantuan Alat Tangkap	31	5	37	2	50
8	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**					
	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	7.322,84	7.549,24	7.817,01	8.128,86	9.166,83
	Jumlah produksi ikan di daerah (ton)	18.314,50	18.332,30	18.501,81	18.970,50	19.042,15

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	39,98	41,18	42,25	42,85	45,69

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2025.

Untuk mengukur keberhasilan produksi perikanan tahun 2020-2024 terdiri atas produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, maka berdasarkan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target produksi perikanan 641.505,99 ton dengan capaain 644.286,15 ton telah dicapai sebesar 100,43%, hal ini mengalami penurunan empat tahun berturut-turut sehingga pada tahun 2024 hanya 92,02 persen capaian produksi perikanan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor, baik dari sisi sumber daya, teknologi, maupun aspek sosial-ekonomi. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan produksi yang signifikan disebabkan adanya perubahan iklim (kekeringan) dan bencana alam.

Adapun Solusi untuk meningkatkan produksi perikanan yaitu pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan, dukungan akses permodalan, fasilitasi izin usaha, dan subsidi BBM), peningkatan keterampilan SDM Perikanan, serta penguatan rantai pasok dan akses pasar khususnya pada industry pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas jaringan pemasaran.

2.1.3.2.3 Urusan Pariwisata

Indikator kinerja kunci urusan pariwisata memiliki 4 indikator dengan menjelaskan capaian tahun 2020-2024 bidang pariwisata sebagai berikut:

Tabel 2.152.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	PAD sektor pariwisata (Ribu Rupiah)	19.790.000	28.000.000	5.920.000	3.869.000	2.018.963.251
2	Total PAD (Rp)	122.916.342.359	132.456.563.071	163.816.263.664	207.400.000.000	53.659.261.708
3	PAD sektor pariwisata (%)	0,02	0,02	0,004	0,002	3,76

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	4.000	1.800	800	308	55.354
5	Tingkat hunian akomodasi	0,17	0,5	18,3	14,52	0,38

Sumber: Dinas Pariwisata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, hal ini disebabkan karena adanya penentuan objek wisata yang menjadi daya Tarik Masyarakat yaitu banyaknya wahana pada objek wisata di Kecamatan Bua, sama halnya dengan wisata Bahari pada Pantai ponnori dan buntumatabbing. Dinas Pariwisata selaku penyelenggara urusan pariwisata melakukan berbagai strategi yaitu peningkatan promosi pariwisata, pengembangan destinasi wisata serta perbaikan infrastruktur dan layanan wisata.

2.1.3.2.4 Urusan Pertanian

Produktivitas pertanian merupakan salah satu indikator yang akan menggambarkan capaian kinerja urusan pertanian, dimana kemampuan tanaman untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal dalam kondisi yang diberikan, dengan mempertimbangkan berbagai factor seoerti genetika tanaman, factor lingkungan dan manajemen pertanian. Hal ini dpaat dilihat pada capaian kinerja urusan pertanian tahun 2020-2024 adalah sebaga berikut:

Tabel 2.153.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,61	6,5	6,42	6,3	6,1
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	9,3	10	25,09	60	22,32

Sumber: Dinas Pertanian, 2025.

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan produktivitas pertanian. Hal ini disebabkan berbagai factor yakni adanya perubahan iklim yang tidak menentu, pada tahun 2024 Kabupaten Luwu mengalami bencana

alam dan terdapat beberapa saran dan prasarana pertanian yang mengalami kerusakan. Pemerintah Kabupaten Luwu telah berkomitmen untuk memperbaiki sarana dan prasarana pertanian khususnya irigasi sehingga hasil produksi pertanian semakin meningkat. Bukan hanya itu, namun perlu didukung oleh mekanisasi pertanian, penggunaan teknologi dan perluasan akses pasar.

2.1.3.2.5 Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas perdagangan dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.154.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	89,03	92,33	94,1	95,88	97,33
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	82,01	84,22	86,07	91,02	91,73

Sumber: Dinas Perdagangan, 2025.

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, dapat diketahui bahwa alat ukur yang digunakan pada produsen sudah sesuai dengan aturan, dimana dapat melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan pedagang.

2.1.3.2.6 Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.155.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Industri	%	-7,21	4,11	4,87	5,02	5,09

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	90	90	90	90	90
3.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	1,969	2,050	2,150	2,258	2,373
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	-	-	4	5	7
5.	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Kemasan	-	-	20	20	21

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian, 2025.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan industry kecul menengah, hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar dapat mengembangkan sektor industri baik dalam sektor rumah tangga atau Perusahaan, hal ini dikembangkan melalui pelatihan keterampilan SDM, Peningkatan kualitas produk melalui standar mutu, kemudahan kredit uaha rakyat, digital marketing agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

2.1.3.2.7 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi Kabupaten Luwu yang dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dengan capaian indikator tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.156.
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Areal Lahan Transmigrasi yang dikelola	104	43,87	20,5	182,07	184,5
Luas Areal LahanTransmigrasi yang disiapkan	254	254	254	254	254
Persentase Luas Lahan yang dikelola	40,94	17,27	8,07	71,68	72,64

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2025.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2020 pemerintah daerah mengelola lahan untuk Kawasan transmigrasi meningkat dari 104 Ha menjadi 184 Ha. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2024 banyak Pembangunan infrastruktur yang dikelola untuk penggunaan lahan kegiatan

produktif. Kegiatan ini dilaksanakan agar mendorong penduduk transmigrant dalam meningkatkan kesejahteraan dan tidak tergantung pada pemerintah daerah.

2.1.3.2.8 Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam mendukung kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan, perencanaan kuangan daerah memiliki peran yang sangat penting yakni alokasi anggaran untuk fungsi penunjang. Sinergi dengan prioritas Pembangunan daerah, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, pengawasan dan akuntabilitas serta penyusunan anggaran yang responsisf. Fungsi penunjang urusan pemerintahan mencakup berbagai kegiatan yang mendukung jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien, seperti administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan public, dan pengawasan. Tingkat capaian terkai IKK bidang administrasi pemerintahan yaitu rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan pada tahun 2023 57,88% dan terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 54,28%.

Tabel 2.157.
Kinerja Penunjang Administrasi Pemerintahan Tahun 2023-2024

Indikator	2023	2024
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		
Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	818.469.888.050,00	781.568.532.397
total belanja langsung	1.414.120.264.262,00	1.439.938.558.876
Persentase	57,88%	54,28%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025.

Pada tahun 2024 anggaran pemerintah kabupaten Luwu dialihkan pada belanja hibah untuk pilkada serentak sehingga pada belanja modal mengalami penurunan. Hal ini juga perlu diperhatikan bahwa setiap belanja modal harus melalui pejabat pengadaan yang sudah diatur berdasarkan peraturan presiden no. 16 tahun 2018.

Pada IKK untuk urusan manajemen keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengengelola Pendapatan memiliki capaian kinerja tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.158.
Kinerja Penunjang Manajemen Keuangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,001	0,002	0,002	0,002	0,18
Perbandingan antara belanja operasi terhadap total belanja daerah (%)	0	63.44	64.84	63.7	66.75
Perbandingan antara belanja modal terhadap total belanja daerah (%)	0	17.54	18.08	19.95	17.08
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	8.48	9.43	11.10	12.98	11.37

Sumber: Bapenda dan BKAD, 2025.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio pajak daerah terhadap PDRB masih sangat rendah, hal ini dikarenakan jenis pajak daerah yang terbatas, dunia usaha yang masih didominasi oleh pelaku usaha kecil sehingga potensi penerimaan tidak digali secara optimal, masih adanya keterbatasan SDM dan teknologi dalam pendataan, penagihan serta pengawasan pajak.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang mengalami peningkatan walaupun nilainya masih kecil, sehingga hal ini menjadi perhatian, karena Kabupaten Luwu masih bergantung pada pendapatan transfer, yang menunjukkan kondisi fiskal belum mandiri. Adapun Solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni intensifikasi pajak daerah dan retribusi; Ekstensifikasi basis pajak dengan mendata ulang wajib pajak potensial termasuk sektor informal; mendorong investasi daerah; menggali potensi ekonomi lokal, serta mengembangkan badan usaha milik daerah.

Pada Belanja APBD masih didominasi oleh belanja operasi yang didalamnya terdapat belanja pegawai, dimana tahun 2024 masih 42,36 persen. Hal ini sudah melewati ketentuan terkait belanja pegawai hanya 30 persen. Maka dari itu menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah untuk mendorong pendapatan daerah sehingga persentase belanja pegawai dapat disesuaikan dengan peraturan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 146.

Pada indikator kinerja urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah, maka terdapat dua indikator yang di capai

tahun 2020-2024 yakni maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.159.
Kinerja Penunjang Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2	2,8	3	3	3
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2,61	Level 3	Level 3	Level 2,71	Level 3

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

Maturitas 277dalah pengendalian intern pemerintah (SPIP), dalam rangka memastikan efektivitas SPIP serta menilai Tingkat kematangan penerapannya dilingkungan pemerintah. Penilaian maturitas SPIP merupakan proses penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian dapat diandalkan. Hasil evaluasi atas penilaian SPIP Tahun 2024 berada level 3. Upaya meningkatkan nilai maturitas SPIP, yang telah dilakukan Adalah meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan dan pendampingan dari BPKP khususnya terkait dengan manajemen risiko, memperbaiki 277dalah dokumentasi agar semua bukti pelaksanaan pengendalian internal terdokumentasi dengan baik, meningkatkan komitmen pimpinan dalam pengelolaan SPIP dan penguatan pengawasan internal, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Peningkatan kapabilitas apparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran strategis dalam emmastikan tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas keuangan negara, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan public. Tahun 2024 pemerintah luwu mendapatkan level 3 pada kapabilitas APIP, Dalam mencapai level tersebut, upaya yang dilakukan meningkatan SDM dan kompetensi auditor melalui pelatihan, sertifikasi, dan bimbingan teknis, penguatan 277dalah pengawasan internal dengan menerapkan standar audit yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penguatan tata 277dalah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sedangkan dalam implementasinya kendala yang dihadapi 277dalah pendokumentasian terkait pengawasan belum sepenuhnya optimal.

Pada indikator kinerja urusan Kepegawaian dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), maka terdapat enam indikator yang di capai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.160.
Kinerja Penunjang Kepegawaian dan Pelatihan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JP)	2,7	20,58	11,66	70,77	16,23
2.	**Pendidikan dan Pelatihan Struktural**					
	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	18	20	25	57	30
	Jumlah Total Jabatan	1038	1038	693	693	693
	Persentase	1,73	1,92	3,6	8,22	4,62
3.	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	38	37	37	37	38
4.	Jumlah pemangku jabatan administrasi pada instansi pemerintah	201	208	207	201	198
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3043	3348	3935	3812	3709
6.	**Pendidikan dan Pelatihan Formal**					
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (orang)	137	97	99	152	141
	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan formal (orang)	18	199	103	728	140
	Jumlah ASN (orang)	5730	5631	5537	5325	5129
	Persentase	2,71	5,26	3,65	16,53	5,48

Sumber: BKPSDM Kabupaten Luwu Tahun 2025.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja BKPSDM sudah cukup baik dengan meningkatnya pegawai ASN yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan dengan jam Pelajaran selama

16 Jam. Walaupun pada tahun 2023 selama 70 jam Pelajaran dan menurun pada tahun 2024. Hal ini perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian dengan strategi yang akan dilakukan yakni: pengembangan kompetensi ASN melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dan non formal; gerakan Luwu Belajar; Peningkatan layanan kepegawaian berbasis digital; Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara melalui pemberian Reward; Penerapan sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

2.4.4.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator Pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator). Penetapan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yakni: Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing Daerah; dan Aspek Pelayanan Umum. Secara rinci, Indikator Kinerja Kunci pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1	Pertumbuhan PDRB	%	7,11	6.03	5,69	5,64	4,36
2	Laju Inflasi	%	3,96	0,65	5,13	2,21	1,87
3	PDRB per Kapita	Juta Rp	38,03	48,55	54,03	57,36	59,73
4	Angka Melek Huruf	%	98,35	93,62	96,29	96,35	95,07
5	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31	8,35	8,48	8,73	8,81
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,39	13,4	13,41	13,43
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,34	70,44	70,75	71	71,23
8	Persentase balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03	0,19	0,1
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,32	5,06	4,62	1,80	n.a
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	n.a
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,18	64,22	72,94	65,64	68,31
12	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas	%	58,91	66,25	70,13	72,53	65,48
13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	40,12	38,11	37,68	n.a	n.a
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,27	9,43	11,33	12,82	11,37
15	Penguatan cadangan pangan		46,94	48,12	48,12	9,25	n.a
16	Penanganan daerah rawan pangan	Skor	5	5	5	4	n.a
17	Ketersediaan pangan utama	%	67,36	68,78	82	78,54	n.a
18	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	53,75	53,21	53,8	52,49	51,73

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
19	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,63	10,07	10,27	10,77	11,09
20	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,89	3,94	3,83	3,8	4,1
21	Pertumbuhan Industri	%	6,28	4,10	4,87	5,02	5,09
II	**Aspek Daya Saing Daerah**						
1	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ribu Rp	752,29	771,1	902,65	997,36	1024,29
2	Nilai Tukar Petani	Angka	-	-	-	-	-
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	52,66	53,98	44,51	56,71	45,26
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	87,23	89,41	89,41	93,94	n.a
5	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB indikator keterbukaan ekonomi	%	0,78	0,79	0,83	0,83	-0,15
6	Angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100	100	n.a
7	Rasio ketergantungan	%	61,32	61,33	47,35	46,98	45,51
III	**Aspek Pelayanan Umum**						
A.	**URUSAN WAJIB DASAR**						
1.	**PENDIDIKAN**						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60,04	93,66	93,48	40,98	93,53
1.2	Angka partisipasi kasar:						
1.2.1	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	99,425	94,36	94,47	98,48	99,84
1.2.2	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	98,85	80,93	95	79,76	99,46
1.2.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI	%	81,140	83,170	89,71	93,73	79,47
1.3	Angka Partisipasi Murni :						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,23	94,14	93,63	98,48	79,57
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83,64	96,56	95,49	79,76	76,53
1.4	Angka partisipasi sekolah :						
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	94,14	94,35	98,48	68,56
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	71,87	96,08	95,06	79,76	75,7
1.5	Angka Putus Sekolah:						
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,77	0,83	0,78	0,09	2,56
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,74	1,04	3,42	2,79	2,8
1.6	Angka Kelulusan:						
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	95,58	89,71	93,83	2,56
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	97,04	90,51	81,59	2,80
1.7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97,67	98,8	98,46	81,9	98,00
1.8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	98,03	98,16	99,46	n.a
1.9	Fasilitas Pendidikan:						
1.10	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	61,77	16,44	14,6	58,27	86,73
1.11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Angka	67,25	67,36	67,25	31,72	42,18
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Per 10.000 murid	763,1	715,44	671,59	08:09	807,36
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	%	98,81	98,24	96,21	98,32	98,32
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,23	84,24	72,06	89,96	48,46

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	60,04	91,85	93,48		29,85
2	**KESEHATAN**						
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	7,7	8,26	13,21	15,34	11,4
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	99,9	98.87	97,36	98,70	98,86
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	9,33	9,66	14,04	16,27	2,29
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	4,97	6,55	10,57	15,71	10,39
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	160,46	233,75	181,7	129,39	166,29
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	Angka	0,0144	0,01	0,014	13,08	15,11
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0,00064	0,00064	0,00064	0,00064	0,00062
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	0,00013	0,00012	0,00015	0,0002	0,0003
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,00114	0,0012	0,00135	0,0016	0,0047
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	73,34
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	86,92	89,45	73,49	75,82	58,52
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	99,56	97,36	97,36	97,36	97,80
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 (Kkal/kapita/hari)	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	100	100	100	100
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%		0,75	8	6,79	4,3
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Per 100.000	43,.27	54,33	77,31	75,00	68,65
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	126,36	142,6	214,97	207,97	222,76
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000	7,11	12,79	14,6	11,02	17,79
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	44,42	50,38	71,11	67,89	74,06
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	48,18	45,48	47,83	34,7	16,13
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.26	Angka kejadian Malaria			117	160	0,37	0,37
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	na	n.a	0	0	0
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Angka	0,004	0	0,015	2,57	0,0095
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100	n.a	10	n.a	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	100	n.a	66	n.a	100
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	72,33	56.66	75,43	100	100
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	101,26	100	93,14	100	61,36
2.35	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	49,34	52,86	53,74	54,63	56,39
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	78,17	84,11	70,63	70,42	53,56
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	86,66	87,83	72,21	75,22	58,68
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	32,91
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	63,27	70,33	72,28	66,45	74,1
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	89,79	n.a	n.a	n.a	100
2.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	86,71	80,66	85,29	88,16	92,5
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	72,71	75,4	83	85,49	94,22
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
2.45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	0	100	100	100	100
2.46	Cakupan menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	Kec	0	22	22	22	22
2.47	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan	%	0	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.48	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	n.a	n.a	n.a	88,95	89,94
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap/ Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	23,94	34,55	48,32	30,17	30,67
3.2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	19,44	17,76	21,66	23,34	24,11
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	85,46	86,53	86,53	76,65	76,88
3.4	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	7,71	7,71
3.5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	41,55	47,56	53,65	60,39	69,19
3.6	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,78	81,4	81,47	81,83	80,41
3.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	68,24	68,36	69,56	69,88	70,12
3.8	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.9	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.10	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	5,88	6,15	5,92	5,29	5,65
3.11	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	n.a	46,18	46,5	46,5	47,3
3.12	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	n.a	8,26	8,91	10,48	0,12
3.13	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002
3.14	Persentase jaringan jalan kabupaten dengan aspal dan beton	%	50,4	35,27	35,45	35,45	33,92

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.15	Tingkat Mobilitas (panjang jalan per luas wilayah)	Angka	0,87	0,87	0,87	0,683	0,588
3.16	Persentase jalan yang memiliki saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	%	100	5,415	6,028	9,66	10,43
3.17	Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun turap/talud/bronjong dan pengendali banjir	meter	0	n.a	n.a	1.799	2074
3.18	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	%	100	80	82	n.a	50,75
3.19	Cakupan ketersediaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	Titik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.20	Tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.21	Jumlah sarana dan prasarana bangunan gedung umum yang dibangun dan ditingkatkan	Unit	4	3	3	7	1
3.22	Presentase penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana bangunan gedung	%	100,00	100,00	67,00	n.a	0,12
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**						
4.1	Rasio rumah layak huni	Angka	20,54	0,207	0.202	0,197	0,199
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0685	0,0688	0.075	0,075	0,07
4.3	Rasio permukiman layak huni		n.a	0,97	0.97	0,97	0,971
4.4	Persentase pemukiman yang tertata	%	n.a	0,224	0.240	0.240	0,14
4.5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	3,88	3,88	5,62	5,62	6,22

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	n.a	1.60	5.98	5.98	5,99
4.7	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	97	97	74,89	3,64	n.a
4.8	Cakupan penyelenggaraan PSU	%	100	100	-	na	n.a
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,63	0,63	0,31	0,70	0,50
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman, (keindahan)	%	76,88	100	70	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	82,00	95,00	95,00	66,14	66,14
5.4	Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	87,3	90,38	86,95	70,11	23,52
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	79,95	100,00	75,00	100,00	100,00
5.6	Cakupan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	%	100,00	100,00	26,67	34,89	0,00
5.7	Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	n.a	75,00	0,00
5.8	Cakupan Jumlah Konflik/Ganguan Keamanan Daerah yang tertangani	Persen	90,00	80,00	30,00	98,00	100,00
5.9	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persen	95,00	95,00	84,26	95,00	77,67
5.10	Persentase Keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam bela negara	Persen	50,00	0,00	85,00	100,00	80,00
5.11	Cakupan koordinasi dalam rangka peningkatan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	%	100,00	60,00	30,00	90,00	85,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.12	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100,00	25,00	90,00	100,00	95,00
5.13	Cakupan penyelenggaraan pendidikan Pembinaan Politik Masyarakat	%	100,00	0,00	95,00	100,00	95,00
5.14	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100,00	29,72	80,00	75,00	100,00
5.15	Persentase pemenuhan Kompetensi Aparatur sesuai ketentuan	%	0,00	0,00	75,00	75,00	31,58
5.16	Cakupan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100,00	30,00	70,00	70,00	10,30
5.17	Cakupan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	n.a	n.a	90,00	90,00	90,00
5.18	Persentase Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran yang terlapor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.19	Cakupan penyelenggaraan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	%	0,00	0,00	91,00	91,00	23,52
6	**SOSIAL**						
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00	100,00	97,00	98,00	54,00
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	20,65	30,45	95,00	97,00	54,00
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	11,95	12,35	98,00	98,00	55,00
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	100,00	100,00	100,00	90,00	88,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social.	%	100,00	100,00	80,00	98,00	n.a
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	100,00	92,00	98,00	100,00
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100,00	100,00	100,00	100,00	93,00
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	67,43	69,12	n.a	98,00	81,00
6.10	Persentase kejadian bencana alam dan kebakaran yang tertangani dengan baik	%	95,00	98,00	98,00	n.a	n.a
B	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**						
1	**TENAGA KERJA**						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	n.a	n.a	n.a	0	0
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	5,45	11,36	4,71	1,45	20,89
1.4	Keselamatan dan perlindungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	75,79	76,51	71,93	56,10	77,94
1.6	Penanganan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	49,19	41,11	81,68	87,27	54,93
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan masyarakat	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	32,00	80,00	48,00	32,00	48,00
1.12	Perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal	%	3,70	3,91	15,48	n.a	66,07
1.13	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	37,04	25,00	n.a	43,48	46,15
1.14	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	51,38	33,33	56,52	27,06	50,64
1.15	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta/Pekerja	104,71	n.a	43,54	n.a	61,90
1.16	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	2,86	22,03	113,51	24,14	16,85
1.17	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	%	5,45	7,97	22,97	1,45	20,97
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	24,52	21,09	5,34	15,00	0,12
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	5,71	5,71	5,71	2,86	2,86
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	75,00	75,00	27,00	6,30	n.a
2.4	Rasio KDRT	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	35,42	35,42	35,42	n.a	n.a
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100,00	75,00	75,00	100,00
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	55,45	18,51	0,00	75,00	100,00
2.9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	6,85	6,85	100,00	0,00	0,00
2.10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Rasio APM perempuan/laki- laki di SD	%	1,04	94,14	n.a	0,00	100,70
2.12	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMP	%	1,24	96,56	n.a	0,00	97,60
2.13	Rasio APM perempuan/laki- laki di SMA	%	1,03	n.a	n.a	0,00	102,90
2.14	Rasio melek huruf Perempuan terhadap laki- laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	1,02	1,02	n.a	0,00	98,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.15	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	35,75	30,00	n.a	n.a	n.a
2.16	Indeks Pembangunan Gender	%	92,12	92,58	92,79	92,79	92,80
2.17	Cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka peningkatan kesetaraan gender dan ketahanan keluarga	%	35,71	50,00	100,00	60,00	100,00
2.18	Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak	%	52,5	70,00	100,00	90,00	100,00
2.19	Persentase ketersediaan data dan informasi yang valid tentang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten	%	100	75,00	90,00	75,00	100,00
3	**PANGAN**						
3.1	Ketersediaan pangan utama	Kg	740,65	845,75	824,21	785,41	750,09
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kapita	2.498	6.132	6.103	7.590	7.399
		Protein per kapita	78,00	180,00	181,00	203,00	214,70
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100,00	95,00	52,72	100,00	n.a
3.4	Angka Ketersediaan Energi	Kalori/Perkapita/Perhari	2.498	6.132	6.103	7.590	7.399
3.5	Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Distribusi Pangan	%	33,30	66,67	66,70	66,70	66,70
3.6	Tingkat Konsumsi Protein	Gr/Kapita/Hari	65,00	66,00	60,68	90,53	56,80

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	**PERTANAHAN**						
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,05	118,95	49,33	0,07	26,25
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	75	33,33	70,00	53,85	66,67
4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5	**LINGKUNGAN HIDUP**						
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	50	50	50	67	70
5.5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	n.a	90,12	91,7	91,61	92,44
5.6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5.7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	n.a	n.a	100	100	100
5.8	Timbulan sampah yang ditangani	%	84,50	77,13	69,50	22,60	79,11
5.9	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	17,05	7,53	24,87	7,65	0,20
5.10	Persentase cakupan area pelayanan	%	87,99	27,27	27,00	27,27	50,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	87,99	77,13	31,94	30,25	79,11
5.12	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	85,35	50,00	56,50	50,00	30,00
5.13	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5.14	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	100	0	0	100	n.a
5.15	Cakupan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	%	50	n.a	100	22,6	n.a
6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
6.1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,91	0,97	0,92	0,97	0,99
6.2	Rasio Penduduk ber-KK	Rasio	0,45	0,34	0,99	0,99	0,76
6.3	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,88	0,96	0,98	0,98	0,97
6.4	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,16	0,2	0,42	0,43	0,48
6.5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	87,95	95,63	98,38	97,98	97,39
6.8	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	-	95,63	98,38	98,50	97,39
6.9	Cakupan Dokumen Kependudukan yang diunggah ke dalam database	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.10	Cakupan Inovasi Pelayanan Pemanfaatan Data	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	98,07	98,55	57,97	57,97	60,39
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah	207,00	228,00	227,00	227,00	227,00
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Jumlah	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
7.4	Persentase LSM aktif	%	20,34	44,06	44,06	44,06	8,60
7.5	Persentase LPM Berprestasi	%	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88
7.6	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7	Persentase Posyandu aktif	%	100,00	100,00	93,02	95,14	100,00
7.8	Jumlah BUMDes Bersama	Jumlah	n.a	0,00	20,00	0,00	0,00
8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Nilai	0,92	1,37	1,35	1,35	1,34
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,86	3,11	2,41	2,33
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	8,9	8,57	20	57,89	62,00
8.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Nilai	3	3	3	3	3
8.5	Rasio Akseptor KB	Rasio	70,61	78,87	87,16	60,47	73,39
8.6	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	66,71	67,95	50,25	65,29	66,07

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	%	2,05	0,89	0,95	0,88	0,36
8.8	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,74	12,41	33,56	14,85	9,26
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	25,70	23,73	30,58	26,48	24,94
8.10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	141,61	126,78	114,73	165,36	136,25
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	63,29	61,44	84,35	37,88	50,64
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	47,52	50,17	10,69	16,21	29,91
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	41,86	40,71	6,90	8,48	7,19
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	9,09	9,09	9,09	13,63
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	154,55	165,18	140,90	140,90	136,36
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	90,00
8.17	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
8.18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	135,87	182,07	128,05	127,16	143,44
8.19	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	43,75	43,75	45,83	100	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.20	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	%	100	n.a	n.a	n.a	n.a
8.21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	44,45	n.a	n.a	n.a	n.a
9	**PERHUBUNGAN**						
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	243.922	254.613	265.585	257.593	255.011
9.2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0006	0	0	0	0
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	1.853	1.924	1.400	0	978
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9.5	Jumlah Bandara	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9.6	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Persentase layanan angkutan darat	%	8,54	8,75	8,79	26,24	29,41
9.8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	40,80	35,40	50,80	100,00	62,10
9.9	Pemasangan Rambu-rambu	%	15,00	13,30	0,80	4,20	0,00
9.10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
9.11	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	223.325	233908	244.755	226623	203.714
9.12	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	409	413	527	415	395
9.13	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	243.922	250.341	265.585	257.593	218.286
9.14	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Ton	516	531	588	572	467
10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
10.1	Jumlah Server yang di kelola	Jumlah	10	10	10	11	11
10.2	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang dikembangkan	Jumlah	6	7	8	8	8
10.3	Tersedianya Website Pemerintah Daerah	Tersedia/ Belum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10.4	Persentase Website OPD	%	28,00	30,00	40,00	43,00	51,42
11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	45,28	18,00	21,04	41,27	41,63
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	35,88	36,77	30,38	35,00	6,40
11.3	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah	Jumlah	18.183	25.221	26.121	26.500	8.538
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	%	30,35	90,13	90,47	6,40	6,40
11.5	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	Jumlah	20,00	18,00	18,00	92,00	18,00
12	**PENANAMAN MODAL**						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	13	13	13	5.046	2.897
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA)	Miliar Rp	17,11	17,53	17,53	2.570	5.079
12.3	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jumlah	7	7	7	15	12
12.4	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	Jumlah	2	2	2	2	1
12.5	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel	Jumlah	14	14	14	9	22
12.6	Lama Proses Perizinan	hari	1-5	1-5	1-5	1-3	1-2
12.7	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah	4	4	4	-	1

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
12.8	Jumlah Macam Pajak	Jumlah	7	7	7	-	-
12.9	Jumlah Macam Retribusi	Jumlah	3	3	3	-	-
12.10	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	2,85	2,71	7,46	2,05	2,08
12.11	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87,35	87,75	87,75	87,00	87,80
12.12	Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama	%	85,00	85,00	85,00	25,00	25,00
12.13	Jumlah kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Investor	13	13	13	122	44
12.14	Jumlah izin yang dikeluarkan berdasarkan SOP	%	65	65	65	90	95
12.15	Jumlah pengendalian dan pengawasan perizinan	%	75	75	75	95	100
13	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	50	75	25	100
13.2	Cakupan pembinaan olahraga	%	5,13	n.a	80	50	0
13.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	7,18	n.a	25	20	58
13.4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100	n.a	65	3	0
13.5	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	11	n.a	25	45	9
13.6	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	11	n.a	8	6	5
13.7	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah	25	31	24	28	51
13.8	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah	8	2	1	23	3
13.9	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah	7		2	9	2
13.10	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah	15	1	24	33	3
13.11	Persentase Organisasi Olah Raga yang aktif	%	51	50	80	30	100
13.12	Cakupan Wasit yang Bersertifikasi	%	52	n.a	15	20	0

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
13.13	Jumlah Cabang Olah Raga Prestasi Setiap Tahun	Jumlah	2	n.a	5	6	4
13.14	Jumlah Klub Olah Raga	Jumlah	22	n.a	22	15	0
13.15	Jumlah Gedung Olahraga	Jumlah	1	1	1	1	1
13.16	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	229	229	229	229	229
13.17	Jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jumlah	11	n.a	2	0	5
14	**STATISTIK**						
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku ”kabupaten dalam angka”	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.4	Buku ”PDRB”	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	**PERSANDIAN**						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
15.2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Kategori	n.a	Baik	Baik	Baik	Baik
16	**KEBUDAYAAN**						

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	2	2	2	2
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	8	8	8	8	8
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	-	-	0	2	0
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	13	13	13	13	17
17	**PERPUSTAKAAN**						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah	20.492	21.868	26.224	28.580	30.798
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	47.674	48.912	49.746	52.067	52.067
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	Jumlah	854	911	1.093	1.191	1.283
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah	15.221	52.377	52.377	52.377	52.067
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga Teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	58,33	61,54
17.7	Jumlah Perpustakaan di Desa/kelurahan yang di Kelola	Jumlah	113	113	113	113	113
17.8	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berprestasi	Jumlah	0	0	0	0	0
17.9	Jumlah Armada Perpustakaan Keliling yang dikelola	Jumlah	2	2	2	2	2
18	**KEARSIPAN**						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18.2	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah	4	5	6	7	8

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
18.3	Jumlah Arsip daerah yang dikelola	Jumlah	4	5	5	7	7
18.4	Jumlah Sarana Kearsipan Daerah	Jumlah	9	10	11	12	13
C	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**						
1	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1.1	Jumlah Produksi perikanan	ton	644.286,15	645.919,16	666.829,06	666.787,25	671.054,41
1.2	Angka Konsumsi ikan	%	107,25	99,01	98	98,12	98,25
1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	66,2	4,01	17,15	3,13	6,26
1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	39,98	41,18	42,25	42,85	45,69
2	**PARIWISATA**						
2.1	Kunjungan wisata	Jumlah	4.000	1.800	800	308	55.354
2.2	Lama kunjungan Wisata	hari	1	1	1	1	1
2.3	PAD sektor pariwisata	%	0,02	0,02	0,004	0,002	3,76
2.4	Jumlah Objek Wisata Pantai yang terdata dan terdaftar	Jumlah	11	11	11	11	11
2.5	Jumlah Objek Wisata Alam yang terdata dan terdaftar	Jumlah	27	27	27	27	27
2.6	Jumlah Objek Wisata Sejarah yang terdata dan terdaftar	Jumlah	20	20	20	20	20
2.7	Jumlah Objek Wisata Budaya yang terdata dan terdaftar	Jumlah	5	5	5	5	5
2.8	Jumlah Objek Wisata Seni yang terdata dan terdaftar		0	0	0	0	0
2.9	Jumlah Objek Agrowisata yang terdata dan terdaftar	Jumlah	0	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.10	Jumlah Objek Wisata Buatan yang Terdata dan Terdaftar	Jumlah	2	2	2	2	2
2.11	Jumlah Objek Wisata dikelola dengan sistem bagi hasil pemerintah setempat	Jumlah	3	0	3	1	0
2.12	Jumlah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemda	Jumlah	1	1	1	1	1
2.13	Jumlah Objek wisata yang dikelolah oleh Swasta	Jumlah	3	3	3	3	3
3	**PERTANIAN**						
3.1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (palawija)	Rp.Juta	1.125.325,00	1.249.42	1.249.42	1.448.138,20	
3.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB sektor pertanian	%	26,52	7	7	12,68	
3.3	Nilai PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Rp.Juta	2.620.315,00	2.631.475,00	2.631.475,00	3.822.220,80	
3.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian/perkebunan	%	61,8	53,21	53,21	33,47	n.a
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	-	-	6,4	6,3	6,1
3.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	5,84	9,61	30,47	4,18
4	**PERDAGANGAN**						
4.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	-	9.380.224.938.000	291.417.313.600	0	0
4.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	65,64	-	-	-
5	**PERINDUSTRIAN**						
6.1	Pertumbuhan Industri	%	-7,1	4,11	4,87	5,02	5,09
6.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	n.a	n.a	4	5	7

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.3	Jumlah Kemasan Lokal yang tercipta	Jumlah	n.a	n.a	20	20	21
7	**TRANSMIGRASI**						
7.1	Transmigran swakarsa	KK	100	50	50	37	26
7.2	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	125	12	12	13	184,5
7.3	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	250	254	254	254	254
D	**PENUNJANG URUSAN**						
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	**KEUANGAN**						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,81	4,59	4,43	2,03	2,08
2.3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0,45	0	0	1,99
2.4	Persentase belanja pendidikan	%	25,55	27,76	26,81	29,32	30,01
2.5	Persentase belanja kesehatan	%	16,82	17,13	17,85	18,82	22,27
2.6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Rasio	-	-	-	-	-
2.7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,22	0,2	0,2	0,33	0
2.8	Penetapan APBD	tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	2,70	20,58	12	70,77	16,23
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,70	5,25	3,64	16,52	5,48
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	13,54	15	13,21	8,23	4,33
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah	38	37	37	37	38
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah	201	208	207	201	198
3.6	Persentase Penempatan SDM sesuai Kompetensi	Jumlah	n.a	3348	3935	3812	3709

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100
4.3	PENERAPAN SIDa :						
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100
5	**PENGAWASAN**						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	82,30	83,00	80,00	81,00	85,00
5.2	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	90,00	90,00	80,00	90,00	90,00
5.3	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	90,00	90,00	100,00	90,00	100,00
5.4	Persentase pelanggaran pegawai yang diproses	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5.5	Jumlah temuan BPK	Jumlah	14	14	7	12	16
6	**SEKRETARIAT DEWAN**						
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	**SEKRETARIAT DAERAH**						
7.1	Persentase Penyelesaian Tapal Batas antar Kecamatan	%	60,00	70,00	90,00	95,00	96,00
7.2	Jumlah Analisa Berita dan Kebutuhan Publik yang disampaikan kepada kepala daerah	Jumlah	852	288	290	504	184
7.3	Jumlah UMKM yang memperoleh akses ke lembaga keuangan	Jumlah	19.703	20.013	21.951	15.838	8.538
7.4	Persentase Potensi Sumber Daya Alam yang telah dimanfaatkan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
7.5	Persentase Paket Tender yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	97	97
7.6	Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Tender	%	100	100	100	100	100
7.7	Persentase Besaran Efesiensi Nilai Kontrak terhadap Nilai Pagu	%	3,83	3,60	5,96	6,90	2,81
7.8	Persentase Asset Sekretariat yang sudah direkonsiliasi	%	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
7.9	Nilai LPPD	Nilai	29.735	34.502	24.152	n.a	n.a

No	Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7.10	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi dalam kurun waktu tahun yang sama	%	100	90	90	100	100
7.11	Persentase Pejabat yang menyampaikan LHKPN	%	80	100	100	100	100
7.12	Persentase ketersediaan analisis jabatan	%	100	100	100	100	100
7.13	Persentase RKA Unit Kerja Lingkup Sekretaris daerah yang diverifikasi	%	100	100	100	100	100
9	**KECAMATAN**						
9.1	Jumlah Kecamatan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan di atas 80%	jumlah	22	22	22	22	22
9.2	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100
9.3	Persentase Konflik yang tertangani di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100
9.4	Persentase Kecamatan memiliki penurunan angka kemiskinan sesuai target RPJMD	%	100	100	100	n.a	n.a

Sumber : OPD Pengampu, 2021-2025.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran Keuangan Daerah bertujuan untuk mendeskripsikan proyeksi kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam horizon waktu perencanaan jangka menengah daerah dengan pertimbangan utama kondisi kinerja keuangan daerah yang telah dihasilkan selama ini, baik itu aspek realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun analisis terhadap perkembangan neraca daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memberikan pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terdapat dua kata kunci utama dalam memahami keuangan daerah, yaitu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak adalah hak daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan meliputi pungutan pajak, retribusi daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sementara kewajiban adalah kewajiban daerah untuk membelanjakan uang untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengertian tersebut, maka dalam setiap periode pemerintahan, analisis keuangan daerah penting untuk dilakukan. Keuangan daerah merupakan motor penggerak percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan fiskal pemerintah daerah meliputi aspek pendapatan daerah, aspek belanja daerah, dan aspek pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah dalam suatu periode tertentu, maka penting untuk menganalisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan

laporan Neraca Daerah. Dengan demikian, APBD merupakan cerminan dari analisis keuangan daerah. Untuk itu, substansi mendasar yang dibahas dalam bab ini adalah: (i) Analisis kinerja keuangan daerah lima tahun sebelumnya, (ii) Analisis kebijakan keuangan daerah masa lalu. Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kemampuan fiskal riil dalam mendanai program-program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Guna mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah di masa lalu, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkaitan dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD serta aspek kondisi neraca daerahnya. Guna melihat kinerja pelaksanaan APBD, tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan akurasi belanjanya. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu periode tahun 2019-2024 menunjukkan peran dari aspek tingkat ralisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Luwu sesuai yang ditargetkan dalam RPJMD Kab. Luwu Tahun 2029-2024.

2.5.1.2. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan komponen APBD yang memiliki peranan penting dalam menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

Guna mendorong peningkatan Pendapatan Daerah pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Selama periode 2019-2023 pemerintah daerah telah menetapkan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dimana arah kebijakan tersebut meliputi:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan asset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distrorsi ekonomi baik angka pendek maupun jangka panjang;
b. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberikan peran lebih pada kas umum daerah, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki;
d. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah;
e. Peningkatan koordinasi dengan segenap instansi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik ditingkat Daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Pusat.

Tabel 2.162.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pendapatan Daerah	**1.451.964.727.853**	**1.404.537.109.394**	**1.476.102.745.149**	**1.556.240.483.899**	**1.578.981.007.784**
Pendapatan Asli Daerah	**123.160.815.946**	**132.465.563.071**	**163.816.263.663**	**202.050.719.099**	**200.643.047.593**
Pajak Daerah	23.594.549.938	26.841.950.254	31.800.743.708	50.438.568.926	40.263.930.624
Retribusi Daerah	6.694.425.568	7.232.109.399	8.199.399.144	10.657.004.004	11.784.017.586
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.220.161.952	5.310.079.034	5.996.278.246	5.933.719.708	5.984.942.696
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87.651.678.488	93.081.424.384	117.819.842.566	135.021.426.461	142.610.156.687
Pendapatan Transfer	**1.242.720.707.327**	**1.205.682.389.554**	**1.277.720.437.034**	**1.329.704.495.044**	**1.336.908.387.195**
Pendapatan Transfer Pusat	1.162.171.725.375	1.153.148.608.581	1.195.160.035.030	1.223.542.473.104	1.277.199.418.249
Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.548.981.952	52.533.780.973	82.560.402.004	106.162.021.940	59.708.968.946
Lain - lain Pendapatan yang Sah	**86.083.204.580**	**66.389.156.769**	**34.566.044.452**	**24.485.269.756**	**41.429.572.996**
Hibah	86.083.204.580	11.297.246.769	34.566.044.452	24.485.269.756	41.429.572.996
Lain-lain pendapatan		55.091.910.000		-	25.312.031.192
BELANJA	**1.453.518.985.092**	**1.403.953.088.257**	**1.470.015.408.695**	**1.550.244.954.003**	**1.519.811.819.698**
Belanja Operasi	**861.759.627.266**	**893.420.451.269**	**957.681.190.505**	**975.447.767.164**	**1.008.375.250.606**

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	523.279.759.914	552.095.552.930	561.370.708.212	571.451.593.674,00	632.789.328.075,00
Belanja Barang dan Jasa	320.829.164.098	327.489.336.935	378.426.168.784	390.906.132.336	303.617.636.719
Belanja Subsidi				270.963.000	41.084.750
Belanja Hibah	16.662.667.254	13.273.561.404	17.511.313.509	12.396.578.154	71.757.201.062
Belanja Bantuan Sosial	988.036.000	562.000.000	373.000.000	422.500.000	170.000.000
Belanja Modal	**320.829.164.098**	**247.060.309.711**	**267.083.227.218**	**315.870.824.632**	**258.905.717.568**
Belanja Tak Terduga	**7.774.407.311**	**1.421.335.930**	**3.641.549.083**	**4.139.871.200**	**1.261.491.918**
Belanja Transfer	**263.155.786.416**	**262.050.991.347**	**241.609.441.889**	**254.786.491.007**	**251.269.359.606**
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.650.339.416	2.795.532.359	3.251.529.889	5.270.883.007	-
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	260.505.447.000	259.255.458.988	238.357.912.000	249.515.608.000	251.269.359.606
Pembiayaan Daerah	**41.465.636.307**	**72.705.657.271**	**67.971.325.955**	**60.206.662.408**	**32.114.608.764**
Penerimanaan Pembiayaan	38.465.636.307	68.388.657.271	61.045.325.955	60.206.662.408	32.114.608.764
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	4.317.000.000	6.926.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan yang stabil dari Rp1.4 triliun pada 2020 menjadi Rp1.57 triliun pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,18%. Walaupun ada kenaikan nominal yang signifikan, terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beberapa sektor transfer, pertumbuhan total pendapatan daerah menunjukkan angka yang relatif moderat, terutama pada tahun-tahun terakhir (2023-2024).

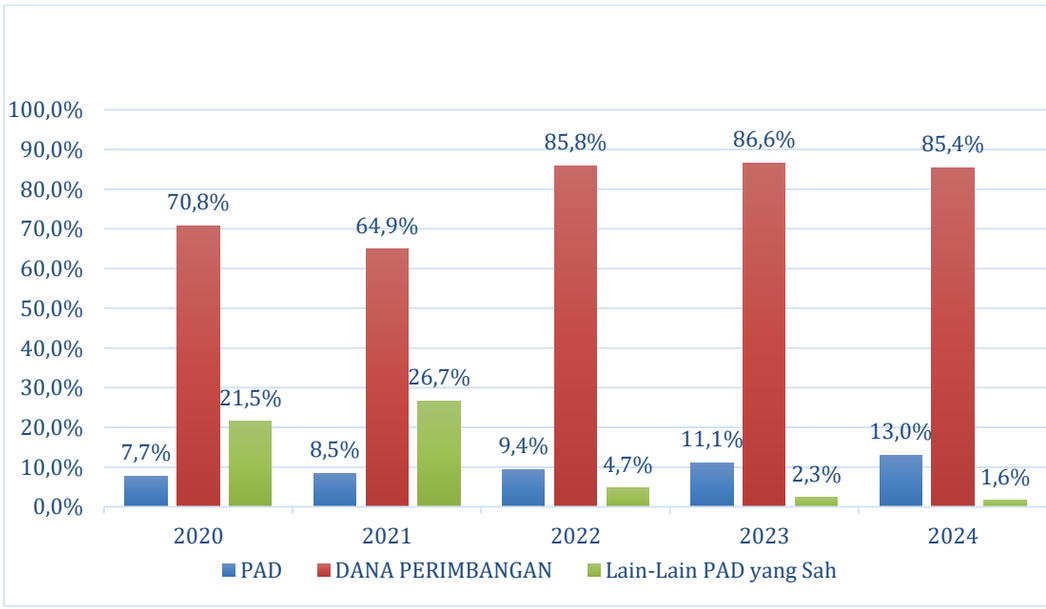
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 13,47%. Pada 2020, realisasi PAD tercatat Rp123,16 triliun dan meningkat menjadi Rp200,64 triliun pada 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh sektor-sektor utama PAD, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Dana Perimbangan mengalami peningkatan yang signifikan, mulai dari Rp941,74 miliar pada 2020 menjadi Rp1.336,91 miliar pada 2024. Dana Perimbangan menunjukkan rata-rata pertumbuhan 9,65%, mencerminkan transfer dari pemerintah pusat yang lebih besar. Peningkatan Dana Perimbangan mencerminkan aliran dana dari pusat yang terus meningkat dan mendukung keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan penurunan yang signifikan dari 387,07 triliun pada 2020 menjadi 41,43 triliun pada 2024. Ini mengindikasikan pengurangan pendapatan yang sah yang tidak termasuk dalam kategori lain. Penurunan tersebut dikarenakan dana hibah mengalami penurunan dan berpidahnya dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang periode tahun 2020-2024 proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Grafik 2.115.
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari 4 (empat) komponen, yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Tabel di bawah menunjukkan PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2020-2024 berdasarkan sumber pendapatan. Nilai PAD Kabupaten Luwu selama periode 2020-2023 mengalami peningkatan dari Rp.123 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp.207 milyar pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 realisasi PAD Kabupaten Luwu mengalami penurunan menjadi 200 milyar. Realisasi PAD pada tahun 2023 merupakan jumlah PAD yang paling tinggi selama realisasi periode 2020-2024.

Tabel 2.163.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah	200.643.47.593	26.841.950.254	31.800.743.708	50.438.568.926	40.263.930.624	17,67
Retribusi Daerah	6.694.425.568	7.232.109.399	8.199.399.144	10.657.004.004	11.784.017.586	15,49
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.220.161.952	5.310.079.034	5.996.278.246	5.933.719.708	5.984.942.696	3,62
Lain-lain PAD yang Sah	87.651.678.488	93.081.424.384	117.819.842.566	135.021.426.461	142.610.156.687	13,25
Total	**123.160.815.946**	**132.465.563.071**	**163.816.263.663**	**207.494.104.220**	**200.643.047.593**	

Sumber: BKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025

Secara keseluruhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang sangat positif dan meningkat setiap tahunnya, dengan total PAD yang terus berkembang dari Rp123,16 miliar pada 2020 menjadi Rp200,64 miliar pada 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan total PAD selama periode ini adalah 13,47%, yang menunjukkan adanya pengelolaan yang baik serta penguatan sektor-sektor pendapatan daerah

Komponen Pajak Daerah menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Pada tahun 2020, Pajak Daerah tercatat sebesar Rp23,59 miliar dan meningkat menjadi Rp50,44 miliar pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 17,67%. Walaupun ada penurunan pada 2024 menjadi Rp40,26 miliar, ini tetap menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total PAD. Kenaikan besar terjadi pada 2023, di mana realisasi pajak daerah melonjak hingga mencapai Rp50,44 miliar, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan kepatuhan pajak daerah.

Komponen Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan yang stabil. Pada 2020, retribusi daerah tercatat Rp6,69 miliar dan meningkat secara konsisten menjadi Rp11,78 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 15,49%. Kenaikan yang cukup signifikan ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam memperluas sektor-sektor pelayanan 318emban yang dikenakan retribusi serta adanya peningkatan tarif retribusi yang dapat memperbesar pendapatan daerah.

Untuk komponen Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, realisasi pada 2020 adalah Rp5,22 miliar, yang kemudian meningkat sedikit menjadi Rp5,98 miliar pada 2024. Meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya (rata-rata pertumbuhannya hanya 3,62%, komponen ini tetap memberikan kontribusi yang stabil terhadap PAD daerah, mencerminkan pengelolaan kekayaan daerah yang tetap terjaga dengan baik.

Komponen yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah Lain-lain PAD yang Sah, yang tercatat sebesar Rp87,65 miliar pada 2020, dan meningkat secara signifikan menjadi Rp142,61 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 13,25%. Peningkatan ini mencerminkan pengelolaan pendapatan yang lebih efisien dan efektif, serta kemungkinan peningkatan sumber pendapatan lain seperti dengan pihak ketiga, hibah, atau sumber pendapatan sah lainnya yang berkontribusi pada PAD daerah.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** terus mengalami peningkatan yang stabil, dengan sektor **Pajak Daerah** dan **Lain-lain PAD yang Sah** sebagai penggerak utama. Meskipun ada sedikit penurunan pada **Pajak Daerah** di tahun 2024, hal ini tetap mencerminkan capaian yang signifikan dalam pengelolaan PAD daerah. **Retribusi Daerah** dan **Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan** juga menunjukkan kinerja yang positif, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat kemandirian 319emban daerah dan meningkatkan kapasitas pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Apabila dilihat dari proporsi masing-masing komponen terhadap total PAD, kontribusi terbesar diberikan oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu masing-masing sebesar 66,1%, 71,2%, 70,3%, 71,9 . Komponen PAD yang paling rendah kontribusinya selama periode tersebut adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu rata-rata 3,7%. Sedangkan pajak daerah berkontribusi rata-rata

sebesar 20,80%. Proporsi komponen PAD terhadap PAD sebagaimana terlihat pada gamber berikut.

Grafik 2.116.
Proporsi Komponen PAD terhadap PAD
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Analisis lebih lanjut tentang PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2020-2024 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Pajak Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, Total Pajak Daerah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Rp23,59 triliun pada 2020 menjadi Rp40,26 triliun pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 340,34%. Meskipun angka totalnya meningkat, ada variasi besar dalam tren pertumbuhannya yang dipengaruhi oleh jenis pajak tertentu yang menunjukkan peningkatan drastis, sementara yang lainnya mengalami penurunan.

Jenis-jenis Pajak Daerah di Kabupaten Luwu terdiri dari: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 7) Pajak Parkir , 8) Pajak Air Bawah Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Peningkatan signifikan terjadi pada beberapa jenis pajak, terutama pada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menunjukkan pertumbuhan luar biasa, serta Pajak

Hiburan dan Pajak Air Bawah Tanah yang mencatatkan angka pertumbuhan yang sangat baik. Beberapa sektor, seperti Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, mengalami penurunan, yang dapat mencerminkan tantangan dalam sektor-sektor tersebut akibat perubahan ekonomi atau kebijakan. Pajak Parkir dan Pajak Hiburan menunjukkan pertumbuhan yang pesat setelah pandemi, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang terjadi dalam sektor hiburan dan infrastruktur.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan, kenaikan pada jenis pajak lainnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total Pajak Daerah, yang menunjukkan pemulihan dan penguatan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi daerah. Realisasi pajak daerah dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.164.

Realisasi PAD dari Pajak Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%)
1	Pajak Hotel	59.620.804	132.307.251	111.741.336	146.456.000	128.906.320	**31,36**
2	Pajak Restoran	1.619.764.217	1.872.197.396	1.971.448.082	1.854.004.352	1.814.943.220	**3,21**
3	Pajak Hiburan	9.685.000	7.400.000	16.626.000	23.715.005	41.452.000	**54,63**
4	Pajak Reklame	586.412.675	687.167.259	693.348.250	754.891.047	991.546.636	**14,58**
5	Pajak Penerangan Jalan	10.686.182.683	11.260.065.446	13.152.149.109	14.337.414.305	15.765.476.980	**10,29**
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.677.206.410	2.751.373.174	2.789.659.431	3.493.288.976	2.728.246.537	**1,87**
7	Pajak Parkir				173.467.500	412.866.100	**138,01**
8	Pajak Air Bawah Tanah	14.467.280	15.406.996	16.106.034	40.017.919	47.450.146	**44,52**
9	Pajak Sarang Burung Walet	3.950.000	3.000.000	2.700.000	3.100.000	2.950.000	**-6,02**
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.084.244.037	7.408.907.803	10.020.732.530	10.085.344.318	10.919.684.281	**16,49**
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.853.016.832	2.704.124.929	3.026.232.936	19.526.869.505,00	7.410.408.404,00	**135,26**
Total		**23.594.549.937,60**	**26.841.950.253,94**	**31.800.743.708,00**	**50.438.568.927,00**	**40.263.930.624,00**	**340,34**

Sumber: Data diolah, BKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Jika dilihat grafik diatas bahwa perkembangan realisasi PAD dari pajak daerah tahun 2020-2023 mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Tahun 2020 pajak daerah senilai Rp.23,59 Milyar menjadi Rp.50,43 Milyar di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 40,26 Milyar. Terjadinya penurunan disebabkan karena perekonomian daerah sedang mengalami perlambatan, penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak juga menurun khususnya dibidang pajak hotel dan hiburan.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi dari jasa umum menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan pendapatan meningkat dari Rp5,40 miliar pada 2020 menjadi Rp7,95 miliar pada 2024. Rata-rata Pertumbuhan: 7,83% per tahun, yang menunjukkan adanya pertumbuhan positif meskipun tidak sangat pesat. Peningkatan ini dapat mencerminkan kenaikan permintaan terhadap layanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti layanan kebersihan, pasar umum, atau infrastruktur publik lainnya. Kenaikan ini mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan dalam sektor ini.

Pendapatan dari retribusi jasa usaha mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada 2020, pendapatan tercatat Rp458,57 juta, namun kemudian meningkat tajam hingga mencapai Rp1,38 miliar pada 2024. Rata-rata Pertumbuhan 24,27% per tahun, yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, meskipun ada penurunan signifikan pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap sektor usaha tertentu yang mungkin mengalami perubahan signifikan dalam kebijakan atau kondisi ekonomi. Peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan optimisme pada sektor usaha daerah, tetapi penurunan di 2024 mungkin disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi usaha-usaha tersebut.

Pendapatan dari retribusi perizinan tertentu mengalami fluktuasi yang besar. Pendapatan awalnya tercatat Rp833,03 juta pada 2020, tetapi turun drastis menjadi Rp129,07 juta pada 2024, meskipun ada lonjakan signifikan pada 2023 (Rp1,50 miliar). Rata-rata Pertumbuhan 7,35% per tahun, yang menunjukkan fluktuasi

cukup besar meskipun dalam jangka panjang tidak ada penurunan besar secara keseluruhan. Fluktuasi yang terjadi disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan izin atau adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan terhadap izin tertentu di daerah tersebut. Lonjakan di 2023 terkait dengan kebijakan atau program yang memberikan dorongan terhadap sektor ini, sementara penurunan di 2024 menunjukkan adanya penurunan permintaan izin atau perubahan regulasi yang membatasi pendapatan dari retribusi ini.

Tabel 2.165.
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Retribusi Jasa Umum	5.402.825.773	5.506.855.050	5.695.001.500	7.176.056.421	7.947.818.204	7,83
2	Retribusi Jasa Usaha	458.567.000	1.177.888.000	1.706.434.000	1.976.397.000	1.380.952.300	24,27
3	Retribusi Perizinan Tertentu	833.032.795	547.366.349	797.963.644	1.504.550.583	129.067.000	7,35
	Total Retribusi Daerah	**6.694.425.568**	**7.232.109.399**	**8.199.399.144**	**10.657.004.004**	**9.457.837.504**	**5,71**

Sumber: Data diolah, BKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. endapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD menunjukkan fluktuasi yang cukup stabil, dengan pendapatan pada 2020 sebesar Rp5,22 miliar, meningkat sedikit menjadi Rp5,31 miliar pada 2021, lalu meningkat lagi pada 2022 menjadi Rp5,99 miliar. Namun, pada 2023 dan 2024, pendapatan tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi masing-masing Rp5,93 miliar dan Rp5,98 miliar. yang diperoleh dari dividen BPD Sulselbar. Rata-rata Pertumbuhan: 2,01% per tahun, yang menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat stabil namun relatif rendah.

Tabel 2.166.
Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.220.161.952	5.310.079.034	5.996.278.246	5.933.719.708	5.984.942.696	2,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah meliputi: 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan; 3) jasa giro; 4) pendapatan bunga; 5) tuntunan ganti rugi; 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 7) komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 2.167.
Realisasi PAD dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%)
1	Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	727.635.205	37.200.000	759.104.501	146.052.055	1.254.985.500	475,12
2	Jasa Giro	727.635.205	37.200.000	759.104.501	146.052.055	1.300.919.107	-11,09
3	Pendapatan Bunga	2.841.119.444	2.412.199.447	2.226.851.832	2.010.333.322	569.349.317	-25,05
4	Tuntutan Ganti Rugi	3.163.092.565	1.928.636.110	1.332.876.704	1.037.400.726	507.934.778	43,95
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	310.356.978	1.103.901.842	1.484.144.697	939.819.277	842.855.072	251,91
6	Pendapatan Denda Keterlambatan		10.604.948	90.154.018	322.336.671	140.863.125	74,38

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%)
	Pelaksanaan Pekerjaan						
7	Pendapatan Denda Pajak	124.853.334	648.845.986	125.001.717	120.960.629	1.609.043	1.973,28
8	Pendapatan Denda Retribusi	1.642.809	2.182.956	175.789.820	17.417.387		-49,27
9	Pendapatan Dari Pengembalian	23.799.339	693.835	0	48.000	460.887.343	51,37
10	Pendapatan BLUD	113.559.937	257.073.165	164.676.537	471.241.025	116.848.320.328	23,92
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	60.702.258.677	66.739.129.044	91.945.462.700	102.820.069.993		-31,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	66.101.251	0	0	4.770.753.600	20.658.057.380	1,29
Total		**75.188.157.943**	**87.651.678.488**	**93.081.424.384**	**117.819.842.566**	**135.021.426.461**	

Sumber: Data diolah, BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2025.

Selama periode tahun 2020-2024, Terjadi kenaikan konsisten dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang paling tajam terjadi pada 2023 (sekitar 26% dari tahun sebelumnya). Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan PAD secara umum. Pendapatan BLUD sangat meningkat di 2024 (>Rp116 Miliar). Ini menyumbang lebih dari 85% dari total PAD tahun itu, sehingga perlu ditinjau apa penyebabnya (perlu verifikasi apakah data sudah sesuai dengan sistem akuntansi). Denda Pajak (No. 7) dan Komisi/Potongan mengalami pertumbuhan ekstrem. Perlu dievaluasi apakah ini bersifat berkelanjutan atau hanya sekali waktu (anomali). Pendapatan bunga dan Jasa Giro mengalami tren menurun, bisa jadi karena penurunan kas pemerintah daerah atau suku bunga rendah. Lain-lain PAD yang sah menyumbang cukup besar selama 2020–2023, tapi tidak ada data tahun 2024, bisa mempengaruhi total estimasi pendapatan secara signifikan.

2. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama meliputi: 1) Dana Bagi

Hasil (DBH); 2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada tabel realisasi Dana Perimbangan Kabupaten menunjukkan tren kenaikan yang stabil, dengan peningkatan dari Rp937,96 miliar pada 2020 menjadi Rp1.336,91 miliar pada 2024. mendengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,78%. Komponen dana perimbangan dengan pertumbuhan tertinggi adalah DBH, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,48%. Kemudian DAU masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,2. Sedangkan DAK mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar 3,75%.

Tabel 2.168.
Realisasi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan (%)
Dana Bagi Hasil	12.341.107.623	23.876.627.254	26.820.395.303	12.021.746.566	17.706.953.000	24,48
Dana Alokasi Umum	652.082.657.000	647.227.070.000	646.307.531.529	696.914.385.820	766.966.029.000	4,25
Dana Alokasi Khusus	273.535.661.290	271.177.191.327	334.495.741.198	308.774.795.718	309.414.847.243	3,75
DID		17.862.280.000	16.208.458.000	26.515.937.000	6.885.398.000	-6,57
Dana Desa		193.005.440.000	171.327.909.000	179.315.608.000	176.226.191.006	-2,76
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		48.012.052.973	60.786.368.504	74.747.129.441	53.926.330.125	7,24
Bantuan Keuangan		4.521.728.000	21.774.033.500	31.414.892.500	5.782.638.821	114,74
Total	**1.043.484.276.331**	**937.959.425.913**	**1.205.682.389.554**	**1.277.720.437.034**	**1.336.908.387.195**	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2025.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Selama periode tahun 2020-2024, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Luwu dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami trend penurunan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Dapat dilihat terjadi penurunan dari tahun 2020 menuju tahun 2024 yaitu senilai Rp. 387 Milyar menjadi Rp. 58 Milyar pada tahun 2024. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan yang dimana komponen bantuan keuangan, dana bagi hasil pajak provinsi dan dana penyesuaian sudah berpindah ke jenis pendapatan transfer pada tahun 2021.

Tabel 2.169.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Hibah	86.083.204.580,00	11.297.246.769,00	34.566.044.452,00	24.485.269.756,00	41.429.572.996,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	46.735.662.951,62				
Dana Penyesuaian dan Otonormi khusus	220.436.237.000,00				
Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	33.813.319.000,00	0,00	0,00		17.543.797.087,00
Lain-Lain Pendapatan		0	55.091.910.000,00		
Total	**387.068.423.531,62**	**66.389.156.769,00**	**34.566.044.452,00**	**24.485.269.756,00**	**58.973.370.083,00**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu 2025.

2.5.1.3. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2020-2024, disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2024-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan daerah.

Realisasi Belanja periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi total belanja hal ini menunkukkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal karena dampak pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021, pemulihan ekonomi pada tahun 2022-2023 dam penyesuaian anggaran menjelang pemilu 2024.

Belanja operasi meningkat konsisten Rp.861 Milyar tahun 2020 menjadi Rp.1 trilyun pada tahun 2024. Porsi terbesar dari belanja belanja pegawai dan barang/jasa. Belanja modal tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi pada tahun 2020 sebesar Rp320 milyar turun menjadi Rp.258 milyar pada tahun 2024 ini mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur yang berubah sesuai kondisi fiskal dan program strategis pemerintah. Belanja Tak Terduga terbesar di tahun 2020 Rp.7,7 milyar menjadi Rp.1,2 milyar pada tahun 2024. Belanja transfer pada tahun 2020 sebesar Rp.263 milyar menjadi Rp.250 milyar pada tahun 2024. Realisasi belanja daerah Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

2.5.1.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur Pembiayaan terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Komponen Penerimaan Daerah meliputi 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; 2) Pencairan Dana Cadangan; 3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan; 4) Penerimaan Pinjaman Daerah; 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 6) Penerimaan Piutang Daerah; dan 7) Penerimaan Pihak Ketiga. Sedangkan komponen Pengeluaran Daerah meliputi: 1) Pembentukan Dana Cadangan; 2) Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 3) Pembayaran Pokok Utang; 4) Pemberiaan Pinjaman Daerah; 5) Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan; dan 6) Pengeluaran Pihak Ketiga.

Secara garis besar analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah

pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defesit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, terjadi lonjakan yang cukup besar mencapai Rp 72,7 triliun dibandingkan tahun 2020 (Rp 41,4 triliun). Namun, setelah itu, terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2024, mencapai Rp 32,1 triliun. Peningkatan yang tajam pada 2021 bisa menunjukkan adanya sumber pembiayaan yang lebih besar, seperti pinjaman atau pembiayaan lain yang diperlukan untuk mendukung belanja daerah. Penurunan pada 2024 mencerminkan berkurangnya kebutuhan pembiayaan.

2.5.2. Neraca Daerah

Neraca daerah mengambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legeslatif daerah maupun para pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi asset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancer *(current ratio)* dan rasio quick *(quick ratio).* Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain: rasio total hutang terhadap total asset *(debt to asset ratio)* dan rasio hutang

terhadap modal *(debt to equity ratio).* Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Luwu serta rata-rata pertumbuhannya secara rinci ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.170.

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1	**ASET**						
1.1	**ASET LANCAR**						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	47.385.606.493,92	61.046.784.136,01	60.206.662.408,38	36.883.406.969,94	33.532.325.816,44	-5,09
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	98.254.066,00	0,00	0,00	0,00	8.613.450,00	-25,00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	17.432.949,00			0,00		-25,00
1.1.4	Kas di BLUD	20.615.902.769,00			24.257.778.544,00	19.274.998.847,11	-25,00
1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	278.461.747,00			186.795.808,00	112.498.184,24	-25,00
1.1.6	Kas di Bendahara Bos	480.900.859,00			39.414.711,00		-25,00
1.1.7	Setara Kas	0,00					0,00
1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	34,03
1.1.9	Kas Lainnya	9.748.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.10	Piutang Pendapatan	34.335.165.669,46	11.711.688.536,46	12.380.505.085,46	48.639.712.952,00	72.921.145.935,89	70,65
1.1.11	Piutang lainnya	79.582.310,00	0,00	0,00	0,00		-
1.1.12	Penyisihan Piutang	-8.585.939.627,57	-8.654.596.768,00	-8.704.692.313,61	-15.189.958.847,00	-15.722.334.890,70	19,85
1.1.13	Beban Dibayar Dimuka	378.082,19	144.790.837,87	169.508.088,50	145.543.667,00	94.329.811,05	9540,97
1.1.14	Persediaan	24.773.116.010,04	12.934.581.186,51	18.455.872.269,51	18.455.872.269,00	20.190.625.269,01	1,07
	Jumlah Aset Lancar	**119.488.609.856,04**	**119.680.233.708,85**	**128.573.410.331,65**	**103.809.450.011,00**	**121.241.387.036,36**	1,28
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00					
1.2.1.1	Dana Bergulir	3.264.172.604,53	31.484.625,00	3.264.172.604,53	3.264.172.604,00		2517,12
1.2.1.2	Penyisihan Dana Bergulir	-3.020.405.804,53	0,00	-3.264.172.604,53	3.264.172.604,00		-100,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**243.766.800,00**	**31.484.625,00**	**0,00**	**0,00**		-46,52
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen						
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	53.818.343.590,00	55.538.229.212,00	54.813.848.722,75	51.732.953.996,00	51.732.953.996,75	-0,93
	Jumlah Investasi Permanen	**53.818.343.590,00**	**55.538.229.212,00**	**54.813.848.722,75**	51.732.953.996,00	51.732.953.996,75	-0,93
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**54.062.110.390,00**	**55.569.713.837,00**	**54.813.848.722,75**	**51.732.953.996,00**	**51.732.953.996,75**	-1,05
1.3	**ASET TETAP**						
1.3.1	Tanah	407.498.291.538,00	406.813.392.578,00	410.251.948.229,00	421.227.354.159,00	409.880.760.547,11	0,16
1.3.2	Peralatan dan Mesin	532.184.863.103,89	552.777.043.600,42	580.944.329.143,43	613.347.799.815,20	638.461.479.629,18	4,66
1.3.3	Gedung dan Bangunan	981.003.101.719,12	1.020.372.163.216,20	1.082.988.419.740,20	1.206.778.563.262,21	1.334.177.443.559,52	8,03
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.460.796.980.345,77	1.653.669.071.852,11	1.796.799.050.630,74	1.968.573.820.108,74	2.080.585.868.941,74	9,28
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	87.641.523.089,21	93.441.466.806,21	97.950.594.806,21	103.340.411.134,21	111.262.547.501,21	6,15
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.812.234.321,46	34.794.235.282,46	76.455.847.999,46	86.343.994.317,46	87.166.427.982,46	29,72
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.024.374.624.677,33	-1.341.503.275.475,18	-1.400.944.748.469,13	-1.624.432.222.012,62	-1.664.525.098.442,85	13,45
	Jumlah Aset Tetap	**2.485.562.369.440,12**	**2.420.364.097.860,22**	**2.644.445.442.079,91**	**2.775.179.720.784,20**	**2.997.009.429.718,37**	4,89
1.4	**DANA CADANGAN**						
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00			0,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Jumlah Dana cadangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**			0,00
1.5	**ASET LAINNYA**						
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	123.662.000,00	3.783.557.647,00	6.300.694.011,00	6.291.124.011,00	6.291.124.011,00	756,49
1.5.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00	0,00
1.5.3	Aset Tak Berwujud	9.323.351.547,00	23.601.807.901,00	24.542.585.824,00	26.972.061.174,50	27.592.950.524,50	42,33
1.5.4	Aset Lain-lain	29.102.665.324,00	29.386.737.534,40	8.349.726.577,49	54.766.543.556,07	38.612.366.534,87	113,95
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	38.549.678.871,00	-16.049.950.883,00	-17.785.077.469,00	-16.220.523.970,00	-20.957.005.136,00	-27,61
1.5.6	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)		0,00	2.356.445.434,00	2.152.729.000,00	0,00	-27,16
	Jumlah Aset Lainnya	**38.549.678.871,00**	**42.339.877.199,40**	**25.382.099.377,49**	**28.568.319.170,57**	**35.125.333.924,19**	-15,11
	JUMLAH ASET	**2.697.662.768.557,16**	**2.637.953.922.605,47**	**2.853.214.800.511,80**	**2.971.960.097.076,79**		-22,47
2	**Properti Investasi**						
2.1	Properti Investasi				901.631.350,00	901.631.350,00	
2.2	Akumulasi Penyusutan				-3.301.240.004,00	-3.301.240.004,00	
	Jumlah Properti Investasi				**18.379.601.375,22**	**18.379.601.375,22**	
3	**KEWAJIBAN**						
3.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
3.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	399.396.075,00	1.458.181,00	0,00	0,00	135.000,00	-49,66
3.1.2	Pendapatan diterima dimuka	266.780.052,61	293.710.210,15	211.403.690,27	308.414.650,25	730.042.862,39	41,17
3.1.3	Utang Beban	18.947.769.505,45	19.892.125.817,90	21.590.211.362,58	53.385.603.163,76	35.156.303.626,17	31,66

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
3.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.040.000,00	296.182.524,00	562.366.300,00	18.301.112.712,00		1253,37
3.1.5	Utang Kepada Pihak Ketiga	73.931.300,00	0,00	0,00	0,00		-24,75
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**19.702.916.933,06**	**20.483.476.733,05**	**22.363.981.352,85**	**72.321.885.950,41**	**35.886.481.488,56**	46,54
3.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
3.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	**19.702.916.933,06**	**20.483.476.733,05**	**22.363.981.352,85**	**72.321.885.950,41**	**35.886.481.488,56**	46,54
4	EKUITAS	2.677.959.851.624,10					-24,75
	JUMLAH EKUITAS DANA	**2.677.959.851.624,10**	**2.617.470.445.872,42**	**2.830.850.819.158,95**	**1.634.898.118.562,03**	**1.894.998.149.085,78**	-5,11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.697.662.768.557,16**	**2.637.953.922.605,47**	**2.853.214.800.511,80**	**1.685.948.046.464,19**	**1.930.884.630.574,34**	-5,11

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Hasil Audited BPK Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan perkembangan pengelolaan neraca daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut.

2.5.2.1. Aset

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Secara umum asset terbagi atas asset lancar, surat berharga baik berupa investasi jangka panjang maupun jangka pendek, asset tetap dan asset lainnya.

Selama periode 2020-2024 Aset Lancar menunjukkan fluktuasi yang cukup besar. Secara umum, Aset Lancar tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28%. Namun, terdapat beberapa kategori yang mengalami penurunan tajam, seperti "Kas di Kas Daerah" yang turun sebesar -5,09%, dan "Piutang Pendapatan" yang meningkat sangat signifikan sebesar 70,65%, menunjukkan peningkatan pendapatan yang mungkin belum diterima dalam kas. Investasi Jangka Panjang mengalami penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan -1,05%. Ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi dalam Dana Bergulir yang mengalami perubahan signifikan. Aset Tetap tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan 4,89%. Kategori seperti "Jalan, Irigasi, dan Jaringan" dan "Gedung dan Bangunan" mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, masing-masing 9,28% dan 8,03%, menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam infrastruktur. Aset Lainnya mengalami penurunan rata-rata sebesar -15,11%, yang disebabkan oleh perubahan pada kategori seperti "Aset Lain-lain" yang mengalami fluktuasi besar pada tahun 2023 dan 2024.

2.5.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesainnya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu meliputi: 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga; 2) Pendapatan diterima di muka; 3) Utang beban; 4) Utang Jangka Pendek Lainnya; dan 5) Utang pada Pihak Ketiga, dimana kewajiban ini termasuk kedalam kewajiban jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024 Kewajiban Jangka Pendek meningkat tajam dengan rata-rata pertumbuhan 46,54%. Ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam "Pendapatan diterima dimuka" (41,17%) dan "Utang Beban" yang meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2023. Peningkatan kewajiban jangka pendek ini menunjukkan adanya peningkatan pembayaran yang harus segera diselesaikan, baik terkait dengan beban maupun pendapatan yang diterima dimuka. Kewajiban Jangka Panjang tidak menunjukkan adanya perubahan berarti, dengan angka tetap 0 sepanjang periode.

2.5.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode 2020-2024 Ekuitas Dana pada 2020 tercatat sebesar 2,677 triliun dan mengalami penurunan tajam pada tahun 2024 menjadi 1,89 triliun, sebuah penurunan sebesar -5,11%. Ini mencerminkan adanya penurunan yang signifikan dalam dana ekuitas sepanjang periode tersebut.

Tabel 2.171.

Analisi Rasio Solvabilitas Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio Solvabilitas					
1.	Rasio Total Utang terhadap Modal	0,0073	0,0069	0,0078	0,0429	0,0186
2.	Rasio Total Hutang terhadap Aset	0,0073	0,0069	0,0078	0,0243	0,0111

Sumber: BPKAD Kab. Luwu (diolah) 2025.

Analisis Solvabilitas yang diperoleh dari neraca daerah Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Hutang terhadap Modal (Debt to Equity Ratio) digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. tahun 2020 sebesar 0,0073 tahun 2021 sebesar 0,0069, tahun 2022 sebesar 0,0078, tahun 2023 sebesar 0,0069 dan tahun 2024 0,0186.
2. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (Debt to Asset Ratio), yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2020 sebesar 0,0073 tahun 2021 sebesar 0,0069, tahun 2022 dan 2023 sebesar 0,0078 dan tahun 2024 sebesar 0.0111.

2.5.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. PAD yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:
    a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan Non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
    b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
    c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekoNomormian;
    d. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

e. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

2. Pendapatan Transfer, yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal *(fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal *(fiscal need)* dengan kapasitas fiskal *(fiscal capacity).* Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah sebagai berikut:
   a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
   b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
   c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendapatan ini biasanya tidak termasuk dalam kategori pajak atau retribusi yang sudah ditetapkan secara jelas, tetapi tetap sah menurut hukum dan diatur oleh pemerintah daerah atau negara

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan

dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta

aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10%, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.5.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tahun 2020-2024, dapat dilihat sebagaiman yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.172.

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu

Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja operasi**	**496.178.223.620**	**500.652.442.389**	**521.691.641.045**	**549.313.892.977**	**561.033.334.048**	**0,60**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	386.698.817.248	390.615.561.808	396.376.356.924	402.578.683.288	437.137.998.928	1,28
2	Belanja Tambahan Penghasilan	31.478.405.826	24.103.813.739	28.929.484.975	44.794.388.115	38.053.686.845	5,94
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	450.000.000	651.600.000	651.600.000	560.880.000	723.800.000	10,84
4	Belanja Insentif Pajak Daerah	302.657.500	872.376.079	732.192.464	1.962.201.125	1.336.170.864	66,66
1	Belanja Honorarium PNS	7.709.444.000	8.781.965.000	9.395.260.000	8.504.920.000	5.934.351.500	2,83
2	Belanja Uang Lembur	1.331.739.000	900.570.000	1.512.685.000	1.509.252.000	890.162.000	-2,55
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000	83.000.000	83.000.000	65.000.000	105.000.000	81,66
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.193.010.300	1.271.894.724	1.415.430.818	1.924.464.043	1.081.120.200	3,81

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	25.365.015.082	31.400.141.204	29.386.528.888	31.915.355.371	31.738.279.680	6,63
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	11.155.765.639	10.668.174.403	10.709.354.100	9.451.721.490	5.400.306.651	-12,91
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	959.412.500	371.512.000	771.911.000	760.808.250	3.959.859.200	2,26
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	179.343.000	246.366.000	685.385.000	868.795.000	412.300.000	37,64
9	Belanja Perjalanan Dinas	29.334.613.525	30.685.467.432	41.042.451.876	44.417.424.295	34.260.298.180	0,43
B	**Belanja Modal**	**14.506.033.254,00**	**22.214.788.196,00**	**6.961.515.069,00**	**14.795.054.237,00**	**11.070.352.106,00**	**18,96**
12	Belanja Modal (Kantor dan rumah tangga, Mobil Dinas, Komputer)	14.506.033.254	22.214.788.196	6.961.515.069	14.795.054.237	11.070.352.106	18,96
TOTAL		**510.684.256.874**	**522.867.230.585**	**528.653.156.114**	**564.108.947.214**	**572.103.686.154**	**19,55**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2025.

Pada tabel di atas Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,55%. Angka ini menggambarkan bahwa ada lonjakan yang signifikan dalam belanja daerah. Total belanja operasi mengalami kenaikan yang cukup stabil sepanjang periode 2020 hingga 2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,60% per tahun. Total Belanja Modal: Meskipun fluktuatif, dengan rata-rata 18,96% per tahun, belanja modal tetap mengalami peningkatan Sebagian besar belanja modal digunakan untuk keperluan kantor dan operasional lainnya seperti kendaraan dinas dan teknologi (komputer). Terlihat ada variasi yang cukup besar dalam angka belanja modal, namun secara umum pemerintah daerah menunjukkan perhatian terhadap pembaruan aset dan pengadaan barang modal yang diperlukan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.173.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (a/b)*100
		(a)	(b)	(c)
1	2020	510.684.256.874	1.422.041.706.888	35,91
2	2021	522.867.230.585	1.408.270.088.257	37,13
3	2022	528.653.156.114	1.476.941.408.695	35,79
4	2023	564.108.947.214	1.551.244.954.003	36,36
5	2024	572.103.686.154	1.519.811.819.698	37,64

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu(diolah).

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Selain analisis tentang pemenuhan kebutuhan aparatur juga perlu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat, untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

2.5.3.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Luwu berdasarkan surplus ataupun defesit anggaran. Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, sebaliknya kondisi defesit berarti belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Analisis pembiayaan daerah meliputi: a) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil; b) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA); dan d) Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

a. Analisis Sumber Penutup Defesit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk defisit riil anggaran. Perkembangan defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.174.

Penutup Defesit Riil Anggaran Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.451.964.727.853	1.404.537.109.394	1.476.102.745.149	1.556.240.483.899	1.578.981.007.784
	Dikurangi					
2	Belanja Daerah	1.419.041.706.888	1.403.953.088.257	1.470.015.408.695	1.550.244.954.003	1.519.811.819.698
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000	4.317.000.000	6.926.000.000	1.000.000.000	0
A	**Defesit Riil**	**29.923.020.964**	**-3.732.978.863**	**-838.663.546**	**4.995.529.896**	**59.169.188.086**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	38.465.486.307	68.388.657.271	61.045.325.955	60.206.662.408	32.114.608.764
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah					
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**38.465.486.307**	**68.388.657.271**	**61.045.325.955**	**60.206.662.408**	**32.114.608.764**
A-B	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan**	**68.388.507.271**	**64.655.678.408**	**60.206.662.409**	**65.202.192.304**	**91.283.796.850**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu.2025.

Berdasarkan tabel diatas, Pada 2021 dan 2022, terjadi defisit yang artinya pengeluaran daerah lebih tinggi daripada pendapatan. Namun, pada 2023 dan 2024, defisit riil menunjukkan surplus atau pendapatan lebih besar dari pengeluaran, yang memberi ruang lebih untuk alokasi pembiayaan atau tabungan daerah. Defesit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen-komponen tersebut termasuk dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah..

Tabel 2.175.
Komposisi Penutup Defesit Riil Anggaran
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari Total defesit Riil (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1,29	-18,32	-72,79	12,05	0,54
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu.2025.

Dengan memperhatikan data defisit dan surplus riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2020 sampai dengan 2024, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebagai akumulasi surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan.

b. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih

perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumya yang lebih rasional dan terukur. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA tersebut dapat bermakna positif dan negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efesiensi anggaran pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Perolehan SiLPA Kabupaten Luwu selama tahun tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diperoleh dari sisa penghematan dan Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	Jumlah SILPA	**68.388.507.270,92**	**100**	**64.655.678.408,01**	**100**	**60.206.662.409,01**	**100**	**32.114.608.762,00**		**91.283.796.850**	
1	Pelampauan Penerimaam PAD	10.557.316.800,09	15,44	13.708.238.100,18	21,20	18.724.410.525,56	31,10		0,00	0	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-13.584.914.315,38	-19,86	-19.460.339.026,67	-30,10	780.795.611,00	1,30	7.545.725.301	23,50	0	0,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	2.533.473.380,00	3,70	-12.437.503.061,00	-19,24	-40.679.344.548,00	-67,57	39.414.711,00	0,12		0,00
4	Sisa Penghematan Belanja atau	68.483.235.331,21	100,14	82.843.824.214,50	128,13	81.380.800.820,45	135,17	24.529.468.750	76,38	91.283.661.850,28	100,00

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
	akibat lainnya										
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	399.396.075,00	0,58	1.458.181,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135.000	0,00
6	kegiatan lanjutan										

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu, Tahun 2025.

2.5.4. Analisis Fiskal Daerah

Analisis Fiskal Daerah dilakukan untuk memberikan gambaran tentang analisis rasio keuangan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024. Berdasarkan rasio keuangan APBD tersebut maka dapat disimpulkan tentang kualitas dan ruang fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang setiap rasionya terfokus pada aspek ruang fiskal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayan daerah.

Di sisi pendapatan, analisis keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio kemandirian daerah, ruang fiskal (fiscal space), serta rasio pajak (tax ratio). Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah. Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Di sisi belanja daerah, analisis meliputi rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal per total belanja, dan rasio belanja per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai pada komponen belanja tidak langsung. Analisis Fiskal Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020- 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.5.4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya

pendapatan transfer dari pusat/dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka- angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Komponen utama yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar peleksanaan desentralisais fiskal di daerah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.177.

Rasio Kemandirian Keuangan Kab. Luwu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Transfer	Rasio Transfer terhadap Pendapatan Daerah
1	2020	1.451.964.727.853	941.735.488.375	64,86
2	2021	1.404.537.109.394	1.205.682.389.554	85,84
3	2022	1.476.102.745.149	1.277.720.437.034	86,56
4	2023	1.556.240.483.899	1.329.704.495.044	85,44
5	2024	1.578.981.007.784	1.336.908.387.195	84,67

2.5.4.2. Rasio Fiskal Daerah

Ruang Fiskal Daerah Ruang fiskal (fiscal space) dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat untuk

secara bebas dialokasikan sesuai kebijakan pemerintah daerah (diskresi) untuk menggunakannya sesuai prioritas pembangunan daerah. Ruang fiskal diperoleh dari total pendapatan daerah setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

Tabel 2.178.

Ruang Fiskal Daerah Kab. Luwu tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal
1	2020	1.451.964.727.853	86.083.204.580	273.535.661.290	500.157.683.514	592.188.178.469	40,79
2	2021	1.404.537.109.394	11.297.246.769	271.177.191.327	552.095.552.930	569.967.118.368	40,58
3	2022	1.476.102.745.149	34.566.044.452	334.495.741.198	561.370.708.212	545.670.251.287	36,97
4	2023	1.556.240.483.899	24.485.269.756	308.774.795.718	571.451.593.674	651.528.824.751	41,87
5	2024	1.578.981.007.784	41.429.572.996	309.414.847.243	632.789.328.075	595.347.259.470	37,70

Pada tahun 2020-2024 kondisi ruang fiskal stabil dikisaran 36-42%, yang menunjukkan ruang fiskal masih aman, namu melamipenurunan pada tahun 2022 dan 2024. Ruang fiskal mencerminkan flesibilitas keuangan daerah untuk belanja prioritas, bila terlalu sempit (<30%) artinya belanja kurang elastis.

2.5.4.3. Rasio Tax Daerah

Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (ekonomy), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (tax ratio), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di Kabupaten Luwu akan membantu kita

dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRBnya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait.

Tax ratio stabil pada 0,15 selama 2020-2021, mengalami kenaikan di tahun di tahun 2022 dan puncaknya padatahun 2023 sebesar 0,23. Turun kembali pada tahun 2024 menjadi 0,18 walaupun masih lebih tinggu dari tahun-tahun awal

Peningkatan kinerja pemungutan pajak tahun 2023 menunjukkan efisiensi paja yang signifikan, terlihat dari lonjakan pajak daerah dan kenaikan tajam tax ratio. Untuk mengetahui gambaran tax rasio pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.179.

Rasio Pajak Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pajak Daerah	Nilai PDRB	Tax Ratio
1	2020	23.594.549.938	16.031.067.610.000	0,15
2	2021	26.841.950.254	17.839.990.460.000	0,15
3	2022	31.800.743.708	19.980.972.190.000	0,16
4	2023	50.438.568.926	21.755.643.550.000	0,23
5	2024	40.263.930.624	22.952.225.530.000	0,18

2.5.4.4. Rasio Belanja Pegawai

Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai APBD. Rasio belanja pegawai tertinggi terjadi pada tahun 2024 (41,64%), yang mengindikasikan porsi belanja pegawai makin mendominasi total belanja daerah, Ini bisa menjadi sinyal inefisiennya struktur anggaran, karena belanja pegawai bersifat konsumtif, bukan produktif. Meskipun belanja pegawai naik, total belanja justru turun di 2024, yang menyebabkan rasio melonjak. Ini mengindikasikan tekanan fiskal ruang fiskal untuk belanja pembangunan mungkin makin sempit. Idealnya, porsi belanja pegawai tidak melebihi 30–35% agar belanja pembangunan dan pelayanan publik tetap optimal.

Gambaran kondisi belanja pegawai Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.180.

Rasio Belanja Pegawai Kab. Luwu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
1	2020	500.157.683.514	1.419.041.706.888	35,25
2	2021	552.095.552.930	1.403.953.088.257	39,32
3	2022	561.370.708.212	1.470.015.408.695	38,19
4	2023	571.451.593.674	1.550.244.954.003	36,86
5	2024	632.789.328.075	1.519.811.819.698	41,64

2.5.4.5. Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian rasio belanja modal fluktuatif dari tahun ke tahun dimana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 20,38 persen dan terjadi penurunan tajam pada tahun 2024 menjadi 17 persen ini menunjukkan persi belanja untuk aset pembangunan makin kecil dibandingkan total belanja. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kab. Luwu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.181.

Rasio Belanja Modal Kab. Luwu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
1	2020	286.351.885.895	1.419.041.706.888	20,18
2	2021	247.060.309.711	1.403.953.088.257	17,60
3	2022	267.083.227.218	1.470.015.408.695	18,17
4	2023	315.870.824.632	1.550.244.954.003	20,38

No	Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja
5	2024	258.905.717.568	1.519.811.819.698	17,04

2.5.4.6. Rasio Belanja per Kapita Penduduk

Rasio belanja daerah terhadap jumlah penduduk (belanja daerah perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilainya, semakin besar besar belanja yang dikeluarkan untuk menyejahterakan satu orang penduduk wilayah tersebut sehingga semakin besar kemungkinan tercapainya. Sebaliknya, semakin kecil angka rasionya, semakin kecil dana yang disediakan pemda untuk menyejahterakan penduduknya. belanja perkapita diharapkan akan lebih memperlihatkan kontribusi belanja daerah sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut rasio belanja per kapita Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.

Tabel 2.182.

Rasio Belanja Daerah Per Kapita Kab. Luwu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja Daerah	Jumlah Penduduk	Belanja Daerah per Kapita
1	2020	1.419.041.706.888	365.608	3.881.320
2	2021	1.403.953.088.257	367.454	3.820.759
3	2022	1.470.015.408.695	369.820	3.974.948
4	2023	1.550.244.954.003	379.300	4.087.121
5	2024	1.519.811.819.698	379.300	4.006.886

2.5.4.7. Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Perekonomian Kabupaten Luwu berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun periode Tahun 2020-2024 Didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang menjadi motor penggerak ekonomi, pertumbuhannya stabil dan bahkan meningkat di tahun 2024 sebesar 12 trilyun. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 8 trilyun. Kontribusi PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.183.
PDRB ADHB Kabupaten Luwu Menurut Pengeluaran
Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.573,20	10.015,50	10.836,70	11.543,20	12.676,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	179,50	186,20	203,20	227,80	242,90
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.417,10	1.552,90	1.574,90	1.708,00	1.766,10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.160,20	6.489,90	7.049,00	8.168,00	8.691,20
Perubahan Inventori	88,50	35,90	433,20	-89,90	-79,70
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.387,30	-440,40	-115,90	198,60	-345,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**16.031,10**	**17.840,00**	**19.981,00**	**21.755,60**	**22.952,20**

Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah Kabupaten Luwu dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Kabupaten Luwu dalam waktu 5 tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami kenaikan dari 1,00 persen pada tahun 2020 menjadi 1,16 pada tahun 2024. Kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.184.
Kontribusi PDRB menurut Pengeluaran Kab. Luwu
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Konsumsi Pemerintah	Total Belanja	Share APBD terhadap Konsumsi Pemerintah
1	2020	1.417.083.850.000	1.419.041.706.888	1,00
2	2021	1.552.898.520.000	1.403.953.088.257	1,11
3	2022	1.574.867.000.000	1.470.015.408.695	1,07
4	2023	1.707.988.120.000	1.550.244.954.003	1,10
5	2024	1.766.050.700.000	1.519.811.819.698	1,16

Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 tahun terakhir yang belum mengalami peningkatan yang signifikan meskipun meningkat. Belanja modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB yang dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD terhadap PMTB seperti Tabel di bawah ini

Tabel 2.185.
Kontribusi APBD terhadap PDRB Pada Komponen Pembentukan PMTB Tahun 2020-2024

No	Tahun	Komponen PMTB	Total Belanja Modal	Share Belanja Modal terhadap Komponen PMTB
1	2020	6.160.177.430.000	286.351.885.895	0,05
2	2021	6.489.854.500.000	247.060.309.711	0,04
3	2022	7.048.956.510.000	267.083.227.218	0,04
4	2023	8.167.961.390.000	315.870.824.632	0,04
5	2024	8.691.239.090.000	258.905.717.568	0,03

2.5.4.8. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kabupaten Luwu menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik pada 2020–2022, namun mengalami penurunan drastis pada 2023 akibat lonjakan utang jangka pendek dan penurunan kas. Pada 2024, situasi mulai membaik, meski belum sepenuhnya pulih. Kabuapten Luwu disarankan untuk menjaga keseimbangan antara kas dan kewajiban jangka pendek guna menghindari risiko gagal bayar atau krisis likuiditas di masa depan. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.186.
Rasio Lancar Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

Tahun	Kas	Utang Jangka Pendek	Persentase
2020	68.876.558.883,92	19.702.916.933,06	349,58
2021	61.046.784.136,01	20.483.476.733,05	298,03
2022	60.206.662.408,38	22.363.981.352,85	269,21
2023	36.883.406.969,94	72.321.885.950,41	51,00
2024	33.532.325.816,44	35.886.481.488,56	93,44

Pada tiga tahun pertama, rasio kewajiban terhadap aset menunjukkan angka yang sangat rendah, yakni di bawah 1%. Hal ini mencerminkan struktur modal yang konservatif dengan tingkat

ketergantungan terhadap utang yang sangat kecil. Perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan sehat dari sisi solvabilitas. Tahun 2023 Terjadi lonjakan signifikan dalam total kewajiban yang mencapai Rp72,32 miliar, meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menyebabkan rasio kewajiban terhadap aset melonjak menjadi 2,43%. Peningkatan tajam ini menunjukkan adanya tekanan dalam struktur keuangan, dan menandakan peningkatan risiko finansial yang perlu dikendalikan. Tahun 2024 Kabupaten Luwu berhasil menurunkan kewajiban menjadi Rp35,89 miliar, hampir setengah dari angka tahun 2023. Di saat yang sama, aset perusahaan terus meningkat menjadi Rp3.223,49 triliun. Hal ini menyebabkan penurunan rasio kewajiban terhadap aset menjadi 1,11%, mengindikasikan langkah perbaikan yang positif dalam pengelolaan utang dan pemulihan kondisi finansial. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.187.
Rasio Total hutang terhadap Aset Kabupaten Luwu
Tahun 2020-2024

Tahun	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase
2020	19.702.916.933,06	2.697.662.768.557,16	0,73
2021	20.483.476.733,05	2.637.953.922.605,47	0,78
2022	22.363.981.352,85	2.853.214.800.511,80	0,78
2023	72.321.885.950,41	2.971.960.097.076,79	2,43
2024	35.886.481.488,56	3.223.488.706.050,89	1,11

2.5.4.9. Dana Bagi Hasil

Selama periode lima tahun terakhir, data menunjukkan fluktuasi dalam penerimaan pemerintah daerah dari dua komponen utama transfer pusat, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Kedua komponen ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut disajikan realisasi dana bagi hasil dan pendapatan bagi hasil pajak pada tabel berikut:

Tabel 2.188.
Realisasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Dana Bagi Hasil	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2020	12.341.107.623,00	46.735.662.951,62
2021	23.876.627.254,00	48.012.052.973,00
2022	26.820.395.303,00	60.786.368.504,00
2023	12.021.746.566,00	74.747.129.440,97
2024	17.706.953.000,00	53.926.330.125,00

2.5.5. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kebijakan Alokasi Anggaran secara umum diarahkan untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah, baik melalui belanja langsung Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah: Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah (pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, dll). Penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan sangat membantu. Implementasi teknologi dalam sistem pembayaran pajak (seperti aplikasi pajak daerah) dapat mempermudah proses dan meningkatkan efisiensi.
b. Realisasi Retribusi Daerah: Meningkatkan retribusi dari pelayanan publik seperti pasar, parkir, dan perizinan. Pemerintah daerah bisa memperbaiki mekanisme penarikan retribusi dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pengumpulan retribusi.
c. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah: Memaksimalkan pemanfaatan aset milik daerah, seperti tanah atau bangunan yang tidak produktif. Aset ini bisa disewakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang dapat menambah pendapatan daerah.
d. Menggali Potensi Sumber Pendapatan Baru: Mengidentifikasi potensi baru yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah, seperti pengembangan ekonomi kreatif, wisata, dan sektor digital. Pemanfaatan sektor pariwisata untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara akan sangat menguntungkan bagi daerah.
e. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Ekonomi: Peningkatan sektor-sektor yang dapat mendatangkan pendapatan baru, seperti infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi. Proyek-proyek infrastruktur yang didukung oleh pemerintah pusat atau pihak swasta bisa menghasilkan pajak atau retribusi tambahan.
f. Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Daerah dengan potensi sumber daya alam (misalnya, pertambangan, perikanan, dan kehutanan) bisa mencari cara-cara baru dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menghasilkan pendapatan.
g. Pengendalian Pengeluaran: Untuk memastikan lebih banyak anggaran tersedia untuk pembangunan dan kebutuhan lain,

pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja daerah dikelola dengan efisien dan tidak ada pemborosan.

h. Pengurangan Pembiayaan Pengeluaran: Mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.
i. Kemitraan Publik-Swasta: Pemerintah daerah bisa menggandeng sektor swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar, pengelolaan potensi wisata, atau sektor-sektor lain yang bisa mendatangkan pendapatan. Model kerjasama ini bisa mengurangi beban anggaran pemerintah daerah, sekaligus mengoptimalkan pendapatan.
j. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pajak dan retribusi daerah. Program edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak daerah dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
k. Sistem e-Pajak dan e-Retribusi: Menerapkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik yang lebih efisien dan transparan. Ini bisa mempercepat proses pembayaran dan memperkecil kebocoran pajak atau retribusi daerah.
l. Aplikasi Pengelolaan Aset: Menerapkan teknologi untuk mengelola aset daerah dengan lebih efisien. Teknologi ini dapat membantu dalam memantau aset, memperbaiki proses sewa, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset daerah.
m. Promosi Wisata Daerah: Mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan melalui tiket masuk, retribusi parkir, serta pengembangan usaha lokal (seperti restoran, hotel, dan souvenir). Menarik wisatawan domestik dan internasional dapat memberikan dampak langsung pada pendapatan daerah.
n. Pengembangan Industri Kreatif dan UMKM: Mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif agar mereka dapat berkembang dan membayar pajak/retribusi. Pemerintah daerah bisa memberikan pelatihan, fasilitas, dan

pasar bagi produk-produk lokal yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

o. Pemanfaatan Dana Hibah dan Pinjaman: Pemerintah daerah bisa mendapatkan dana tambahan melalui hibah dari pemerintah pusat atau lembaga internasional, serta memanfaatkan pinjaman daerah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
p. Meningkatkan Investasi Daerah: Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di daerah dengan memberikan insentif dan fasilitas investasi. Peningkatan investasi ini akan menghasilkan pendapatan dari pajak dan retribusi serta meningkatkan lapangan pekerjaan.
q. Pengawasan Ketat terhadap Pajak dan Retribusi: Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Dengan sistem yang baik, penghindaran pajak dapat diminimalisir.
r. Menerapkan Sanksi yang Tegas: Pemberian sanksi atau denda yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban pajak atau retribusi daerah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
s. Meningkatkan Transparansi Anggaran: Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, baik dalam pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembiayaan daerah.
t. Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD.

2.5.6. Asumsi Ekonomi, Kondisi Sosial Daerah

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025-2029.

Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menetukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu dua tahun ke depan.

Tabel 2.189.
Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Luwu 2025-2029

No	Indikator	Capaian 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	6,12	6,39	6,53	6,63	6,72
2	Tigkat Pengangguran (%)	4,14	3,2	3,05	2,87	2,65	2,41
3	Gini Ratio	0,319	0,302	0,247	0,227	0,218	0,201
4	PDRB per Kapita ADHB (Rp Juta)	59,73	74,23	75,09	76,3	77,61	78,21
5	PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta)	31,59	42,23	51,09	52,33	54,26	56,71
5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,7	10,55	10,46	10,35	10,23	9,21
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,86	74,23	75,09	76,3	77,61	78,21

Sumber: BPS Kab. Luwu dan Tim Penyusun Bappelitbangda Kab. Luwu

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Luwu yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Luwu lima tahun kedepan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, Tingkat kemiskinan, indeks Pembangunan manusia, gini rasio dan PDRB per kapita. Keenam indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan dapat memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Pertumbuhan ekomoni daerah Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga Kabupaten Luwu diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian Provinsi dan Nasional. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya diharapkan secara konsisten terus meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun kedepan. Dengan demikian, kesejahteraan Masyarakat dapat meningkat dan mampu melahirkan bibit-bibit unggul pada sumber daya manusia Kabupaten Luwu.

Capaian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sekitar 4,36 persen. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari periode sebelumny dan lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan Tingkat pengangguran pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu mencapai 4,14%, dan diharapkan akan berada pada posisi 2,41% pada tahun 2029. Tetapi angka pengangguran yang turun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 1,01 poin. Hal ini Pemerintah dan Pihak Swasta lebih berperan penting untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan turunnya angka pengangguran, sehingga Kabupaten Luwu menargetkan angka kemiskinan berada pada posisi 9,21 persen pada tahun 2029.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Kabupaten Luwu akan terus membaik bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga peningkatannya secara regional dan nasional. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Luwu juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban serta aksesibilitas ekonomi yang

semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia Kabupaten Luwu yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik, setara dengan daerah-daerah maju lainnya baik di tataran regional dan nasional.

Indeks pembangunan manusia tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 73,86. Hal ini sudah sesuai dengan target yang akan dicapai. Pada tahun 2025 pemerintah Kab. Luwu menargetkan sebesar 74,02 sampai 75,27 pada tahun 2029 dan peningkatan ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Sama halnya komponen indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga kualitas manusia Kabupaten Luwu semakin baik.

Selanjutnya, asumsi-asumsi pokok kebijakan fiskal juga diperkirakan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PAD secara rata-rata diperkirakan akan bertumbuh 7,50 persen pertahun dengan kecenderungan yang meningkat. Sedangkan, dana perimbangan diperkirakan bertumbuh rata-rata 2,50 persen selama periode 2025-2029 dengan kecenderungan yang melambat. Perkiraan melambatnya pertumbuhan Dana Perimbangan bersumber dari pertumbuhan DAU dan DAK yang diperkirakan akan melambat karena kondisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.

Tabel 2.190.
Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Pertumbuhan PAD	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
2	Pertumbuhan Pendapatan Transfer	3%	3%	3%	3%	3%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

2.5.7. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Sejak tahun 2021 struktur Pendapatan dan Belanja (APBD) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Dasar utama dalam proyeksi pendapatan daerah mencakup empat determin, yakni: (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah; (2) kebijakan di bidang keuangan negara; (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah; serta (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap obyek pendapatan daerah. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain mengacu pada analisis asumsi indikator makro ekonomi daerah, juga mengacu, pada analisis kebijakan. Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu untuk periode 2025-2029 yang akan datang.

Selama periode 2025 hingga 2030, pendapatan daerah menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari Rp1,562 triliun pada 2025 menjadi Rp1,912 triliun pada 2030. Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mengalami peningkatan tajam dari Rp233,48 miliar (2025) menjadi Rp327,39 miliar (2030). Kenaikan didorong oleh Pajak Daerah meningkat dari Rp72,83 miliar menjadi Rp117,30 miliar. Retribusi Daerah melonjak dari Rp145,65 miliar menjadi Rp199,09 miliar. Namun, terdapat penurunan drastis pada Lain-lain PAD yang sah, yaitu dari Rp9,5 miliar (2025) menjadi stagnan di Rp5,5 miliar mulai 2026 hingga 2030. Pendapatan Transfer Merupakan sumber utama pendapatan, meningkat dari Rp1,304 triliun (2025) menjadi Rp1,553 triliun (2030). Transfer Antar Daerah juga tumbuh perlahan dari Rp103,3 miliar menjadi Rp93 miliar, sementara Transfer Pusat relatif stabil di kisaran Rp1,46 triliun dari tahun 2028. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terus bertumbuh dari Rp23,81 miliar (2025) menjadi Rp32,08 miliar (2030). Pos ini menunjukkan peluang optimalisasi pendapatan non-transfer dan non-PAD.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Kabupaten Luwu untuk lima tahun kedepan didasari pada berbagai aspek. Salah satunya dari besarnya pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang diasumsikan akan bertumbuh signifikan kedepan. Potensi pendapatan daerah dari berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat, akan direspon dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

1. Retribusi daerah meningkat rata-rata 5% per tahun, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kebersihan, pelayanan perparkiran, izin trayek, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penjualan hasil perikanan dan pertanian, tempat pelalangan ikan, tempat rekrasi, dan retribusi pasar.
2. Pajak daerah meningkat rata-rata 10% pertahun.

Selain itu, diperkirakan kebijakan keuangan Negara ke depan, akan semakin mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Luwu yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat.

Pada Tahun 202025-2030 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi melalui optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensfikasi pajak daerah.

Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Untuk itu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Perluasan dan Pemuktahitan Data Base Pajak dengan melaksanakan uji petik.
2. Perlu dilaksanakan perencanaan nilai-nilai integritas pelatihan terkait peningkatan penerimaan pajak daerah
3. Dilaksanakannya uji potensi/uji petik dan sosialisasi PERDA/PERBUB yang berlaku di Kab. Luwu tentang pajak dan retribusi daerah.
4. Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak terkait digitalisasi pajak.
5. Dilaksanakannya rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara intensif terhadap OPD pengelola retribusi maupun organisasi yang terlibat dalam penerimaan PAD Kab. Luwu
6. Perluasan pemutakhiran data wajib pada kawasan cepat tumbuh.
7. Kolaborasi dengan berbagai stekholder dalam pemutakhiran data wajib pajak (KPP Pratama, ATR/BPN)
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Sertifikasi juru hitung dan juru sita)
9. Pencegahan kebocoran yang terkait pengumpulan pajak langsung untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
10 Pengembangan system informasi yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengumpulan, pemantauan dan analisis data pajak, sehingga mengoptimalkan pengumpulan pajak daerah dan pajak retribusi daerah serta melakukan analisis yang lebih akurat terhadap potensi pajak yang dapat ditingkatkan (data pajak berbasis spasial)

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah akan diarahkan kepada antara lain;

1. Sosialisasi pajak dan retribusi daerah;

2. Digitalisasi pemungutan/pendaftaran objek pajak dan retribusi daerah;
3. updating data objek pajak PBB P2 dan BPHTB;
4. Penambahan objek pajak dalam hal ini pajak parkir;
5. Peningkatan kulitas sumber daya aparat pengelolah pendapatan;
6. Kordinasi intensif dengan pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), lintas Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
7. Pemanfaatan barang milik daerah yang berpotensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat yang sama, seiring dengan pertumbuhan pendapatan daerah, dimana potensinya terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan berdampak pada pertumbuhan belanja daerah yang juga pesat. Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai selama periode lima tahun ke depan, berimplikasi pada besarnya kebutuhan belanja daerah, terutama pada program-program strategis yang mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebutuhan belanja daerah yang besar ini, mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan anggaran defisit, sebagai langkah ekspansi fiskal guna menjaga *trend* pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditandai dengan penurunan tingkat penganggaran dan tingkat kemiskinan yang signifikan, serta peningkatan IPM yang konsisten. Artinya kebijakan penganggaran daerah yang Defisit untuk lima tahun kedepan harus dapat memastikan pada pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu secara menyeluruh.

Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp1,593 triliun pada 2025 menjadi Rp1,907 triliun pada 2030. Belanja Operasi Peningkatan dari Rp1,129 triliun 2025 menjadi Rp1,258 triliun 2030. Komponen utama. Belanja Pegawai naik dari Rp686,63 miliar menjadi Rp719,55 miliar. Belanja Barang dan Jasa melonjak dari Rp426,65 miliar menjadi Rp528,05 miliar. Belanja Hibah fluktuatif, dengan

lonjakan pada 2029 sebesar Rp60 miliar, lalu turun kembali ke Rp10 miliar pada 2030. Belanja Modal Tumbuh stabil dari Rp175,59 miliar 2025 menjadi Rp358,35 miliar 2030. Fokus belanja diarahkan pada Gedung dan Bangunan: naik dari Rp65,8 miliar 2025 ke Rp110 miliar 2030. Jalan, Jaringan, dan Irigasi: meningkat tajam dari Rp61,3 miliar menjadi Rp191,04 miliar. Peralatan dan Mesin bertambah dari Rp43,17 miliar menjadi Rp47,24 miliar. Aset Lainnya juga bertumbuh meskipun nilainya relatif kecil. Belanja Tak Terduga Konsisten sebesar Rp5 miliar per tahun sejak 2026. Belanja Transfer Stabil di kisaran Rp259 miliar 2025 hingga Rp285 miliar 2030, sebagian besar untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah terkait erat dengan kewajiban untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan daerah bergantung pada anggaran selama lima tahun kedepan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah, seperti target peningkatan PAD, rencana investasi dan lain sebagainya. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Sumber pembiayaan utama adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada 2025 dan 2029, serta pencairan dana cadangan pada 2029 (Rp20 miliar). Penyertaan modal daerah terjadi pada 2025 Rp1 miliar, 2026: Rp5 miliar dan 2030 Rp5 miliar. Tabel proyeksi keuangan Kabupaten Luwu 2026-2030 ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.191.
Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kab. Luwu Tahun 2026-2030

Uraian (PP 12/2019)	Baseline 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	**1.596.524.804.871**	**1.562.022.082.341**					
Pendapatan Asli Daerah	**200.643.047.593**	**233.481.386.943**	**247.722.125.638**	**265.546.568.202**	**285.210.316.522**	**305.795.394.249**	**327.391.932.053**
Pajak Daerah	40.263.930.624	72.833.386.943	80.116.725.638	88.128.398.202	96.941.238.022	106.635.361.824	117.298.898.007
Retribusi Daerah	11.784.017.586	145.648.000.000	156.605.400.000	166.418.170.000	177.269.078.500	188.160.032.425	199.093.034.046
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.984.942.696	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	142.610.156.687	9.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
Pendapatan Transfer	**1.336.908.387.195**	**1.304.735.556.631**	**1.428.117.052.805**	**1.468.655.061.946**	**1.527.957.977.493**	**1.549.226.038.817**	**1.553.204.202.461**
Pendapatan Transfer Pusat	1.277.199.418.249	1.201.433.498.000	1.349.897.931.230	1.386.999.453.042	1.442.694.056.894	1.460.173.390.939	1.460.173.390.939
Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.708.968.946	103.302.058.631	78.219.121.575	81.655.608.904	85.263.920.599	89.052.647.879	93.030.811.523
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**58.973.370.083**	**23.805.138.767**	**26.396.395.705**	**27.716.215.490**	**29.102.026.265**	**30.557.127.578**	**32.084.983.957**
Hibah	41.429.572.996	-	-				

Uraian (PP 12/2019)	Baseline 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	17.543.797.087	23.805.138.767	26.396.395.705	27.716.215.490	29.102.026.265	30.557.127.578	32.084.983.957
Jumlah Pendapatan	**1.596.524.804.871**	**1.562.022.082.341**	**1.702.235.574.148**	**1.761.917.845.638**	**1.842.270.320.280**	**1.885.578.560.645**	**1.912.681.118.471**
BELANJA	**1.506.961.698.616**	**1.593.287.451.679**					
Belanja Operasi	**1.008.334.165.856**	**1.129.757.672.243**	**1.167.330.779.359**	**1.188.207.246.331**	**1.208.410.808.760**	**1.278.966.433.701**	**1.258.247.128.007**
Belanja Pegawai	632.789.328.075	686.630.180.019	665.139.408.316	680.116.499.441	690.318.246.932	700.673.020.636	719.549.846.681
Belanja Barang dan Jasa	303.617.636.719	426.646.402.773	487.834.065.579	497.590.746.890	507.542.561.828	517.693.413.065	528.047.281.326
Belanja Hibah	71.757.201.062	16.268.089.451	14.126.805.464	10.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000	10.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial	170.000.000	213.000.000	230.500.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000
Belanja Modal	**246.096.681.236**	**175.589.803.533**	**266.405.196.366**	**287.836.026.652**	**328.239.548.477**	**335.925.976.460**	**358.351.374.998**
Belanja Modal Tanah		100.000.000	2.460.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.266.320.152	43.172.680.811	43.220.383.026	44.516.994.516	45.407.334.407	46.315.481.095	47.241.790.717
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.244.193.133	65.843.876.175	107.910.006.471	104.672.706.277	107.458.796.916	103.160.445.039	110.065.631.688
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.488.314.933	61.334.611.247	106.849.656.569	130.561.872.552	167.147.274.782	177.490.220.278	191.040.024.684

Uraian (PP 12/2019)	Baseline 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	286.000.000	3.538.635.300	2.342.425.300	3.389.273.806	3.457.059.282	4.115.365.297	5.082.573.863
Belanja Modal Aset Lainnya	620.889.350	1.600.000.000	3.622.725.000	3.695.179.500	3.769.083.090	3.844.464.752	3.921.354.047
Belanja Tak Terduga	**1.261.491.918**	**28.819.286.094**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
Belanja Transfer	**251.269.359.606**	**259.120.689.809**	**262.499.598.424**	**275.874.572.655**	**280.619.963.042**	**285.360.205.532**	**285.495.766.399**
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	8.768.838.809	9.282.172.563	10.454.656.820	11.421.031.652	12.479.539.425	13.639.193.205
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	251.269.359.606	250.351.851.000	253.217.425.861	265.419.915.835	269.198.931.390	272.880.666.107	271.856.573.194
Jumlah Belanja	**1.506.961.698.616**	**1.593.287.451.679**	**1.701.235.574.148**	**1.756.917.845.638**	**1.822.270.320.280**	**1.905.252.615.694**	**1.907.094.269.404**
Surplus/Defisit	**89.563.106.255**	**- 31.265.369.338**	**1.000.000.000**	**5.000.000.000**	**20.000.000.000**	**- 19.674.055.049**	**5.586.849.068**
Penerimaan Pembiayaan	**32.114.608.764**	**31.265.369.338**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000.000**	
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	32.114.608.764,15	31.265.369.338	-	-	-	-	

Uraian (PP 12/2019)	Baseline 2024	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pencairan Dana Cadangan		-				20.000.000.000	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-					
Penerimaan pinjaman daerah		-					
Penerimaan kembali pemberian pinjaman		-					
Penerimaan piutang daerah		-					
Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**	**1.000.000.000**	**5.000.000.000**	**20.000.000.000**	**-**	**5.000.000.000**
Pembentukan dana cadangan		-			20.000.000.000		
Penyertaan modal (investasi) daerah		-	1.000.000.000	5.000.000.000	-		5.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang		-					
Pemberian pinjaman daerah		-					
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-					
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**32.114.608.764**	**31.265.369.338**	**- 1.000.000.000**	**- 5.000.000.000**	**- 20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**- 5.000.000.000**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Sumber: Hasil Proyeksi 2025.

2.5.8. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dihitung dari hasil pengurangan total penerimaan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, komponen belanja yang mempengaruhi besar kecilnya perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kedua komponen ini merupakan pengurang dari total penerimaan daerah karena keduanya merupakan belanja priodik dan pengeluaran wajib dan mengikat yang harus dibayarkan setiap priodik oleh pemerintah daerah dan tidak dapat ditunda. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pasal 5 ayat (2) bahwa keuangan daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan pada kemampuan keaungan daerah tinggi apabila diatas Rp.550 Milyar.

Tabel 2.192.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

No	Uraian	2025	Sesuai Permendagri 62 Tahun 2017				
			Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Asli Daerah	233.481.386.943	200.643.047.593	233.481.386.943	247.722.125.638	265.546.568.202	285.210.316.522
2	Dana Alokasi Umum	757.859.786.000	865.738.209.230	899.733.070.042	935.427.673.894	972.907.007.939	972.907.007.939
3	Dana Bagi Hasil	16.873.524.000	16.873.524.000	19.980.185.000	19.980.185.000	19.980.185.000	19.980.185.000
	Total Penerimaan	**1.008.214.696.943**	**1.083.254.780.823**	**1.153.194.641.985**	**1.203.129.984.532**	**1.258.433.761.140**	**1.278.097.509.461**
	Dikurangi						
4	Belanja Pegawai	686.630.180.019	686.630.180.019	665.139.408.316	680.116.499.441	690.318.246.932	700.673.020.636
5	**Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah**	**321.584.516.924**	**396.624.600.804**	**801.846.160.372**	**862.637.538.576**	**941.443.018.724**	**938.773.864.123**

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu diharapkan sebesar Rp.746 Miliar pada tahun 2026 dan Rp.938 Milyar pada tahun 2030. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari penganggaran defisit. Pelampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Selain itu, ada rasa optimisme yang tinggi dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat dari capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi sehingga mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.193.
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2026-2030

Uraian	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Rill Kemampuan	728.404.880.957	776.746.631.211	831.033.032.957	908.258.287.824	948.283.197.425
Prioritas I	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
Proporsi Priorotasi I	327.782.196.431	349.535.984.045	373.964.864.831	408.716.229.521	426.727.438.841
Prioritas II	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
Proporsi Prioritas II	240.373.610.716	256.326.388.300	274.240.900.876	299.725.234.982	312.933.455.150
Prioritas III	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Proporsi Prioritas III	160.249.073.811	170.884.258.866	182.827.267.251	199.816.823.321	208.622.303.434

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini dirumuskan rencana penggunaannya ke dalam kategori tiga prioritas. Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan, prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan fungsi penunjang urusan.

Untuk periode 2026-2030 yang akan datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Luwu akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2.6. Permasalahan Dan Isu Strategis

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan

kebijakan yang tepat diharapkan dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk dipahami guna mengukur sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah, selalu selalu diawali dengan identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem). Analisis dilakukan guna menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa mendatang adalah kesempatan yang memberi peluang positif atau yang memberi dampak buruk bagi masyarakat. Hal-hal semacam ini harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Subbab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan rujukan dalam merumuskan strategi dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu

Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Luwu diidentifikasi melalui kajian data dan informasi Pembangunan daerah khususnya data strategis Pembangunan. Penjabaran permasalahan Pembangunan Kabupaten Luwu berdasarkan Gambaran umum kondisi Pembangunan daerah yang belum mencapai target dan perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat Kesejahteraan Yang Masih Rendah dan Belum Merata**

   Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa pendekatan kondisi sosial ekonomi, salah satunya ialah kemiskinan yang acap kali menjadi polemik bagi suatu daerah

karena banyaknya variabel yang berpengaruh terhadapnya. Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2024 dapat mencapai 11,70%. Hal ini mencerminkan kinerja yang baik namun sayangnya capaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Dengan gini ratio yang berada pada angka 0,319 menandakan ketimpangan pendapatan yang cukup rendah, mamun kondisi ini justru dapat mengindikasikan bahwa sebagaian besar penduduk memiliki pendapatan yang rendah.

Rendahnya pendapatan masyarakat sangat erat berhubungan dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, dimana apabila pendapatan masyarakat yang rendah maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Secara statistik, pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Luwu dalam beberapa tahun terakhir cenderung membaik (59,7 Juta) namun masih jauh tertinggal dari beberapa daerah lainnya hal ini sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan diangka 4,14%. Kondisi hunian masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 10,86% juga menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu masih tergolong rendah.

2. Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah Yang Belum Merata

Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah yang eksistensinya diukur tidak hanya dari kuantitasnya, tetapi juga harus dijamin kualitasnya sesuai dengan standar, serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Merujuk pada capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan perumahan permukiman, secara umum ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dasar daerah masih tergolong rendah.

Tercatat panjang jalan kabupaten di Kabupaten Luwu adalah 2.049,05 km, dimana pada tahun 2024 jaringan jalan yang berada dalam kondisi baik hanya sekitar 485,7 km atau 24%, jauh dari angka provinsi Sulawesi Selatan yang di atas 80%. Hal ini tentu saja berdampak pada mobilitas manusia dan barang serta konektifitas antar wilayah yang terhambat. Kondisi ini diperparah

dengan layanan sistem drainase yang rendah, dimana drainase dan gorong-gorong yang berkondisi baik hanya sekitar 10,43%. Pun demikian halnya dengan kualitas layanan irigasi dan pengairan, dimana irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya sekitar 69,19%, padahal Kabupaten Luwu termasuk dalam kategori kawasan rawan bencana dan kawasan lumbung pangan.

Di bidang perumahan dan permukiman, penyediaan PSU juga belum optimal dimana luasan kumuh diwilayah perkotaan mencapai 6,22% dengan rumah tangga yang mengakses sanistasi aman hanya sebesar 4,52%. Sedangkan penyediaan air minum sudah tergolong baik yakni sebesar 80,41% namun capaian ini menunjukan layanan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Tingkat Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Rendah

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Pendidikan yang berkualitas berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Berdasarkan kinerja capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu, berbagai data menunjukan bahwa layanan pendidikan yang berkualitas belum dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Hal ini ditandai salah satunya oleh capaian Rerata lama sekolah (RLS) Kabupaten Luwu pada tahun 2024 hanya mencapai 8,81 Tahun dimana hal ini berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMP kelas 3. Hal ini diperparah dengan angka putus sekolah pada tingkat SD sebesar 2,56% dan tingkat SMP sebanyak 2,8%.

Berbagai kondisi ini perlu menjadi perhatian penting pemerintah dengan meningkatkan mutu pendikan melalui perbaikan sistem dan layanan yang inklusif, pengajar berkompeten dan sarana prasana pendidikan yang memadai. Pemerintah juga perlu menunjukan keberpihakan terhadap anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga berpenghasilan

rendah agak tidak ada lagi anak-anak sekolah yang harus putus sekolah dikarenakan keterbatasan biaya.

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan secara Inklusif. Secara umum derajat kesehatan masyarakat mencerminkan tingkat Kesehatan bagi masyarakat yang terutama pada kasus-kasus penyakit menular, gizi buruk, tingginya angka stunting sampai dengan masih adanya kasus kematian bayi dan balita. Kesenjangan aksesibilitas layanan kesehatan selain dipengaruhi oleh aspek morfologi wilayah, juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan dokter dan paramedis, serta tingkat pendapatan masyarakat.

Kebijakan cakupan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi pondasi dasar dalam membangun upaya kesehatan yang kemudian juga harus diikuti dengan peningkatan layanan pada fasilitas kesehatan tingkat dasar, dimana hanya terdapat sekitar 60 persen unit layanan kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap. Hal ini juga diperparah dengan rasio ketesediaan dokter yang hanya mencapai 0,00020. Dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan, berbagai hal lain juga harus diperhatikan seperti aspek kemudahan, dan kenyamanan layanan yang dapat dilaksanakan dengan pemanfataan teknologi seperti seperti layanan konsultasi dan pemeriksaaan kesehatan jarak jauh untuk mengatasi masalah aksesibilitas masyarakat yang terbatas.

4. Tata Kelola dan Tata Laksana Pemerintahan Daerah Belum Optimal

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dalam penyelenggaraannya mengaplikasikan prinsip-prinsip *clean* and *good governance*, dimana aspek tranparansi dan akuntabilitas memegang peranan penting didalamnya. Disamping itu pelayanan prima sebagai aspek penting dalam pemerintahan harus didukung dengan sistem dan aparatur yang handal dan terampil, berbagai variabel ini menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola dan tata laksana pemerintahan yang baik.

Berdasarkan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 79,92 menggambarkan perlu adanya perbaikan, terutama pada aspek kemandirian keuangan. Disamping itu, sebagaimana laporan hasil evaluasi SAKIP sebesar 62,81 juga mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan. Kedua capaian ini menjadi penting untuk diperhatikan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pengelolaan keuangan, perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja. Sedangkan dari aspek pelayanan publik, Nilai IKM hanya mencapai angka 2,4 (Cukup) merefleksikan perlu adanya upaya peningkatan yang masif dan terutama pada aspek kemudahan layanan dimana dengan capaian 2,6, elektonifikasi sistem pemerintahan (SPBE) juga memang belum berjalan optimal.

Dari aspek pengelolaan kepegawaian daerah, penerapan merit sistem dalam penempataan peningkatan kapasitas dan kompetensi yang masih rendah (rerata 16,23 JP per orang/tahun) menjadi salah satu aspek yang harus ditingkatkan mengingat aparatur menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan dan ujung tombak pelayan masyarakat. Disisi lain, berdasarkan pengukuran kemandirian desa, hanya terdapat 11 (sebelas) desa berstatus mandiri dari total 207 desa yang berada diwilayah Kabupaten Luwu yang mana hal ini menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan desa belum berjalan baik sehingga pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan desa perlu ditingkatkan sejalan dengan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pedesaan.

Pengelolaan potensi perekonomian daerah merupakan suatu upaya terpadu yang dilakukan oleh pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kemudian nantinya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan karakteristik wilayah yang khas sumber daya alam yang melimpah nyatanya belum mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusif bagi masyarakat.

Belum optimalnya pengelolaan perekonomian daerah diantaranya dapat terlihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB tetapi belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani yang signifikan, pun demikian halnya dengan para nelayan. Dengan produktifitas pertanian sebesar 6,37 ton/tahun dan perikanan 7,9 ton/tahun seharusnya dapat lebih dioptimalkan mengingat moderenisasi berbagai sarana dan prasarana serta teknik/metode pertanian dan perikanan yang berkembang pesat.

Upaya-upaya lain seperti pengembangan sektor UMKM dan pariwisata juga harus terus didorong sehingga kontribusinya dapat meningkat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya promosi investasi daerah sejalan dengan kebijakan kemudahan proses perizinan didalamnya. Dengan tren investasi dan penanaman modal yang meningkat, menggambarkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki potensi yang besar sehingga upaya penguatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat sehingga nantinya dapat mendorong kegiatan-kegiatan yang menstimulasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

5. Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana Yang Rendah

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi perhatian dunia. Dengan fenomena perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pemerintah di seluruh dunia dituntut dapat melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan dan menjamin kelestarian lingkungan. Gagasan mengenai konsep Pembangunan yang beriorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam Pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini dari aktivitas

manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dokumen tata ruang mengatur peruntukan kawasan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berpengaruh tidak hanya dari sisi kepentingan ekonomi tetapi juga menjamin jasa ekosistem lingkungan tetap terjaga. Dengan perkembangunan pembangunan, alih fungsi lahan menjadi kegiatan yang tidak dapat terbantahkan namun perubahan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dapat meminimalisir degradasi lingkungan. Dengan persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang hanya sebesar 5,32% mengindikasikan banyaknya pembangunan yang belum berkesesuaian dengan peruntukannya atau bahkan tidak melalui proses dan mekanisme perizinan yang ditetapkan. Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti dengan memperkuat aspek pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Degradasi lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang berkegiatan didalamnya. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang tidak terkontrol pada wilayah-wilayah pegunungan dan bantaran sungai dapat mempengaruhi turunnya jasa ekosistem disekitarnya yang kemudian dapat memicu terjadinya bencana, terutama banjir dan longsor dimana tercatat bahwa 7,71% sempadan sungai digunakan oleh bangunan liar. Berbagai potret permasalahan ini tentunya perlu mendapat perhatian penting, semisal dengan pembatasan dan pengaturan jenis vegetasi dan tanaman yang diperbolehkan untuk dibudidayakan. Disisi lain dalam lima tahun terakhir tercatat rata-rata timbulan sampah yang tertangani hanya 80% yang juga mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan dan layanan persampahan diwilayah Kabupaten Luwu yang keserluruhannya akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

6. Pemanfaatan Dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah Masih Belum Optimal

Pengelolaan potensi perekonomian daerah merupakan suatu upaya terpadu yang dilakukan oleh pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang kemudian nantinya bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan karakteristik wilayah yang khas sumber daya alam yang melimpah nyatanya belum mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat inklusif bagi masyarakat.

Belum optimalnya pengelolaan perekonomian daerah diantaranya dapat terlihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi besar dalam PDRB tetapi belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani yang signifikan, pun demikian halnya dengan para nelayan. Dengan produktifitas pertanian sebesar 6,37 ton/tahun dan perikanan 7,9 ton/tahun seharusnya dapat lebih dioptimalkan mengingat moderenisasi berbagai sarana dan prasarana serta teknik/metode pertanian dan perikanan yang berkembang pesat.

Upaya-upaya lain seperti pengembangan sektor UMKM dan pariwisata juga harus terus didorong sehingga kontribusinya dapat meningkat dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya promosi investasi daerah sejalan dengan kebijakan kemudahan proses perizinan didalamnya. Dengan tren investasi dan penanaman modal yang meningkat, menggambarkan bahwa Kabupaten Luwu memiliki potensi yang besar sehingga upaya penguatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat sehingga nantinya dapat mendorong kegiatan-kegiatan yang menstimulasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

7. Peran Desa Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Belum Berjalan Secara Optimal

Desa memiliki peran strategis sebagai fondasi perekonomian nasional karena menyimpan potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya yang sangat besar. Di tingkat kabupaten, desa seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, kerajinan tangan, dan industri rumah tangga. Namun, pada kenyataannya, banyak desa di wilayah kabupaten belum mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Berbagai potensi lokal yang dimiliki sering kali belum diidentifikasi dan dikembangkan secara menyeluruh karena keterbatasan data, kurangnya perencanaan pembangunan yang berbasis potensi wilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Banyak desa hanya menjalankan program-program yang bersifat seremonial atau mengikuti instruksi dari pemerintah pusat tanpa memahami kebutuhan dan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya peran desa dalam mendorong perekonomian daerah adalah minimnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, baik dalam aspek manajerial, kewirausahaan, maupun pengelolaan potensi lokal. Aparatur desa masih banyak yang belum memiliki kemampuan teknis dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, irigasi, pasar desa, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian masih belum merata dan memadai. Hal ini menyulitkan pelaku ekonomi di desa untuk mengembangkan usahanya atau mengakses pasar yang lebih luas. Tak hanya itu, lemahnya sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan turut memperburuk kondisi ini. Perencanaan pembangunan yang seharusnya bersifat bottom-up sering kali menjadi top-down, sehingga banyak kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat desa.

Lebih lanjut, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi desa juga belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Banyak BUMDes yang belum mampu menjalankan fungsi usaha secara profesional karena kurangnya pembinaan, modal kerja, dan akses terhadap jaringan usaha yang lebih luas. Di sisi lain, keterlibatan pemuda dan perempuan dalam kegiatan ekonomi desa juga masih rendah, padahal mereka merupakan aset penting dalam menggerakkan inovasi ekonomi desa berbasis potensi lokal. Selain itu, ketergantungan desa pada dana transfer dari pusat seperti Dana Desa juga sering kali menyebabkan inisiatif lokal menjadi pasif dan menunggu arahan dari pemerintah kabupaten atau pusat, bukan tumbuh dari inisiatif internal desa sendiri. Ini menjadi indikasi bahwa belum terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan, sebagaimana data tahun 2024 menunjukan hanya terdapat (satu) 1 Bumdes dengan kategori maju dan dan 21 Bumdes berkategori berkembang diwilayah Kabupaten Luwu.

2.6.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Terdapat 9 (sembilan) pendekatan yang digunakan dalam menetapkan isu strategis pembangunan daerah, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis regional, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Luwu, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. **Pemulihan Pasca Bencana dan Resiko Bencana Yang Masih Tinggi**

   Pasca kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang masif terjadi pada sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu pada tanggal 3 Mei 2024, pemerintah menetapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Dokumen R3P berisi informasi kerusakan dan kerugian, kewenangan, kebutuhan serta indikasi program dan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan pada sektor-sektor yang terdampak oleh kejadian bencana selama 3 (tiga) tahun mendatang. Penting bagi pemangku kepentingan agar R3P menjadi pertimbangan dalam meletakkan prioritisasi arah kebijakan pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang holistik dan integratif dalam urusan kebencanaan dan penangangan pasca bencana daerah.

   Berdasarkan data hasil pengukuran Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kabupaten Luwu memiliki nilai indeks yang cenderung membaik, namun hal ini tidak menunjukan tingkat resiko yang menurun karena nyatanya Kabupaten Luwu masih memiliki kelas resiko tinggi dengan nilai indeks yang tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (186,58) dengan nilai kerugian ekonomi langsung sebesar Rp. 259,6 miliar pada tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik dan morfologi wilayah yang banyak didominasi oleh pegungungan dengan sungai-sungai besar yang melintasi wilayah dataran rendah yang diperparah dengan minimnya keberpihakan terhadap kebijakan upaya pengurangan resiko bencana yang ada wilayah Kabupaten Luwu.

Upaya mitigasi struktural dan nonstruktual menjadi pendekatan yang wajib dilakukan. Mitigasi Nonstruktural dilakukan salah satunya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dengan penerapan skema insentif dan disentif terhadap kesesuaian dan ketidaksesuaian ruang sehingga proses perizinan dan pengawasannya menjadi sangat penting. Disamping itu berbagai upaya adaptasi bencana semisal dengan penguatan aspek kesiapsiagaan masayarakat terhadap kejadian bencana juga menjadi penting untuk diperluas. Sedangkan Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai tindakan rekayasa teknis pada wilayah-wilayah dataran tinggi yang menjadi hunian atau tempat kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti menormalisasi sedimen dan aliran sungai, perkuatan tebing pada wilayah-wilayah berpotensi longsor dan upaya teknis lainnya. Pemerintah juga harus terus mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan terutama masyarakat dengan memastikan jasa ekosistem dan daya dukung lingkungan tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi bencana dengan menjamin ketersediaan cadangan pangan guna memastikan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok dapat dijangkau oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat pada situasi tanggap darurat bencana. Pengembangan dan penerapan teknologi serta hasil-hasil riset yang memberikan rekomendasi dan pengetahuan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan juga perlu dioptimalkan, semisal dengan mengembangkan varietas tanaman pangan dan ternak yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca ekstrem dan potensi dampak perubahan iklim yang terjadi.

2. Potensi dan Peluang Investasi Daerah

Seiring dengan perluasan pasar global dunia, kesempatan dan peluang bisnis juga semakin terbuka lebar. Dengan bentangan wilayah yang luas dan letak geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam yang beragam, Kabupaten

Luwu menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun sayangnya belum diikuti dengan pendapatan perkapita yang besar (59,73 juta) dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi (11,70%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat belum mampu memperoleh manfaat yang signfikan terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan daerah.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah terus berupaya mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional, hal ini salah satunya dapat dilihat dengan munculnya beberapa perusahaan skala besar yang berinvestasi dan beroperasi diwilayah Kabupaten Luwu terutama pada sektor barang konsumsi bergerak cepat atau fast moving consumer goods (FCMG), sektor industri, sektor pertambangan dan sektor konstruksi serta real estate yang cenderung meningkat pertumubuhannya bila mengacu pada sektor lapangan usaha PDRB 5 (lima) tahun terakhir.

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan multiplier effect yang seyogyanya perlu diantisipasi kedepannya. Pemerintah daerah perlu berinovasi dengan menstimulasi sub-sektor yang berperan dalam supply chain atau rantai distribusi yang memiliki daya ungkit tinggi. Disamping itu, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah juga dapat terlibat langsung melalui pembentukan badan-badan usaha yang terafiliasi dengan kegiatan tersebut sehingga dapat mengilhami masyarakat dan menginisiasi pembentukan kerjasama pada bidang-bidang usaha lainnya yang kemudian diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.

Keterlitbatan aktor-aktor dan mitra pembangunan seperti sektor swasta dan organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat juga dapat menjadi hal lain yang perlu ditingkatkan. Program-program pemerintah diseluruh sektor yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama dengan kementerian/lembaga, Non-Government Organization (NgO) atau kegiatan yang bersumber dari funding sektor swasta harus

dilaksanakan secara optimal dan dapat ditingkatkan sehingga memberikan dampak signifikan pada lokasi fokus kegiatan yang dilaksanakan sekaligus dapat mendorong pusat-pusat pertumbuhan kawasan baru serta mendorong praktik-praktik baik pada wilayah sekitarnya.

3. Hilirasi dan Pemerataan Pendapatan

Dengan penetapan Kabupaten Luwu sebagai Kawasan Komoditas Unggulan (Kakao dan Kopi), Kawasan Swasembada Pangan dan Kawasan Afirmasi Teluk Bone dan Sekitarnya dalam kebijakan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan mempertegas potensi kekayaan sumber daya alam daerah yang sangat besar didalamnya. Dengan produktifitas hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah (6,1 ton/tahun) sepatutnya perlu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pelaku usaha yang terlibat didalamnya.

Selain itu, dengan rata-rata produktivitas perikanan sebesar 7,9 ton/tahun, Kabupaten Luwu juga berperan penting dalam sektor perikanan sebagai salahsatu kawasan andalan Teluk Bone. Disamping menjaga ketersediaan pangan, berbagai komoditas pada kedua sektor ini juga perlu terus ditopang dan ditingkatkan melalui mekanisme hilirisasi sehingga tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tetapi juga dapat mendorong pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai solusi jangka panjang pembangunan berkelanjutan.

Hiilirasi produk menjadi salah satu faktor kunci keberhasilaan dalam pengembangan komoditas unggulan daerah. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan investasi dan penanaman modal disektor industri pengolahan melalui regulasi yang memberikan kemudahan kepada para perlaku dan calon pelaku usaha didaerah mengingat pertumbuhan industri yang rata-ratanya hanya sekitar 5% pertahun. Kebijakan hilirisasi diharapkan juga nantinya dapat berimplikasi terhadap langsung terhadap pencipataan lapangan kerja sehingga berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

4. Konektifitas dan Kesenjangan Antar Wilayah

Ditinjau dari sisi kondisi geografis, Kabupaten Luwu secara umum terbagi kedalam wilayah utara dan selatan, wilayah utara Kabupaten Luwu mencakup seluruh kecamatan Walenrang-Lamasi (Walmas) dan wilayah selatan yang meliputi Kecamatan Bua sampai dengan Kecamatan Larompong Selatan. Wilayah Walmas yang terdiri dari enam (6) kecamatan berada sekitar 60 - 75 Km dengan jarak tempuh 90 – 120 menit via kendaraan bermotor dari wilayah perkotaan Belopa yang merupakan ibukota Kabupaten Luwu. Selain itu dengan wilayah yang juga didominasi oleh wilayah pegunungan menjadikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta jangkauan layanan infrastruktur yang merata bagi masyarakat.

Guna menanggulangi hal ini, pemerintah perlu melakukan akselerasi pembangunan pada wilayah-wilayah yang ditetapkan pada pusat pengembangan kawasan dengan menangkap berbagai kebijakan pembangunan Infrastruktur, dan sarana-prasarana pemerintah pusat dan provinsi serta sumber-sumber lainnya wilayah di Kabupaten Luwu. Selain itu seluruh layanan pemerintahan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah melalui pembentukan pusat-pusat layanan terpadu dan terintegrasi yang tidak hanya terbatas pada layanan administrasi tetapi juga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

5. Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu wilayah Walenrang dan Lamasi (Walmas) merupakan gagasan yang muncul atas respons dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut, terutama setelah pemindahan ibu kota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa. Berbagai faktor penting yang memperkuat isu ini diantaranya kondisi geografis yang unik, di mana wilayah Walmas terpisah dari ibu kota Kabupaten Luwu, yakni Belopa, dan diapit oleh Kota Palopo sehingga menyebabkan sulitnya

pemerintah dalam mengoptimalkan pemerataan penyediaan infrastruktur, layanan dasar dan terutama pada aspek layanan administrasi publik karena masyarakat akan terbebani oleh besarnya biaya dan waktu yang digunakan untuk memperoleh layanan mengingat jarak yang cukup jauh.

Dalam dekade terakhir berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan legislator baik ditingkat daerah maupun pusat dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, namun sayangnya usulan ini terkendala oleh moratorium pemerintah di tingkat pusat, untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yang masif oleh seluruh pemangku kepentingan mengingat hal ini juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik.

6. Penguatan Kelembagaan dan Kemandirian Fiskal Daerah

Penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal daerah adalah dua pilar utama yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam konteks otonomi daerah. Keduanya adalah prasyarat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Dengan capaian Indeks SPBE yang cukup meningkat dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah cukup baik, namun hal ini belum memberikan gambaran utuh terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dari aspek akuntabilitas belanja, pendapatan dan pengelolaan aset daerah serta pemenuhan layanan-layanan dasar masyarakat.

Disisi lain, mengacu pada postur anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu hanya berkontribusi sekitar 28,7% terhadap seluruh pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mana kondisi ini juga diperparah dengan besarnya pos belanja pegawai terhadap APBD. Situasi ini tentunya akan berdampak pada fleksibilitas pembangunan daerah mengingat dana transer pusat ke daerah

umumnya diikuti dengan kebijakan penggunaannya yang diarahkan untuk menunjang prioritas pembangunan nasional sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber pendapatan dan retribusi daerah, memperkuat pengawasan dalam rangka perencanaan dan penganggaran belanja daerah, serta mendorong berbagai skema kerjasama pembangunan yang dimungkinkan dalam rangka mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

7. Perkembangan Teknologi dan Transformasi Digital

Di era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting. Perkembangan teknologi diikuti oleh kemajuan pertukaran informasi yang begitu masif karena ditunjang oleh konektivitas digital yang berperan penting bagi kemajuan pada seluruh bidang dan sektor-sektor vital didunia. Disisi lain kemajuan teknologi dan transformasi menjadi dua mata pisau yang perlu diantisipasi guna mengoptimalkan peluang yang ada dan meminimalisir dampak buruk yang timbul. Konektivitas memainkan peran yang sangat strategis dalam menghubungkan individu, komunitas, dan pemerintah. Dengan persentase pengguna layanan internet yang hanya 67% pemerintah perlu mendorong penyediaan dan pemerataan serta kesiapan jaringan telekomunikasi dan internet yang terjangkau dan dapat diandalkan terutama pada daerah-daerah rural Kabupaten Luwu, dimana layanan Internet yang baik hanya dapat diakses oleh sekitar 65% desa saja.

Sekaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Luwu perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengoptimalkan seluruh bentuk kegiatan pelayanan publik yang teritegrasi dengan berbagai jenis platform dan layanan digital sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis

elektronik (SPBE) juga sangat penting, dengan capaian indeks SPBE 2,6 menandakan bahwa upaya yang masif perlu dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat aspek keterbukaan informasi publik yang selama ini hanya berkategori "cukup"

Dengan pemanfaatan yang tepat, kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital pada sektor sosial ekonomi masyarakat dapat mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mendorong produktifitas masyarakat. Semisal pemanfaatan layanan digital dapat digunakan oleh pelaku ekonomi dalam perolehan informasi pengetahuan, pengembangan produk, harga pasar, dan kondisi cuaca sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan mengefisiensikan biaya produksi, dan atau memasarkan hasil usaha secara luas baik secara langsung maupun daring.

Dengan perkembangan yang begitu pesat, kemajuan dibidang teknologi informasi dan konektivitas digital juga memberikan dampak pada pengaruh masuknya budaya luar dan atau informasi serta konten-konten negatif yang berpotensi tersebar diberbagai platform. Untuk itu intervensi pemerintah dan peran orangtua menjadi hal sangat esensial. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan pembatasan terhadap berbagai informasi dan konten sensitif yang dapat memicu kekerasan, pelecehan dan kerusakan norma serta tatanan sosial, sebagaimana yang tergambar pada capaian Indeks Perlindungan Anak yang cenderung turun (56,57). Orangtua juga harus memberi andil penting dalam pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan gawai, media dan platform digital yang digunakan oleh anak-anaknya.

8. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi di mana suatu wilayah memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang relatif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-

produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), dimana berdasarkan proyeksi kependudukan kondisi ini terjadi di Kabupaten Luwu dalam rentang tahun 2025 sampai dengan tahun 2034.

Pembangunan sumber daya manusia yang diawali dari pendidikan anak usia dini hingga pembangunan kepemudaan menjadi critical path (jalur kritis) dalam menyikapi manfaat dari fenomena ini. Untuk itu peningkatan kualitas asupan gizi anak hingga kualitas layanan pendidikan serta peningkatan keterampilan dan media kreatifitas pemuda menjadi hal yang perlu difasilitasi oleh pemerintah. Sebaliknya, bila fenomena ini tidak dapat diantisipasi dengan baik maka akan memberi dampak buruk terhadap potensi peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Seiring perkembangan wilayah, sektor agraris yang menjadi ciri khas sektor perekonomian pedesaan secara alami lambat laun terkikis oleh berbagai kemajuan teknologi dan informasi. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan penyiapan kelompok usia produktif yang tidak hanya memiliki keterampilan dan kemapuan mengolah lahan-lahan pertanian, perkebunan dan perikanan secara modern, tetapi juga mampu memperkuat kelembagaan dan sistem pasar yang terintegrasi. Hal ini penting, selain untuk menjaga keberlangsungan dan kemandirian pangan daerah, juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bagi petani dan nelayan dimasa mendatang.

9. Wajah Perkotaan dan Daya Saing Daerah

Dalam konteks perkotaan “wajah kota” merujuk pada tampilan fisik, karakter, dan ciri khas suatu kota yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti arsitektur, infrastruktur, lingkungan, hingga aktivitas sosial dan budaya yang terjadi di dalamnya. Sejak ditetapkannya wilayah Belopa sebagai ibukota Kabupaten Luwu 18 tahun silam, kawasan perkotaan belopa mengalami perkembangan yang begitu signifikan dari berbagai aspek sejalan dengan ditetapkan Kecamatan Belopa dan Belopa

Utara sebagai kawasan perkotaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu. Hal ini menjadi sebuah isu tersendiri dimana karakteristik perkotaan akan selalu berkembang dengan dominasi aktifitas pemerintahan, hunian, perdagangan dan jasa didalamnya.

Polarisasi yang terjadi diwilayah perkotaan menuntut penyediaan Infrastruktur yang memadai dan mumpuni sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan wilayah. Dengan berbagai dinamika kegiatan pembangunan, pemerintah daerah perlu tetap memperhatikan aspek-aspek penting pembentuk ciri khas yang menjadi identitas dan karakteristik wilayah Kabupaten Luwu, terutama pada tampilan visual bangunan-bangunannya, namun tetap mendorong percepatan pembangunan pemenuhan sarana dan prasarana wilayah perkotaan melalui mekanisme tertentu, semisal dengan pengaturan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).

Karakteristik wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan handal. Pemenuhan fasilitas umum seperti fasilitas olahraga dan rekreasi menjadi hal yang penting guna mempertegas karakteristik wilayah perkotaan. Selain itu ketersediaan penyediaan sarana dan prasarana yang berkarakter dapat menjadi Landmark yang mampu mendorong kegiatan-kegitan perekonomian seperti aktifitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang diarea sekitarnya. Pemenuhan Infrastruktur perkotaan diharapkan nantinya dapat menjadi daya tarik bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berskala regional maupun nasional diwilayah Kabupaten Luwu sekaligus menjadi pengungkit terhadap peningkatan daya saing daerah.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

3.1. Visi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah Pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2025-2029 adalah:

"Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis"

Rumusan visi tersebut harus didasarkan pada kondisi yang ada, potensi yang dimiliki, kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di dalam Masyarakat, untuk berbagai permasalahan yang sedang dan akan berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Adapun rumusan visi tersebut mengandung 3 (tiga) pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu

Unggul : Mewujudkan Kabupaten Luwu yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan pengembangan lokasi yang spesifik berdasarkan karakter lingkungan dan tersebar serta didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berkarakter : Membangun pribadi Masyarakat yang memiliki sikap berahlak mulia, berkesadaran, sikap mental dan kualitas kehidupan, religius yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang memiliki nilai etika, disiplin,

bertanggungjawab, cinta tanah air, berpikir kritis hormat pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan.

Agribisnis : Berkembangnya perekonomian pedesaan pada sektor pertanian dan perikanan sebagai basis lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Luwu.

Berdasarkan pernyataan visi di atas, dapat diselaraskan dengan Visi RPJMN dan RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Nasional tahun 2025-2029

NO.	VISI RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029	VISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	VISI RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029
1.	Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Sulawesi Selatan maju dan berkarakter	Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis

Hal ini dapat di opersionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk dikembangkan dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam Pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas Langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu

Tahun 2025-2029, akan disajikan penyelarasan antara pokok visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Keselarasan antara Pokok Visi dan Misi Kabupaten Luwu tahun 2025-2029

No.	POKOK VISI	MISI
1.	Unggul	Misi 1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial
		Misi 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan
		Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana
2.	Berkarakter	Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif
		MISI 3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal
3.	Agribisnis	Misi 4. Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan
		Misi 6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa

Berikut adalah penjelasan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama lima tahun kedepan:

1. **Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi denga daya dukung sosial dan sumber daya potensial**

   Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat diwujudkan melalui sinergi yang harmonis antara daya dukung sosial dan sumber daya potensial. Daya dukung sosial sebagai pilar keukuata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup modal sosial yang terjalin erat, seperti kepercayaan, gotong royong, dan partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Pembangunan. Sedangkan sumber daya potensial sebagai motor penggerak yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Ini mencakup kekayaan alam yang melimpah yakni pertanian, perikanan, industri dan pertambangan.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, mengoptimalkan potensi perekonomian, pemberdayaan UMKM, industry kreatif melalui akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan.

Perwujudan percepatan pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan nilai Produk domestik regional bruto, pendapatan per kapita, penurunann Tingkat pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan.

2. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif

Tata kelola pemerintahan bersih pada prinsipnya adalah sebuah model penyelenggaran pemerintahan yang paling diminati bahkan dijadikan nilai kerja untuk memperoleh kepercayaan publik. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Luwu melalui misi ini tidak hanya menjadikan hal tersebut sebagai narasi melainkan tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih salah satu hal yang paling esensial adalah penyelenggaraan pemerintahan secara profesional.

Secara umum, upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi ini antara lain adalah peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penerapan merit sistem dalam pengisian jabatan, pembinaan dan pengawasan melekat, pengembangan inovasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan regulasi, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan pelaksanaan misi ini, akan terwujud penyelengaraan pemerintahan yang amanah dan transparan, yang memuaskan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, sehingga terwujud pemerintahan yang berwibawa.

3. **Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal**

   Sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal merupakan modal dasar pembangunan menuju tercapainya visi berkarakter. Oleh karena itu pembangunan harus diawali dengan pemenuhan pelayanan dasar dan pembentukan modal manusia sebagai aspek utama pembangunan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi transformasi pembangunan.

   Pembangunan manusia seutuhnya membuka peluang dan memperluas kesempatan setiap individu mendapatkan layanan pendidikan, Kesehatan, serta menerapkan prinsip kesetaraan gender untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Melalui misi ini Pemerintah Luwu berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, Kesehatan, budaya dan kearifan lokal, taat beragama, prestasi olahraga, pemuda, dan penyandang disabilitas.

4. **Meningkatkan Pembangunan agribisnis yang berkelanjutan**

   Pembangunan agribisnis yang berkelanjutan agar diupayakan pengembangan sistem agribisnis tidak hanya focus pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi untuk suatu daerah, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan generasi mendatang. Hal ini dilakukan dengan pendekatan holistic yang mengentegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam seluruh rantai nilai agribisnis mulai dari produksi hulu, hingga pengolahan, pemasaran dan konsumsi hilir.

   Kabupaten Luwu merupakan swasembada pangan dan potensi ekonomi biru di Sulawesi Selatan. Pengembangan pangan dan ekonomi biru berbasis sumber daya dan kearifan local yang sehat dan bergizi, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan Tangguh. Dalam meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan

pengembangan teknologi digital dalam mengembangkan produk unggulan daerah.

5. **Mewujudkan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan**

   Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan merupakan pondasi utama kemajuan suatu daerah yang akan membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara merata di seluruh wilayah. Pembangunan infrastruktur bertujuan mendukung pelayanan dasar untuk meningatkan akses, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas.

   Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat pada seluruh lapisan Masyarakat dengan memprioritaskan Pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan konektivitas dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, kelompok marginal dan Masyarakat berpenghasilan rendah.

   Dalam lima tahun kedepan Pembangunan infrastruktur akan mencakup Pembangunan konektivitas jalan dan aksebilitas daerah tertinggal, Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, penyediaan irigasi, drainase dan air minum, Pembangunan rumah dan Kawasan permukiman, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan.

   Pembangunan infrastruktur ini berpedoman pada tata ruang dan tujuan Pembangunan berkelanjutan. Perwujudan Pembangunan ini dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh Masyarakat.

6. **Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa**

Pembangunan desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata Kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Dalam hal ini pemerintah desa agar mengidentifikasi daan memetakan secara komprehensif seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan budaya. Pengembangan ekonomi local bebrbasis potensi dan mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Perwujudan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat mendorong desa yang mandiri yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan secara bertanggungjawab dengan memastikan kesejahteraan antargenerasi, serta menanggulangi dampak perubahan iklim dan ancaman bencana. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan Masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pelestarian lingkungan hidup harus disesuaikan dengan penguatan tata Kelola dan Upaya menjaga dan dan melindungi lingkungan agar tetap sehat dan seimbang untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Gerakan Sosialisasi dalam menggunakan air seperlunya, mencegah pencemaran air dan mengelola air dengan bijak, memilah sampah, mengurangi penggunaan platik, daur ulang dan mengelolah sampah secara efektif, serta tersedianya infrastruktur dalam mengelolah limbah.

Upaya mitigasi bencana yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar pihak terkait, partisipasi aktif Masyarakat, serta alokasi sumber daya yang memadai. Dalam pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat harus ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespon saat kejadian bencana dan pemulihan pascabencana, serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana.

Pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pusat, maka dari itu perlu adanya keselarasan yang kuat antara misi Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan dan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Keselarasan antara Misi Kabupaten Luwu, Misi Provinsi Sulawesi Selatan dan Asta Cita RPJMN tahun 2025-2029

No.	MISI RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	ASTA CITA RPJMN TAHUN 2025-2029
MISI 1	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
			Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Misi 2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	Misi 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani melalui transformasi birokrasi berbasis digital	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
			Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

No.	MISI RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	ASTA CITA RPJMN TAHUN 2025-2029
MISI 3.	Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yg Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
			Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Misi 4.	Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Misi 5.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
Misi 6.	Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa		Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

No.	MISI RPJMD KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025-2029	ASTA CITA RPJMN TAHUN 2025-2029
Misi 7.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana		Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai di masa akhir periode Pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator- indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun.

Penentuan tujuan dan sasaran pada dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 didasarkan pada isu strategis aktual sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Isu strategis aktual adalah suatu kondisi dimana serangkaian kejadian yang akan menjadi perhatian bagi berbagai pihak, baik internasional, nasional maupun daerah.

Isu strategis aktual tahun 2025-2029 yang menjadi rumusan untuk tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Luwu yakni kondisi sosial, ekonomi, Infrastruktur dan lingkungan. Kondisi sosial menggambarkan bonus demografi, peningkatan kesejahteraan Masyarakat, mendekatkan pelayanan Kesehatan bagi seluruh Masyarakat. Kondisi ekonomi menggambarkan pertumbuhan ekonomi hijau, efek resesi ekonomi, inflasi, transformasi digital. Kondisi infrastruktur dan Lingkungan menggambarkan Perubahan iklim dan konektivitas antar wilayah.

TABEL 3.4.
TUJUAN DAN SASARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS										
Misi 1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)	59,73	74,23	75,09	76,3	77,61	78,21	78,90
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	4,36	6,12	6,39	6,53	6,63	6,72	7,0
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,14	3,2	3,05	2,87	2,65	2,41	2
		Berkembangnya Hilisasi sumber daya unggulan	Kontiribusi Industri pengolahan terhadap PDRB (%)]	4,09	5,77	6,29	7,01	7,81	8,22	8,91
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran Perkapita (Ribu. Rp)	11.121	12.482	13.789	14.621	15.299	16.222	17.011
		Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	11,71	10,55	10,46	10,35	10,23	9,21	8,22
Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)	57,1	57,5	57,9	58,2	58,6	58,9	60,2
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	62,18	62,3	62,48	62,66	62,8	63,11	63,25

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS										
		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	79,92	80,37	81,51	81,92	82,3	82,86	83,11
		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	2,6	2,9	3,4	3,9	4,2	4,6	4,8
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	44,22	44,4	44,87	45,18	45,85	46,01	46,37
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	2,49	2,42	2,04	1,91	1,76	1,52	1,44
MISI 3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	73,86	74,02	74,6	74,8	75,05	75,27	75,98
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	73,78	80,2	81,71	82,35	83,77	85	85,33
		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	82,23	83,09	83,79	84,11	84,98	85,25	86
		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	56,07	60,36	61,38	62,09	62,91	63,44	66
			Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	60,23	60,55	60,67	60,83	60,95	61	61,29
		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Angka)	73,83	74,22	74,71	75,06	75,51	76,22	76,81
Misi 4. Meningkatkan	Meningkatnya usaha		Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	49,82	50,22	50,66	51,41	51,88	52,6	53

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS										
pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan	agribisnis yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Biru (Angka)	90,31	101,14	111,98	122,82	133,65	144,49	155,33
		Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	6,1	6,5	7	7,8	8	8,06	8,44
			Nilai Tukar Petani (Angka)	100,66	101,17	103,44	104,03	105,07	106,22	108,09
		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas Perikanan (Rp/Jiwa)	8,04	10,22	10,36	11,05	11,36	11,98	12,03
			Nilai Tukar Nelayan (Angka)	109,22	110,2	111,03	111,8	112,22	112,8	113
		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	82,23	82,77	83,05	83,61	83,71	84,06	84,55
Misi 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)	2,63	2,72	2,9	3,02	3,46	3,86	4,02
		Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas wilayah (Angka)	13,2	14,02	14,98	15,14	15,84	16,01	16,49
		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	10,9	10,66	10,75	10,85	10,98	11,15	11,25

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS										
			akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	21,71	28	31	34	37	40	43
		Meningkatknya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan	Akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	0,14	4,12	8,36	8,9	9	9,5	9,67
Misi 6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks Desa (Angka)	70,32	72,21	74,27	75,38	77,21	77,9	78,01
		Meningkaatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri (%)	14,49	19,32	21,74	24,15	26,57	28,99	30,92
Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca (%)	10	14,82	15	16,36	17,06	18,11	19,07
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah (Angka)	186,59	189,22	188	185,58	180,27	179	170,47
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	48,48	76,54	77,02	77,92	78,63	79,39	80,02

3.4. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Startegi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Luwu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi digitalisasi, tatakelola pemerintahan, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029. Sedangkan Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabarana misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2029.

3.4.1.Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi juga dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah yang setiap tahun diturunkan menjadi prioritas pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS							
Misi 1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial							
T1-S1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi,	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi,	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata berbasis agro-ekologi di kecamatan Bastem Utara, Fasilitasi penyusunan Rippow destinasi wisata Kecamatan Larompong serta menguatkan pemasaran objek	perluasana akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana Objek Wisata Kecamatan BAssesangtempe Utara, serta fasilitasi penyusunan dokumen Rippow	usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasana akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata	perluasana akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata Kecamatan Bassesangtempe Utara dan Larompong; serta fasilitasi penyusunan dokumen Rippow	akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasana akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata,

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			wisata prioritas di Kabupaten Luwu	objek eko-wisata kecamatan Ponrang	Kecamatan Bassesangtempe Utara dan Larompong; serta fasilitasi penyusunan dokumen Rippow objek wisata religi Kecamatan Bua	objek wisata alam Kecamatan Bassesangtempe	pembangunan sarana dan prasarana objek wisata Kecamatan Bassesangtempe Utara dan Larompong; serta fasilitasi penyusunan dokumen Rippow objek wisata alam Kecamatan Walenrang Utara
T1-S2		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu,

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri	usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri	dengan kebutuhan dunia usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri	dunia usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri	pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
							mengembangkan usaha mandiri
T1-S3		Berkembangnya hilirisasi sumber daya unggulan	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air,	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; percepatan pembangunan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			hasil produksi pertanian; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk,	untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana	Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan	jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui	irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor	pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor	hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor	fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor	ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T2-S4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah; strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah; strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah; strategi peningkatan	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah; strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah; strategi peningkatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.	pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.	pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan	bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi	pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
					berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.	landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.	pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.
Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif							

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T3-S5	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara; penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara; penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara; penyusunan produk hukum	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara; penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara;

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
					yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.	pemerintah daerah.	penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.
T3-S6		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan	meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu; peningkatan penerimaan pendapatan daerah	meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu;	meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu; peningkatan penerimaan	meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah; pembentukan Perusahaan Perseroan daerah untuk berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah, serta Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik	melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah; Pemanfaatan Perusahaan Perseroan daerah untuk pembiayaan Pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan public, serta Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik	peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah; Pemanfaatan Perusahaan Perseroan daerah untuk pembiayaan Pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan public, serta Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)	pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah; Pemanfaatan Perusahaan Perseroan daerah untuk pembiayaan Pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan public, serta Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang	Luwu; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah; Pemanfaatan Perusahaan Perseroan daerah untuk pembiayaan Pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan public, serta Pembentukan Daerah Otonomi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
					melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik	handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik	Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik
T3-S7		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha,

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal	kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal	internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal	internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal	penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T3-S8		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik ; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik ; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik ; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik ; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda
MISI 3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal							

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T4-S9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP) serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP) serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP) serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP), serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP), serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah,	kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong	kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada	belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan	penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			desa, maupun digital.	kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.	Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.	sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.	tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T4-S10		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas Walenrang Barat, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health Coverage* untuk memudahkan	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas Bastem Utara, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health*	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas Walenrang Utara, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis,	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan alat kesehatan pada Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas Latimojong, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pemenuhan alat kesehatan pada Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran	*Coverage* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran	peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health Coverage* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi	pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health Coverage* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran	kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health Coverage* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
					agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran		dan Preventif yang tepat sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T4-S11		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, dan integrasi karakter; peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, dan integrasi karakter; peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan,	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integrasi karakter; peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integrasi karakter; peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan,	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integrasi karakte;, peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas melalui perencanaan pembangunan stadion dan sirkuit, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga	karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas dengan pembangunan stadion dan sirkuit, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga	perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga	kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga	perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T4-S12		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualita layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh gama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualita layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh gama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualita layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualita layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh gama dalam pelaksanaan	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualita layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.	local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.	tabligh akbar, melibatkan tokoh gama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.	program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.	keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh gama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.
Misi 4. Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan							

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T5-S13	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; Pemanfaatan pupuk	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Penguatan	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Penguatan produktivitas komoditas	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Dukungan terhadap pengembangan pangan lokal dan nabati melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian; peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan	tambah; Pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Dukungan terhadap pengembangan pangan lokal dan nabati melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian; peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; peningkatan	produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; Pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Dukungan terhadap pengembangan pangan lokal dan nabati melalui peningkatan produktifitas	pertanian berorientasi nilai tambah; Pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Dukungan terhadap pengembangan pangan lokal dan nabati melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian; peningkatan produktifitas	melalui petani muda milenial; Penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; Pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Dukungan terhadap pengembangan pangan lokal

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			mesin pertanian; modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani	pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani	lahan pertanian; peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani	komoditas tanaman pangan; peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani	dan nabati melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian; peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
							usaha pertanian dan wanatani

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
T5-S14		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.	penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.	Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.	penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.	seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.
T5-S15		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; penanganan kerawanan pangan	Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; penanganan	Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman;	Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; penanganan	Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan	kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan	penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan	kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan	dan aman; penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan
Misi 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan							
16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan; Penguatan konektivitas darat	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan; Penguatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan;	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan;	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan;

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.	konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.	Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.	Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.	Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.
17		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat	Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan	Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan	Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan	Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan	Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	**Tahap 2 (2027)**	**Tahap 3 (2028)**	**Tahap 4 (2029)**	**Tahap 5 (2030)**
			Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)	Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)	pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)	Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)	pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)
18		Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; serta	Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan	Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan	Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan	Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan	permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan	kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan	Kawasan permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan	pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan
Misi 6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa							
19	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Meningkatnya kemandirian desa	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; Pengembangan	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa	ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa	kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi	musyawarah perencanaan desa; Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa	kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
					kewenangan pemerintah desa		kewenangan pemerintah desa
Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana							
20	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Menurunnya risiko bencana	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana;	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
			pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana	penanganan kedaruratan bencana; pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana	layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana	peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana	bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
21		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan melalui pemanfaatan TPA tallangbulawang, TPA Tanjong dan TPST Lamasi Timur;	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan melalui pemanfaatan TPA tallangbulawang, TPA Tanjong dan TPST Lamasi Timur;	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan melalui pemanfaatan TPA tallangbulawang, TPA Tanjong dan TPST Lamasi Timur;	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan melalui pemanfaatan TPA tallangbulawang, TPA Tanjong dan TPST Lamasi Timur;	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan melalui pemanfaatan TPA tallangbulawang, TPA Tanjong

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
			Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
							dan TPST Lamasi Timur;

Tabel 3.5 di atas memperlihatkan keterhubungan masing-masing strategi dengan sasaran pembangunan (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran pembangunan selama lima tahun mendatang.

Selain strategi maka ditentukan tema pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode keperiode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritisas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional perangkat daerah di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan

Gambar 3.1.
Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029



Fokus atau tema pembangunan pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029 dijabarkan tahapannya sebagai berikut:

a. **Tema Pembangunan Tahap I (2025)**

Tema pembangunan pada tahun 2025 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Sebagai tahun transisi dokumen perencanaan jangka menengan seiring dengan pergantian kepemimpinan daerah, maka ditahun 2025 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu.

Pada tahun 2025 pembangunan Kabupaten Luwu diarahkan "**Pengembangan kualitas layanan sumber daya manusia, akses pelayanan publik dan peningkatan perekonomian masyarakat**". Dengan tema ini diharapkan daerah segera memperkuat cakupan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, layanan publik serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan dapat mencakup langkah strategis diantaranya, (1) peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata berbasis agro-ekologi di kecamatan Bastem Utara, Fasilitasi penyusunan Rippow destinasi wisata Kecamatan Larompong serta menguatkan pemasaran objek wisata prioritas di Kabupaten Luwu. (2) Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui pendidikan vokasi pada dunia usaha indutri nikel dan pertambangan, kerja sama antara pemerintah

daerah dan perusahaan Masmindo Dwi Area, Bumi Mineral Sulawesi dan Tiara Tirta Energi, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri. (3) Pembentukan tata kelola dan kelembagaan terkait peta potensi investasi Kabupaten Luwu; Peningkatan kawasan industi nikel dan pertambangan mampu Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor. (4) Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah; strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi

Masyarakat. (5). pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal. (6) Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital. (7) Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas Walenrang Barat, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau Universal health Coverage untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi

pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran.

b. **Tema Pembangunan Tahap II (2026)**

Pada tahun 2026 ini pembangunan diarahkan pada "**Penguatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan publik serta infrastruktur dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berbasis komoditas unggulan daerah**". Sesuai tema di atas maka beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun 2026 adalah dengan pemerataan ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang terstandar, penerapan teknologi informasi yang terintegrasi, SDM yang terlatih dan berkarakter baik, serta peningkatan hasil produksi unggulan. Hal ini diperlukan strategi yakni (1) Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; Pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Dukungan terhadap pengembangan pangan lokal dan nabati melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian; peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani (2) Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui

pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone. (3) pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal. (4) Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital. (5) Mendorong pemerataan layanan kesehatan

melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas Bastem Utara, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau Universal health Coverage untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran.

c. **Tema Pembangunan Tahap III (2027)**

Pada tahun 2027 pembangunan Kabupaten Luwu diarahkan pada "**Penguatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola, dengan infrastruktur wilayah yang merata**". Sesuai tema ini pembangunan dilakukan dengan menitikberatkan kualitas pembangunan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangunan SDM. Pembangunan infrastruktur memperhatikan kebutuhan spesifik setiap wilayah, sehingga terjadi pemerataan secara proporsional mendukung aktivitas sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Hal ini diperlukan strategi yaitu (1) pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal. (2) Penyiapan dan perluasan kesempatan kerja melalui dukungan pendidikan dan keterampilan yang memadai serta pembentukan lingkungan pendukung ramah perempuan dan keluarga, fasilitasi job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam

rangka pengiriman keluar negeri (3) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan; Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.

d. **Tema Pembangunan Tahap IV (2028)**

Pada tahun 2028 pembangunan Kabupaten Luwu diarahkan pada "**Perluasan sentra-sentra ekonomi produktif berbasis agribisnis dan pemerataan infrastruktur berkelanjutan serta dukungan sumber daya manusia berkarakter dan tata kelola yang adaptif**". Dengan tema tersebut maka pembangunan daerah diarahkan pada upaya pengembangan produk-produk unggulan daerah yang lebih berkualitas dan inovatif. Hal ini bertujuan untuk produk-produk daerah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah, sehingga diharapkan struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Luwu menjadi lebih kuat. Perekonomian yang berdaya saing menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat meningkat dan pendapatan asli daerah akan meningkat, hal ini dikarenakan dengan peningkatan perekonomian masyarakat menjadi pendorong dalam struktur ekonomi Kabupaten Luwu. Untuk mendorong struktur perekonomian yang kuat, dibutuhkan dukungan infrastruktur berkeadilan yang dirangcang dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat.

e. **Tema Pembangunan Tahap V (2029)**

Tahun 2029 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Oleh karena itu fokus pembangunan pada tahun ini ditekankan pada "**Perwujudan Kabupaten Luwu yang unggul berkarakter dan berbasis agribisnis** ". Sesuai visi RPJMD yang ingin mewujudkan keunggulan daerah dan masyarakat yang berkarakter serta sistem agribisnis yang maju, sehingga aktivitas pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dan merata dengan SDM yang berkarakter dan produktif, menjadi satu kesatuan yang diarahkan mampu mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di Kabupaten

Luwu. Hal ini dilakukan untuk mendorong potensi-potensi unggulan daerah dalam bidang pertanian dan perikanan dalam arti luas. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan ketersediaan bahan baku untuk mendukung agroindustri. Agroindustri ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk melalui peningkatan nilai tambah suatu produk, sehingga harga jual meningkat dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas perdagangan, industri dan sektor jasa. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa upaya yang akan dilakukan yaitu pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif, pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat dan kondusif yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai, peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan potensi kepariwisataan daerah, peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu prioritas pada tahun adalah penyelesaian prioritas kebijakan sebelumnya dan kemudian mempersiapkan arah kebijakan pembangunan pada periode berikutnya.

f. Tema Pembangunan Transisi (2030)

Tahun 2030 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD 2025-2029 ke RPJMD 2030-2034. Oleh karena itu fokus pembangunan pada tahun ini ditekankan pada pengembangan daya saing sosial ekonomi masyarakat dan mempersiapkan keberlanjutan dan keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan sehingga diharapkan terwujud pertumbuhan yang inklusif. Tema pembangunan pada tahun 2030 adalah "**Percepatan daya saing sosial ekonomi berkelanjutan mewujudkan pertumbuhan inklusif**". Dengan tema tersebut maka pembangunan diarahkan pada upaya untuk pengembangan produk-produk unggulan daerah yang lebih berdaya saing dalam pasar regional atau global dengan mempertahankan keberlanjutan sosial dan lingkungan, melalui pengembangan kualitas SDM yang tinggi, infrastruktur yang memadai, penerapan inovasi dan teknologi, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang terjaga melalui pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan.

3.4.2.Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi dan tema pembangunan diatas, maka arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
Misi 1. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial				
T1-S1	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Meningkatkan efisiensi distribusi produk unggulan serta penguatan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, disertai penguatan kapasitas dan pengawasan kelembagaan koperasi	peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui Pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih, peningkatan sarana dan prasarana industri kecil menengah, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran; meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana objek wisata berbasis agro-ekologi, Fasilitasi penyusunan Rippow destinasi wisata, serta Meningkatkan pemasaran objek wisata prioritas di Kabupaten Luwu melalui promosi terpadu dan pemanfaatan teknologi digital

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T1-S2		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, pertambangan dan industri	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja formal melalui pelatihan dan pendidikan yang disediakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Luwu, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja informal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, fasilitasi individu/kelompok masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri
T1-S3		Berkembangnya hilirisasi sumber daya unggulan	Meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan investasi di sektor industri pengolahan, energi, dan pertambangan	Mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi Daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; percepatan pembangunan irigasi tersier, embung, Dam Parit, Pintu air, jalan usaha tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian; Pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha,

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
				peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T2-S4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat dengan penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, jaminan kesehatan, perlindungan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Penurunan tingkat kemiskinan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi di seluruh masyarakat kabupaten Luwu; strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah; strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya rumah, air minum layak, sanitasi layak, layanan kesehatan dan layanan pendidikan di Desa-desa tertinggal; serta pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang akan menjadi landasan untuk memastikan program-program yang telah dijalankan memiliki dampak yang nyata bagi Masyarakat.
Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T3-S5	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel, serta mendukung implementasi pembangunan daerah melalui penyusunan regulasi yang efektif	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan birokrasi melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan, program kegiatan kepala daerah, kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi; penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara; penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah.
T3-S6		meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan pendapatan, serta diversifikasi sumber pendapatan, disertai perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan peran Perseroda.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; Percepatan penataan dan perbaikan serta mengoptimalkan fungsi aset pemerintah Kabupaten Luwu; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak seperti pengembangan usaha baru berbasis aset daerah, retribusi jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata, Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM), potensi lokal lainnya, serta peningkatan iklim investasi; pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Intensifikasi Pajak dan Retribusi; serta pembentukan Perusahaan Perseroan daerah untuk berkontribusi pada kemandirian fiscal daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T3-S7		Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis data dan riset., pengembangan smart government dan digitalisasi layanan publik, penguatan infrastruktur TIK dan ekosistem inovasi, serta penyediaan kajian kelayakan dan perencanaan yang komprehensif dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru	pembentukan pemerintahan berbasis digitalisasi melalui layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kepndudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, pendidikan, dan kesehatan; peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui hasil-hasil riset yang akan digunakan dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal; Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik
T3-S8		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang adaptif dan kolaboratif, serta pengendalian dan penegakan hukum/Perda, termasuk implementasi tata ruang daerah	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengekan hukum, penanganan konflik ; penguatan ideologi pancasila dan wawasan dikalangan aparatur sipil negara dan generasi muda
MISI 3. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T4-S9	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas tenaga pendidik; penguatan pendidikan digital berbasis TIK/IoT; serta pengembangan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi	Peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata Kelola Pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (pemberian pakaian seragam + sepatu dan tas bagi siswa SD dan SMP) serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan Pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal; memanfaatkan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar mengembangkan kemampuan berpikir siswa sehingga nilai literasi dan numerasi semakin baik; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui Upaya kolaboratif bersama pemerintah desa/kelurahan untuk pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, sosialisasi kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan, dan memberikan bantuan Pendidikan bagi keluarga yang ingin melanjutkan sekolah; serta penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T4-S10		meningkatnya kualitas layanan kesehatan	pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu; pembudayaan hidup sehat dengan sarana prasarana memadai; peningkatan kualitas, pemerataan, dan insentif tenaga kesehatan; serta perluasan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di seluruh wilayah	Mendorong pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Walmas, Penyediaan Ambulance, Peningkatan status Puskesmas, Pengembangan sistem telemedicine dengan program care and call doctor agar memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan khususnya tenaga medis spesialis, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, memperkuat pelayanan kesehatan berbasis E-KTP atau *Universal health Coverage* untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang efektif dan efisien, penguatan intervensi pencegahan stunting dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder dalam melaksanakan program pemberian makan bergizi agar tepat sasaran serta upaya Promotif dan Preventif yang tepat sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T4-S11		Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Meningkatkan kompetensi dan daya saing pemuda, penguatan sumber daya dan kelembagaan olahraga; integrasi GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) pada seluruh sektor Pembangunan, serta menguatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak dan Perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.	Membangun keluarga yang berkualitas melalui penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, dan integrasi karakter; peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan sarana dan prasarana olahraga bestandar nasional yang ramah disabilitas melalui perencanaan pembangunan stadion dan sirkuit, peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T4-S12		meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	membangun kehidupan beragama yang harmonis dan bermanfaat, serta pelestarian kebudayaan lokal dan penguatan karakter masyarakat melalui warisan budaya dan seni tradisional.	Menjalankan nilai-nilai spiritual dalam Masyarakat dengan Penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama; peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, melibatkan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya local dengan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter Masyarakat melalui pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.
Misi 4. Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T5-S13	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan	Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan rantai pasok yang efisien, pemberdayaan petani dan nelayan secara inklusif, serta Pengembangan diversifikasi pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan bergizi seimbang	Pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; Pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani melalui kegiatan tudang sipulung, pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; Penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; Pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk; Pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Dukungan terhadap pengembangan pangan lokal dan nabati melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian; peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T5-S14		Berkembangnya kegiatan usaha perikanan		Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap pada seluruh wilayah pesisir teluk bone; serta Pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan; dan penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kawasan pesisir teluk bone.
T5-S15		Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan		Menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan Cadangan pangan pemerintah; serta penyusunan peta Kawasan pangan
Misi 5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T6-S16	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata untuk mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar masyarakat, serta daya saing daerah	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan rusak sedang menjadi kondisi mantap, Pembangunan dan rehabilitasi jembatan; Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; serta Peningkatan penerangan jalan pada setiap daerah tertinggal.
T6-S17		Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat		Percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi untuk perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Luwu; penyediaan instalasi air minum aman dengan mengutamakan Lokasi 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan pendekatan berkelanjutan; serta Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS (*City Wide Inclusive Sanitation*)
T6-S18		Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan		Perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu; Percepatan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan pendekatan yang lebih holistic; peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan; serta Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Misi 6. Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa				

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T7-S19	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa	Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan peran desa secara inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa yang adaptif	Penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; Peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; Pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan; Pengembangan produk unggulan desa melalui pemanfaatan bumdes dan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa
Misi 7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana				
T8-S20	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Menurunnya risiko bencana	Penguatan ketangguhan, mitigasi, dan manajemen risiko bencana serta integrasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam seluruh sektor pembangunan	Pengelolaan risiko bencana melalui ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana; Peningkatan Upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; peningkatan resiliensi Masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana

NO.	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
VISI. LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS				
T8-S21		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan upaya pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah dan sampah berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; Pengembangan kawasan konservasi ex-situ; Mengembangkan dan menerapkan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim; Penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon; Perubahan perilaku dan penguatan tata Kelola persampahan; peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah di wilayah perkotaan

3.4.3.Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indicator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangkamenengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena posisinya yang strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Program Prioritas Bupati sesuai Dokumen KPUD

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO.	PROGRAM PRIORITAS BUPATI
MISI 1	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	1	Mendorong industri kreatif masyarakat/UMKM bagi pemuda dan kaum perempuan
			2	Pengembangan Objek Wisata Berbasis Agro-Ekologi
			3	Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat)
			4	Fasilitasi Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri
			5	Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
			6	Pemutakhiran database Masyarakat Miskin dalam rangka data Tunggal sosial ekonomi nasional
			7	Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
			8	Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
			9	BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO.	PROGRAM PRIORITAS BUPATI
Misi 2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	10	Optimalisasi Layanan MPP di Walenrang
			11	Penyediaan Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
			12	Pemberian Beasiswa S1, S2, S3 Bagi ASN
			13	Luwu belajar (Magang, pelatihan dan Pengembangan)
			14	Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)
			15	Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda
			16	Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah
			17	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
			18	Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
			19	Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
			20	Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			21	Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
			22	Kebijakan Berbasis Riset
			23	Peningkatan kualitas apartur di lingkup keamanan dan ketertiban
			24	Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
MISI 3.	Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	25	Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar
			26	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Wilayah Walmas
			27	Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
			28	Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
			29	Layanan Kesehatan *Care and Call Doctor*
			30	Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO.	PROGRAM PRIORITAS BUPATI
			31	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
			32	Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
			33	Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
			34	Pembangunan Stadion dan Sirkuit, serta Peningkatan Kualitas Lapangan Olahraga
			35	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
			36	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
			37	Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
			38	Pemberian Umroh bagi Imam Masjid
			39	Pelaksanaan Tabligh Akbar
Misi 4.	Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	40	Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
			41	Pengembangan petani muda milenial
			42	Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian dan pelaksanaan tudang sipulung, serta pengawasan penyaluran pupuk subsidi
			43	Pengadaan Bibit Perkebunan, Hortikultura, serta Alat dan mesin pertanian
			44	Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
			45	Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			46	Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
			47	Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
			48	ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
			49	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
Misi 5.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	50	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
			51	Peningkatan Penerangan Jalan Desa
			52	Pengelolaan sumber daya air

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NO.	PROGRAM PRIORITAS BUPATI
			53	Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
			54	Pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
			55	Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			56	Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
Misi 6.	Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa	Desa mandiri	57	peningkatan kelembagaan BUMDES
			58	Fasilitasi desa belajar
			59	Fasilitasi pencapaian SDGs Desa
			60	Membuat peta potensi wilayah desa
			61	Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan
			62	Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Misi 7.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	63	Pemanfaatan TPA Tallangbulawang
			64	Pembangunan TPA Tanjong dan Persiapan TPST wilayah Walenrang-Lamasi
			65	Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
			66	Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
			67	Peningkatan layanan persampahan perkotaan

Tujuh prioritas Pembangunan sebagaimana tabel diatas merupakan prioritas untuk mewujudkan tujuh misi Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029. Hal ini juga selaras dengan prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
MISI 1	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
				Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
Misi 2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
			Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
MISI 3.	Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Misi 4.	Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Misi 5.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
Misi 6.	Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa	Desa mandiri	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka	Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

NO	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	
Misi 7.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Tabel 3.8.
OUTCOME DAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
MISI 1	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung sosial dan sumber daya potensial	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumberdaya unggulan daerah		PDRB Per Kapita (Juta. Rp)				
				Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	Meningkatnya skala usaha pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	URUSAN KOPERASI DAN UMKM
						Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN P	

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
								ERKOPERASIAN	
						Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	URUSAN PARIWISATA

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	URUSAN PARIWISATA
						Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	URUSAN PERDAGANGAN
				Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	URUSAN KETENAGAKERJAAN
						meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Program penempatan tenaga kerja	

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
				Meningkatnya Hirilisasi sumber daya unggulan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri dan kawasan industri	program Perencanaan dan Pembangunan Industri	UNSUR KOPERASI DAN UMKM
						Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	URUSAN PENANAMAN MODAL
						Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Program promosi penanaman modal	
						Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	URUSAN PERTANIAN
			Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat		Pengeluaran perkapita (Ribu. Rp)				

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
				Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	URUSAN SOSIAL
						Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Program pemberdayaan sosial	
						Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM Bidang Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	URUSAN KESEHATAN

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						Meningkatnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan/ penyedia kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	Program hubungan industrial	URUSAN KETENAGAKERJAAN
MISI 2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkarakter, inovatif dan adaptif	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang responsif, berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi General (Angka)				
				Meningkatnya Akuntabilitas dan Berintegritas dalam tata kelola pemerintahan daerah	SAKIP (Angka)	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase SOP yang diterapkan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Seluruh OPD
						Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	URUSAN PEMERINTAHAN

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		
						Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik		
						Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah		
						Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	Program penyelenggaraan pengawasan	URUSAN PENGAWASAN

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan BPK		
							Persentase tindak lanjut temuan BPKP		
							Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi		
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani		
						meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	Program perekonomian dan pembangunan	URUSAN PEMERINTAHAN
						Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematanagan UKPBJ		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						Meningkatnya Kualitas Penilaian kinerja ASN	Pesentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	Program kepegawaian daerah	URUSAN KEPEGAWAIAN
						Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
						Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
				meningkatnya Kualitas Tata Kelola perencanaan dan Keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah (Angka)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase keselarasan nomenklatur dan anggaran antara program RPJMD dengan RKPD	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	URUSAN PERENCANAAN
							Persentase Perangkat Daerah dengan predikat kinerja		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							program "Sangat Tinggi"		
						meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran	Program pengelolaan keuangan daerah	URUSAN KEUANGAN
						meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah	
				Terwujudnya pemerintahaan yang adaptif dan inovatif	Indeks SPBE (Angka)	Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Program pengelolaan aplikasi informatika	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							keakuratan, relevansi, dan kecepatan informasi.		
							Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
						Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
							Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
					Indeks Inovasi Daerah (Angka)	Meningkatnya jumlah kelitbangan daerah yang mendukung kebijakan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						meningkatnya kualitas riset dan ekosistem inovasi	Persentase inovasi daerah yang memiliki kematangan >75 dalam IID pada tahun pelaporan	Program riset dan inovasi daerah	
						meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	Program pengembangan sumber daya manusia	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
				Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (Angka)	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masayarakat berkat Aparatur yang Berkompeten serta Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Daerah	Persentase capaian SPM bidang pelayananTrantibum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
						meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penangan konflik sosial	URUSAN KESBANGPOL

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
MISI 3	Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter berdasarkan nilai luhur kearifan lokal	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)				
				Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Rapor Pendidikan (Angka)	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Program pengelolaan pendidikan	URUSAN PENDIDIKAN
							Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan		
						meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program pengembangan kurikulum	
						meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Program pendidik dan tenaga pendidik	
						meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang ber Standar	Program pembinaan perpustakaan	URUSAN PERPUSTAKAAN

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							Nasional Perpustakaan		
				meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan (Angka)	Terjaminnya perlindungan jaminan kesehatan dan pemenuhan standar layanan masyarakat	Indeks SPM	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	URUSAN KESEHATAN
						Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase Peningkatan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
						Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
				Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan keluarga (Angka)	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak,	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	Program peningkatan kualitas keluarga	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						serta perlindungan perempuan dan anak			
						Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
						Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	Program pengendalian penduduk	Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
					Indeks Pembangunan Pemuda (Angka)	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
						meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	Program pengembangan daya saing keolahragaan	
				meningkatnya kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama	Indeks kerukunan umat beragama (Angka)	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	Program kesejahteaan Rakyat	Urusan Pemerintahan
						Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							dalam kondisi baik		
						Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah		
						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	Program pengembangan kebudayaan	URUSAN KEBUDAYAAN
MISI 4	Meningkatkan pembangunan Agribisnis yang berkelanjutan	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	Meningkatnya usaha agribisnis yang berkelanjutan		Indeks ekonomi hijau (Angka)				
					indeks ekonomi biru (Angka)				
				Berkembangnya kegiatan usaha pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase peningkatan produksi peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Urusan Pertanian

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura		
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan		
							Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan		
					Nilai Tukar Petani (NTP) (Angka)	meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Program penyuluhan pertanian	
				Berkembangnya kegiatan usaha perikanan	Produktivitas perikanan (Ton/Ha)	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	Urusan Perikanan

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	
					Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Angka)	Meningkatnya pemanfaatan hasil perikanan oleh masyarakat	angka konsumsi ikan	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	
				Terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan pangan (Angka)	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Urusan Ketahanan Pangan
							Tingkat Konsumsi Protein		
						Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Rasio Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
MISI 5	Mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (Angka)				
				Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah	Tingkat Konektivitas infrastruktur (%)	Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
						Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat pelayanan lalu lintas (V/C)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Urusan Perhubungan
				Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian yang produktif dan ketersediaan air	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi (%)	Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan sumber daya air	Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
				minum yang layak bagi masyarakat	Akses rumah tangga terhadap air minum aman (Angka)	Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
				Meningkatknya kualitas permukiman melalui penataan yang terencana dan berkelanjutan	Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	
						Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Program kawasan permukiman	
						Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Urusan Pertanahan
MISI 6	Mewujudkan desa yang lebih inklusif yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan lokalitas desa	Desa mandiri	Meningkatnya Pembangunan dan pemberdayaan Desa		Indeks desa (Angka)				
				Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri (%)	Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang terkelola dengan baik	Program administrasi pemerintahan desa	Urusan pemberdayaan dan masyarakat desa
						Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
						Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
MISI 7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)				
				Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Angka)	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							kesiapsiagaan bencana		
							Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
						terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program pengembangan perumahan	Urusan Perumahan dan kawasan permukiman
							persentase warga negara yang terkena relokasi akibat pemerintah daerah yang memperoleh		

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
						meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Urusan Pemadam kebakaran
							Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit		
						meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Program penangan bencana	Urusan Sosial

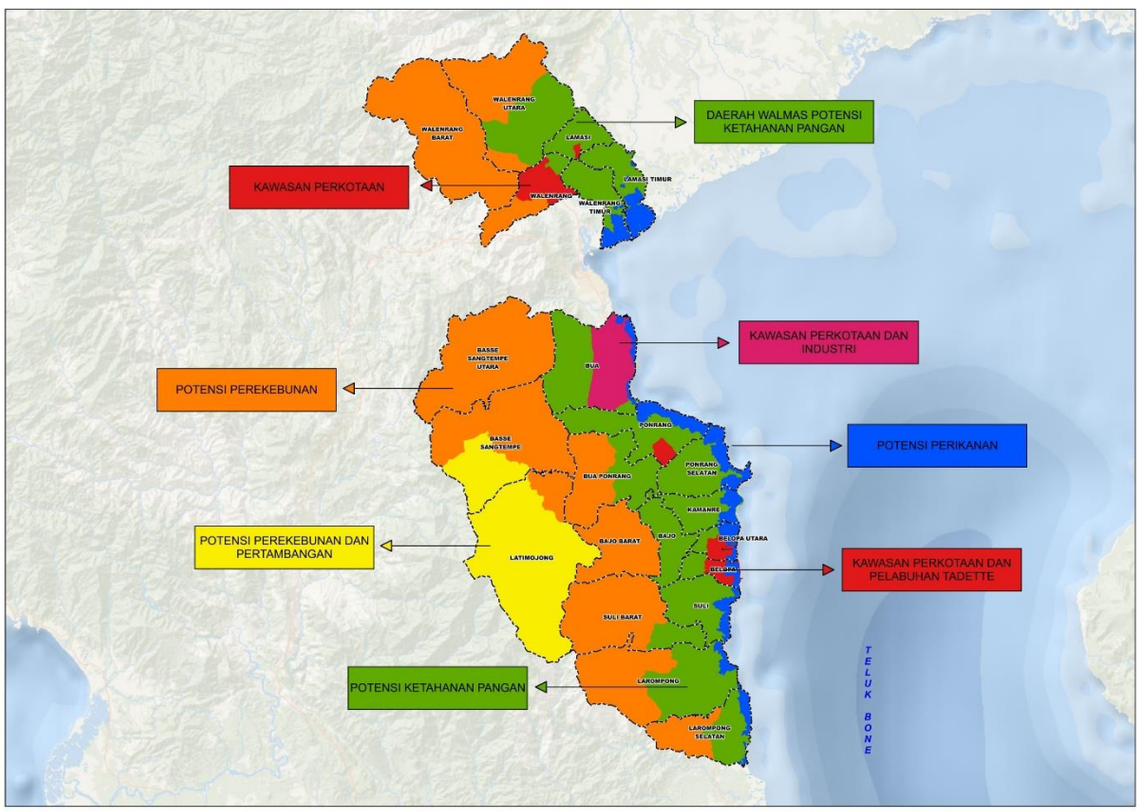
No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							tanggap darurat bencana daerah kabupaten		
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) (Angka)	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan indeks kualitas air	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Urusan lingkungan hidup
						Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Program pengelolaan persampahan	
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Urusan Pekerjaan umum dan tata ruang
						Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan	

No.	MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	URUSAN
LUWU UNGGUL, BERKARAKTER DAN BERBASIS AGRIBISNIS									
							oleh sistem persampahan	persampaham regional	

3.5. Arah Kebijakan Kewilayahan

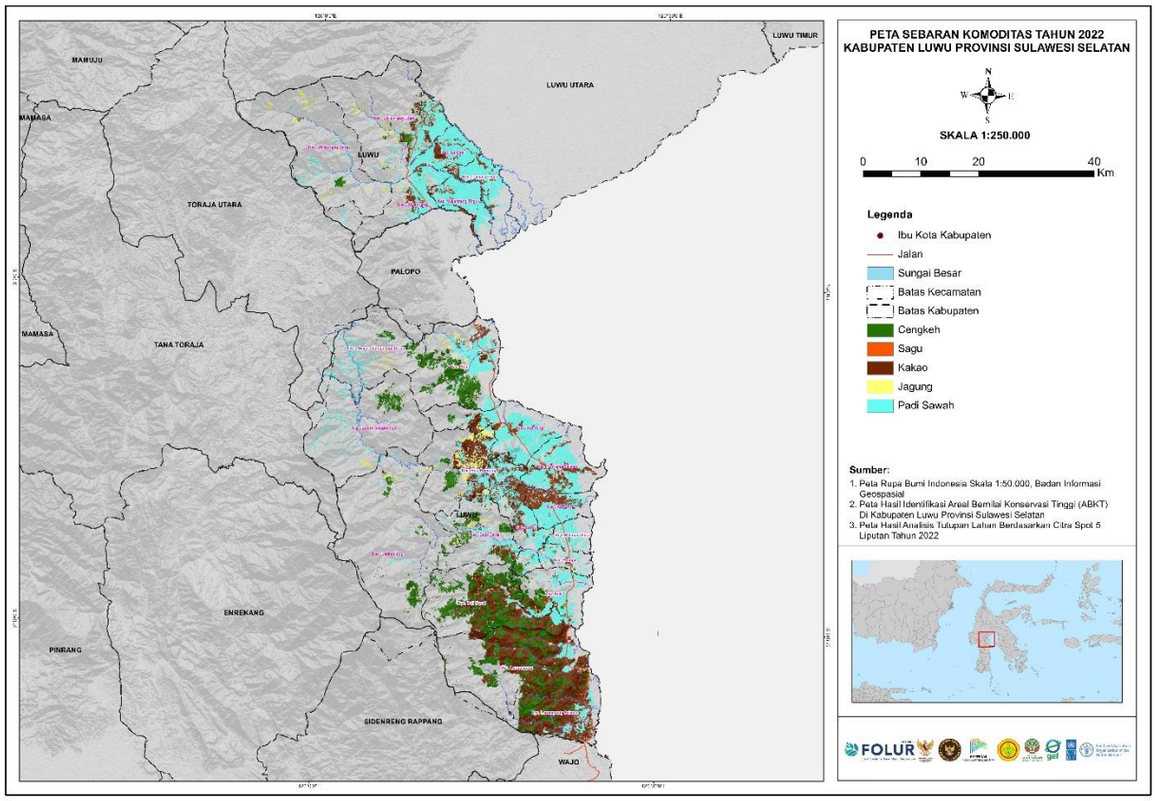
Sejatinya pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan namun di Kabupaten Luwu masih terdapat kesenjangan yang relatif besar antar kawasan. Untuk menanggulangi kesenjangan tersebut maka disetiap kawasan pembangunan akan diterapkan beberapa potensi wilayah yang akan didukung oleh beberapa intervensi program. Berikut ini peta potensi ekonomi, sebaran komoditas, tutupan lahan, dan area bernilai konservasi tinggi (ABKT) di Kabupaten Luwu.

Gambar 3.1.
Peta Potensi Ekonomi Kabupaten Luwu



Gambar 3.2.

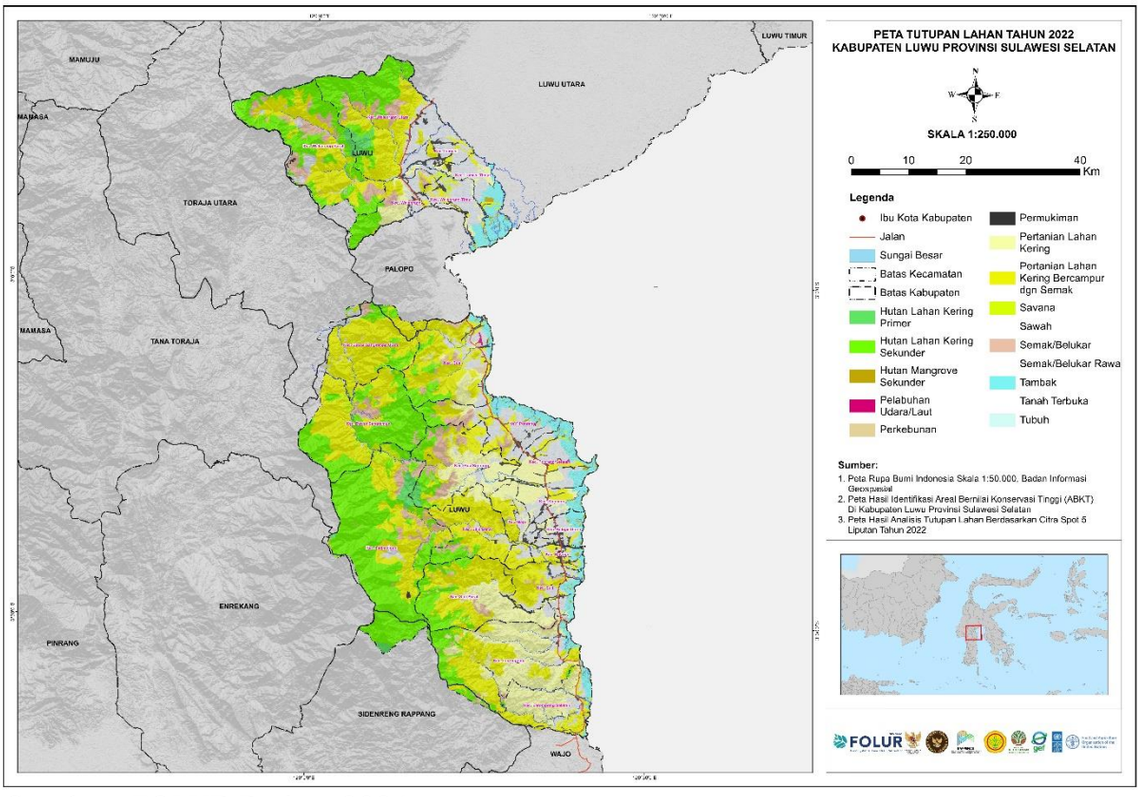
Peta Sebaran Komoditas Kabupaten Luwu



Sumber: FOLUR Project 2024

Gambar 3.3.

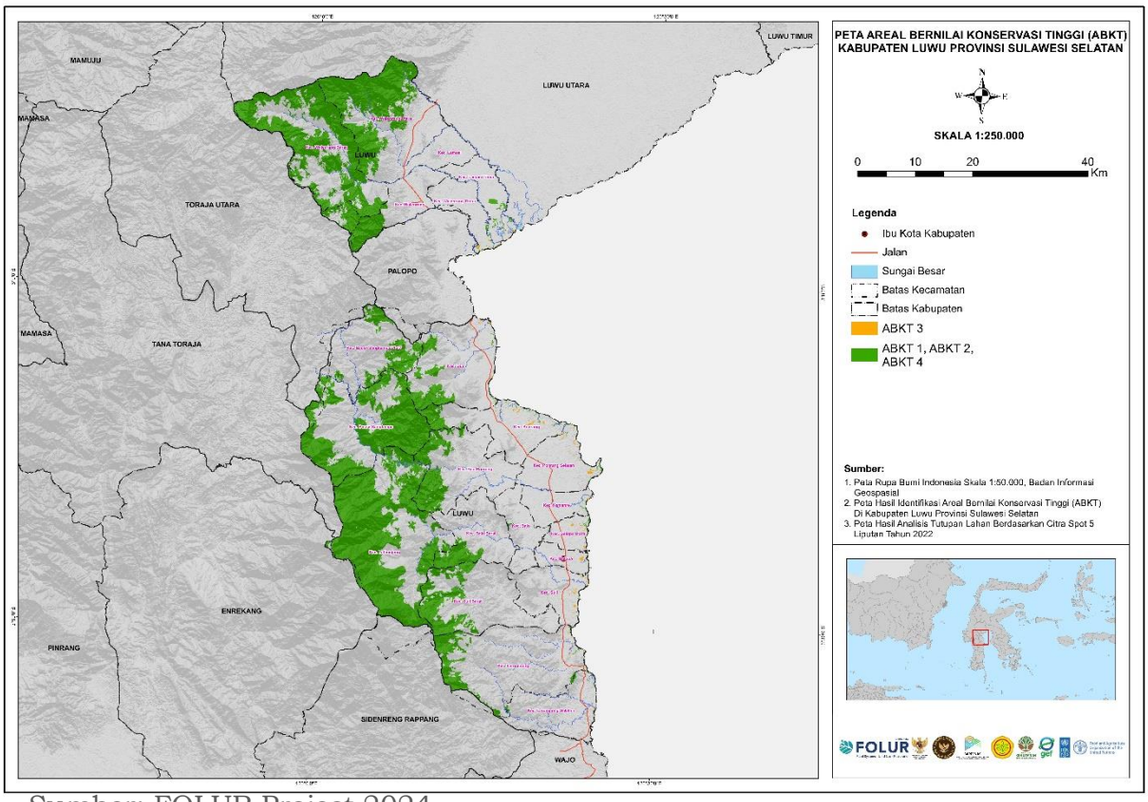
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Luwu



Sumber: FOLUR Project 2024

Gambar 3.4.

Peta Area Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Luwu



Sumber: FOLUR Project 2024

Sebagai upaya mewujudkan kabupaten Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan kewilayahan akan dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan berdasarkan kecamatan, sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Belopa

Kecamatan Belopa sebagai Pusat Kegiatan lokal yang berperan sebagai kawasan perkotaan kabupaten Luwu yang berperan sebagai pusat pelayanan yang didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum difokuskan pada:

Pertama, untuk mewujudkan Luwu Berdaya, diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui peningkatan sarana dan prasarana Usaha Mikro, Kecil dan menengah, fasilitasi pengembangan industri kreatif melalui perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro,

kecil dan menengah serta industri kreatif dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran pada kecamatan belopa, kamanre, belopa utara. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan penyiapan dan perluasan kesempatan kerja formal dan informal melalui pelatihan dan pendidikan serta pengembangan keterampilan kerja, pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, penguatan kerja sama dengan korporasi dan lembaga pendidikan tinggi, fasilitasi kerja sama pelaksanaan job fair, serta fasilitasi pencari kerja dalam rangka pengiriman keluar negeri; fasilitasi dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri. Sedangkan untuk pengembangan hilirisasi sumber daya unggulan diarahkan dengan mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor pada Kecamatan Bajo; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor pada Kecamatan Belopa, Belopa Utara dan Kamanre. Sedangkan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi, pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya peningkatan kualitas rumah, pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan layanan

pendidikan, serta penanganan kemiskinan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor."

Kedua, untuk mewujudkan Luwu Malebbi melalui layanan publik yang profesional dan bermartabat, diarahkan pada peningkatan akuntabilitas dan integritas tata kelola pemerintahan melalui penguatan peran APIP dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terkait pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan, penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas dan kinerja aparatur sipil negara, penyusunan produk hukum yang mendukung perencanaan dan program kerja pemerintah daerah, peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, percepatan penataan dan perbaikan serta optimalisasi fungsi asset, peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pembentukan BUMD, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pada masyarakat terutama pada sektor strategis, seperti layanan kependudukan dan catatan sipil, perizinan berusaha, penyediaan internet pada ruang publik, serta pendidikan, dan kesehatan, peningkatan kontribusi IPTEK dan inovasi dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan hasil-hasil riset dalam penentuan kebijakan; peningkatan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan informal. Sedangkan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diarahkan pada peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan penanganan konflik, serta penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi ASN dan generasi muda

Ketiga, Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing diarahkan pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan

ruang belajar pada seluruh satuan pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk peningkatan literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, pemberian bantuan pendidikan, penguatan budaya literasi untuk budaya baca melalui layanan perpustakaan berbasis digital. Sedangkan untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, perwujudan keluarga berkualitas,kesetaraan gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif melalui penguatan institusi keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, peningkatan partisipasi penyelenggaran kompetisi olahraga, peningkatan kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama, peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, pelibatan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah,

pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.

Keempat, Luwu Mapptuwo sebagai Pelopor Kedaulatan Pangan, diarahkan pada pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk, pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Sedangkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap; pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan, penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kecamatan Belopa, Belopa Utara, dan Kamanre. Selain itu perwujudan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman, penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah serta penyusunan peta kawasan pangan

Kelima, Infrastruktur merata dan berkelanjutan, diarahkan pada Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan dan rehabilitasi jembatan; penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan kebutuhan air baku, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, dan peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten. Sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman melalui penataan, perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan."

Keenam, perwujudan Desa mandiri diarahkan pada meningkatnya kemandirian desa penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif melalui peningkatan kualitas perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan, peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial- budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan, pengembangan produk unggulan desa dengan memanfaatkan Bumdes dan Koperasi, khususnya dukungan terhadap koperasi kelurahan Merah Putih.

Ketujuh, perwujudan Luwu Lestari melalui Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana diarahkan pada penurunan risiko bencana melalui peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur

berketahanan bencana. Selain itu untuk mewujudkan peningkatan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengembangan dan penerapan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon, perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, dan penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R.

2. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Larompong Selatan

Kecamatan Larompong Selatan sebagai kawasan pesisir dan ketahanan pangan yang beperan sebagai pusat ekonomi biru dan hijau, Pariwisata dan difokuskan pada:

Pertama, untuk mewujudkan Luwu Berdaya, diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui peningkatan sarana dan prasarana industry kecil menengah Barambing di kecamatan Suli, peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan menengah, fasilitasi pengembangan industri kreatif dan dan penentuan objek wisata khususnya Kecamatan Larompong. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan penyiapan dan perluasan kesempatan kerja informal melalui pelatihan dan pendidikan serta pengembangan keterampilan kerja khususnya pada sektor pertanian dan perikanan; fasilitasi dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri. Sedangkan untuk pengembangan hilirisasi sumber daya unggulan diarahkan dengan mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor pada Kecamatan Suli dan Suli Barat; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan

kapasitas usaha dan akses pasar ekspor pada Kecamatan Suli, Larompong dan Larompong Selatan. Sedangkan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi, pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya peningkatan kualitas rumah, pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta penanganan kemiskinan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor."

Kedua, untuk mewujudkan Luwu Malebbi melalui layanan publik yang profesional dan bermartabat, diarahkan pada penyediaan internet pada ruang publik, serta pendidikan, dan Kesehatan; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Sedangkan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diarahkan pada peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan penanganan konflik.

Ketiga, Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing diarahkan pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk peningkatan literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, pemberian

bantuan pendidikan, penguatan budaya literasi untuk budaya baca melalui layanan perpustakaan berbasis digital. Sedangkan untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, perwujudan keluarga berkualitas,kesetaraan gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif melalui penguatan institusi keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, peningkatan partisipasi penyelenggaran kompetisi olahraga, peningkatan kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama, peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, pelibatan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.

Keempat, Luwu Mapptuwo sebagai Pelopor Kedaulatan Pangan, diarahkan pada pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan;

pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk, pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani pada Kecamatan Suli, Suli Barat, larompong dan Larompong Selatan. Sedangkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap; pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan, penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kecamatan Suli, larompong dan Larompong Selatan. Selain itu perwujudan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman, penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah serta penyusunan peta kawasan pangan

Kelima, Infrastruktur merata dan berkelanjutan, diarahkan pada Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan dan rehabilitasi jembatan; penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan kebutuhan air baku, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, dan peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan

sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten. Sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman melalui penataan, perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan."

Keenam, perwujudan Desa mandiri diarahkan pada meningkatnya kemandirian desa penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif melalui peningkatan kualitas perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan, peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial- budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan, pengembangan produk unggulan desa dengan memanfaatkan Bumdes dan Koperasi, khususnya dukungan terhadap koperasi kelurahan Merah Putih.

Ketujuh, perwujudan Luwu Lestari melalui Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana diarahkan pada penurunan risiko bencana melalui peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana khususnya pada Kecamatan Suli dan Suli Barat. Selain itu untuk mewujudkan peningkatan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengembangan dan penerapan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon, perubahan

perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, dan penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R.

3. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Bua

Kecamatan Bua sebagai kawasan cepat tumbu yang memiliki kegiatan utama mencakup pusat layanan transportasi udara bandara lagaligo, Kawasan industry dan pergudangan Bua, Kawasan layanan Kesehatan dan permukiman, untuk itu akan difokuskan pada:

Pertama, untuk mewujudkan Luwu Berdaya, diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui fasilitasi pengembangan industry, perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran, serta meningkatkan pemasaran objek wisata prioritas di Kabupaten Luwu melalui promosi terpadu dan pemanfaatan teknologi digital pada kecamatan Bua dan Ponrang. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan penyiapan dan perluasan kesempatan kerja informal melalui pelatihan dan pendidikan serta pengembangan keterampilan kerja khususnya pada sektor industri; fasilitasi dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri pada sektor perikanan dan pertanian Kecamatan Ponrang, Ponrang Selatan dan Bua Ponrang. Sedangkan untuk pengembangan hilirisasi sumber daya unggulan diarahkan dengan mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta mendorong daya tarik kawasan industri dan sentra pengolahan; pengembangan hirilisasi komoditas unggulan terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor

pada Kecamatan Bua Ponrang; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor pada Kecamatan Bua, ponrang dan Ponrang Selatan. Sedangkan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi, pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya peningkatan kualitas rumah, pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta penanganan kemiskinan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor."

Kedua, untuk mewujudkan Luwu Malebbi melalui layanan publik yang profesional dan bermartabat, diarahkan pada penyediaan internet pada ruang publik, serta pendidikan, dan Kesehatan; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Sedangkan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diarahkan pada peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan penanganan konflik.

Ketiga, Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing diarahkan pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan

kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk peningkatan literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, pemberian bantuan pendidikan, penguatan budaya literasi untuk budaya baca melalui layanan perpustakaan berbasis digital. Sedangkan untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, perwujudan keluarga berkualitas,kesetaraan gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif melalui penguatan institusi keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, peningkatan partisipasi penyelenggaran kompetisi olahraga, peningkatan kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama, peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, pelibatan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.

Keempat, Luwu Mapptuwo sebagai Pelopor Kedaulatan Pangan, diarahkan pada pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk, pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani pada Kecamatan Ponrang, Bua Ponrang, Ponrang Selatan. Sedangkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap; pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan, penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kecamatan Ponrang, Bua, Ponrang Selatan. Selain itu perwujudan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman, penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah serta penyusunan peta kawasan pangan

Kelima, Infrastruktur merata dan berkelanjutan, diarahkan pada Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan

dan rehabilitasi jembatan; penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan kebutuhan air baku, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, dan peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten. Sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman melalui penataan, perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan."

Keenam, perwujudan Desa mandiri diarahkan pada meningkatnya kemandirian desa penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif melalui peningkatan kualitas perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan, peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial- budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan, pengembangan produk unggulan desa dengan memanfaatkan Bumdes dan Koperasi, khususnya dukungan terhadap koperasi kelurahan Merah Putih.

Ketujuh, perwujudan Luwu Lestari melalui Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana diarahkan pada penurunan risiko bencana melalui peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu untuk mewujudkan peningkatan

ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengembangan dan penerapan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon, perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, dan penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R serta Pembangunan TPA Tanjong di Kecamatan Bua Ponrang.

4. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Latimojong

Kecamatan Latimojong sebagai kawasan Perkebunan dan pertambangan yang akan difokuskan pada:

Pertama, untuk mewujudkan Luwu Berdaya, diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui peningkatan sarana dan prasarana UMKM, perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, perlibatan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran pada kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Bassesangtempe, dan Bassesangtempe Utara. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan penyiapan dan perluasan kesempatan kerja informal melalui pelatihan dan pendidikan serta pengembangan keterampilan kerja khususnya pada sektor pertambangan; fasilitasi dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri pada sektor pertanian di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Bassesangtempe, dan Bassesangtempe Utara. Sedangkan untuk pengembangan hilirisasi sumber daya unggulan diarahkan dengan mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha, serta Meningkatkan pemasaran objek wisata prioritas di Kabupaten Luwu melalui promosi terpadu dan pemanfaatan teknologi digital Kecamatan Basseangtempe Utara dan Bassesangtempe; pengembangan hirilisasi komoditas unggulan

terutama kopi dan kakao melalui pemataan perkebunan kakao dan kopi, fasilitasi kerja sama perdagangan Kopi dan kakao, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor pada Kecamatan Bajo Barat dan Latimojong; Sedangkan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi, pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya peningkatan kualitas rumah, pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta penanganan kemiskinan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor."

Kedua, untuk mewujudkan Luwu Malebbi melalui layanan publik yang profesional dan bermartabat, diarahkan pada penyediaan internet pada ruang publik, serta pendidikan, dan Kesehatan; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Sedangkan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diarahkan pada peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan penanganan konflik.

Ketiga, Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing diarahkan pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk peningkatan literasi

dan numerasi, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, pemberian bantuan pendidikan, penguatan budaya literasi untuk budaya baca melalui layanan perpustakaan berbasis digital. Sedangkan untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, perwujudan keluarga berkualitas,kesetaraan gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif melalui penguatan institusi keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, peningkatan partisipasi penyelenggaran kompetisi olahraga, peningkatan kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama, peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, pelibatan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.

Keempat, Luwu Mapptuwo sebagai Pelopor Kedaulatan Pangan, diarahkan pada pengembangan produktivitas pertanian

melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk, pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani pada Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Bassesangtempe, dan Bassesangtempe Utara. Selain itu perwujudan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman, penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah serta penyusunan peta kawasan pangan

Kelima, Infrastruktur merata dan berkelanjutan, diarahkan pada Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan dan rehabilitasi jembatan; penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan kebutuhan air baku, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, dan peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten. Sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman melalui penataan, perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan

permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan."

Keenam, perwujudan Desa mandiri diarahkan pada meningkatnya kemandirian desa penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif melalui peningkatan kualitas perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan, peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial- budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan, pengembangan produk unggulan desa dengan memanfaatkan Bumdes dan Koperasi, khususnya dukungan terhadap koperasi kelurahan Merah Putih.

Ketujuh, perwujudan Luwu Lestari melalui Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana diarahkan pada penurunan risiko bencana melalui peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu untuk mewujudkan peningkatan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengembangan dan penerapan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon, perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, dan penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R.

5. Arah Kebijakan Kawasan Pembangunan Walenrang

Kecamatan Walenrang sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan sebagai kawasan perkotaan kabupaten Luwu yang berperan sebagai pusat pelayanan yang didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum difokuskan pada

Pertama, untuk mewujudkan Luwu Berdaya, diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi unggulan melalui fasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perluasan akses ke perizinan usaha, fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, pengembangan pariwisata pada kecamatan Walenrang Utara dengan melibatkan pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dilakukan penyiapan dan perluasan kesempatan kerja informal melalui pelatihan dan pendidikan serta pengembangan keterampilan kerja; fasilitasi dalam membuka dan mengembangkan usaha mandiri pada sektor pertanian dan perikanan Walenrang Timur dan Lamasi Timur. Sedangkan untuk pengembangan hilirisasi sumber daya unggulan diarahkan dengan mendorong peluang investasi dan daya saing daerah melalui penyediaan peta potensi investasi daerah, menjamin iklim investasi yang kondusif dan kemudahan perizinan usaha; pengembangan hirilisasi komoditas unggulan, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor pada Kecamatan Walenrang Barat; pengembangan hilirisasi produk hasil perikanan dan tanaman pangan melalui fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha, peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pasca panen, sertifikasi produk, serta peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar ekspor. Sedangkan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi, pelayanan kesehatan berbasis e-ktp atau universal health coverage, pemberian bantuan sosial, bantuan penyelesaian study bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan produksi komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan penyediaan lapangan kerja; penyediaan layanan infrastrutur dasar diantaranya peningkatan kualitas rumah, pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta penanganan kemiskinan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor."

Kedua, untuk mewujudkan Luwu Malebbi melalui layanan publik yang profesional dan bermartabat, diarahkan pada penyediaan internet pada ruang publik, penyediaan mall pelayanan public, pendidikan, dan Kesehatan; peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui pencatatan potensi objek pajak, pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Sedangkan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang diarahkan pada peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melaui peran kolaboratif antara pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan penanganan konflik.

Ketiga, Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing diarahkan pada peningkatan kualitas layanan Pendidikan melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan; pemerataan dan percepatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan serta bangunan dan ruang belajar pada seluruh satuan pendidikan; penguatan karakter siswa melalui penerapan kurikulum muatan lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar; peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk peningkatan literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah, pemberian bantuan pendidikan, penguatan budaya literasi untuk budaya baca melalui layanan perpustakaan berbasis digital. Sedangkan untuk penguatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan; serta peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan; dan dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan,

utamanya program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, perwujudan keluarga berkualitas,kesetaraan gender, kualiatas pemuda dan masyarakat Inklusif melalui penguatan institusi keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko, peningkatan pembinaan prestasi olahraga, peningkatan partisipasi penyelenggaran kompetisi olahraga, peningkatan kualitas kemajuan kebudayaan dan kualitas beragama melalui kenaikan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu, serta pemberian umroh bagi tokoh agama, peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah; peningkatan peran tokoh agama, Lembaga beragama dan Lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan tabligh akbar, pelibatan tokoh agama dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pelestarian warisan budaya dan seni tradisional.

Keempat, Luwu Mapptuwo sebagai Pelopor Kedaulatan Pangan, diarahkan pada pengembangan produktivitas pertanian melalui pemberian bantuan bibit-bibit unggul sektor perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan serta peternakan; pengembangan sistem budidaya pertanian berkelanjutan; pengembangan kelembagaan petani pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi melalui petani muda milenial; penguatan produktivitas komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; pemanfaatan pupuk organik melalui pemberian subsidi pupuk pada petani dan pengawasan pendistribusian pupuk, pengembangan dan penguatan sentra produksi pangan; serta perluasan akses pasar produk pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani pada Kecamatan Walenrang, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi Timus dan lamasi. Sedangkan untuk peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya rumput laut, budidaya air tawar, air payau, pembangunan

kolam, dan pembangunan jalan produksi tambak; perluasan akses pasar modal produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan; peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap; pemanfaatan inovasi, teknologi dan sumber daya manusia perikanan, penguatan kerja sama perluasan pasar, dan rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya rumput laut pada Kecamatan Lamasi Timur dan Walenrang Timur. Selain itu perwujudan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam rangka menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang terjangkau pada masyarakat melalui pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman, penanganan kerawanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan cadangan pangan pemerintah serta penyusunan peta kawasan pangan

Kelima, Infrastruktur merata dan berkelanjutan, diarahkan pada Meningkatknya aksesibilitas, mobilitas, dan keterhubungan antarwilayah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada setiap wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan dan preservasi jalan daerah, pembangunan dan rehabilitasi jembatan; penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan kebutuhan air baku, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi, dan peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten. Sedangkan untuk peningkatan kualitas permukiman melalui penataan, perejamaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan pemenuhan kebutuhan PSU perumahan dan Kawasan permukiman yang layak; serta percepatan pembangunan drainase perkotaan dan lingkungan."

Keenam, perwujudan Desa mandiri diarahkan pada meningkatnya kemandirian desa penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara

adaptif melalui peningkatan kualitas perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan, peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan sosial- budaya, dan pelestarian lingkungan pedesaan dalam rangka pengembangan pusat ekonomi pedesaan, pengembangan produk unggulan desa dengan memanfaatkan Bumdes dan Koperasi, khususnya dukungan terhadap koperasi kelurahan Merah Putih.

Ketujuh, perwujudan Luwu Lestari melalui Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana diarahkan pada penurunan risiko bencana melalui peningkatan ketaatan terhadap rencana tata ruang; peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana; peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan bencana, serta peningkatan infrastruktur berketahanan bencana. Selain itu untuk mewujudkan peningkatan ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengembangan dan penerapan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan aksi-aksi pembangunan rendah karbon, perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan, dan penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R serta Pembangunan TPST pada Zona Walenrang-Lamasi.

Sebagai Upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu maka ditetapkan highlight intervesi program pada Kawasan-kawasan tertentu yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu, Rencana pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9.

Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten Luwu

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
1.	Larompong Selatan, Larompong, Suli dan Suli Barat	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	**perwujudan luwu berdaya akan dilakukan intervensi berupa:** Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Penguatan ekosistem kuliner
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Transformasi digital layanan publik prioritas
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan
				Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
2.	Belopa, Belopa Utara, Kamanre dan Bajo	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Fasilitasi Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan ekosistem kuliner
			layanan publik yang profesional dan	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	bermartabat " Luwu Malebbi"	Transformasi digital layanan publik prioritas
				Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
				Optimalisasi Layanan MPP di Walenrang
				Penyediaan Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
				Pemberian Beasiswa S1, S2, S3 Bagi ASN
				Luwu belajar (Magang, pelatihan dan Pengembangan)
				Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)
				Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda
				Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah
				Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Kebijakan Berbasis Riset
				Peningkatan kualitas apartur di lingkup keamanan dan ketertiban
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				pembentukan Perusahaan Perseroan daerah
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik untuk Daerah otonomi baru
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan Sirkuit dan Peningkatan Kualitas Lapangan Olahraga
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan
				Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
				Pemanfaatan TPA Tallangbulawang
3	Ponrang, Ponrang Selatan, Bua Ponrang dan Bua	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Pengembangan Objek Wisata Berbasis Agro-Ekologi
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan ekosistem kuliner
				Pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi dan kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel; Pengembangan kawasan industri
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Transformasi digital layanan publik prioritas
				Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
				Penyediaan Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
				Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit Listrik terbarukan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan
				Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk	Lingkungan yang sehat dan tangguh	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	bencana "Luwu Lestari"	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
				Pembangunan TPA Tanjong
4	Latimojong, Bajo Barat, Bassesangtempe, Bassesangtempe Utara	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Pengembangan Objek Wisata Berbasis Agro-Ekologi
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Fasilitasi Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan tata kelola industri nikel dan pertambangan serta ketereediaan bahan baku dan energi
				Pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi
				Penguatan ekosistem kuliner
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Transformasi digital layanan publik prioritas

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan		**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**
				Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
				Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit Listrik terbarukan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan
				Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Lingkungan yang sehat dan tangguh bencana "Luwu Lestari"	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
				Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
5	Walenrang, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Lamasi, Lamasi Timur	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal "Luwu Berdaya"	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subdisi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
				Pengembangan koperasi sektor produksi
				Pemberdayaan Pelaku UMKM, Ekonomi kreatif dan dan industri kecil menengah
				Pengembangan UMKM dan Industri
				Perluasan akses ke perizinan usaha
				Fasilitasi akses pembiayaan usaha
				peningkatan mutu produk melalui standarisasi dan sertifikasi serta pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran
				Pengembangan Objek Wisata Berbasis Agro-Ekologi

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor
				Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif
				prasarana pengolahan dan pascapanen komoditi unggulan
				Pendidikan Vokasi Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha (Perbengkelan, Pramuniaga, Konstruksi, Pengelasan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Berat
				Fasilitasi Pengiriman Tenaga Kerja Keluar Negeri
				Promosi Potensi dan Keunggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Investasi
				Pendataan Masyarakat Miskin
				Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berprestasi
				Universal Health Coverage (layanan kesehatan berbasis KTP)
				BPJS Ketenagakerjaan kelompok rentan
				Fasilitasi hilirisasi investasi
				Penguatan ekosistem kuliner

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	layanan publik yang profesional dan bermartabat " Luwu Malebbi"	**Perwujudan Luwu Malebbi akan di lakukan intervensi:**
				Transformasi digital layanan publik prioritas
				Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
				Optimalisasi Layanan MPP di Walenrang
				Penyediaan Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan
				Bantuan Keuangan Khusus Bagi Desa
				Bebas PBB Bagi Veteran, Mantan KDH/WKDH, Tokoh Adat dan MBR
				Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Layanan Internet Gratis Di Ruang Publik
				Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Daerah
				Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/aset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah
				pemanfaatan teknologi digital pelayanan dan pembayaran non tunai dalam rangka percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				pembentukan Perusahaan Perseroan daerah
		Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital		Penyediaan Kelengkapan Administrasi yang handal dan Penguatan Aspek Politik serta Komunikasi Publik untuk Daerah otonomi baru
		Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing	**Perwujudan Sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dilakukan intervensi :**
				Peningkatan standar mutu pendidikan dan ketersediaan bahan pembelajaran, alat pembelajaran, perlengkapan (Pemberian seragam sekolah + sepatu dan tas) serta bangunan dan ruang belajar
				Pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Wilayah Walmas
				Layanan Mobil Ambulance/Jenazah Gratis
				Peningkatan Layanan (Rawat Inap) Pada Puskesmas
				Layanan Kesehatan Care and Call Doctor (Inovasi)
				Pencegahan dan Penanggulangan Risiko Stunting, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak
				Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
				Pengembangan kebudayaan Luwu dan pelaksanaan festival budaya

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Youthcamp (Pusat Kegiatan Pemuda)
				Pembangunan Sirkuit dan Peningkatan Kualitas Lapangan Olahraga
				Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota
				Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatn
				Peningkatan Insentif Bagi Guru Ngaji, Imam, Marbot, Guru Sekolah Minggu
				Pemberian Umroh bagi petugas keagamaan
				Pelaksanaan Tabligh Akbar
				Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
				Investasi pelayanan kesehatan primer
				Penuntasan TBC
				Penurunan kematian ibu dan anak
				Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
				Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				penguatan budaya literasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi Masyarakat dengan memanfaatkan layanan perpustakaan kabupaten, sekolah, desa, maupun digital.
				peningkatan sarana dan prasarana tempat beribadah
				peningkatan kualitas perlindungan anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, peningkatan peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				peningkatan partisipasi penyelenggaran event/festival/kompetisi olahraga
				Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, pramuka, pembangunan dan pencegahan perilaku berisiko
		Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung	Pelopor Kedaulatan Pangan "Luwu Mappatuwo"	**Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan teluk bone dan sekitarnya melalui:**

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi
				Pengembangan petani muda milenial
				Peningkatan kapasitas dan daya guna penyuluh pertanian
				Pengadaan Bibit Perkebunan dan Hortikultura
				Pembangunan irigasi dan sarana pengairan lainnya untuk pertanian dan perkebunan
				Hilirisasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
				Mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi IP200-IP300 dan sumber benih mandiri berbasis masyarakat
				Pengembangan sumber daya wilayah pesisir, payau dan air tawar
				ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/ Lumbung Pangan
				Implementasi pertanian rendah karbon

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk
				desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan
				Pengembangan lahan pertanian produktif alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, Pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat, dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang di rehabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi, dan kerja sama di bidang pertanian

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu sarana prasarana Kesehatan hewan dan layanan optimalisasi reproduksi
				rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi tahan pertanian;
				produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian Sampe Survailance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang;

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf intemasional yan dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pclabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur;
				Pembangunan pangan lokal dan nabati didukung dengan : a)peningkatan produktifitas lahan pertanian; b)peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan; c) peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan; d)pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian; e)modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta f) pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
				Pembangunan pangan akuatik (blue food) : a) peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; b) penguatan kapasitas SDM; serta c)penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur merata dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur desa dan interkoneksi antar desa, antar kecamatan, dan pusat pertumbuhan ekonomi
				Peningkatan Penerangan Jalan Desa
				Pengelolaan sumber daya air
				Pengembangan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir dan SPALD
				Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Publik
				Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS melalui dukungan dan fasilitasi: ▪ penguatan regulasi dan lembaga pengelola; ▪ kolaborasi multi sektor; ▪ pemenuhan dan pemerataan akses sanitasi aman; ▪ penerapan teknologi yang tepat dan pengembangan komunikasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
				Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
				Konservasi sumberdaya air
				pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala kota;
				fasilitasi peningkatan konekvitas ketenagalistrikan
				Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit Listrik terbarukan
		Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Desa mandiri	Fasilitas desa belajar
				peningkatan kelembagaan BUMDES
				Pencapaian SDGs Desa
				Fasilitasi pembinaan Koperasi merah putih desa dan kelurahan
				Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
				membuat peta potensi wilayah desa
		Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk	Lingkungan yang sehat dan tangguh	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN LUWU	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI berdasarkan Kawasan Pembangunan Kabupaten Luwu, Kawasan Pembangunan Provinsi dan Nasional, Prioritas Sulawesi Selatan, Luwu dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029
		mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	bencana "Luwu Lestari"	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pemanfaatan kawasan konservasi pengembangan ruang terbuka hiiau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana.
				penanganan sampah sistem regional yang optimal dari dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R;
				Peningkatan mitigasi bencana melalui pengadaan Excavator amfibi dan Desa tangguh bencana
				Peningkatan layanan persampahan perkotaan
				Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
				Pembangunan TPST Lamasi Timur

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan Strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD kedalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (*multiyear*). Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat Daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih
2. Berdasarlan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM)

4. Pencapaian sustainable development goals (SDGs)
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup

Proyeksi ini disusun sebagai arah kebijakan jangka menengah yang berkelanjutan, sekaligus menjadi pijakan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030. Dengan memperhatikan siklus perencanaan dan penganggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan proyeksi tahun 2030 menjadi penting karena akan mengisi masa transisi pemerintahan menuju periode kepemimpinan kepala daerah tahun 2030–2034. Oleh karena itu, program-program yang ditetapkan dalam tahun 2030 harus Memastikan kesinambungan visi dan misi pembangunan daerah. Memberikan ruang strategis bagi kepala daerah terpilih periode 2030–2034 untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mengembangkan kebijakan pembangunan. Menjadi dasar sinkronisasi antara RPJMD 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045, sehingga tetap menjaga konsistensi arah pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, proyeksi tahun 2030 bukan hanya penutup dari siklus perencanaan RPJMD 2025–2030, tetapi juga penjembatan strategis menuju awal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun berikutnya.

Adapun program perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun kedepan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 4.1.

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN LUWU TAHUN 2026-2030

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**569.682.159.119**		**605.079.134.667**		**641.587.224.627**		**652.514.327.865**		**653.610.758.476**	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**153.575.953.587**		**158.180.112.195**		**162.913.865.737**		**167.806.947.430**		**172.838.035.853**	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	54,09	100	107.878.093.765	100	153.173.236.945	100	157.768.434.053	100	162.501.487.075	100	167.376.531.687	100	172.397.827.637	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pendidikan
	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	71,87	100		100		100		100		100		100		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	40,92	100		100		100		100		100		100		
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM																
meningkatnya penerapan kurikulum muatan lokal untuk penguatan karakter siswa	Persentase Kurikulum yang Diterapkan	%	20	100	274.925.108	100	22.670.530	100	23.350.646	100	24.051.165	100	24.772.700	100	25.515.881	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pendidikan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																
meningkatnya kualitas tenaga kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	89,96	81,34	1.608.337.266	100	276.046.112	100	284.327.495	100	284.327.495	100	301.643.040	100	310.692.331	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pendidikan
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN																
Terwujudnya pengendalian perizinan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar	Persentase usulan izin satuan pendiidkan yang diterbitkan / diperbarui	%	80	89,96		82	104.000.000	81,78	104.000.001	81,89	104.000.002	82,32	104.000.003	82,45	104.000.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pendidikan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							**243.076.591.004**		**263.164.280.109**		**283.254.599.886**		**303.347.629.258**		**323.443.449.510**	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		%														
Terjaminnya Perlindungan Jaminan Kesehatan dan Pemenuhan Standar Lanyanan Kesehatan Masyarakat	Indeks SPM	Angka	60,34	100	145.701.970.150	100	105.153.620.845	100	115.153.620.845	100	125.153.620.845	100	135.153.620.845	100	145.153.620.845	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dan upaya kesehatan masyarakat	%	100	100	144.700.000.000	100	135.000.000.000	100	145.000.000.000	100	155.000.000.000	100	165.000.000.000	100	175.000.000.000	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																
meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	%	77,27	90,27	1.347.377.278	80	2.453.163.813	93,45	2.526.758.728	94,35	2.602.561.489	95,67	2.680.638.334	96,78	2.761.057.484	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesehatan
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase toko obat, apotek, alat kesehatan, TPP, Depot air minum yang berizin	%	100	100	351.250.400	100	469.806.346	100	483.900.536	100	498.417.552	100	513.370.079	100	528.771.181	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah tangga yang menerapkan PHBS	%	100	100	619.052.100	100	1.126.657.176	100	1.160.456.891	100	1.195.270.598	100	1.231.128.715	100	1.268.062.577	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Persentase Peningkatan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit	%	80,24	100		100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	
1.02.07 PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN																
Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat	%	80	81,22		82	100.000.000	83,56	100.000.000	84,67	100.000.000	85,98	100.000.000	86,35	100.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**152.170.725.090**	**-**	**162.900.976.243**	**-**	**174.440.799.899**	**-**	**160.239.153.297**	**-**	**136.061.457.296**	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
SUMBER DAYA AIR (SDA)																
Meningkatnya kondisi irigasi dalam kondisi baik	Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	69.19	70,04	2.719.332.113	71	17.868.529.733	71,89	18.404.585.625	72,51	18.956.723.193	73,45	19.525.424.889	74,89	20.111.187.636	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
Tersedianya akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	80,41	81.02	884.431.000	82	772.500.000	81,93	795.675.000	82,04	819.545.250	82,15	844.131.608	82,26	869.455.556	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		%														
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase wilayah perkotaan yang telah dilayani oleh sistem persampahan	%	70,89	72,89	400.000.000	73	2.500.000.000	74,56	2.500.000.000	75,87	2.500.000.000	76,78	2.500.000.000	77,87	2.500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Penataan Ruang
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	75,95	75,99	376.113.676	76	229.020.000	76,08	229.020.000	76,12	229.020.000	76,15	229.020.000	76,19	229.020.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
Meningkatnya layanan drainase perkotaan/saluran pembuangan air	Persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal1,5 m)	%	80,9	81,02	557.705.895	81	4.399.595.962	81,93	4.531.583.841	82,04	4.667.531.356	82,15	4.807.557.297	82,26	4.951.784.016	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN																
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	%	80,9	90,89	800.000.000	93	800.000.000	93,47	800.000.000	94,56	800.000.000	95,67	800.000.000	96,78	800.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 PROGRAM PENATAAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
BANGUNAN GEDUNG																
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase PBG yang diterbitkan	%	0,12	0,13	5.994.023.324	0	500.000.000	0,14	500.000.000	0,14	500.000.000	0,15	500.000.000	0,15	500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase RTH yang ditingkatkan/ tertata	%	0,99985	0,99985	302.348.225	1	4.500.000.000	1,02985	4.500.000.000	0,99985	4.500.000.000	0,99985	4.500.000.000	0,99985	4.500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																
Meningkatnya kondisi jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap kabupaten	%	36,67	32,54	30.240.675.830	34	120.082.494.419	34,17	130.084.969.252	34,7	140.875.183.300	35,23	125.901.438.799	35,76	100.928.481.963	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	21,24	271.189.715	37	309.704.678	47,76	318.995.818	62,69	328.565.692	81,34	338.422.663	100	348.575.343	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	5,62	5,69	880.467.508	6	1.008.880.298	5,86	1.036.146.707	5,87	1.064.231.108	5,88 1.093.158.041	5,8 1.122.952.782	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**10.801.920.000**		**10.840.977.601**		**10.881.206.930**	**10.922.643.139**	**10.965.322.434**	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100	100	264.860.373	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100 1.000.000.000	100 1.000.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100		100		100		100		100	100	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																
meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	0,07	2,44	1.128.400.093	5	1.301.920.000	5,02	1.340.977.600	5,29	1.381.206.928	5,58	1.422.643.136	5,91	1.465.322.430	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	%	10,86	10,39	961.000.000	10	5.000.000.000	9,92	5.000.000.001	9,69	5.000.000.002	9,45	5.000.000.003	9,21	5.000.000.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	3,96	6,18	5.338.223.430	6	3.500.000.000	6,22	3.500.000.000	7,1	3.500.000.000	7,1	3.500.000.000	7,1	3.500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
							-									
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN							**9.054.784.317**		**8.969.537.846**		**9.051.803.981**		**9.130.658.101**		**9.222.177.843**	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat berkat Aparatur yang Berkompeten serta Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Daerah	Persentase capaian SPM Bidang Pelayanan Trantibun	%	100	100	2.083.199.312	100	2.378.816.726	100	2.450.181.228	100	2.523.686.665	100	2.599.397.265	100	2.677.379.182	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	95	100	25.522.623.727	100	3.010.447.993	100	3.013.761.432	100	3.019.354.275	100	3.019.234.904	100	3.029.411.951	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	90	100		100		100		100		100		100		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																
Meningkatnya pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	23,52	35,23	93.208.590	46	2.465.519.598	50,21	2.305.595.186	53,22	2.308.763.041	57,02	2.312.025.932	59,22	2.315.386.710	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 Menit	%	61,76	100		100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							**1.002.185.121**		**1.023.250.673**		**1.044.948.194**		**1.067.296.640**		**1.080.315.540**	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																
Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Kabupaten	Persentase ketersediaan lembaga kesejahteraan	%	87,5	100	11.082.965	100	17.140.405	100	17.654.617	100	18.184.256	100	18.729.783	100	19.291.677	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Sosial

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
	sosial kabupaten													
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	91,6	100	28.757.263	100	51.500.481	100	53.045.495	100	54.636.860	100 56.275.966	100 57.964.245	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	%	56,09	62	295.442.478	65	657.237.733	74	667.954.864	80	678.993.510	86 690.363.316	92 692.074.215	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	93,12	100	240.589.321	100	255.400.592	100	263.062.610	100	270.954.488	100 279.083.123	100 287.455.617	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Sosial

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
	daerah kabupaten													
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	100	100	18.980.500	100	20.905.910	100	21.533.087	100	22.179.080	100 22.844.452	100 23.529.786	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Sosial
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**57.836.771.310**		**58.982.184.526**		**69.316.201.215**	**49.504.806.908**	**51.207.696.032**	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							**4.000.000.000**		**4.161.992.658**		**4.208.852.437**	**4.257.118.010**	**4.306.831.551**	
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
Meningkatnya ketersediaan rencana tenaga kerja daerah	persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	%	N.A	100		100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100 80.000.000	100 90.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Tenaga Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	50,64	52,77	1.095.131.625	54	3.000.389.350	54,55	3.132.393.689	55,44	3.148.365.499	56,6 3.164.816.464	57,4 3.181.760.958	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
meningkatnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	%	20,97	21,43	21.058.841	8	31.485.750	10,01	32.430.322	11,89	33.403.232	12,26 34.405.329	13,15 35.437.489	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Meningkatnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan/penyedia kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja	Persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	%	50,64	52,77	928.815.264	54	968.124.900	54,55	997.168.647	55,44	1.027.083.706	56,6 1.057.896.217	57,4 1.089.633.104	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Tenaga Kerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**546.045.616**		**551.909.285**		**557.948.866**	**564.169.632**	**570.577.022**	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	4,91	4,95	22.407.422	5	41.185.644	4,98	42.421.213	5	43.693.850	5,12	45.004.665	5,2	46.354.805	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan	Angka	1,578	1,05	69.289.016	1	128.519.296	0,98	132.374.875	0,78	136.346.122	0,25	140.436.505	0	144.649.600	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase perempuan kepala keluarga yang diberdayakan	%	20	22		23	200.590.000	24	200.590.001	25	200.590.002	26	200.590.003	27	200.590.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase kebijakan/program yang berbasis data gender dan anak yang tersedia dalam sistem.	%	100	100		100	20.291.676	100	20.900.426	100	21.527.439	100	22.173.262	100	22.838.460	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																
terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase peningkatan Peringkat Kabupaten Layak Anak	%	60	62	3.150.000	63	5.459.000	65	5.622.770	66	5.791.453	67	5.965.197	68	6.144.153	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,017	100		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							**1.631.482.969**		**1.646.109.645**		**1.661.175.123**		**1.676.692.565**		**1.692.675.530**	
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
KEMANDIRIAN PANGAN																
Meningkatnya Ketersediaan Energi	Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hr	7399	6137		6.200	643.927.100	6300	643.927.101	6400	643.927.102	6500	643.927.103	6700	643.927.104	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketahanan Pangan
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi	kkal/kapita/hr	1.789 (85,19 %)	2.300 (109,52 %)	333.235.407	2.275 (108,33 %)	390.413.907	2.250 (104,65 %)	402.126.324	2.225 (103,49 %)	414.190.114	2.200 (102,33 %)	426.615.817	2175 (101,16 %)	439.414.292	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketahanan Pangan
	Tingkat Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	56,80 (99,65%)	62,00 (108,77 %)		62,25 (109,21 %)		62,5 (109,64 %)		62,75 (110,09 %)		63 (110,53 %)		63,25 (110, 96 %)		
Terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Rasio Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	%	0,24 (24%)	0,37 (37%)		0,57 (57 %)	500.000.000	0,59 (59%)	500.000.000	0,73 (73%)	500.000.000	0,86 (86 %)	500.000.000	0,99 (99 %)	500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketahanan Pangan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa/Kelurahan Tahan Pangan	%	80,18	82,38	36.421.914	85	45.641.962	85,46	47.011.220	85,9	48.421.557	86,34	49.874.204	86,78	51.370.430	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketahanan Pangan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																
meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Keamanan Pangan segar asal tumbuhan yang di Uji	%	N.A	100	6.548.903	100	51.500.000	100	53.045.000	100	54.636.350	100	56.275.441	100	57.963.704	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Ketahanan Pangan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							**3.041.505.430**		**2.845.750.591**		**2.850.123.110**		**2.854.626.804**		**2.859.265.607**	
2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM																
Meningkatnya ketersediaan tanag lahan untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaiakn tepat waktu	%	0	16,67	100.000.000	33	2.800.000.000	50	2.600.000.000	66,67	2.600.000.000	83,33	2.600.000.000	100	2.600.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanahan
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	66	90	18.168.026	90	31.138.987	90	32.073.156	90	33.035.351	90	34.026.412	90	35.047.204	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanahan
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan		0	16,67	100.000.000	33	100.000.000	50	100.000.000	66,67	100.000.000	83,33	100.000.000	100	100.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanahan
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE																
Meningkatnya penyelesaian redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase penyelesaian redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang diselesaikan	%	0	16,67	5.451.862	33	7.366.418	50	7.587.410	66,67	7.815.033	83,33	8.049.484	100	8.290.968	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanahan
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH																
meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Aset tanah pemda yang bersertifikat	%	26,25	30,41	74.415.024	33	203.000.025	36,92	206.090.025	38,25	209.272.726	40,22	212.550.908	45,09	215.927.435	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanahan
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							**4.239.673.507**		**4.346.613.712**		**4.456.762.124**		**4.770.214.987**		**4.687.071.436**	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
LINGKUNGAN HIDUP																
meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP (Kebijakan, Rencana, dan/atau Program)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	152.817.774	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase peningkatan nilai indeks kualitas air	%	68,24	100	76.114.569	100	180.948.103	100	186.376.546	100	191.967.843	100	197.726.878	100	203.658.684	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	38,27	40,22	3.588.273	42	90.725.025	44,81	93.446.776	46,27	96.250.180	47,09	99.137.685	49,08	102.111.815	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase izin lingkungan dan PPLH yang dibina dan diawasi sesuai ketentuan peraturan perundangan	%	54,31	60,31	11.107.890	62	7.344.816	62,51	7.565.160	63,47	7.792.115	64,51 8.025.878	65,32 8.266.655	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	0	100		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100 50.000.000	100 50.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	20,23		40	105.000.000	50,23	105.000.000	57	105.000.000	60,31 105.000.000	63,2 105.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	%	7,26	8,14	4.563.261	8	20.000.000	8,67	20.000.000	8,78	20.000.000	8,87 20.000.000	8,96 20.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	%	96,31	100	9.596.587.472	100	3.285.655.563	100	3.384.225.230	100	3.485.751.986	100 3.590.324.546	100 3.698.034.282	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Lingkungan Hidup
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**2.057.303.727**		**2.074.022.839**		**1.191.243.525**	**608.980.829**	**627.250.255**	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	3,5	16	204.507.906	35	1.733.919.938	57	1.740.937.536	81	848.165.662	100 255.610.632	100 263.278.951	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Administrasi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pcrscntase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	35,57	36		58		78		91		91,67		92		Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL																
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan	%	85,02	100	72.065.060	100	88.139.345	100	90.783.526	100	93.507.032	100	96.312.242	100	99.201.610	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan		97,39	97,42		97		97,5		97,55		97,6		97,65		
	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan		48,05	49		50		55		65		70		75		
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan		42,99	32		47		64		83		98		98		
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependuudkan yang dimanfaatkan	%	99	100	202.524.222	100	227.339.118	100	234.159.291	100	241.184.070	100	248.419.592	100	255.872.180	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase data kependudukan yang tersedia dalam profil kependudukan	%	100	100	7.675.074	100	7.905.326	100	8.142.486	100	8.386.761	100	8.638.363	100	8.897.514	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**2.744.746.350**		**2.745.338.742**		**2.745.948.905**		**2.746.577.373**		**2.747.224.695**	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA																
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa yang dilakukan penataan desa	%	87,88	89		90	125.000.000	92,36	125.000.001	93,45	125.000.002	94,56	125.000.003	96,78	125.000.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA																
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase program kerja sama antar desa yang berlanjut setelah tahap awal pelaksanaan	%	39,13	98,99		99	19.746.350	100	20.338.741	100	20.948.903	100	21.577.370	100	22.224.691	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya status legalitas Bumdes	Persentase Bumdes yang terkelola dengan baik	%	50,2203	52,86	3.842.379.508	55	500.000.000	57,2687	500.000.000	59,4713656	500.000.000	61,6740088	500.000.000	63,876652	500.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tercapainya SDGs Desa	Indeks SDGs Desa	%	4,83092	7,25		10	100.000.000	12,0773	100.000.000	14,4927536	100.000.000	16,9082126	100.000.000	19,3236715	100.000.000	
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
Meningkatnya pemberdayaan lembaga masyarakat desa	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	%	16,91	21,74	783.182.134	23	2.000.000.000	25,12	2.000.000.000	27,54	2.000.000.000	28,99	2.000.000.000	31,4	2.000.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**8.298.230.755**		**8.547.177.678**		**8.803.593.009**		**8.887.939.307**		**8.974.815.996**	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fretility Rate (TFR)	Angka	2,33	2,35	483.561.141	2	504.213.854	2,16	519.340.270	2,19	534.920.478	2,05	550.968.092	2	567.497.135	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pengendalian Penduduk

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																dan Keluarga Berencana
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	54,7	60	5.476.778.466	73	5.648.081.535	73	5.817.523.981	73	5.992.049.701	73	5.992.049.701	73	5.992.049.701	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,1	25		10		10		10		10		10		
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Persentase BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang aktif dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%	80	100	2.049.404.714	100	2.145.935.366	100	2.210.313.427	100	2.276.622.830	100	2.344.921.514	100	2.415.269.160	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							-									

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							**9.054.310.909**		**9.554.310.909**		**10.054.310.909**		**10.054.310.909**		**10.054.310.909**	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
Terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat pelayanan lalu lintas (V/C)	%	0,48	0,48	6.068.796.475	0	9.000.000.000	0,5	9.500.000.000	0,52	10.000.000.000	0,53	10.000.000.000	0,55	10.000.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perhubungan
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Pelabuhan Yang Terpelihara	%	60	100	49.669.038	100	54.310.909	100	54.310.909	100	54.310.909	100	54.310.909	100	54.310.909	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**4.658.781.276**		**4.798.544.714**		**4.942.501.056**		**5.090.776.087**		**5.243.499.369**	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							3.228.633.640		3.325.492.649		3.425.257.429		3.528.015.152		3.633.855.606	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik yang disampaikan, termasuk keakuratan, relevansi, dan	%	80	82,4	1.291.753.050	83		84,76		85,02		86,7		87,1		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	kecepatan informasi.															
	Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	62,44		64		65,22		66,82		67,41	68,09			
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																
Terintegrasinya aplikasi daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	19,29	19,29	785.122.710	21	1.430.147.636	21,05	1.473.052.065	22,81	1.517.243.627	22,81	1.562.760.935	22,81	1.609.643.763	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Komunikasi dan Informatika
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							**4.460.964.678**		**4.649.368.750**		**4.815.099.814**		**5.985.802.810**		**6.161.626.896**	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																
Meningkatnya pembinaan dari pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	80,02	100	10.235.868	100	20.630.764	100	21.249.687	100	21.887.178	100	22.543.793	100	23.220.107	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Koperasi,

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																UKM dan Perindustrian
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI																
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	41,62	14,88		17	77.250.000	18,6	75.000.001	20,23	75.000.002	22,09	75.000.003	23,95	75.000.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Koperasi, UKM dan Perindustrian
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	72,29	100	24.992.940	100	230.040.239	100	236.941.446	100	244.049.689	100	251.371.180	100	258.912.315	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Koperasi, UKM dan Perindustrian
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	%	11,73	39,06	24.999.154	40	20.630.946	41,25	50.000.001	42,53	50.000.002	43,16	50.000.003	43,69	50.000.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Koperasi, UKM dan Perindustrian
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Meningkatnya skala usaha pelaku UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	%	6,4	8,02	10.059.515	10	20.249.875	11,09	21.249.875	12,55	21.887.371	13,96	22.543.992	23.220.312	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Koperasi, UKM dan Perindustrian
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Berkembangnya produk pelaku UMKM	Persentase produk pelaku UMKM yang dikembangkan	%	99	100	20.249.875	100	4.092.162.854	100	4.244.927.740	100	4.402.275.572	100	4.564.343.839	4.731.274.154	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Koperasi, UKM dan Perindustrian
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							**1.295.197.436**		**1.313.652.078**		**1.317.861.640**		**1.324.227.489**	**1.329.754.314**	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya nilai investasi daerah berbasis sumber daya unggulan	Realisasi total investasi terhadap target investasi	%	12,1	20,36	37.585.115	30	52.151.635	34,02	53.716.184	36,9	55.327.669	38,09	56.987.499	39,22 58.697.124	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penanaman Modal
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	%	-6,06	5,22	44.624.305	8	1.000.000.000	8,29	1.015.298.719	8,56	1.016.257.680	10,35	1.019.275.411	12,09 1.021.353.673	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Penanaman Modal
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	99,58	100	41.627.476	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penanaman Modal
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	31.962.778	100	53.045.801	100	54.637.175	100	56.276.291	100	57.964.579	100	59.703.517	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penanaman Modal
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase peningkatan jumlah pengguna yang dapat mengakses sistem informasi penanaman modal secara real-time	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penanaman Modal

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**12.758.388.673**		**12.763.024.407**		**22.757.799.213**		**1.762.717.263**		**3.065.438.112**	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	%	90,01	90,39	38.578.743	91	202.600.000	91	202.600.001	91,49	202.600.002	91,92	202.600.003	92,05	202.600.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																
meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan jumlah medali yang diperoleh dalam event olahraga nasional dan internasional	%	9,29	10,33	2.950.491.492	15	12.451.264.238	15,92	12.451.264.238	16,22	22.451.264.238	16,94	1.451.264.238	17,07	2.758.919.495	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan	%	90,35	100	137.927.123	100	104.524.435	100	109.160.168	100	103.934.973	100	108.853.022	100	103.918.613	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							**103.701.012**		**106.812.042**		**110.016.403**		**113.316.896**		**116.716.402**	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																
Tercapainya kolaborasi, intgrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	71.359.594	100	103.701.012	100	106.812.042	100	110.016.403	100	113.316.896	100	116.716.402	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Statistika
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							**80.000.000**		**46.042.423**		**47.423.696**		**48.846.407**		**50.311.799**	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	52,09	100	35.263.100	100	80.000.000	100	46.042.423	100	47.423.696	100 48.846.407	100 50.311.799	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Persandian
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							**2.698.603.000**		**2.778.943.001**		**2.861.693.201**	**2.946.925.909**	**3.034.715.597**	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan masyarakat yang dikembangkan	%	70,57	71,28	860.177.990	72	1.959.299.999	73,49	2.018.078.999	74,77	2.078.621.369	75,02 2.140.980.010	76,08 2.205.209.411	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradional yang dikembangkan	%	77,24	77,89	228.001.532	78	255.670.238	79,19	263.340.345	80,02	271.240.555	80,78 279.377.772	81,67 287.759.105	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kebudayaan
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
Meningkatnya sejarah daerah yang dibina	Persentase Sejarah Kabupaten yang dilakukan pembinaan	%	0	10		20	20.603.000	30	20.603.001	40	20.603.002	50 20.603.003	60 20.603.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kebudayaan
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	68,61	75	442.063.459	80	463.029.763	85	476.920.656	90	491.228.275	95	505.965.124	100	521.144.077	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kebudayaan
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							**783.848.934**		**807.364.402**		**831.585.334**		**856.532.894**		**882.228.881**	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																
meningkatnya pembinaan dan kualitas layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang ber Standar Nasional Perpustakaan	Angka	20,89	24,59	800.000.000	27	783.848.934	30,98	807.364.402	40,89	831.585.334	60,98	856.532.894	68,98	882.228.881	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perpustakaan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							**42.768.314**		**43.751.364**		**44.763.906**		**45.806.824**		**46.881.030**	
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	80	90	35.430.272	92	32.768.314	92,49	33.751.363	93	34.763.904	93,67	35.806.821	93,76	36.881.026	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kearsipan
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Dokumen Arsip daerah yang diselamatkan dan dilindungi	%	65,89	70,25		72	10.000.000	72,9	10.000.001	73,01	10.000.002	73,89	10.000.003	74,21	10.000.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kearsipan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							**48.815.046.104**		**50.149.776.494**		**51.636.707.798**		**53.147.167.039**		**54.710.339.858**	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							**9.326.380.733**		**9.606.172.155**		**9.894.357.320**		**10.191.188.039**		**10.496.923.680**	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0,33	1,5	916.304.000	2	4.285.572.714	1,97	4.414.139.895	2,09	4.546.564.092	3,43	4.682.961.015	4,33	4.823.449.846	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	0,64	1,89	587.294.150	2	4.500.000.000	3,22	4.635.000.000	4,54	4.774.050.000	6,78	4.917.271.500	7,89	5.064.789.645	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perikanan
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan pengawasan	%	87,65	88,98	-	92	50.000.000	96,78	51.500.000	100	53.045.000	100	54.636.350	100	56.275.441	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	%	56,26	57,39	15.431.600	59	490.808.019,00	59,7	505.532.260	60,9	520.698.227	62,12	536.319.174	63,36	552.408.749	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perikanan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							**1.725.448.819**		**1.766.826.283**		**1.809.445.072**		**1.853.342.424**		**1.898.556.697**	
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																
Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	9,89	9,95	134.995.000	10	1.160.257.003	10,26	1.195.064.713	10,69	1.230.916.655	10,71	1.267.844.154	10,89	1.305.879.479	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pariwisata
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	75,31	82,98	17.987.000	85	218.991.816	86,78	225.561.570	88,79	232.328.417	90,79	239.298.270	92,74	246.477.218	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pariwisata
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	3,03	-	6	150.000.000	7,89	150.000.000	10	150.000.000	11,11	150.000.000	13,33	150.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pariwisata

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																
berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	Persentase Pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	0	15,15	24.965.000	30	196.200.000	31,58	196.200.000	32,5	196.200.000	33,33	196.200.000	35,56	196.200.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pariwisata
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							**33.295.832.415**		**34.294.707.387**		**35.323.548.609**		**36.383.255.067**		**37.474.752.719**	
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																
Meningkatnya produksi hewan ternak	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	5,53	8,67	5.561.972.873	9	1.899.951.460	10,21	1.956.950.004	11,34	2.015.658.504	12,56	2.076.128.259	13,47	2.138.412.107	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanian
Meningkatnya benih yang terdistribusi ke petani	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman hortikultura	%	16,09	4,12		10	18.045.871.750	11,89	18.587.247.903	12,56	19.144.865.340	13,56	19.719.211.300	16,67	20.310.787.639	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanian
	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman perkebunan	%	0,17	2,34		11		11,78		12,67		13,46		14,56		
	Persentase peningkatan produksi komoditi tanaman pangan	%	-1,99	2,5		12		12,89		13,67		14,78		15,88		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																
Meingkatnya luas areal yang terfasilitasi prasarana pertanian	Persentase luas sawah yang beririgasi	%	89,9	90,8	5.727.989.530	95	11.646.698.953	95,69	11.996.099.922	96,78	12.355.982.919	97,87	12.726.662.407	98,09	13.108.462.279	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanian
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER																
Meningkatnya pengendalian hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-22,32	11	4.762.500	11	99.999.729	11,4	102.999.721	11,6	106.089.712	11,8	109.272.404	12	112.550.576	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanian
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN																
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin Usaha pertanian yang diterbikan	%	100	100		100	20.852.000	100	21.477.560	100	22.121.887	100	22.785.543	100	23.469.110	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanian
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																
meningkatnya kualitas layanan penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	76,22	84,14	1.753.963.400	85,22	1.582.458.523	86,39	1.629.932.279	87,01	1.678.830.247	87,92	1.729.195.154	88,15	1.781.071.009	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pertanian
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							**4.151.113.838**		**4.261.467.254**		**4.373.101.272**		**4.489.114.311**		**4.608.607.741**	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh rekomensasi izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	%	97	97		98	6.000.000	98	6.000.001	99	6.000.002	99 6.000.003	100 6.000.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perdagangan
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase kecamatan yang telah memiliki sarana distribusi perdagangan	%	90,1	95,4	68.692.324	100	3.326.823.435	100	3.426.628.138	100	3.529.426.982	100 3.635.309.792	100 3.744.369.085	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perdagangan
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
terjaganya kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	80,6	82,97	208.435.147	85	183.233.467	86,78	185.730.471	88,79	188.302.385	90,34 190.951.456	92,67 193.680.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perdagangan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya pelaku usaha yang beriorientasi ekspor	Persentase pertumbuhan ekspor daerah	%	5,67	6,68	16.425.300	8	400.000.000	8,7	401.000.000	9,23	400.000.000	10,76	400.000.000	11,67	400.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perdagangan
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	91,72	100	61.464.614	100	106.306.936	100	109.496.144	100	112.781.028	100	116.164.459	100	119.649.393	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perdagangan
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan	%	19,89	20,38	-	22	128.750.000	23,45	132.612.500	24,56	136.590.875	25,68	140.688.601	27,68	144.909.259	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perdagangan
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							**279.553.838**		**182.886.954**		**197.539.064**		**190.550.736**		**191.682.559**	
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembangunan sektor industri	%	33,33	33,33	301.060.202	33	243.300.000	66,67	146.000.000	66,67	160.000.000	66,67	152.340.000	66,67	152.780.000	Perangkat Daerah Pengampuh

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
	dan kawasan industri													Urusan Perindustrian
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang diawasi	%	0,777	1	-	1	15.150.000	5	15.150.001	10	15.150.002	15 15.150.003	16 15.150.004	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perindustrian
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase sistem informasi yang dikelola	%	8,75	100	9.991.361	100	21.103.838	100	21.736.953	100	22.389.062	100 23.060.733	100 23.752.555	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perindustrian
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							**36.716.461**		**37.716.461**		**38.716.461**	**39.716.461**	**39.816.461**	
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Persentase luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	9,8	10,7	7.111.728	12	36.716.461	12,76	37.716.461	13,87	38.716.461	17,76 39.716.461	15,67 39.816.461	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Transmigrasi
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							**305.032.892.907**		**314.644.601.635**		**323.507.804.220**	**334.821.501.391**	**337.367.902.423**	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH							**18.803.529.443**		**19.522.117.267**		**20.266.876.322**	**21.036.588.926**	**21.835.927.424**	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Persentase kenaikan capaian LPPD	%	1,35	1,35	301.379.360	2	394.377.896	2	406.209.233	2,2	418.395.510	2,8	430.947.375	3,1	443.875.796	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan sekretariat Daerah
Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas keagamaan	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	100	100	1.790.106.536	100	8.418.589.411	100	8.671.147.093	100	8.931.281.506	100	9.199.219.951	100	9.475.196.550	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan sekretariat Daerah
Tersedianya Produk hukum sesuai kebutuhan daerah (Perda dan Perbup)	Persentase ketersediaan produk hukum daerah	%	100	100	301.379.360	100	774.280.123	100	797.508.527	100	821.433.782	100	846.076.796	100	871.459.100	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan sekretariat Daerah
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																
meningkatnya akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM yang memperoleh akses lembaga keuangan	%	52,09	100	349.846.776	100	513.000.000	100	524.000.000	100	532.000.000	100	534.510.000	100	534.872.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	%	8	9	627.916.135	9	759.684.996	9	782.475.546	9	805.949.812	9	830.128.307	9	855.032.156	
4.02 SEKRETARIAT DPRD																
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terlaksananya penyusunan Perda sesuai dengan Prolegda	Persentase penyelesaian penyusunan PERDA sesuai Prolegda	%	85,71	100	170.553.350	100	3.971.798.509	100	4.170.388.434	100	4.378.907.856	100	4.597.853.248	100	4.827.745.911	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	3.349.337.805	100	3.971.798.509	100	4.170.388.434	100	4.378.907.856	100	4.597.853.248	100	4.827.745.911	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan sekretariat DPRD
5.01 PERENCANAAN							**1.523.000.000**		**1.568.690.000**		**1.615.750.700**		**1.664.223.221**		**1.714.149.918**	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan nomenklatur dan anggaran antara program RPJMD dengan RKPD	%	100	100	735.886.913	100	753.000.000	100	775.590.000	100	798.857.700	100	822.823.431	100	847.508.134	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perencanaan
	Persentase Perangkat Daerah dengan predikat kinerja program "Sangat Tinggi"	%	75,22	82		83		84		85		86		87		
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase perangkat daerah yang dikoordinasikan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah bidang koordinasi perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	146.159.596	100	400.000.000	100	412.000.000	100	424.360.000	100	437.090.800	100	450.203.524	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase perangkat daerah yang dikoordinasikan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah bidang koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	143.835.659	100	370.000.000	100	381.100.000	100	392.533.000	100	404.308.990	100	416.438.260	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Perencanaan
							-									
5.02 KEUANGAN							**273.328.095.809**		**281.799.588.684**		**289.496.645.344**		**299.463.033.434**		**300.685.942.437**	
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah	Persentase penyerapan anggaran	%	93,95	100	290.682.165.145	100	268.519.767.574	100	276.875.360.602	100	284.481.621.420	100	294.346.070.062	100	295.476.452.164	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Keuangan
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
BARANG MILIK DAERAH																
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penatausahaan BMD yang baik dan benar	%	99	100	788.042.158	100	545.000.000	100	578.000.000	100	583.409.000	100	597.400.000	100	599.340.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Keuangan
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Keuangan
meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	%	9,97	10,32	2.124.886.865	15	4.263.328.235	15,33	4.346.228.082	15,75	4.431.614.924	16,51	4.519.563.372	17,08	4.610.150.273	
5.03 KEPEGAWAIAN							**4.000.000.000**		**4.160.000.000**		**4.326.400.000**		**4.499.456.000**		**4.679.434.240**	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																
Meningkatnya Kualitas Penilaian kinerja ASN	Pesentase pegawai dengan SKP Bernilai baik	%	85,92	100	516.271.806	100	1.333.333.333	100	1.386.666.667	100	1.442.133.333	100	1.499.818.667	100	1.559.811.413	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	5,48	10,23	1.398.670.112	12	1.333.333.333	12,61	1.386.666.667	13,92	1.442.133.333	14,82	1.499.818.667	15,22	1.559.811.413	
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	4,62	6,22	405.171.425	7	1.333.333.333	8,03	1.386.666.667	10,45	1.442.133.333	11,68	1.499.818.667	12,09	1.559.811.413	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							**1.423.146.941**		**1.465.841.349**		**1.509.816.589**		**1.555.111.087**		**1.601.764.420**	
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
meningkatnya kualitas aparatur sipil negara	Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai ketentuan	%	66,24	70,25	502.797.471	73	1.423.146.941	74,31	1.465.841.349	76,31	1.509.816.589	77,59	1.555.111.087	78,27	1.601.764.420	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Pendidikan dan Pelatihan
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**947.000.000**		**970.000.000**		**979.200.000**		**1.130.580.000**		**1.214.000.000**	
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
Meningkatnya jumlah kelitbangan daerah yang mendukung kebijakan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	100	552.872.734	100	813.000.000	100	826.000.000	100	867.200.000	100	896.580.000	100	980.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penelitian dan Pengembangan
Program Riset dan Inovasi Daerah																
meningkatnya kualitas riset dan ekosistem inovasi	Persentase inovasi daerah yang memiliki kematangan >75 dalam IID pada tahun pelaporan	%	30	40	108.961.180	50	134.000.000	60	144.000.000	70	112.000.000	80	234.000.000	80	234.000.000	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Penelitian dan Pengembangan
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6.01 INSPEKTORAT DAERAH							**5.008.120.714**		**5.158.364.335**		**5.313.115.265**		**5.472.508.723**		**5.636.683.985**	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya transparansi tata kelola dan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Kabupaten	%	90	90	1.496.523.197	90	4.534.150.099	90	4.670.174.602	90	4.810.279.840	90	4.954.588.235	90	5.103.225.882	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Inspektorat Daerah
	Persentase tindak lanjut temuan BPK	%	85	85		85		85		85		85		85		
	Persentase tindak lanjut temuan BPKP	%	90	92		90		90		90		90		90		
	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	%	100	100		90		90		90		90		90		
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase rekomendasi hasil perumusan kebijakan yang ditindaklanjuti dalam kebijakan daer ah	%	100	100	569.150.263	100	473.970.615	100	488.189.733	100	502.835.425	100	517.920.488	100	533.458.103	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Inspektorat Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN																
7.01 KECAMATAN							**9.038.862.204**		**9.448.862.204**		**9.561.862.204**		**9.611.262.204**		**9.638.862.204**	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan	%	100	100	149.475.066	100	644.333.920	100	744.333.920	100	684.333.920	100 692.333.920	100 944.333.920	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	%	100	100	5.500.303.631	100	6.622.235.346	100	6.722.235.346	100	6.732.235.346	100 6.713.635.346	100 6.922.235.346	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	30.360.000	100	142.860.360	100	242.860.360	100	382.860.360	100 422.860.360	100 142.860.360	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kecamatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Persentase cakupan pemerintahan umum	%	100	100	721.900.784	100	1.243.295.738	100	1.343.295.738	100	1.363.295.738	100 1.383.295.738	100 1.243.295.738	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	59.300.000	100	386.136.840	100	396.136.840	100	399.136.840	100	399.136.840	100	386.136.840	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kecamatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**3.271.183.706**		**3.369.319.216**		**3.470.398.793**		**53.618.639.943**		**3.637.616.893**	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	95	100	619.945.907	100	700.509.911	100	721.525.208	100	743.170.965	100	765.466.094	100	788.430.076	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Partai Politik yang Melaksanakan Fungsinya sesuai Peraturan	%	77,67	100	1.180.029.904	100	1.346.148.576	100	1.386.533.033	100	1.428.129.024	100	51.515.102.081	100	1.470.972.895	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029	2030	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target Rp	Target Rp	
	Perundang-Undangan													
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	51	100	3.490.729	100	327.628.545	100	337.457.401	100	347.581.123	100 358.008.557	100 368.748.814	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	50	100	48.901.489	100	13.155.010	100	13.549.660	100	13.956.150	100 14.374.834	100 14.806.079	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target dan Anggaran										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
meningkatnya kualitas penanganan penyelesaian konflik daerah	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	85	100	622.598.999	100	883.741.664	100	910.253.914	100	937.561.531	100	965.688.377	100	994.659.029	Perangkat Daerah Pengampuh Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
X NON URUSAN																
X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					**740.570.964.185**		**723.663.836.644**		**745.285.926.642**		**771.010.785.233**		**834.062.217.527**		**822.387.998.416**	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan dan penerapan SOP Tupoksi Perangkat Daerah	100	100	100	740.570.964.185	100	723.663.836.644	100	745.285.926.642	100	771.010.785.233	100	834.062.217.527	100	822.387.998.416	Semua Perangkat Daerah
					1.593.287.451.679		**1.717.340.751.994**		**1.786.959.805.384**		**1.870.090.984.089**		**1.987.279.922.876**		**1.932.561.174.302**	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu gambaran capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Tercapainya suatu kinerja akan terlihat dari capaian indikator sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi *Indikator Kinerja Makro*, *Indikator Kinerja Utama (*IKU*)* maupun *Indikator Kinerja Daerah (IKD)* pada akhir periode masa jabatan.

4.2.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro adalah ukuran atau parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi umum perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja pembangunan daerah secara makro.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Makro 2025-2030
Kabupaten Luwu

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	6,12	6,39	6,53	6,63	6,72	7,00	
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	59,73	74,23	75,09	76,3	77,61	78,21	78,90	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi	%	3,29	3,298	3,3	3,31	3,32	3,34	3,35	
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	10,55	10,46	10,35	10,23	9,21	8,22	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,2	3,05	2,87	2,65	2,41	2,00	
6	Gini Ratio	%	0,319	0,329	0,326	0,324	0,322	0,32	0,317	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,86	74,02	74,6	74,8	75,05	75,27	75,98	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N.A	20,77	23,22	25,92	28,49	31,07	33,87	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	48,48	76,54	76,75	76,96	77,17	77,38	77,59	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Luwu diolah Tahun 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh kepala daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu periode 2025-2030 tertuang pada tabel berikut :

Tabel. 4.3
Indikator Kinerja Utama 2025-2030
Kabupaten Luwu

NO.	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE TAHUN* 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	59,73	74,23	75,09	76,3	77,61	78,21	78,90	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	6,12	6,39	6,53	6,63	6,72	7,0	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,2	3,05	2,87	2,65	2,41	2	
4.	Pengeluaran perkapita	*Rp Juta*	11.121	12.482	13.789	14.621	15.299	16.222	17.11	
5.	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	10,55	10,46	10,35	10,23	9,21	8,22	
6.	SAKIP	*Skor*	62,18	62,3	62,48	62,66	62,8	63,11	63,25	
7.	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	*Skor*	79,92	80,37	81,51	81,92	82,3	82,86	83,11	
8.	Indeks Inovasi Daerah	*Skor*	44,22	44,4	44,87	45,18	45,85	46,01	46,37	
9.	Indeks Pembangunan Manusia	*Poin*	73,86	74,02	74,6	74,8	75,05	75,27	75,98	
10.	Indeks Ekonomi Hijau	*Skor*	49,82	50,22	50,66	51,41	51,88	52,6	53	
11.	Indeks Ekonomi Biru	*Skor*	90,31	101,14	111,98	122,82	133,65	144,49	155,33	
12.	Produktivitas Pertanian	*Ton/ha*	6,1	6,5	7	7,8	8	8,06	8,44	
13.	Produktivitas Perikanan Budidaya	*Ton/ha*	8,04	10,22	10,36	11,05	11,36	11,98	12,03	
14.	Indeks Ketahanan Pangan	*Skor*	82,23	82,77	83,05	83,61	83,71	84,06	84,55	
15.	Tingkat Konektivitas Wilayah	%	13,2	14,02	14,98	15,14	15,84	16,01	16,49	
16.	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	%	10,89	10.66	10,75	10,89	10,98	11,15	11,25	
17.	Persentase desa mandiri	%	14,49	19,32	21,74	24,15	26,57	28,99	30,92	
18.	Penurunan Intensitas emisi gas rumah kaca	%	N.A	20,77	23,22	25,92	28,49	31,07	33,87	
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*Skor*	48,48	76,54	76,75	76,96	77,17	77,38	77,59	

Sumber : BPS dan Hasil Olah Data Tim Penyusun RPJMD Tahun 2025

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah (IKD) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah tersebut sangat bergantung kepada data dan informasi yang diolah sehingga dapat dibandingkan antara target yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Indikator Kinerja ini juga diperlukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja tahun 2024 serta penetapan target indikator kinerja Kabupaten Luwu tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan									
	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,23	82,77	83,05	83,61	83,71	84,06	84,55	
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,8	7,12	6,86	6,61	6,35	6,09	5,83	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	77,00	79,90	81,34	82,68	83,67	84,56	85,78	
	Indeks pertanaman padi	Poin	180,0	188	208	228	247	269	289	
	Proporsi sawah irigasi	%	10,00	10,66	10,75	10,89	10,98	11,15	11,25	
	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	25.019,29	26.019,00	904,87	906,79	908,83	910,33	912,27	
	Kapasitas Air Baku	M3/det	N.A	5,31	6,09	6,86	7,64	8,41	9,96	
	Lingkungan Hidup Berkualitas									
	Akses air minum jaringan perpipaan	%	14,69	25,66	25,97	26,34	26,76	27,16	27,70	
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	42,77	60,00	63,00	65,00	68,00	70,00	73,00	
	Akses Rumah Tangga Terhadap air minum aman	%	21,71	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	48,48	76,54	76,75	76,96	77,17	77,38	77,59	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	4,45	6	8	8,5	9	9,5	10	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	14,88	16,70	17,10	18,20	19,25	20,13	21,12	
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	3,12	21,86	24,04	27,32	30,59	33,87	37,15	
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	N.A	20,77	23,22	27,32	30,59	33,87	37,15	
	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	1,5	1,84	2,18	2,53	2,87	3,21	4,56	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indeks Risiko Bencana	Poin	186,59	189,22	188	185,58	180,27	179	170,47	
	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,36	0,38	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	
	Demografi									
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,31	1,3	1,25	1,2	1,15	1,1	1	
	Rasio Penduduk	%	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	127,68	
	Kepadatan Penduduk	Org/km2	129	130	131	133	135	136	138	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
	Kesejahteraan Ekonomi									
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	6,12	6,39	6,53	6,63	6,72	7,0	
	Tingkat Kemiskinan	%	11,71	10,55	10,46	10,35	10,23	9,21	8,22	
	PDRB Per Kapita	Rp Juta	59,73	63,89	67,23	69,59	73,76	76,13	79,46	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14	3,2	3,05	2,87	2,65	2,41	2	
	Indeks Gini	Angka	0,319	0,329	0,326	0,324	0,322	0,32	0,317	
	Kesehatan Untuk Semua									
	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,86	73,86	74,02	74,6	74,8	75,05	75,27	
	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,52	73,83	74,15	74,49	74,86	75,25	75,67	
	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,37	0,39	0,40	0,43	0,48	0,50	0,51	
	Prevalensi Stunting	%	23,60	22,34	20,33	18,32	16,31	14,3	12,29	
	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	%	58,52	59	59	60	61	62	63	
	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	8	7	6	5	3	2	1	
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 ribu kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	166,29	112,2	111,31	110,41	109,52	108,62	107,73	
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	54	56,766	59,882	62,998	66,114	69,23	72,346	
	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment success rate)	%	89	92,96	93,52	94,07	94,62	95,18	95,73	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	88,42	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pendidikan Berkualitas Yang Merata									
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,91	9,07	9,16	9,26	9,35	9,45	9,55	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,54	14,72	14,89	14,92	14,95	14,98	
	Angka Literasi	%	65,59	66,78	68,36	72,55	74,74	75,67	78,28	
	Angka Numerasi	%	65,19	65,89	67,94	70,14	72,15	73,18	74,15	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62,35	64,28	66,78	68,7	69,8	70,28	71,23	
	Indeks Literasi Digital	Angka	N.A	3	3,16	3,2	3,22	3,27	3,29	
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	15,41	17,50	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00	
	Persentase penduduk usia 15 ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	96,51	98,316	99,358	100	100	100	100	
	Perlindungan Sosial Yang Adaptif									
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0,029	0,1	0,12	0,16	0,18	0,2	0,24	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	58,06	95	95,3	95,6	95,9	96,2	96,5	
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju									
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	79,04	74,22	74,71	75,06	75,51	76,22	76,81	
	Persentase kegiatan keagaamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi oleh pemerintah	%	N.A	77,34	80,465	83,59	86,715	89,84	96,09	
	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,62 (Bertumbuh)	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	
	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	70,01	79,04	79,86	80,68	81,5	82,32	83,14	
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif									
	Indeks Perlindungan Anak	Angka	56,47	60	61	62	63,5	65	66	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	56,07	78,03	78,38	78,73	79,07	79,42	79,42	
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92,80	93	93	93	94	94	95	
	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,535	0,52	0,515	0,51	0,505	0,501	0,496	
	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N.A	53,56	54,59	55,61	56,65	57,67	57,98	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
	Daya Saing Sumber Daya Manusia									
	Angka Ketergantungan	%	45,51	44,368	43,581	42,794	42,007	41,22	40,433	
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas									
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,1	0,0399	0,042	0,045	0,047	0,049	0,053	
	Rasio PDRB Akomodasi makan dan minum	%	0,8	0,0088	0,0098	0,016	0,023	0,027	0,031	
	Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Jiwa	55.354	56120	56500	57200	57300	57400	57500	
	Jumlah industri ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif	67	87	107	117	127	137	147	
	Jumlah Industri kecil dan menengah	Pelaku industri	2.373	2466	2569	2672	2774	2877	2979	
	Persentase Koperasi sehat di kabupaten	%	24	28	32	36	40	44	48	
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,0088**	0,0088	0,0098	0,016	0,023	0,027	0,031	
	Rasio Kewirausahaan	%	6,4	0,0088	0,0098	0,016	0,023	0,027	0,031	
	Proporsi Individu yang menggunakan internet	%	67,01	73,865	80,014	86,163	92,312	98,461	100	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,31	68,47	68,78	68,92	69,17	69,25	69,37	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	54,77	55,89	56,71	57,12	57,89	58,19	59,08	
	Indeks Inovasi Daerah	Skor	44,22 (Inovatif)	44,4	44,87	45,18	45,85	46,01	46,37	
	Return On Aset (ROA) BUMD	%	-6,3463	-6,227	-6,109	-6	-5,98	-4,3	-3,5	
	Produktivitas padi	Ton/ha	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	0,37	0,49	0,57	0,68	0,79	0,87	1,08	
	Jumlah produksi perikanan	Ton	671.054	684.720,66	701.838,70	719.384,66	737.369,28	775.312,00	786.124,00	
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	652.012,26	662.021,00	669.280,50	676.540	683.799,50	691.059	693.318,50	
	Produktivitas budidaya perikanan tangkap	%	5,90	6,1	6,2	6,3	6,4	6,6	6,7	
	Angka konsumsi ikan	%	56,26	56,90	57,51	58,13	58,75	59,37	59,99	
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan online dan terintegrasi	%	60	60,89	61,4	65,3	69,2	73,1	77	
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	17,54	19,87	21,68	23,45	28,57	29,87	30,79	
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru									
	Indeks Ekonomi Hijau	Skor	49,82	50,22	50,66	51,41	51,88	52,6	53	
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Skor	90,31	101,14	111,98	122,82	133,65	144,49	155,33	
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	46,12**	46,12’	47,09	48,06	49,03	50	50,97	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	37,87	38,07	38,12	38,19	38,22	38,27	38,32	
	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-1,5	1,23	1,29	1,36	1,43	1,5	1,57	
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (Satu Data Indonesia)	%	14	13,76	13,31	12,86	12,40	11,95	11,49	
	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
	Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi	%	3,29	3,298	3,3	3,31	3,32	3,34	3,35	
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	71,53	78,49	81,71	84,93	88,15	91,37	94,59	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase desa mandiri	%	14,49	19,32	21,74	24,15	26,57	28,99	30,92	
	Indeks Layanan Infrastruktur	%	2,63	2,72	2,9	3,02	3,46	3,86	4,02	
	Stabilitas Ekonomi Makro									
	Tingkat Inflasi	%	1,87	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	
	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,18	0,20	0,25	0,3	0,35	0,45	0,5	
	Pertumbuhan Investasi daerah	%	-50	5,7	5,75	5,8	5,85	6	6,1	
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Skor	79,92	80,37	81,51	81,92	82,3	82,86	83,11	
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,50	3,59	3,63	3,68	3,72	3,77	3,79	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegrasi dan Adaptif									
	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,08	98,72	99,28	99,47	100	100	100	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,6	2,9	3,4	3,9	4,2	4,6	4,8	
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,40 (C-)	3,45	3,45	3,56	3,66	3,77	3,88	
	Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	73,98	74,18	75,19	76,09	77,18	78,19	79,02	
	Indeks Maturitas SPIP	%	3	3	3	3	3	3	3	
	Monitoring Centre for Prevenstion (MCP) KPK	Nilai	49	69	69,6	70,2	70,8	72	73	
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial									
	Persentase penegakan perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	92,72	93,24	93,57	94,25	95,03	95,63	96,83	
	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	perda	2	3	4	4	5	5	6	
	Persentase perempuan pengurus partai politik	%	30	30	30	30	30	30	30	
	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan									
	Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti	kerjasama	6	32	35	37	38	40	42	
	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,23	3,77	3,97	4,18	4,38	4,59	4,79	

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
KABUPATEN LUWU TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR**									
1.	**PENDIDIKAN**									
1.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	54,09	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100	
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	79,48	100	100	100	100	100	100	
1.3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	%	75,70	100	100	100	100	100	100	
1.4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	40,92	100	100	100	100	100	100	
1.5.	Jumlah Kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang ditetapkan	Kurikulum	2	100	100	100	100	100	100	
1.6.	Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	54,09	100	100	100	100	100	100	
1.7.	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	71,87	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.8.	Rata-rata kemampuan literasi	%	57,25	2	2	2	2	2	2	
1.9.	Rata-Rata kemampuan numerasi	%	56,68	100	100	100	100	100	100	
1.10.	Persentase kurikulum yang diterapkan	%	20	100	100	100	100	100	100	
1.11.	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	%	80	81,34	81,56	81,78	81,89	82,32	82,45	
1.12.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	89,96	100	100	100	100	100	100	
1.13.	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89,96	100	100	100	100	100	100	
1.14.	Persentase kegiatan pengendalian perizinan pendidikan	%	100,00	100	100	100	100	100	100	
1.15.	Indeks Literasi	Indeks	65,59	66,78	68,36	72,55	74,74	75,67	78,28	
1.16.	Angka Literasi	%	65,59	66,78	68,36	72,55	74,74	75,67	78,28	
1.17.	Angka Numerasi	%	65,19	65,89	67,94	70,14	72,15	73,18	74,15	
2.	**KESEHATAN**									
2.1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0.091	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
2.2.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	96,82	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99,63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.6.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.7.	Persentase orang usia 15-49 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.8.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	97,97	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.9.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.10.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.11.	Persentanse ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	99.03	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.12.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	82,10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.13.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	%	75,60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.14.	Rata-rata indicator SPM yang dapat dicapai sesuai target yang ditentukan	%	94,86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.15.	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar	%	94	90	91	92	93	94	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.16.	Rasio tenaga kesehatan lain per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	4,70	4,77	4,84	4,91	4,97	5,03	5,10	
2.17.	Persentase Pemenuhan Izin Sediaan Farmasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.18.	Persentase desa/kelurahan yang terlah menerapkan PHBS	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.19.	Akses Rumah Tangga Terhadap air minum aman	%	21,71	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	
2.20.	Indeks SPM	Indeks	60,34	62,25	64,75	65,04	66,28	67,33	68,25	
2.21.	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang kesehatan	%	90,27	91,28	92,33	93,45	94,35	95,67	96,78	
2.22.	Persentase toko obat, apotek, alat Kesehatan, TPP, depot air minum yang berizin	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.23.	Persentase status akreditasi fasilitas pelayanan Kesehatan minimal madya atau sederajat	%	80	81,22	82,34	83,56	84,67	85,98	86,35	
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
3.1.	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	10,89	10,95	11,02	11,24	11,35	11,46	11,54	
3.2.	Rasio luas Kawasan permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	13.78	13.78	13.78	13.78	13.78	13.78	13.78	
3.3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	10.9	10.66	10,75	10,89	10,98	11,15	11,25	
3.4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalu SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	80.41	82.05	82.07	82.18	82.29	82.4	82.51	
3.5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestik	%	76.88	77.15	77.88	77.92	78.12	78.31	78.44	
3.6.	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	1	1	1	1	1	1		
3.7.	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	%	30.67	32.54	33.64	34,17	34,7	35,23	35,76	
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	21,24	36,57	47,76	62,69	81,34	100	
3.9.	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**									
4.1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten.	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.2.	Fasilitasi, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.	%	-	100	100	100	100	100	100	
4.3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	0,07	2,44	4,78	5,02	5,29	5,58	5,91	
4.4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,86	10,39	10,16	9,92	9,69	9,45	9,21	
4.5.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	3,96	6,18	6,22	6,22	7,10	7,10	7,10	
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
5.1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.2.	Persentase Gangguan Trantibun yang dapat diselesaikan	%	80	80	100	100	100	100	100	
5.3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	63,238	91,751	93,001	93,851	94,751	95,521	96,721	
5.4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	92,882	1,045	2,545	3,365	4,235	5,185	6,335	
5.5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	orang	3.335	7.151	5.654	4.321	3.927	3.215	2.151	
5.6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.7.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.8.	Persentase warga negara memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapgaan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.9.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	
6.	**SOSIAL**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	92,72	93	95	96	98	99	100	
6.2.	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.	%	93,12	100	100	100	100	100	100	
B.	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**									
1.	**TENAGA KERJA**									
1.1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	%	46,15	48,20	50,12	51,25	52,30	53,50	55,15	
1.2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	50,64	52,77	53,52	54,55	55,44	56,60	57,40	
1.3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta/Pekerja	61,90	62,52	63,15	63,78	64,42	65,06	65,71	
1.4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Biparit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	16,85	18,50	20,25	22,45	24,55	26,30	30,00	
1.5.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten.	%	20,97	21,43	8,12	10,01	11,89	12,26	13,15	
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,91	4,95	4,97	4,98	5,00	5,12	5,2	
2.2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,017	100	100	100	100	100	100	
2.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	1,578	1,05	1,02	0,98	0,78	0,25	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	**PANGAN**									
3.1.	Persentase Cadangan pangan terhadap kebutuhan Cadangan pangan	%	0,24 (24 %)	0,32 (32 %)	0,46 (46 %)	0,59(59 %))	0,73(73 %)	0,86 (86 %)	0,99 (99 %)	
4.	**PERTANAHAN**									
4.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	N.A	100	100	100	100	100	100	
4.2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	%	N.A	100	100	100	100	100	100	
4.3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	N.A	100	100	100	100	100	100	
4.4.	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	5.945,637	23.949,41	23.949,41	23.949,41	23.949,41	23.949,41	23.949,41	
4.5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	N.A	30,00	32,65	33,45	34,67	35,78	36,67	
4.6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	66	90	90	90	90	90	90	
5.	**LINGKUNGAN HIDUP**									
5.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Skor Indeks	48,48	76,54	76,75	76,96	77,17	77,38	77,59	
5.2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.3.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	70,98	100	100	100	100	100	100	
6.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.1.	Persentase perekaman KTP Elektronik	%	86,34	98,85	98,90	98,95	98,97	99,00	99,05	
6.2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	33,73	34,00	34,50	35,00	40,00	45,00	50,00	
6.3.	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	93,21	97,42	97,45	97,50	97,55	97,60	97,65	
6.4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	2,86	3	3	4	5	5	5	
7.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
7.1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	19.8	30	100	100	100	100	100	
7.2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	14.49	70	80	80	80	90	90	
8.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
8.1.	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,33	2,35	2,30	2,25	2,20	2,15	2,10	
8.2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (mCPR)	%	50,25	60,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	
8.3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	33,56	25,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
9.	**PERHUBUNGAN**									
9.1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	0,65	0,65	
9.2.	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Unit/Smp/Jam	0,48	0,49	0,49	0,50	0,51	0,52	0,52	
10.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
10.1.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	19.29	19.29	21.05	21.05	22.81	22.81	22.81	
10.2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	43	43	57	57	60	60	65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	80	82,23	83	84	84	85	85	
11.	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
11.1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	11,17	39,06	40.28	41.25	42.53	43.16	43.69	
11.2.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	6,40	8,02	9,58	11,09	12,76	14,19	15,58	
12.	**PENANAMAN MODAL**									
12.1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
13.1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	3.05	20	30	40	50	60	70	
13.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	3.78	10	20	30	40	50	60	
13.3.	Persentase Peningkatan prestasi olahraga (jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional)	%	0	10	20	30	40	50	60	
14.	**STATISTIK**									
14.1.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukakn evaluasi pembangunan daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100	
15.	**PERSANDIAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15.1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16.	**KEBUDAYAAN**									
16.1.	Terlestarikannya cagar budaya	%	68,61	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	
17.	**PERPUSTAKAAN**									
17.1.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,35	65,35	68,21	68,21	70,83	70,83	70,83	
17.2.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	62,35	64,28	66,78	68,7	69,8	70,28	71,23	
18.	**KEARSIPAN**									
18.1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	N.A	100	100	100	100	100	100	
18.2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	N.A	100	100	100	100	100	100	
C.	**LAYANAN URUSAN PILIHAN**									
1.	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1.1.	Jumlah Total Produksi perikanan	ton	671.054,41	678.436,01	685.898,80	693.443,69	701.071,57	708.783,36	716.579,98	
2.	**PARIWISATA**									
2.1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	1	5	6%	7%	8%	9%	
2.2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang dating ke kabupaten	%	- 0,8	1	10	15%	20%	25%	30%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.3.	Tingkat hunian akomodasi	%	0,38	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	
2.4.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,29	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	
2.5.	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	0,001	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	
3.	**PERTANIAN**									
3.1.	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Ton/ha	6,1	6,5	7	7,8	8	8,06	8,44	
3.2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-22,32	11	11,20	11.4	11.6	11.8	12	
6.	**PERDAGANGAN**									
6.1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	%	97	97	98	98	99	99	100	
6.2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	97,29	99,30	100	100	100	100	100	
6.3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	99,94	100	100	100	100	100	100	
7.	**PERINDUSTRIAN**									
7.1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	80,02	81,98	82,98	83,45	84,56	85,67	86,67	
7.2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	1	5	10	15	16	17	18	
7.4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	industri (IPUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.									
7.5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten .	%	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
7.6.	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	%	75	80	85	90	95	95	95	
8.	**TRANSMIGRASI**									
8.1.	Persentase Cadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	10	11	12	13	14	15	16	
8.2.	Persentase luas Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	9,8	10,7	11,8	12,76	13,87	14,76	15,67	
8.3.	Transmigran swakarsa	KK	26	26	26	26	26	26	26	
8.4.	Luas Lahan Areal Transmigrasi yang dikelola	Ha	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	184,5	
8.5.	Luas Areal Lahan Transmigrasi yang disediakan	Ha	254	254	254	254	254	254	254	
8.6.	Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	
D.	**PENUNJANG URUSAN**									
1	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**									
1.1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11,73	11,70	11,65	11,60	11,55	11,50	11,45	
1.2.	Rasio PAD	%	14,11	14,39	14,82	15,26	15,72	16,19	16,68	
1.3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
1.4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	Level 2,62	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
1.5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	3.88	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
1.6.	Opini Laporan Keuangan	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**PENGADAAN**									
2.1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	17,56	17,59	18	18,67	19	19,34	20	
2.3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	54,28	56,78	57,64	58,76	59,87	60,02	61,34	
3	**KEPEGAWAIAN**									
3.1.	Rasio Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	
3.2.	Rasio pegawai fungsional (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	
3.3.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat (Tidak Termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	**MANAJEMEN KEUANGAN**									
4.1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	93,88	93,78	93,68	93,50	93,35	93,30	93,21	
4.2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	
4.3.	Manajemen Asset	Data	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4.4.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	2,34	2,30	2,27	2,24	2,21	2,18	2,15	
5	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI**									
5.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : BPS & Hasil olah data Tim Penyusun

4.2.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pemerintah kabupaten Luwu telah menerapkan standar pelayanan minimal guna mengetahui ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib sesuai dengan ukuran yang ditetapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Adapun penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Luwu
Tahun 2025 - 2030

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
PENDIDIKAN										
Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/ MTs)	%	97,6	100	100	100	100	100	100	
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	73,93	100	100	100	100	100	100	
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	9,03	100	100	100	100	100	100	
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Angka	73,70	100	100	100	100	100	100	
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	53,56	100	100	100	100	100	100	
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional	Angka	56,68	100	100	100	100	100	100	
KESEHATAN										
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	96,82	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,63	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,29	100	100	100	100	100	100	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96,46	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	96,30	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,16	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	97,97	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	98,01	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	97,89	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	99,03	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	82,10	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefeciency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefeciency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	75,60	100	100	100	100	100	100	
PEKERJAAN UMUM										
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	80,41	100	100	100	100	100	100	
Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelohan air limbah domestic	%	75,98	100	100	100	100	100	100	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
PERUMAHAN RAKYAT										
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	
TRANTIBUNLINMAS										
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/kota	%	89,88	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	26,68	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	26,68	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	26,68	100	100	100	100	100	100	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	23,52	100	100	100	100	100	100	
SOSIAL										
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	90,15	100	100	100	100	100	100	
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar memperoleh rehabilitasi social di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	76,25	100	100	100	100	100	100	
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jamninan sosial pada saat dan setelah tangga darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : OPD Pengelola SPM Kabupaten Luwu

4.2.5 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Sebagaimana diketahui bahwa TPB merupakan agenda pembangunan universal yang disepakati oleh negara-negara di dunia serta merupakan kesepakatan pembangunan global yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan yang mencakup bidang sosial ekonomi, dan lingkungan hidup yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target .

Pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal ini telah berupaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pencapaian TPB yang menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan kedepan.Kondisi Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap indikator TPB tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Indikator TPB/SDGs Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2030

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 01 :	**MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN**										
Target 1.1 :	**Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari**										
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	%	0,71	0,59	0,47	0,36	0,24	0,12	0	Bappelitbangda
Target 1.2 :	**Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.**										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	11,7	10,55	10,46	10,35	10,23	9,21	8,22	Bappelitbangda
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	BPS	%	11,7	10,55	10,46	10,35	10,23	9,21	8,22	Bappelitbangda
Target 1.3 :	**Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BPJS Kesehatan	%	90,62	98	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPS/TN2K: Basis Data Terpadu, BPJS Kesehatan	%	90,62	98	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan, BPS : Sakernas	%	56,94	57	58,06	58,28	58,52	58,75	59,02	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 1.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro**										
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS : Susenas	%	80.32	80.75	81.17	81.6	82.03	82.45	82.88	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	BPS : Sensus Penduduk, Susenas	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman
Target 1.5 :	**Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana**										
1.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Per 100.000 Orang	7151	5510	4715	3400	2981	1517	1112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	BPBD	%	20	40	50	50	70	80	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 02 :	**MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN**										
Target 2.1 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan	%	6,80	6,50	6,30	5,80	5,50	5,00	5	Dinas Ketahanan Pangan
Target 2.2 :	**Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula**										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN, Survei Kesehatan Indonesia (SKI)	%	6,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN, Survei Kesehatan Indonesia	%	2,20	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	77	90,5	90,7	91,2	91,7	92,2	92,7	Dinas Ketahanan Pangan
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	DINAS KESEHATAN	%	NA	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	Dinas Kesehatan
Target 2.4 :	**Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.**										
2.4.1. (a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai	Dinas Pertanian	%	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	Dinas Pertanian

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kawasan pertanian pangan berkelanjutan										
Target 2.a	**Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.**										
Target 2.c	**Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim**										
Tujuan SDGs 03 :	**MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA**										
Target 3.1 :	**Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup**										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	DINAS KESEHATAN; BPS: Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)	Per 100.000 HK	166,29	70	70	60	60	50	50	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN /BPS	%	99	99	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.2 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.										
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	Per 1000 KH	2,29	0	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	Dinas Kesehatan
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	Per 1000 KH	11,4	11,4	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup	DINAS KESEHATAN, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	Per 1000 KH	10,39	10,4	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	Dinas Kesehatan
Target 3.3 :	**Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.**										
3.3.2*	Insidens Tuberkolosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINAS KESEHATAN	Per 1000 penduduk	222.760	190	180	175	170	165	160	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs		Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.		DINAS KESEHATAN	Per 1000 penduduk	0,38	0,23	0,35	0,33	00.31	00.29	00.27	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.		DINAS KESEHATAN	Per 100.000 Penduduk	**0,51**	**0,88**	**0,48**	**0,46**	**0,44**	**0,42**	0,4	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.											
	(a)	Filariasis	DINAS KESEHATAN	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	(b)	Kusta	DINAS KESEHATAN	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
Target 3.4.1.	**Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan**											
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis		BPJS Kesehatan	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.		DINAS KESEHATAN	%	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.		DINAS KESEHATAN	%	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		DINAS KESEHATAN	%	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 3.5	**Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan**										
Target 3.7	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional**										
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS; SDKI	%	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 3.8 :	**Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang**										
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan essensial	Dinas Kesehatan	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan/BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS Kesehatan	%	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96	Dinas Kesehatan
Target 3.c	**Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil**										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINAS KESEHATAN	rasio	72.239	74.866	77.493	80.120	82.747	85.375	88.001	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 04 :	**MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 4.1	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif**										
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.										
	(i) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	98,93	98,93	98,95	98,98	98,97	99,1	99,3	Dinas Pendidikan
	(ii) Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP	DINAS PENDIDIKAN	%	98,93	98,93	98,95	98,98	98,97	99,1	99,3	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; 13-15 tahun; usia 16-18 tahun										
	(i) Angka Anak tidak sekolah usia 7-12 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	3397	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
	(ii) Angka Anak tidak sekolah usia 13-15 tahun	Dinas Pendidikan / BPS : Susenas	%	3397	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
Target 4.4	**Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan**										
4.4.1. (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan	BPS : Susenas	%	**N.A**	**PM**	**PM**	**PM**	**PM**	**PM**	**PM**	**Dinas Pendidikan**

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)										
Target 4.5	**Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan**										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	BPS	%								
	1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat	DINAS PENDIDIKAN	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	2 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	DINAS PENDIDIKAN/ BPS : Susenas	%	60	70	80	90	100	100	100	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SMP/sederajat										
Target 4.6	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi**										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN/ BPS : Susenas	%	98,24	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	Dinas Pendidikan
Tujuan SDGs 05 :	**MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN**										
Target 5.5	**.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat**										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	DINAS P3A	%	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5.6	**Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut**										
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DINAS P3A	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 5.b	**Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan,khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan**										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	BPS : Susenas	**%**	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informatika & Stastik
Tujuan SDGs 06 :	**MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**										
Target 6.1	**Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua**										
6.1.1*	Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Kesehatan : Susveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga BPS : Survei Nasional	%	21,71	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	**Dinas Kesehatan**
Target 6.2	**Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan**										
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan (a) layanan sanitasi yang dikelola secara aman dan (b) fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.	PUTR	%	4,29	4,6	4,52	5	5	5	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global										
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang diolah secara aman	Dinas Lingkungan Hidup	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 6.4	**Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air**										
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya .	PUTR	ltr/dtk	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	**0.5-1.5**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang`**
Tujuan SDGs 07 :	**MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA**										
Target 7.1	**Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern**										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN	%	90.08	92,56	93,68	94,75	95,67	96,68	97,76	PLN
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	BPS	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPS
Tujuan SDGs 08 :	**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**										
Target 8.1	**Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	%	4,13	24,28	1,15	1,61	1,72	0,77	0,88	Bappelitbangda
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS STATISTIK	Juta	59,73	74,23	75,09	76,3	77,61	78,21	78,90	Bappelitbangda
Traget 8.2	**Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya**										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS/DINAS TENAGA KERJA	%	64,08	65,05	65,87	66,69	67,51	68,33	69,15	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Target 8.5 :	**Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya**										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS TENAGA KERJA	Rp	19,805	20,103	20,355	20,645	20,868	21.050	21,305	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	4,14	3,7	3,55	3,42	3,25	3,1	3	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DINAS TENAGA KERJA	%	7,03	7,01	6,98	6,95	6,92	6,89	6,86	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Target 8.6 :	**Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah.**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS TENAGA KERJA	%	11,7	10,08	10,05	10	9,97	9,94	9,89	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Target 8.9 :	**Pada tahun 2030, menyusu dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal**										
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	40	45	50	55	60	65	70	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	55.314	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000	Dinas Pariwisata
Tujuan SDGs 09 :	**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI**										
Target 9.1 :	**Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua**										
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional	**PUTR**	**%**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	DINAS PERHUBUNGAN	Orang/Ton								
	1 Angkutan Udara (Pesawat)										
	Jumlah Penumpang	DINAS PERHUBUNGAN	Orang	36.725	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	Dinas Perhubungan
	Jumlah Barang	DINAS PERHUBUNGAN	Ton	201.841	220	230	240	250	260	270	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2 Angkutan Umum (Mobil)										
	Jumlah Penumpang	DINAS PERHUBUNGAN	Orang	218.286	217.000	216.000	215.000	214.000	213.000	212.000	Dinas Perhubungan
	Jumlah Barang	DINAS PERHUBUNGAN	Ton	350	330	310	300	290	270	260	Dinas Perhubungan
9.1.2(a)	Jumlah Bandara	DINAS PERHUBUNGAN	Unit	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan
9.1.2(b)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN	Unit	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan
Target 9.2	**Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.**										
9.2.1(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	BPS	%	4,35							Dinas Koperasi, UMKM & Perindustrian
Target 9.5	**Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan**										
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BAPPELITBANGDA	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Bappelitbangda
Tujuan SDGs 10 :	**MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA**										
Target 10.1	**Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional**										
10.1.1.(a)	Rasio Gini	BPS	Angka	0,319	0,329	0,326	0,324	0,322	0,32	0,317	BAPPELITBANGDA
10.1.1 (b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut	BPS	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPS

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	jenis kelamin dan kelompok umur										
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa	41	20	15	10	10	5	0	DPMD
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa	30	115	130	150	170	180	185	DPMD
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	BPS
Target 10.2	**Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.**										
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	BPS/DINAS SOSIAL	%	62	60	57	54	51	48	45	Dinas Sosial
Target 10.3	**Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.**										
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DP3A	Kebijakan	0	1	1	1	1	1	1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Target 10.4 :	**Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DINAS TENAGA KERJA	%	58,06	58,28	58,52	58,75	59,02	59,26	59,7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Tujuan SDGs 11 :	**MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**										
Target 11.1	**Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.**										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DINAS PERKIM\/BPS	%	71,53	78,49	81,71	84,93	88,15	91,37	94,59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 11.3	**Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara**										
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk.	BIG/PUTR	1,68	1,68	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Target 11.5 :	**Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.**										
11.5.1*.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Org	7151	5510	4715	3400	2981	1517	1112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BPBD	%	259.576.524.000	50.000.000.000	43.000.000.000	30.000.000.000	27.000.000.000	25.000.000.000,00	20.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 11.6	**Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.**										
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	40	70	80	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	40	70	80	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	92,44	80,41	80.71	81,01	81,31	81.61	81.61	Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.b :	**Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.**										
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD	**%**	**20**	**40**	**50**	**50**	**70**	**80**	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 12 :	**MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 12.3	**Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen.**										
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.4	**Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.**										
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.5 :	**Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.**										
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.6 :	**Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.**										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Usaha	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 12.8	**Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.**										
12.8.1. (a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.b	**Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal**										
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi yang menerapkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*).	Dinas Pariwisata	Destinasi	1	2	3	4	5	6	7	Dinas Pariwisata
Tujuan SDGs 13 :	**MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**										
Target 13.1	**Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara**										
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang	BPBD	per 100.000 orang	7151	5510	4715	3400	2981	7151	5510	` Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan	BPBD	%	25	37,5	50	62,5	75	25	37,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana										
Target 13.2	**Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional**										
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	BAPPELITBANGDA/Platform AKSARA	Ton co2 eq	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Bappelitbangda
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA/Platform AKSARA	Ton co2 eq	1.345.279,21	1.350.591,38	1.352.591,38	1.353.591,38	1.352.591,38	1.352.591,38	1.345.279,21	Bappelitbangda
13.2.2.(b)	Persentase potensi penurunan intesitas emisi gas rumah kaca (GRK)	BAPPELITBANGDA/Platform AKSARA	%	10	14,82	15	16,36	17,06	18,11	19,07	Bappelitbangda
Tujuan SDGs 16 :	**MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN**										
Target 16.1 :	**Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.**										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES LUWU	Kasus	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Polres Luwu
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik	POLRES LUWU	Org	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Polres Luwu

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	per 100.000 penduduk.										
Target 16.2 :	**Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.**										
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	DP3A/POLRES LUWU	%	0	0	0	0	0	0	0	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
16.2.3.(a)	Proprosi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3A/POLRES LUWU	%	5	0,000	0,017	0	0	0	0	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Target 16.3 :	**Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**										
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia, BPHN	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Biro Hukum
Target 16.6 :	**Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.**										
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BKAD	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem	Bag. Organisasi SETDA	%	62,18 B	B	B	B	BB	BB	BB	Biro Organisasi (Sekretariat Daerah)

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B										
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Bag. Organisasi SETDA	%	46,49 (C)	B	B	B	BB	BB	BB	Biro Organisasi (Sekretariat Daerah)
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Diskominfo	Instansi	NA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika
Target 16.7 :	**Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.**										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DP3A/SETWAN	%	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan Eselon II)	DP3A/BKPSDM	%	11,43	30	30	30	30	30	30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 16.9 :	**Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.**										

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS : Susenas	%	97,39	97,42	97,45	97,5	97,55	97,6	97,65	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS : Susenas	%	N.A	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Disdukcapil/ BPS : Susenas	%	93,21	93,25	93,30	93,35	93,40	93,45	93,5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Target 16.10 :	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.**										
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	DISKOMINFO	%	34,28	40	42,85	48,57	54,28	57,14	68,57	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Target 16.b :	**Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.**										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DP3A	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 17	**MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**										
Target 17.1 :	**Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.**										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BAPENDA/BPS	%	6,97	6,99	6,71	6,73	6,75	6,77	6,79	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA/BPS	%	0,18	0,22	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	Badan Pendapatan Daerah
Target 17.8 :	**Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi**										
17.8.1*	Persentase pengguna internet	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	67.01	67.25	67.48	67.52	67.79	67.93	68.02	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Target 17.17 :	**Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.**										
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	DPMPTSP	Dokumen	0	2	3	3	3	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan	DPMPTSP	Proyek	0	1	2	2	2	2	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Badan Usaha (KPBU).										
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	DPMPTSP	Rp	0	1.000.000.000,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Target 17.19 :	**Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.**										
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (VitalStatistics Register).	Disdukcapil	Tersedia / Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sumber : BPS, OPD Pengampu TPB/SDGs Kabupaten Luwu dan Tim Penyusun RPJMD.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati Luwu yang diterjemahkan kedalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah yang akan dicapai melalui beberapa stategi dan rangkaian arah kebijakan serta program prioritas daerah beserta target-target kinerja dan kerangka pendanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan. RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 maupun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu.

Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu periode perencanaan tahun 2025-2029, RPJMD ini juga sebagai instrumen untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya pedoman transisi perencanaan pembangunan dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029.

5.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Luwu ini, berlaku untuk kurun waktu lima tahun dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD 2025-2029 berakhir, di dalam dokumen RPJMD ini memuat target-target kinerja Pembangunan daerah tahun 2030 sehingga dokumen RPJMD ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2030 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2045 serta memperhatikan rancangan RKP/RKP Tahun 2030.

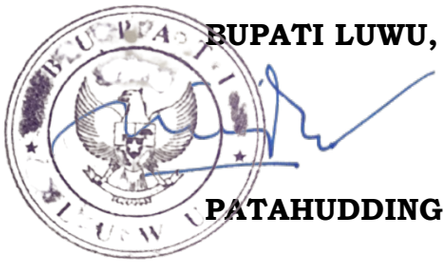
5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 maka perlu diatur kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 kepada Masyarakat;
2. Seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD secara baik dan benar, mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
3. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD setiap tahunnya (RKPD Perubahan Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, RKPD Tahun 2027, RKPD Tahun 2028, RKPD Tahun 2029 dan RKPD Tahun 2030);
4. Seluruh perangkat daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029. Renstra perangkat daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. Seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu berkewajiban menjamin keselarasan dan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
6. Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka Perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan akhir Lima tahun periode RPJMD;
7. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD dimaksud, perlu didukung dengan tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja, serta mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah atau pemerintah daerah. Sistem elektronik pengendalian dan evaluasi diintegrasikan dengan tatakelola data pembangunan yang mendorong pembangunan berbasis bukti;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu beserta masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program – program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, memerlukan komitmen bersama dan dukungan seluruh elemen masyarakat, dengan memperkuat koordinasi, kerjasama dan sinergi, antar penyelengara pemerintahan daerah maupun para pemangku kepentingan di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu perlu kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras dari seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Luwu. Semoga dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, **"Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis"** dapat terwujud.

BUPATI LUWU,



PATAHUDDING